



*Kabupaten  
Banyuwangi*



Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah  
Daerah

**RPJMD**

Tahun 2021-2026







BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

DAN

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah;
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran;
16. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

## Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

### Pasal 3

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan penganggaran;
- (2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sekitar yang berbatasan.

### BAB II

#### SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

### Pasal 4

Sistematika RPJMD terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran umum kondisi daerah;
- c. BAB III : Gambaran keuangan daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
- e. BAB V : Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
- g. BAB VII : Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. BAB IX : Penutup.

### Pasal 5

- (1) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan dalam BAB VII dan BAB VIII dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah. Selanjutnya Bupati melalui perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal *26 Agustus 2021*

  
BUPATI BANYUWANGI,  
*Ibuk Fiestiandani*  
IBUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal *26 Agustus 2021*

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,  
*H. Mujiono*  
H. MUJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR **2**  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 126-2/2021



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I - 1
1.2. Dasar Hukum.....	I - 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 9
1.4. Maksud Dan Tujuan.....	I - 11
1.5. Sistematika Penulisan .....	I - 12
<b>BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</b> .....	<b>II - 1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II - 1
2.1.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah.....	II - 1
2.1.2 Topografi .....	II - 2
2.1.3 Geologi .....	II - 3
2.1.4 Klimatologi .....	II - 4
2.1.5 Penggunaan Jalan.....	II - 5
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II - 5
2.1.7 Kawasan Rawan Bencana.....	II - 9
2.1.8 Demografi.....	II - 11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 14
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II - 14

2.2.2	Kesejahteraan Sosial.....	II - 22
2.3	Aspek Pelayanan Umum .....	II - 34
2.3.1	Pelayanan Urusan Wajib.....	II - 34
2.3.2	Unsur penunjang .....	II - 99
2.3.3	Unsur Pendukung .....	II - 106
2.3.4	Unsur Pengawasan .....	II - 109
2.3.5	Urusan Pilihan .....	II - 113
2.3.6	Urusan Pemerintahan Umum .....	II - 122
2.4	Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 124
2.4.1	Kemampuan Ekonomi .....	II - 124
2.4.2	Sumber Daya Manusia .....	II - 126
2.4.3	Iklim Investasi .....	II - 127
2.4.4	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur .....	II - 128
<b>BAB III: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>		<b>III - 1</b>
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III - 1
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III - 34
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III - 54
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....</b>		<b>IV - 1</b>
4.1	Permasalahan Pembangunan .....	Iv - 1
4.2	Isu Strategis .....	IV - 10
4.2.1	Telaah Dinamika Global.....	IV - 10
4.2.2	Telaah Dinamika Pembangunan Nasional .....	IV - 18
4.2.3	Telaah Keterkaitan dan Dinamika Pembangunan Regional Provinsi Jawa Timur .....	IV - 29

4.2.4	Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan Kabupaten Banyuwangi.....	IV - 35
4.2.5	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi.....	IV - 51
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>		<b>V - 1</b>
5.1	Visi .....	V - 1
5.2	Misi.....	V - 3
5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V - 9
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>		<b>VI - 1</b>
6.1	Strategi Pembangunan Daerah.....	VI - 1
6.2	Arah Kebijakan .....	VI - 10
6.3	Program Pembangunan Daerah.....	VI - 16
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>		<b>VII - 1</b>
<b>BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>		<b>VIII - 1</b>
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>		<b>IX - 1</b>
9.1	Pedoman Transisi.....	Ix - 1
9.2	Kaidah Pelaksanaan.....	Ix - 1
9.3	Penutup.....	IX - 3

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi .....	II - 2
Tabel 2. 2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi.....	II - 3
Tabel 2. 3 Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	II - 6
Tabel 2. 4 Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	II - 6
Tabel 2. 5 Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	II - 7
Tabel 2. 6 Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Besar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	II - 7
Tabel 2. 7 Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	II - 8
Tabel 2. 8 Produksi Daging, Susu dan Telur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	II - 9
Tabel 2. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Pada Setiap Kecamatan Tahun 2020 .....	II - 12
Tabel 2. 10 PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 (dalam miliar).....	II - 15
Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 16
Tabel 2. 12 Indikator kesejahteraan masyarakat dari perspektif pemerataan.....	II - 18
Tabel 2. 13 Angka Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi 2016-2020 ...	II - 21
Tabel 2. 14 Capaian Indikator Urusan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 34
Tabel 2. 15 Ruas Jalan Nasional Menurut Statusnya .....	II - 43
Tabel 2. 16 Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 43

Tabel 2. 17 Capaian indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2020 .....	II - 73
Tabel 2. 18 Indikator program kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020.....	II - 76
Tabel 2. 19 Indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 78
Tabel 2. 20 Capaian Indikator Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020 .....	II - 80
Tabel 2. 21 Indikator dan Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020 .....	II - 81
Tabel 2. 22 Indikator Program Urusan Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 83
Tabel 2. 23 Indikator Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 86
Tabel 2. 24 Indikator Program Urusan Kepemudaan Dan Olahraga di Kabupaten Banyuwangi .....	II - 89
Tabel 2. 25 Indikator Program Urusan Statistik Di Kabupaten Banyuwangi .....	II - 92
Tabel 2. 26 Indikator Program Urusan Kearsipan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 97
Tabel 2. 27 Indikator urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi .....	II - 109
Tabel 2. 28 Indikator program urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 114
Tabel 2. 29 Indikator program urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi.....	II - 115
Tabel 2. 30 Persentase Masyarakat Menggunakan Hak Politiknya ....	II - 122
Tabel 2. 31 Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi .....	II - 129
Tabel 2. 32 Realisasi indikator kinerja tahun 2016-2020.....	II - 130
Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020 (Berdasarkan Permendagri 13/2006 .....	III - 3
Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020 (Berdasarkan PP 12/2019) III - 4	
Tabel 3.3. Proporsi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 9
Tabel 3.4. Proporsi Sumber-sumber Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 15
Tabel 3.5. Proporsi Sumber-sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 16
Tabel 3.6. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016-2020 .....	III - 17
Tabel 3.7. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 18
Tabel 3.8. Pertumbuhan Komponen Belanja Tidak Langsung Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 19
Tabel 3.9. Pertumbuhan Komponen Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 21
Tabel 3.10. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	III - 24
Tabel 3.11. Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 III - 25	
Tabel 3.12. Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 28
Tabel 3.13. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020.....	III - 36
Tabel 3.14. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020 .....	III - 37
Tabel 3.15. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	III - 39
Tabel 3.16. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	III - 41
Tabel 3.17. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	III - 42
Tabel 3.18. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas.....	III - 43

Tabel 3.19. Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan PMK No. 120/PMK.07/2020 .....	III - 45
Tabel 3.20. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020 .....	III - 48
Tabel 3.21. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020 .....	III - 49
Tabel 3.22. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020.....	III - 50
Tabel 3.23. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi 2017 – 2020.....	III - 51
Tabel 3.24. Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020 .....	III - 52
Tabel 3.25. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 – 2026 .....	III - 57
Tabel 3.26: Penyesuaian Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 – 2026 .....	III - 64
Tabel 3.27: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 – 2026 .....	III - 64
Tabel 4. 1: Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi.....	IV - 11
Tabel 4. 2: linieritas 7 agenda pembangunan nasional dengan 7 agenda prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 ...	IV - 20
Tabel 4. 3: program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas RPJMN Tahun 2020-2024.....	IV - 21
Tabel 4. 4: Misi RPJMN, Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi.....	IV - 23
Tabel 4. 5: Matriks Misi, Tujuan, Sasaran .....	IV - 30
Tabel 4. 6: Linieritas 9 Agenda Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 & Nawa Bakti Satya Provinsi Jawa Timur .....	IV - 32
Tabel 4. 7: Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 .....	IV - 36

Tabel 4. 8: fokus pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025 dengan isu strategis dan misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 .....	IV - 38
Tabel 4. 9: Isu Strategis terhadap Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 .....	IV - 60
Tabel 5. 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 .....	V - 20
Tabel 6. 1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode Tahun 2021-2026 .....	VI - 9
Tabel 6. 2. Pemetaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi.....	VI - 10
Tabel 6. 3. Integrasi Janji Politis dengan Program Nomenklatur .....	VI - 17
Tabel 6. 4. Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 .....	VI - 23
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2026 .....	VII - 1
Tabel 7. 2. Program yang disertai Kerangka Pendanaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 (tahun berjalan) .....	VII - 3
Tabel 7. 3. Indikasi Rencana Program Prioritas I yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 .....	VII - 26
Tabel 7. 4. Indikasi Rencana Program Prioritas II yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026.....	VII - 36
Tabel 7. 5. Indikasi Rencana Program Prioritas III yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 .....	VII - 45
Tabel 8. 1: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022-2026 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	VIII - 1

Tabel 8.2: Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2026 ..... VIII - 2

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan .....	I - 10
Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Banyuwangi .....	II - 1
Gambar 2. 2: Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi .....	II - 4
Gambar 2. 3 Penggunaan Lahan Kabupaten Banyuwangi .....	II - 5
Gambar 2. 4 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	II - 9
Gambar 2. 5 Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Banyuwangi .. .....	II - 11
Gambar 2. 6: Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Banyuwangi	II - 12
Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk Tahun 2015-2020 .....	II - 13
Gambar 2. 8: Piramida penduduk Kabupaten Banyuwangi 2020.....	II - 14
Gambar 2. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II - 17
Gambar 2. 10 Gini Ratio Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II - 18
Gambar 2. 11 Indeks Pengeluaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016- 2020 .....	II - 19
Gambar 2. 12 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2020...	II - 21
Gambar 2. 13 Inflasi kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 22
Gambar 2. 14 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 23
Gambar 2. 15 Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 24
Gambar 2. 16 Angka rata-rata lama sekolah 2015-2020 .....	II - 25
Gambar 2. 17 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 26
Gambar 2. 18 Angka Harapan lama Sekolah 2016-2020 .....	II - 26

Gambar 2. 19 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 27
Gambar 2. 20 Angka Melek Huruf Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 28
Gambar 2. 21 Indeks Kesehatan Tahun 2016-2020.....	II - 29
Gambar 2. 22 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 ....	II - 30
Gambar 2. 23 ...Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 30
Gambar 2. 24 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 ....	II - 31
Gambar 2. 25 Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019.....	II - 32
Gambar 2. 26 Data kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas di Kabupaten Banyuwangi 2015-2020.....	II - 33
Gambar 2. 27 Angka Kematian Bayi 2015-2020 .....	II - 34
Gambar 2. 28 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 35
Gambar 2. 29 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 36
Gambar 2. 30 Akreditasi sekolah minimal B di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 37
Gambar 2. 31 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 38
Gambar 2. 32 Prevalensi Balita gizi kurang di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 39
Gambar 2. 33 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 ....	II - 40
Gambar 2. 34 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur Tahun 2015-2019.....	II - 41

Gambar 2. 35 Persentase Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 .....	II - 44
Gambar 2. 36 Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 45
Gambar 2. 37 Cakupan Luasan RTH Publik Tahun di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 46
Gambar 2. 38 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019 .....	II - 47
Gambar 2. 39 Proporsi Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengolahan Lumpur Tinja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 48
Gambar 2. 40 Persentase Panjang Jalan yang Terlayani LPJU Tahun 2016-2020 ..	II - 49
Gambar 2. 41 Jumlah Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2015-2020.....	II - 50
Gambar 2. 42 Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak Dan Terjangkau Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 51
Gambar 2. 43 Persentase Akses Pelayanan Sanitasi (Air Limbah) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2019 .....	II - 51
Gambar 2. 44 Luasan kawasan Kumuh yang tertangani (Ha) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 52
Gambar 2. 45 Tingkat Waktu Tanggap (Respons Rate Time) Penanggulangan Bahaya Bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020.....	II - 54
Gambar 2. 46 Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 55
Gambar 2. 47 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 ....	II - 56
Gambar 2. 48 Capaian Indikator Persentase Risiko Bencana Pada KRB di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 56
Gambar 2. 49 IPMas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2020.....	II - 58

Gambar 2. 50 Capaian Indikator Indeks Rasa Aman Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 58
Gambar 2. 51 Capaian Indikator Persentase Angka PMKS di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 59
Gambar 2. 52 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II - 60
Gambar 2. 53 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur Tahun 2016-2020 .....	II - 61
Gambar 2. 54 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 62
Gambar 2. 55 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 64
Gambar 2. 56 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019.....	II - 64
Gambar 2. 57 Skor PPH ketersediaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 ....	II - 66
Gambar 2. 58 Skor PPH konsumsi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 66
Gambar 2. 59 Indeks lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 67
Gambar 2. 60 Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.....	II - 68
Gambar 2. 61 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 ....	II - 69
Gambar 2. 62 Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 ....	II - 70
Gambar 2. 63 Penanganan Sampah rumah tangga .....	II - 71
Gambar 2. 64 Persentase sampah yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 71
Gambar 2. 65 Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 .....	II - 73

Gambar 2. 66 Persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 74
Gambar 2. 67 Persentase data kependudukan yang valid dan update di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 75
Gambar 2. 68 Persentase Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akta Di Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2015-2020.....	II - 76
Gambar 2. 69 Jumlah desa mandiri di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 77
Gambar 2. 70 Indeks Desa Membangun Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 ....	II - 78
Gambar 2. 71 Persentase KB Aktif di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 79
Gambar 2. 72 Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 81
Gambar 2. 73 Persentase Aplikasi IT Yang Mendukung City Branding Dan Layanan Publik Yang Berfungsi Baik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 ....	II - 84
Gambar 2. 74 Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Tersebarluaskan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 85
Gambar 2. 75 Jumlah Minat Investasi Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 ....	II - 87
Gambar 2. 76 Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 ....	II - 88
Gambar 2. 77 Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan Dengan SOP Tahun 2015-2020 .....	II - 89
Gambar 2. 78 Persentase Pemuda Terlatih Yang Menjadi Wirausaha Mandiri/Persentase Pemuda Terampil di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 ....	II - 91
Gambar 2. 79 Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Baik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 92
Gambar 2. 80 Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020.....	II - 93

Gambar 2. 81 Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 95
Gambar 2. 82 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020.....	II - 96
Gambar 2. 83 Indeks Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan Nasional Tahun 2020 .....	II - 96
Gambar 2. 84 Persentase Arsip Statis Dan Dinamis Yang Dikelola di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 98
Gambar 2. 85 Persentase Arsip/ Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 98
Gambar 2. 86 Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2016-2020 .....	II - 99
Gambar 2. 87 Persentase SKPD Yang Tercapai Target Programnya di Kabupaten Banyuwangi .....	II - 101
Gambar 2. 88 Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Yang Dimanfaatkan Sebagai Policy Brief di Kabupaten Banyuwangi..	II - 102
Gambar 2. 89 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 ....	II - 103
Gambar 2. 90 TPD: Total Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 104
Gambar 2. 91 Persentase Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Seleksi Kompetensi Jabatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 105
Gambar 2. 92 Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Sebagai Policy Brief di Kabupaten Banyuwangi .....	II - 106
Gambar 2. 93 Persentase Raperda yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 107
Gambar 2. 94 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 108
Gambar 2. 95 Nilai SAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020	II - 108

Gambar 2. 96 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban I .....	II - 110
Gambar 2. 97 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban II .....	II - 111
Gambar 2. 98 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban III .....	II - 111
Gambar 2. 99 Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 112
Gambar 2. 100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 113
Gambar 2. 101 Length of stay di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 114
Gambar 2. 102 Produksi daging di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 116
Gambar 2. 103 Produksi telur di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 117
Gambar 2. 104 Produksi Susu di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 117
Gambar 2. 105 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 118
Gambar 2. 106 Jumlah realisasi ekspor di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 119
Gambar 2. 107 Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 120
Gambar 2. 108 Pertumbuhan sektor industri olahan dalam PDRB di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 120
Gambar 2. 109 Persentase peningkatan nilai penjualan (Omset) IKM di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 121
Gambar 2. 110 Persentase penempatan transmigran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 122
Gambar 2. 111 Potensi Konflik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 123

Gambar 2. 112 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 125
Gambar 2. 113 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 126
Gambar 2. 114 ICOR Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2020.....	II - 127
Gambar 2. 115 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020 .....	II - 128
Gambar 2. 116 Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi..	II - 129
Gambar 3.1 .Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 (dalam Milyar Rupiah).....	III - 6
Gambar 3.2..Rata-rata Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 8
Gambar 3.3 Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 10
Gambar 3.4 Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 11
Gambar 3.5 .Realisasi dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020	III - 12
Gambar 3.6 .Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 13
Gambar 3.7 .Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 14
Gambar 3.8..Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 15
Gambar 3.9 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 18
Gambar 3.10 Proporsi Komponen Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 20
Gambar 3.11 Rasio Lancar dan Rasio Quick Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .	III - 29

Gambar 3.12 Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 31
Gambar 3.13 Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020.....	III - 32
Gambar 3.14 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 38
Gambar 3.15 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020. ....	III - 39
Gambar 3.16 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020.....	III - 40
Gambar 3.17 Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 42
Gambar 3.18 Rasio Efektivitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020. ....	III - 43
Gambar 3.19 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017 - 2020 .....	III - 44
Gambar 3.20 Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 .....	III - 46
Gambar 3.21 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 -2020 .....	III - 47
Gambar 3.22 Rata-rata Proporsi Prioritas I, II, dan III .....	III - 65
Gambar 4. 1 17 Tujuan SDGs .....	IV - 10
Gambar 4. 2 Peluang Tantangan Revolusi Industri.....	IV - 15
Gambar 4. 3 Misi untuk mewujudkan pembangunan nasional.....	IV - 19
Gambar 4. 4 Peta Delinasi Kawasan Pendukung Selingkar Ijen .....	IV - 26
Gambar 5. 1 Value Visi Pembangunan Kab. Banyuwangi .....	V - 1
Gambar 5. 2 Konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah.....	V - 4
Gambar 5. 3 Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah.....	V - 4
Gambar 5. 4 Proses Bisnis Pencapaian Visi Pembangunan.....	V - 6

Gambar 5. 5 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1 .....	V - 7
Gambar 5. 6 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2 .....	V - 8
Gambar 5. 7 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3 .....	V - 9
Gambar 5. 8 Linieritas Visi, Misi, Tujuan Sasaran, dan Program.....	V - 10
Gambar 5. 9 Cascading Pencapaian Tujuan 1 .....	V - 11
Gambar 5.10 Proses Bisnis Pencapaian Tujuan 2.....	V - 13
Gambar 5.11 Cascading Pencapaian Tujuan 2 .....	V - 14
Gambar 5.12 Proses Bisnis Pencapaian Tujuan 2.....	V - 16
Gambar 5.13 Cascading Pencapaian Tujuan 3 .....	V - 17
Gambar 5.14 Proses Bisnis Pencapaian Tujuan 3.....	V - 18
Gambar 6. 1 Tema Pembangunan dan Prioritas Lima Tahunan Kabupaten Banyuwangi.....	VI - 15
Gambar 6. 2 Definisi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih .....	VI - 16



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan politis adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi hasil pemilihan tahun 2020 adalah pasangan **Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan H Sugirah S.Pd, M.Si**, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur dengan periode jabatan 2019-2024. Visi dan misi bupati dan wakil bupati harus diterjemahkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 disebutkan perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 adalah berdasarkan masa jabatan kepala daerah dan bukan berdasarkan

waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi adalah tahun 2021-2026.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, capaian SDG`s, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Banyuwangi juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Mengacu periodisasi RPJMD, RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025. Artinya dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi pada periode ini merupakan tahapan terakhir dari capaian RPJPD Kabupaten Banyuwangi, sehingga pada periode ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berorientasi penuh terhadap capaian RPJMD Tahun 2021-2026, namun juga memiliki misi memastikan seluruh tujuan RPJPD dioptimalkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi harus menggunakan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*). Pendekatan pertama yakni "**Pendekatan Teknokratik**" yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Secara praktis pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 direpresentasikan melalui penyusunan Rancangan

Teknokratik RPJMD Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan akademis dan ilmiah, analisis data dan informasi sebagai upaya dalam melihat objektivitas kondisi, permasalahan, dan isu-isu strategis di Kabupaten Banyuwangi.

Pendekatan kedua yakni "**Pendekatan Partisipatif**" yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD, segala proses dan tahapan dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* atau pemangku kepentingan terkait di lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Praktisnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dapat direpresentasikan melalui *stakeholder* yang melibatkan Akademisi, masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Komunitas, maupun masyarakat ekonomi atau *private sector* di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan ketiga yakni "**Pendekatan Politis**" yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD dilaksanakan proses penerjemahan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD. Kaitannya dengan tahapan ini, secara praktis Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 melalui Tujuan dan Sasaran yang direpresentasikan dengan indikator dan targetnya. Penerjemahan Visi dan Misi Bupati Banyuwangi melalui tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan agar, berhasil atau tidaknya pemerintah dapat terukur melalui IKU atau indikator tujuan. Selain itu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang diterjemahkan melalui visi dan misi Bupati terpilih juga menjadi pedoman perangkat daerah dalam menentukan program pembangunan.

Terakhir pendekatan keempat yakni "**Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up**", yang dimaksud adalah penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 merupakan hasil perencanaan yang diseleraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Praktisnya penetapan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dokumen RPJMD selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan sebagai muara seluruh rencana pelaksanaan

pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Banyuwangi yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Banyuwangi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 ini berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, disusun melalui enam tahapan, yaitu:

- a. Persiapan penyusunan RPJMD;
- b. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. Penyusunan rancangan RPJMD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. Penetapan.

Berbagai poin-poin tahapan sebagaimana di atas telah dilaksanakan. Selanjutnya penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2021-2026. RENSTRA Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa RENJA Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merujuk pada sejumlah dasar hukum sebagaimana berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
  45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

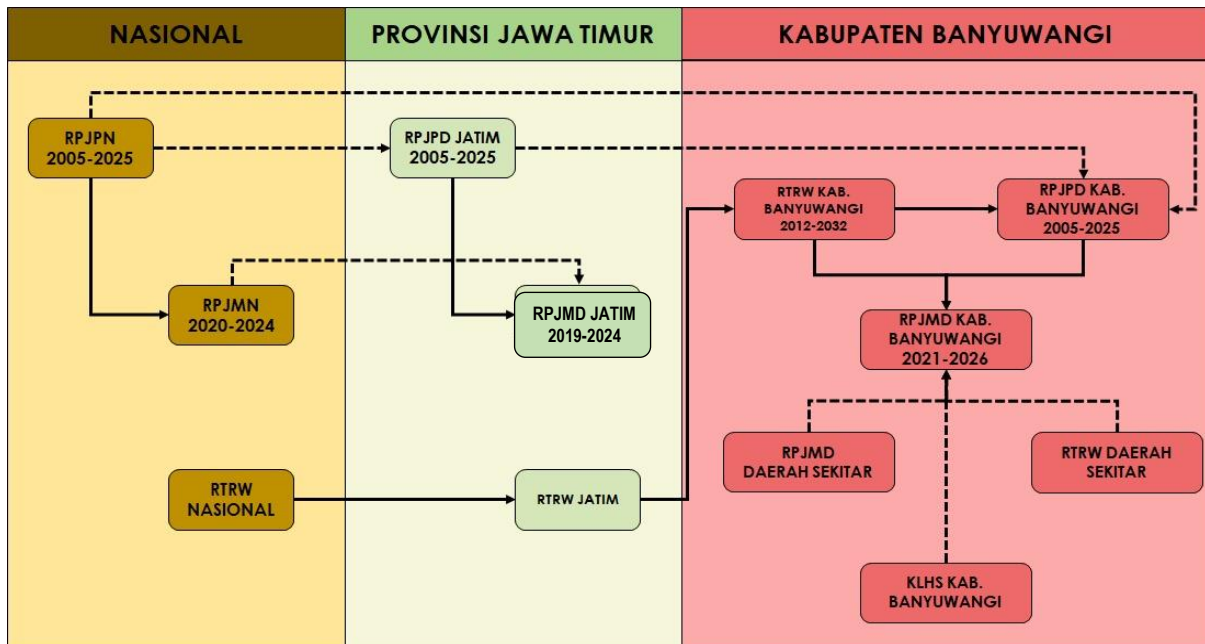
46. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor );
47. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan pedoman teknis penyusunan dokumen perencanaan. Secara tersurat dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa sebelum disusunnya RPJMD baik di Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun dulu Rancangan Teknokratis RPJMD yang berujung terhadap munculnya isu strategis sebagai pedoman pembangunan daerah.

Tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan rancangan dokumen RPJMD sesuai platform politik dari Bupati/Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi perencanaan, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan jangka panjang daerah, RPJMD Provinsi, dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar level pemerintahan, antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



**Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Banyuwangi memperhatikan dan selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi bertujuan adalah untuk melihat arah pembangunan nasional 2020-2024. Pada prinsipnya, melalui arahan pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dijabarkan dan ditelaah melalui RPJPN 2005-2025 periode ke IV menjadi acuan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.
2. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Penyelarasan terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan kewilayahan dan seluruh urusan (sektoral) lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
3. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 Tahap IV. Dengan demikian dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Banyuwangi juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 Tahap IV.
4. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 memperhatikan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah pola dan

struktur ruang sebagai acuan pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026.

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakatnya merupakan tempat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan terhadap pencapaian TPB di daerah. Dukungan Pemkab dalam TPB secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya melalui rencana kuadran identitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembangunan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Sementara itu, secara substantif keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan provinsi, berserta dokumen KLHS dan RTRW dibahas sebagai bahan telaah isu. Maka keselarasan substansi dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat di bab IV permasalahan dan isu strategis.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi misi program untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025.

Tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026;

3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026;
4. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang terdiri atas 9 (sembilan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

#### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH**

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

**BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

- 6.1 Strategi Pembangunan Daerah
- 6.2 Arah Kebijakan
- 6.3 Program Pembangunan Daerah

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB IX PENUTUP**



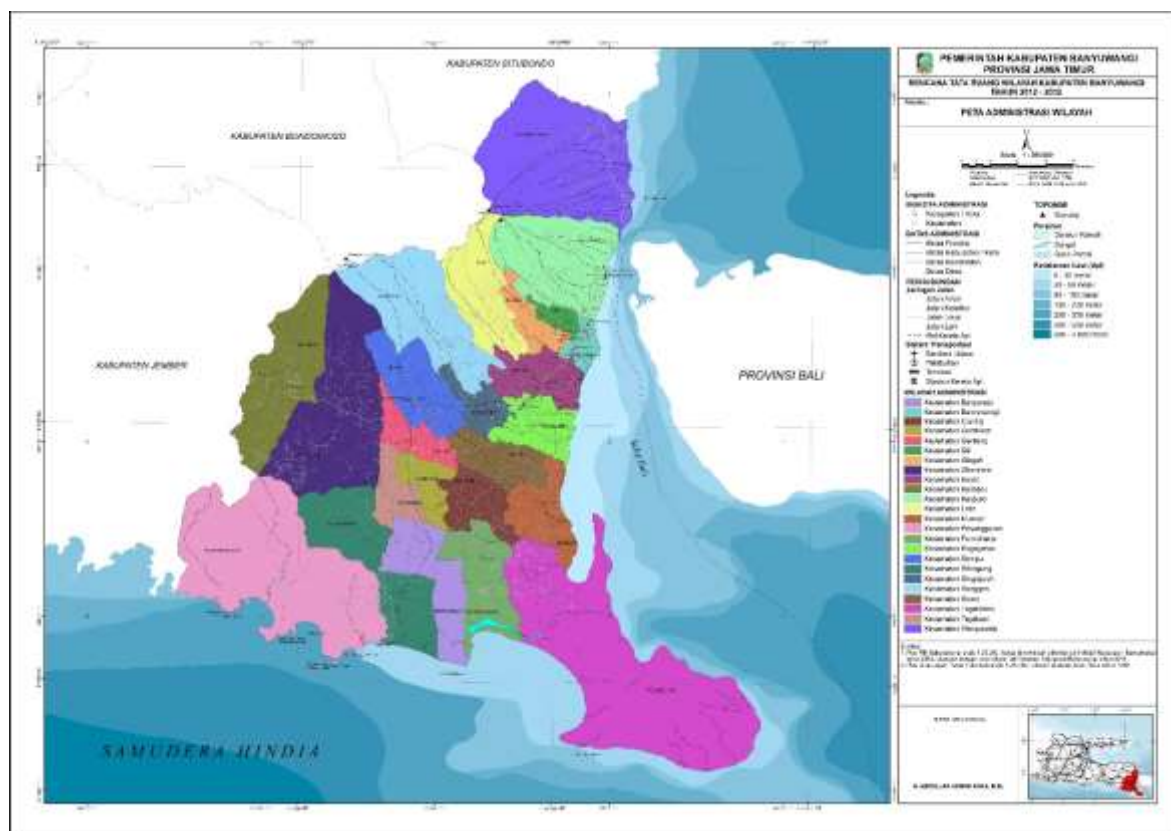
# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa pada koordinat antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur.



**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Banyuwangi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Kabupaten Bondowoso dan Jember di sebelah Barat, dan Selat Bali di sebelah Timur. Wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas

wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km<sup>2</sup> yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Banyuwangi**

No.	Kecamatan	Desa	Kel.	No.	Kecamatan	Desa	Kel.
1	Pesanggaran	5	-	14	Rogojampi	10	-
2	Siliragung	5	-	15	Kabat	14	-
3	Bangorejo	7	-	16	Singojuruh	11	-
4	Purwoharjo	8	-	17	Sempu	7	-
5	Tegaldlimo	9	-	18	Songgon	9	-
6	Muncar	10	-	19	Glagah	10	2
7	Cluring	9	-	20	Licin	8	-
8	Gambiran	6	-	21	Banyuwangi	-	18
9	Tegalsari	6	-	22	Giri	2	4
10	Glenmore	7	-	23	Kalipuro	5	4
11	Kalibaru	6	-	24	Wongsorejo	12	-
12	Genteng	5	-	25	Blimbingsari	10	-
13	Srono	10	-	<b>Jumlah</b>		<b>189</b>	<b>28</b>

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Kabupaten Banyuwangi secara administratif terdiri dari 25 kecamatan dan 189 desa dan 28 kelurahan. Di Kabupaten Banyuwangi terdapat Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) yang merupakan kawasan strategis perkotaan Banyuwangi yang meliputi seluruh kelurahan di Kecamatan Banyuwangi, beberapa kelurahan di Kecamatan Giri, beberapa kelurahan di Kecamatan Glagah, beberapa desa di Kecamatan Kabat, dan beberapa kelurahan/desa di Kecamatan Kalipuro. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Tiga kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Wongsorejo terdiri dari 12 Desa, dan Kecamatan Singojuruh terdiri dari 11 Desa.

### 2.1.2. Topografi

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas:

- a. Ketinggian 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi, Kabat,

- Blimbingsari, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran;
- b. Ketinggian 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran;
  - c. Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari;
  - d. Ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran;
  - e. Ketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru;
  - f. Ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

### 2.1.3. Geologi

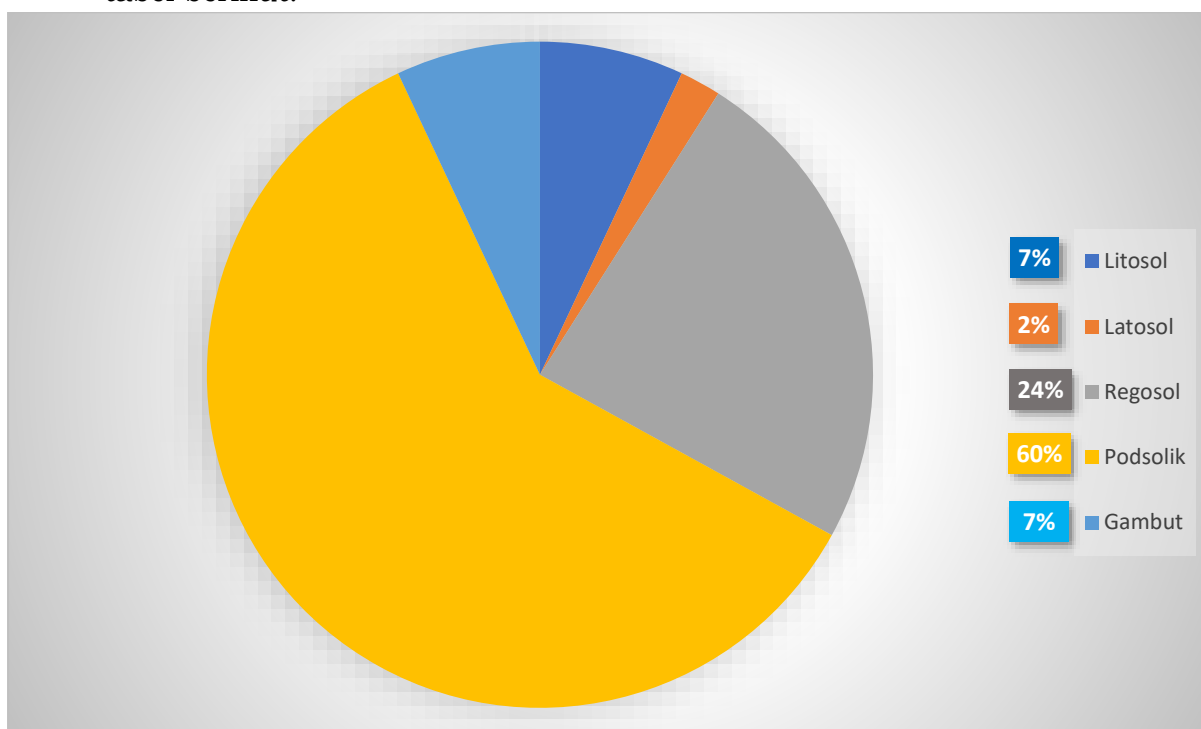
Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi seperti pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2. 2 Luas Tanah Berdasarkan Struktur Geologi Kabupaten Banyuwangi**

Struktur Geologi	Luas (Ha)	( % )
<b>Aluvium</b>	134.525,00	23,27
<b>Hasil Gunung Api kuartir muda</b>	170.310,50	29,43
<b>Hasil Gunung Api kuartir tua</b>	59,283.00	10,26
<b>Andesit</b>	47.417,75	8,20
<b>Miosen falses semen</b>	89.177,25	15,43
<b>Miosen falsen batu gamping</b>	77.536,50	13,41

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada tabel berikut:



**Gambar 2. 2: Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari tanah regosol, litosol, latosol, podsolik dan gambut. Sebagian besar komposisi jenis tanah Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh Tanah Podsolik sebesar 60%, Tanah Regosol 24%, Lithosol 7%, Gambut 7% dan jenis tanah Lathosol hanya 2% dari luas area di Kabupaten Banyuwangi.

#### 2.1.4. Klimatologi

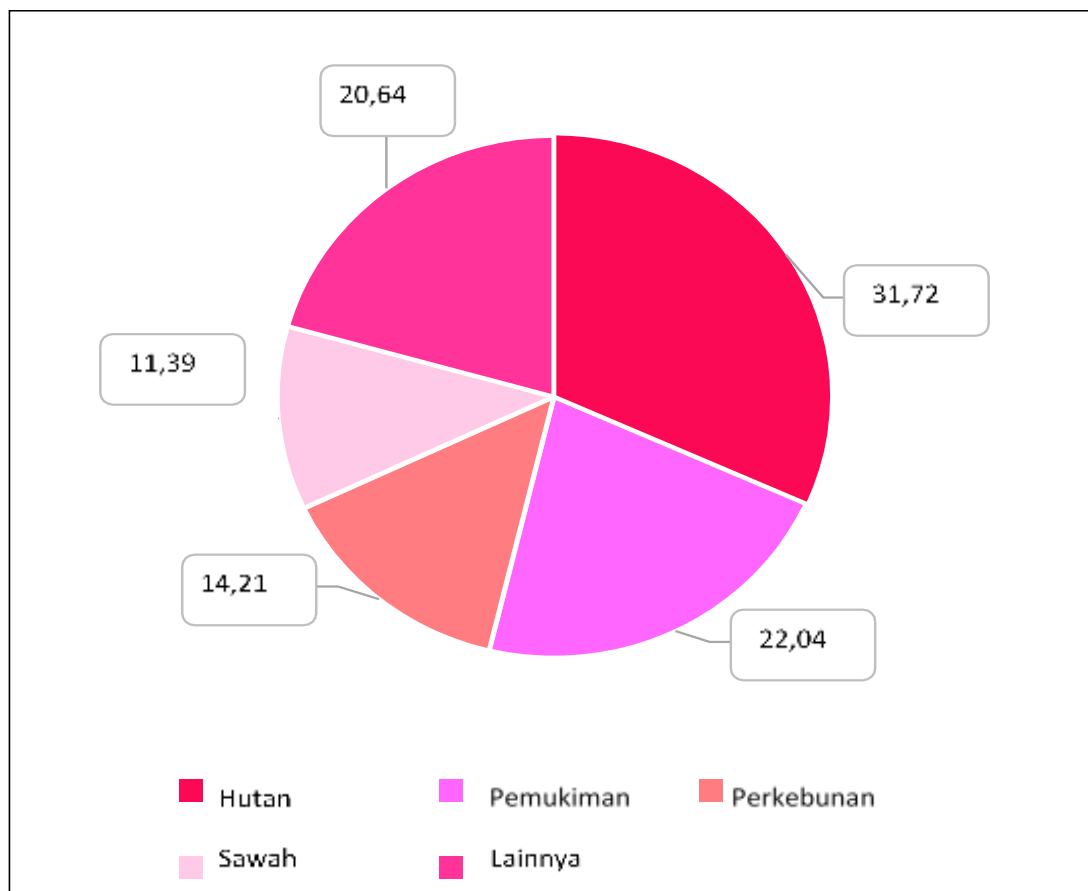
Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

1. Rata-rata curah hujan selama tahun 2020 sebesar 133.7 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan April yaitu 40.7 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Mei mencapai 232.4 mm;
2. Persentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2020 mencapai 71.17%, terendah pada Bulan Desember sebesar 42% dan tertinggi pada Bulan September mencapai 89%;
3. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2020 mencapai 78.92 %. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan Januari dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 74%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Mei, Oktober dan Desember dengan besaran 81%;

4. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Juli 2020 sebesar 30 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan Januari sebesar 34.9 derajat celcius.

#### 2.1.5. Penggunaan Lahan

Luas Wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar ± 5.782,50 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar didominasi oleh kawasan hutan dibandingkan kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62 %, daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 %, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 %, sedangkan yang dimanfaatkan sebagai pemukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 %.



**Gambar 2.3 Penggunaan Lahan Kabupaten Banyuwangi**

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

#### 2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah

##### a. Pertanian

Potensi pertanian tanaman bahan makanan terbesar di Banyuwangi adalah produksi tanaman padi. Kabupaten Banyuwangi juga termasuk dalam lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi Banyuwangi pada tahun 2020 adalah sebanyak 794.114 ton. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyuwangi berikutnya yang dominan adalah jagung, dengan produksi sebanyak 221.271 ton. Potensi pertanian tanaman bahan makanan di

Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan ke depan menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman serta industri, alih fungsi komoditas dari pertanian tanaman pangan ke pertanian hortikultura karena faktor keuntungan yang diperoleh petani hortikultura dirasa lebih besar daripada pertanian tanaman pangan.

**Tabel 2.3 Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	119.108	66,240	788.971
2	Padi Ladang	950	54,137	5.143
3	Jagung	32.602	67,870	221.271
4	Kedelai	5.135	20,150	10.347
5	Kacang Tanah	561	14,349	805
6	Kacang Hijau	773	12,497	966
7	Ubi Kayu	834	222,350	18.544
8	Ubi Jalar	935	211,722	19.796

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Produksi sayuran di yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi meliputi terong, buncis, kubis, kacang panjang, tomat, bawang merah dan cabai sebagai komoditas. Komoditas terbesar adalah pada tanaman cabai yaitu pada komoditas cabai kecil dan cabai besar. Pada tahun 2020 hasil produksi cabai kecil di Kabupaten Banyuwangi mencapai 23.518 ton dan hasil produksi cabai besar mencapai 13.966 ton.

**Tabel 2.4 Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

No.	Jenis Sayuran	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
1	Cabe Besar	1.133	125,5	13.966
2	Cabe Kecil	3.013	79,6	23.518
3	Bawang merah	589	116,3	6.701
4	Tomat	233	94	2.123
5	Kacang Panjang	210	165	3.461
6	Kubis	26	113	297
7	Buncis	61	110	680
8	Terong	128	130	1.663

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki potensi unggulan pertanian pada produksi buah-buahan. Salah satu buah yang terkenal dan menjadi perhatian adalah buah naga. Meskipun sebenarnya kuantitas produksi tidak

sebanyak buah-buah yang lain. Produksi buah terbanyak adalah buah Jeruk Siam dengan jumlah produksi sebanyak 2.263.528 Ton, sedangkan buah naga menjadi komoditas dengan produksi terbanyak kedua setelah jeruk siam yaitu sebanyak 1.259.034 Ton.

**Tabel 2.5 Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

No.	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Semangka	1.379	409.415	2.968,93
2	Melon	214	70.406	3.290
3	Manggis	3.388	464.148	1.369,98
4	Jeruk Siam	9.054	2.263.528	2.500,03
5	Durian	1.041	159.273	1.530
6	Mangga	513	45.657	890
7	Buah Naga	4.787	1.259.034	2.630,11
8	Rambutan	632	39.816	630
9	Pisang	3.114	700.538	2.249,64

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2021

#### b. Perkebunan

Produk olahan kopi merupakan salah satu produk yang cukup terkenal di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2020 produksi kopi di Kabupaten Banyuwangi mampu menyentuh angka 5.918,40 Ton. Komoditas kedua setelah produksi tanaman tebu adalah tanaman kakao yang pada tahun 2020 mampu menghasilkan 3.426,09 Ton.

**Tabel 2.6 Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Besar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw / Ha)	Produksi (Ton)
1	Tebu	5.292,93	745	394.323
2	Kopi	5.177,57	10,79	5.586,60
3	Kakao	4.490,29	7,63	3.426,09
4	Cengkeh	1.800,18	4,28	770,48
5	Kelapa Kopra	102,40	10,87	1.113,09
6	Kelapa Deres	506,64	14,98	758,94
7	Kapuk Randu	602,28	1,39	83,72
8	Abacca	344,31	13,6	468,26
9	Karet	5.210,02	10,5	5.529,25

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Potensi tanaman perkebunan rakyat pada tahun 2020 yang memiliki produksi terbesar adalah kelapa kopra dengan tingkat produksi sebanyak 33.450 ton per tahun. Potensi lainnya adalah kelapa deres dengan tingkat produksi sebanyak 20.006. Komoditas tanaman perkebunan rakyat terbesar

setelah kelapa kopra dan deres di Banyuwangi adalah kopi dengan produksi sebanyak 10.518 ton.

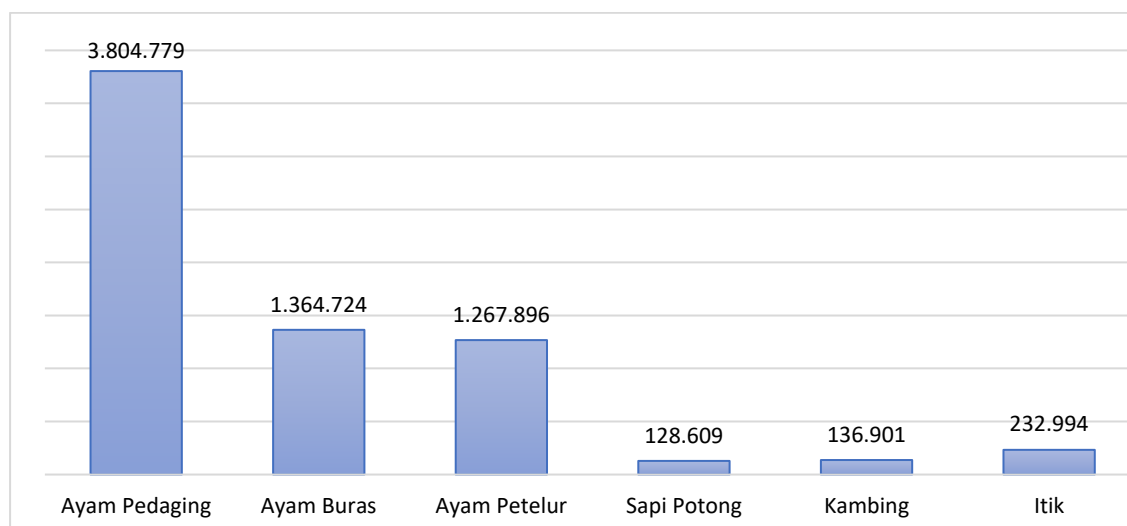
**Tabel 2.7 Luas Panen, Luas Tanaman dan Total Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

No.	Jenis Tanaman	Luas (ha)	Produktivitas (KW/ha)	Produksi (Ton)
1	Tembakau	416	14,52	465,50
2	Tebu	82	715,88	5.892
3	Kapas	-	-	-
4	Kelapa Kopra	21.427	15,49	33.450
5	Kelapa Deres	2.176	91,96	20.006
6	Kakao	443	7,73	372
7	Cengkih	613	2,96	180
8	Kapuk Randu	64	3,59	71
9	Kopi	9.690	10,71	10.518
10	Gula Aren	30	105	315

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2021

### c. Peternakan

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi berbagai jenis hewan ternak. Adapun konsentrasi jumlah kontribusi daging maka ternak yang paling dominan adalah sapi potong yang mampu memproduksi 1.886.986 Kg pada tahun 2020 dan disusul dengan ayam pedaging sebanyak 1.280.542 Kg. Ada pula ternak lain yang turut memberikan kontribusi dalam konsumsi daging kabupaten Banyuwangi seperti ayam kampung, kambing, domba, itik.



**Gambar 2. 4: Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2021

**Tabel 2.8 Produksi Daging, Susu dan Telur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020**

No	Jenis	Produksi 2017	Produksi 2018	Produksi 2019	Produksi 2020
1	Sapi Potong(Kg)	2.789.671	2.289.729	2.824.891	1.886.986
2	Ayam Pedaging (Kg)	3.468.020	3.819.864	4.071.540	1.280.542
3	Ayam Kampung (Kg)	2.337.166	1.947.029	2.108.013	166.279
4	Susu (Kg)	1.673.452	1.397.635	1.392.753	1.738.537
5	Telur (Kg)	9.649.731	9.619.483	10.410.254	14.585.935

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat produksi hasil peternakan di Kabupaten Banyuwangi selama 4 (empat) tahun terakhir bergerak fluktuatif. Produksi hasil peternakan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yang meningkat signifikan yaitu pada produksi Telur meningkat sebanyak 4.175.681 kg atau sebesar 40,11 % dari tahun sebelumnya. Produksi susu meningkat sebanyak 345.784 kg atau sebesar 24,83 % dibandingkan tahun 2019.

Produksi hasil peternakan pada tahun 2020 yang menurun dibandingkan tahun 2019 yaitu Sapi Potong, Ayam Pedaging dan Ayam Kampung. Produksi sapi potong pada tahun 2020 menurun sebanyak 937.905 kg atau sebesar 33,20 %. Produksi ayam pedaging menurun sebanyak 2.790.998 kg atau sebesar 68,55 %. Produksi ayam kampung menurun sebanyak 1.941.734 kg atau sebesar 92,11 %.

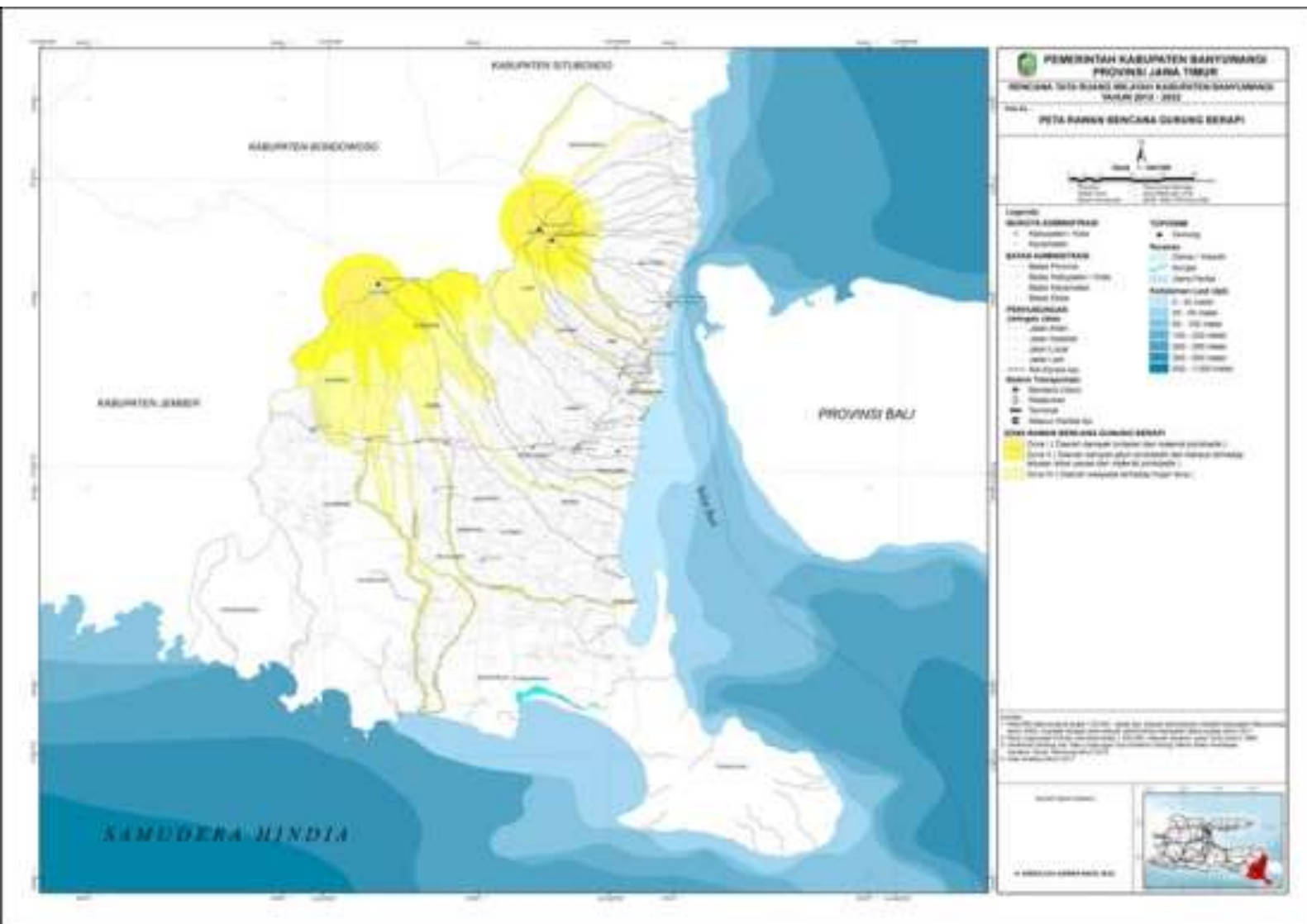
Pada tahun 2020 wabah Covid-19 berdampak ke berbagai sektor perekonomian. Produksi ayam pedaging dan ayam kampung di Kabupaten Banyuwangi menurun sangat drastis pada tahun 2020 salah satu penyebabnya karena kondisi pandemi Covid-19 yang berakibat kepada kondisi ekonomi peternak ayam dalam pemeliharaan hewan ternaknya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan produksi pertanian dan membantu masyarakat di sektor pertanian salah satunya adalah pelayanan bergerak yakni Mobil Pelayanan Pertanian Terpadu (BILAPERDU). Pelayanan Bilaperdu ini meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dengan adanya layanan Bilaperdu ini permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dapat dengan cepat segera dibantu penyelesaiannya.

#### **2.1.17. Kawasan Rawan Bencana**

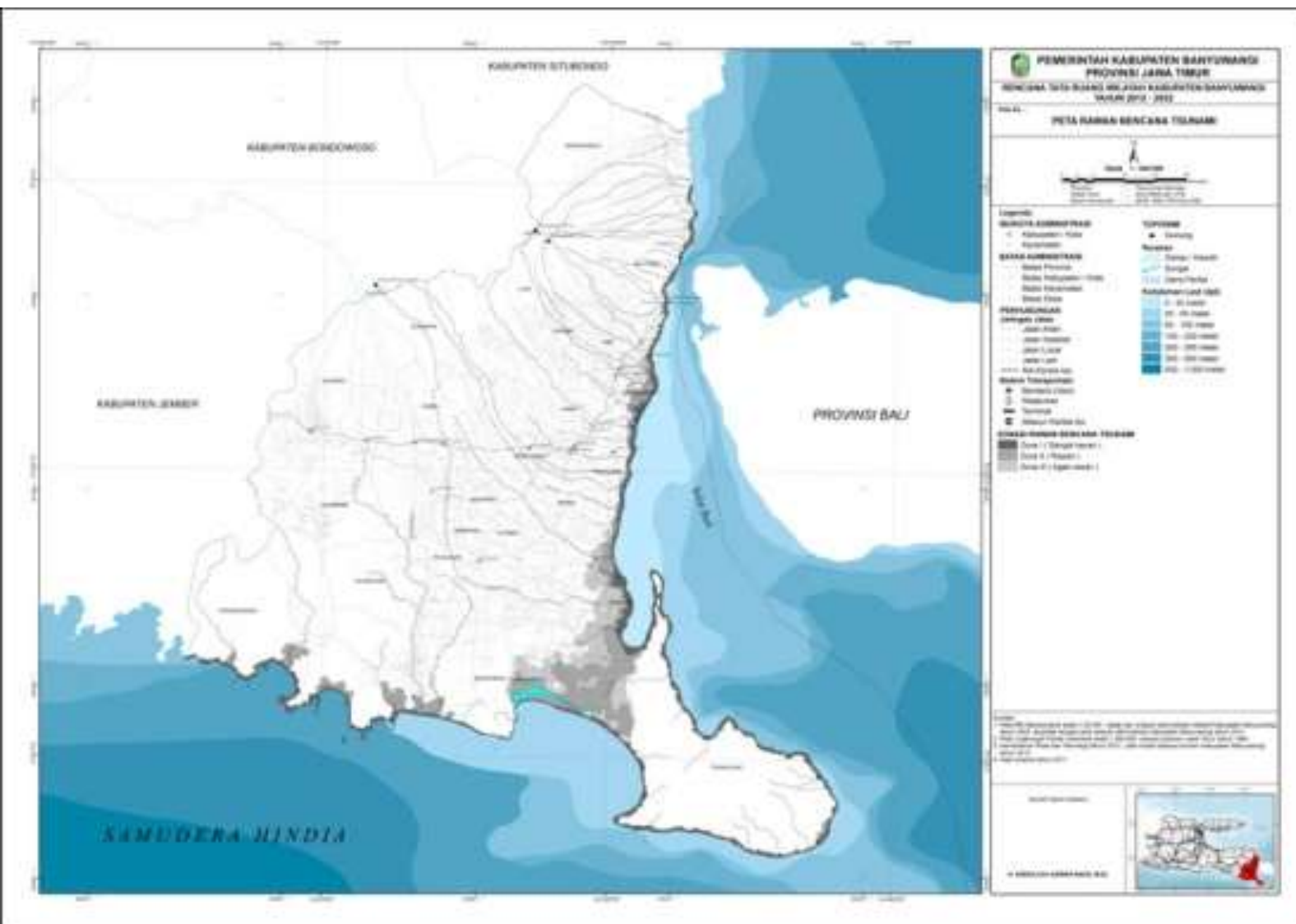
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa

pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi memaparkan bahwa potensi bencana gunung berapi menjadi yang paling diwaspadai.



**Gambar 2. 5: Peta Rawan Bencana Gunung Berapi Kabupaten Banyuwangi**  
 Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Berikut merupakan peta rawan bencana tsunami Kabupaten Banyuwangi.



**Gambar 2. 6: Peta Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Banyuwangi**  
 Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

### 2.1.8. Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebanyak 1.708.114 jiwa. Jumlah penduduk Banyuwangi pada tahun 2019 meningkat sebanyak 4.314 jiwa atau 0.27% persen dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 94.123 jiwa atau 5,83% menjadi 1.708.114 jiwa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk agar proses pemerataan pembangunan juga dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan merata. Berikut merupakan Gambar jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi dalam 6 tahun terakhir:



**Gambar 2. 7: Jumlah Penduduk Tahun 2015-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

**Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi Pada Setiap Kecamatan Tahun 2020**

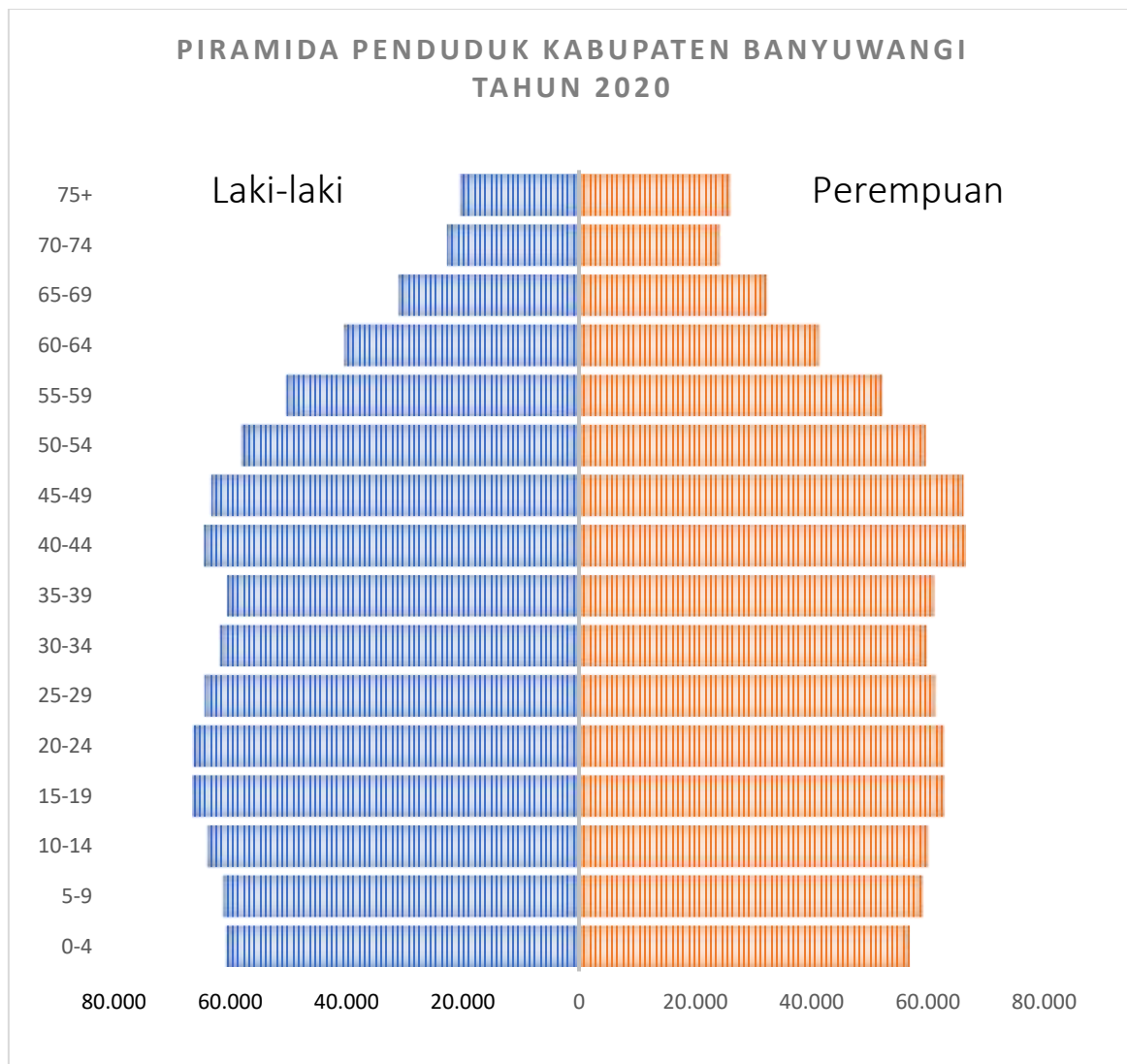
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	L+P
1	Pesanggaran	26.831	26.542	53.373
2	Bangorejo	33.180	32.529	65.709
3	Purwoharjo	34.972	34.499	69.471
4	Tegaldlimo	33.653	33.084	66.737
5	Muncar	68.778	67.647	136.425
6	Cluring	38.902	38.515	77.417
7	Gambiran	32.971	33.216	66.187
8	Srono	48.774	48.140	96.914
9	Genteng	46.541	45.907	92.448
10	Glenmore	37.447	37.918	75.365
11	Kalibaru	32.491	32.651	65.142
12	Singojuruh	25.192	25.271	50.463
13	Rogojampi	28.257	28.960	57.217
14	Kabat	31.793	31.620	63.413
15	Glagah	18.076	18.456	36.532
16	Banyuwangi	57.932	59.626	117.558
17	Giri	15.832	15.789	31.621

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk
		L	P	L+P
18	Wongsorejo	38.780	38.640	77.420
19	Songgon	28.526	28.551	57.077
20	Sempu	41.650	41.450	83.100
21	Kalipuro	41.845	41.840	83.685
22	Siliragung	24.666	24.012	48.678
23	Tegalsari	26.295	26.066	52.361
24	Licin	14.818	14.642	29.460
25	Blimbingsari	27.018	27.323	54.341
<b>JUMLAH</b>		<b>855.220</b>	<b>852.894</b>	<b>1.708.114</b>

Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Berdasarkan total sebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat bahwa pusat kependudukan terkonsentrasi di Kecamatan Banyuwangi yang merupakan wilayah perkotaan dan Kecamatan Muncar yang merupakan kawasan minapolitan, sementara jumlah penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Licin yang wilayahnya berada pada dataran tinggi perbukitan. Tentunya daerah yang menjadi pusat pemerintahan, perekonomian juga memiliki daya tarik tersendiri terhadap perkembangan jumlah penduduk.

Perkembangan penduduk jika dilihat dari profil distribusinya, hingga tahun 2020 masih cukup bagus. Profil jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan postur yang cukup ideal antara usia produktif (umur 15-64 tahun) dan usia tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun). Jumlah penduduk terbanyak adalah pada kelompok umur 40-44 tahun dengan jumlah 131.028 penduduk yang terdiri dari 64.436 penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 66.592 penduduk berjenis kelamin perempuan. Melihat bentuk piramida penduduk tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 hingga lima tahun kedepan profil penduduk Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh usia produktif, sehingga diupayakan kebijakan yang tepat terkait menyiapkan kualitas angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja serta menyiapkan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan untuk penduduk usia lanjut perlu antisipasi kebutuhan layanan yang memadai. Berikut merupakan grafik piramida penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data kependudukan tahun 2020.



**Gambar 2. 8: Piramida penduduk Kabupaten Banyuwangi 2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2021

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi selama periode 2016 - 2018 menunjukkan tren yang positif, kemudian sedikit turun di tahun 2019. Trend dalam jangka waktu 2016-2019 cenderung berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi baik skala regional, nasional, maupun global mengalami perlambatan bahkan mencapai pertumbuhan yang negatif. Dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi sebesar -3,58%, berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (-2,39%) dan nasional (-2,07%). Berikut ini gambaran pertumbuhan ekonomi Banyuwangi, Jawa Timur, dan Indonesia dalam lima tahun terakhir:



**Gambar 2.9: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2021

Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari Perubahan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau (PDRB) Kabupaten Banyuwangi, Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah atas barang dan jasa yang dihitung dalam wilayah tertentu tersebut dihitung tanpa memperhatikan adanya perputaran ekonomi di wilayah tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut atau masyarakat lain. Secara umum penghitungan PDRB terdapat beberapa jenis yang meliputi PDRB yang dihitung berdasarkan pendekatan produksi yang dibagi menjadi 17 kategori lapangan usaha, PDRB yang dihitung melalui pendekatan pendapatan, dan PDRB yang dihitung melalui pendekatan pengeluaran. Berdasarkan jenisnya setidaknya PDRB dihitung dengan 2 metode yakni PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) dan PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku).

PDRB ADHK adalah jenis PDRB yang isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang dihitung pada tahun tertentu sebagai dasar, pada periode ini tahun yang menjadi tahun dasar adalah tahun 2010. Nilai PDRB ADHK merepresentasikan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi selalu positif dimana rata-rata pertumbuhan tertinggi tahun 2016-2019 adalah kategori I lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,59%. Hal ini dipengaruhi tumbuh pesatnya sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 kategori lapangan

usaha ini terkontaksi paling besar sebesar -13,85% seiring dengan terpuruknya pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

**Tabel 2.10: Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,81	1,49	-0,73	-0,56	-2,96
B	Pertambangan dan Penggalian	5,09	8,06	6,25	1,93	-7,06
C	Industri Pengolahan	6,17	3,67	7,13	7,86	-0,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,2	4,37	3,48	3,34	-0,3
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,05	2,09	4,18	5,31	5,03
F	Konstruksi	7,51	8,08	11,81	12,32	-5,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,86	9,12	11,3	9,6	-6,58
H	Transportasi dan Pergudangan	7,68	6,3	5,36	5,97	-12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,5	10,91	10,78	11,18	-13,85
J	Informasi dan Komunikasi	6,92	8,65	8,75	9,03	8,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,8	6,42	6,07	4,2	-0,26
L	Real Estat	5,21	6,37	7,24	6,63	1,91
M,N	Jasa Perusahaan	5,77	6,28	7,15	6,64	-6,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,54	4,45	4,2	2,21	-3,68
P	Jasa Pendidikan	6,57	7,39	7,43	7,14	3,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,66	9,8	7,61	6,22	15,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,02	8,68	9,86	8,16	-13,2
<b>PERTUMBUHAN EKONOMI</b>		<b>5,38</b>	<b>5,45</b>	<b>5,84</b>	<b>5,55</b>	<b>-3,58</b>

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2021

Selama 10 tahun terakhir sektor pariwisata, pertanian dan UMKM menjadi prioritas unggulan pembangunan daerah dan menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Dalam struktur PDRB sektor pertanian direpresentasikan dalam kategori A, sektor UMKM dalam kategori C dan G, sektor pariwisata masuk dalam kategori I dan kategori R. Selama pandemi tahun 2020, kategori I dan R terdampak paling besar. Sementara kategori A dan C relatif lebih tangguh dan mampu bertahan. Sedangkan kategori G yang diharapkan bisa bertahan akhirnya terkontraksi akibat pembatasan mobilitas dan permintaan konsumen. Kedepan fokus pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi bisa dilakukan dengan memulihkan lapangan usaha kategori I dan R serta menjadikan lapangan usaha kategori A, C dan G sebagai kategori unggulan untuk terus dikembangkan.

PDRB ADHB merupakan nilai PDRB yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk dapat melihat perubahan yang terjadi dalam sektor ekonomi. Selain itu juga dapat melihat struktur ekonomi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Berikut merupakan PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020 dihitung dalam Miliar.

**Tabel 2.11: PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020  
(dalam miliar)**

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23.473,24	24.345,12	24.329,42	24.541,48	24.081,01
B	Pertambangan dan Penggalian	5.033,74	5.504,25	5.963,32	6.211,03	5.913,07
C	Industri Pengolahan	7.264,44	7.768,10	8.521,54	9.351,68	9.422,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28,83	31,56	33,70	35,31	34,91
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40,48	42,02	44,29	47,21	49,71
F	Konstruksi	7.775,55	8.994,18	10.517,95	12.005,04	11.362,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.618,55	10.898,01	12.474,56	14.017,66	13.120,38
H	Transportasi dan Pergudangan	2.064,86	2.294,32	2.501,20	2.706,10	2.369,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.638,07	1.885,46	2.137,88	2.425,55	2.105,92
J	Informasi dan Komunikasi	2.676,78	2.955,66	3.225,75	3.566,03	3.887,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.180,43	1.278,07	1.377,53	1.449,97	1.449,27
L	Real Estat	970,95	1.063,76	1.170,66	1.268,36	1.301,74
M,N	Jasa Perusahaan	149,55	161,18	178,92	194,92	186,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.494,43	1.637,26	1.745,03	1.822,84	1.845,59
P	Jasa Pendidikan	1.978,78	2.160,70	2.363,86	2.573,71	2.681,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	217,68	247,16	278,49	302,06	351,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	739,61	863,39	982,93	1.076,76	940,19
	<b>PDRB ADHB</b>	<b>66.345,97</b>	<b>72.130,20</b>	<b>77.847,03</b>	<b>83.595,71</b>	<b>81.102,89</b>

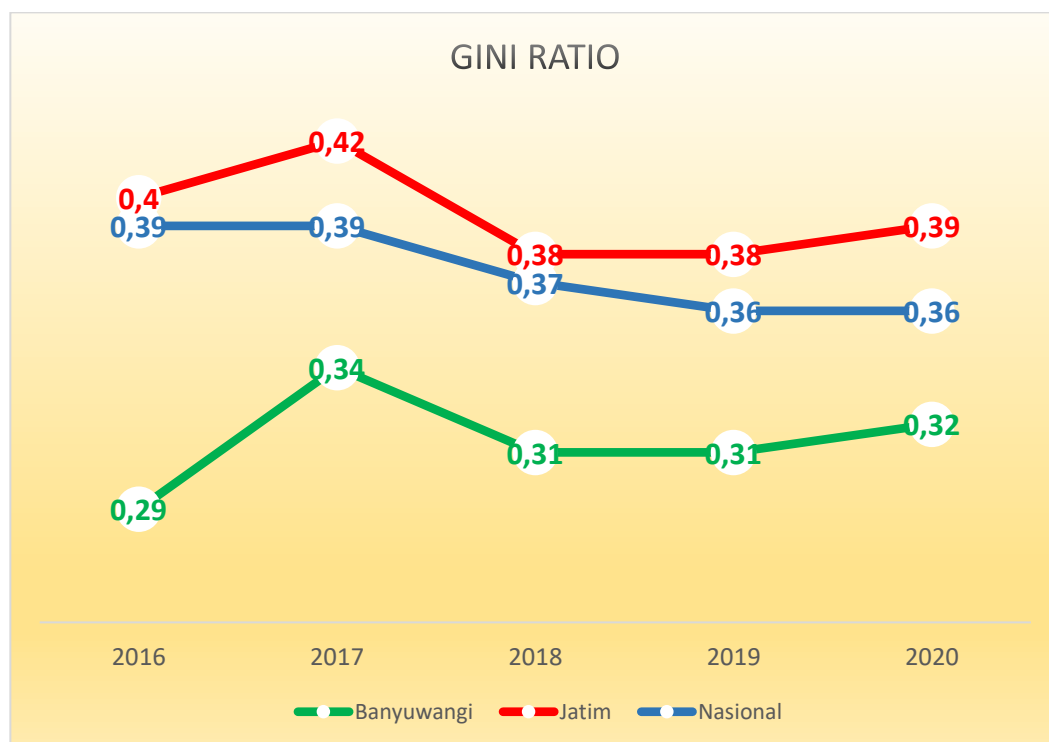
Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2021

Gambaran diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Banyuwangi adalah pada kategori A lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29.69%, kategori G lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16.18%, kategori F lapangan usaha konstruksi sebesar 14.01%, kategori C lapangan usaha industri pengolahan sebesar 11.62%,

kategori B lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 7.29%. Kinerja perekonomian Kabupaten Banyuwangi kurun waktu 2016-2020 menunjukkan peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 66.345,97 M, pada tahun 2020 mencapai 81.102,89 M, terjadi peningkatan sebesar 14.756,92 M (22,24%) selama lima tahun.

### 2.2.1.2. Gini Ratio

Gini ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Banyuwangi secara menyeluruh. Nilai gini ratio semakin mendekati 0 maka tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah dan sebaliknya, semakin mendekati angka 1 maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan Kabupaten Banyuwangi cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi cukup merata. Perbandingan gini ratio Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.10: Gini Ratio Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2021

Indikator kesejahteraan masyarakat dari perspektif pemerataan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.12: Indikator kesejahteraan masyarakat dari perspektif pemerataan**

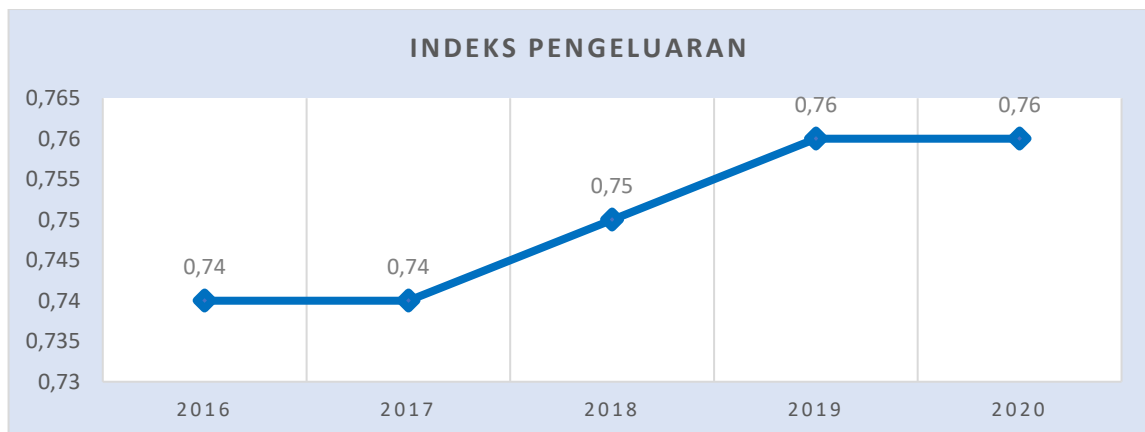
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Gini Ratio		0,29	0,34	0,31	0,31	0,32
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	41,47	44,94	48,36	51,80	50,13

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2021

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diatas menunjukkan pendapatan masyarakat Banyuwangi per orang per tahun. Berdasarkan tabel diatas, pendapatan masyarakat Banyuwangi tahun 2016-2019 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 8,3% per tahun. Tetapi di tahun 2020 dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita masyarakat sebesar -3,3%.

### 2.2.1.3. Indeks Pengeluaran

Indeks pengeluaran merupakan salah satu komponen pembentuk IPM yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.



**Gambar 2.11: Indeks Pengeluaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2021

Indeks pengeluaran disusun berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Dari data di atas terlihat bahwa indeks pengeluaran meningkat setiap tahunnya. Pandemi Covid-19 mempengaruhi menurunnya indeks pengeluaran Kabupaten Banyuwangi meskipun tidak signifikan, yaitu sebesar 0,764 ditahun 2019 menjadi 0,761 ditahun 2020 atau turun 0,41%.

#### 2.2.1.4. Angka Kemiskinan

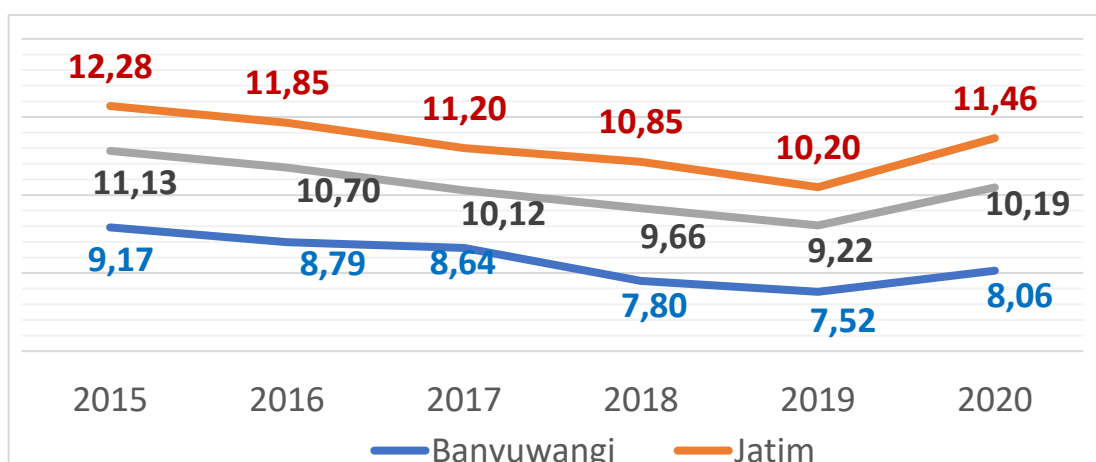
Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun. Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini akan disajikan data dalam bentuk table mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

**Tabel 2.13: Angka Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi 2016-2020**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/tahun)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2016	311.722	140,45	8,79
2	2017	319.236	138,54	8,64
3	2018	339.891	125,50	7,80
4	2019	353.873	121,37	7,52
5	2020	373.679	130,37	8,06

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2021

Berdasarkan data yang tersaji dalam bentuk table diatas merupakan gabungan angka kemiskinan antara Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur. Dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin Jawa Timur lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi lebih terkendali dan tertangani daripada penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan.



**Gambar 2.12: Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2020**

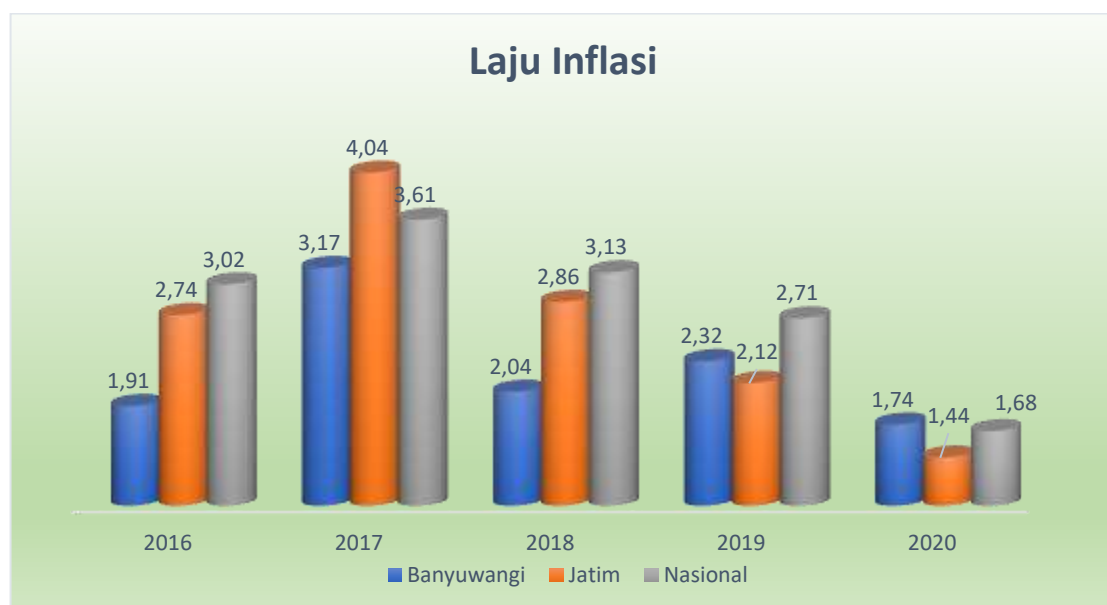
Berdasarkan gambar diatas, sejak tahun 2015 persentase kemiskinan di Kab. Banyuwangi berada di bawah persentase kemiskinan Provinsi Jatim dan Nasional. Tahun 2020 akibat dari Pandemi Covid-19, trend persentase kemiskinan baik di Kab Banyuwangi , Provinsi Jatim, maupun Nasional mengalami peningkatan.

#### 2.2.1.5. Laju inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi atau distribusi (kurangnya produksi (*Product or Service*) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (*Government*) seperti *fiskal* (perpajakan /pungutan /insentif /disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lain-lain.

Secara umum peningkatan inflasi setiap tahunnya merupakan fenomena yang wajar. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar peningkatan inflasi tersebut dan apakah daerah mampu untuk mengendalikan inflasi tersebut dengan paket kebijakannya. Berikut merupakan gambaran inflasi Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun kebelakang dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional.



**Gambar 2.13 Inflasi kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tren laju inflasi Kabupaten Banyuwangi dibawah inflasi nasional tetapi tidak terlalu rendah atau bisa dikatakan inflasi Kabupaten Banyuwangi dalam posisi terkendali. Inflasi di Kabupaten Banyuwangi tidak terlalu tinggi sehingga harga barang tetap terjangkau dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Inflasi juga tidak terlalu rendah yang menandakan bahwa kondisi permintaan dan penawaran tetap terjaga sehingga ekonomi tetap bergerak.

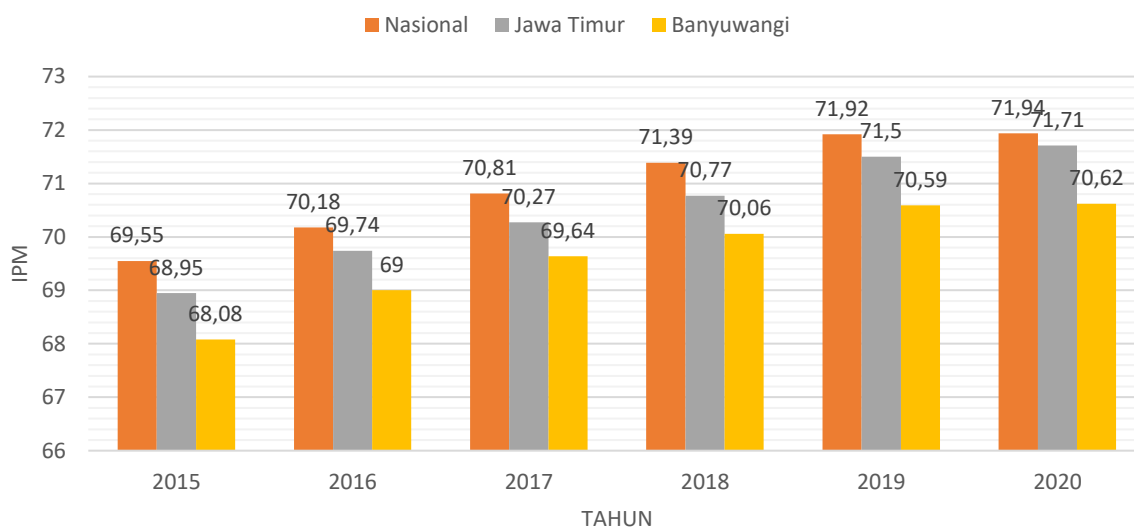
## **2.2.2. Kesejahteraan Sosial**

### **2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada hakikatnya merupakan suatu proses investasi jangka panjang. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indeks kesehatan, pengetahuan dengan indeks pendidikan, serta standar hidup layak diukur dengan indeks pengeluaran.

Upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap kenaikan angka IPM Kabupaten Banyuwangi.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



**Gambar 2.14 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

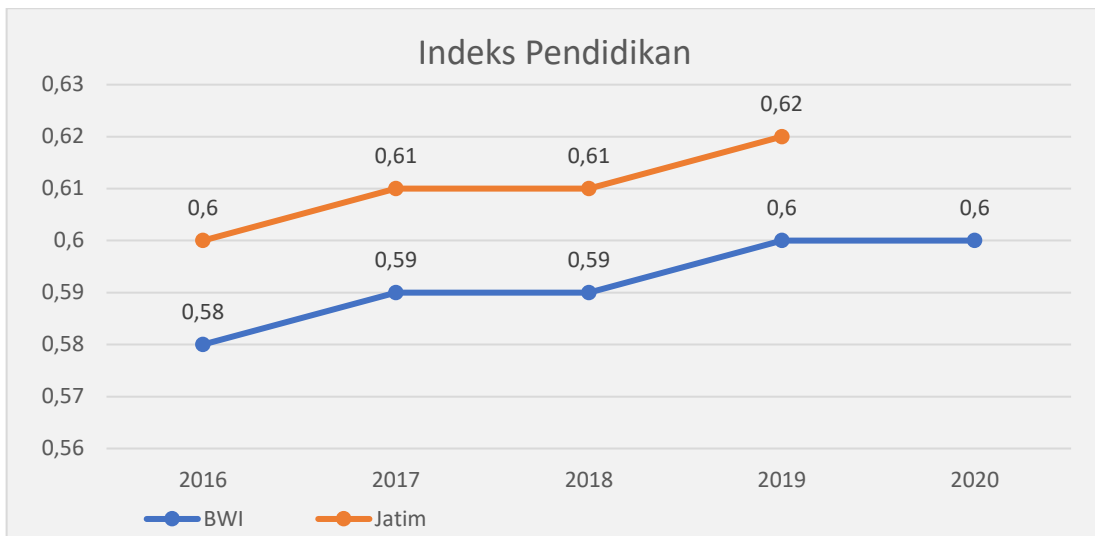
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tren capaian yang terus meningkat dari tahun 2015-2020. IPM Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 hingga tahun 2020 masih dibawah angka IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 68,08 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan capaian menjadi 69,00. Kemudian pada tahun 2017 angka capaian IPM menjadi 69.64 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 yang mencapai angka 70.06. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Banyuwangi mencapai angka 70.59 dan terus meningkat menjadi 70.62 pada tahun 2020. Capaian tersebut cukup bagus mengingat pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 dimana pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat termasuk sektor ekonomi yang mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga pengeluaran perkapita mengalami penurunan.

### 2.2.2.2. Pendidikan

#### 2.2.2.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan dapat diketahui dengan terlebih dahulu menghitung angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan dibagi dua. Indeks Pendidikan daritahun 2016 sampai dengan 2020 meningkat pada tahunnya secara rata-rata. Pada tahun 2016 indeks Pendidikan berada pada angka 0.58 dan naik dalam dua tahun kemudian menjadi 0.59 di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 indeks mengalami kenaikan kembali menjadi 0.60. Namun demikian, capaian indeks pendidikan di Kabupaten

Banyuwangi hingga tahun 2020, masih belum dapat melampaui capaian indeks pendidikan Provinsi Jawa Timur.

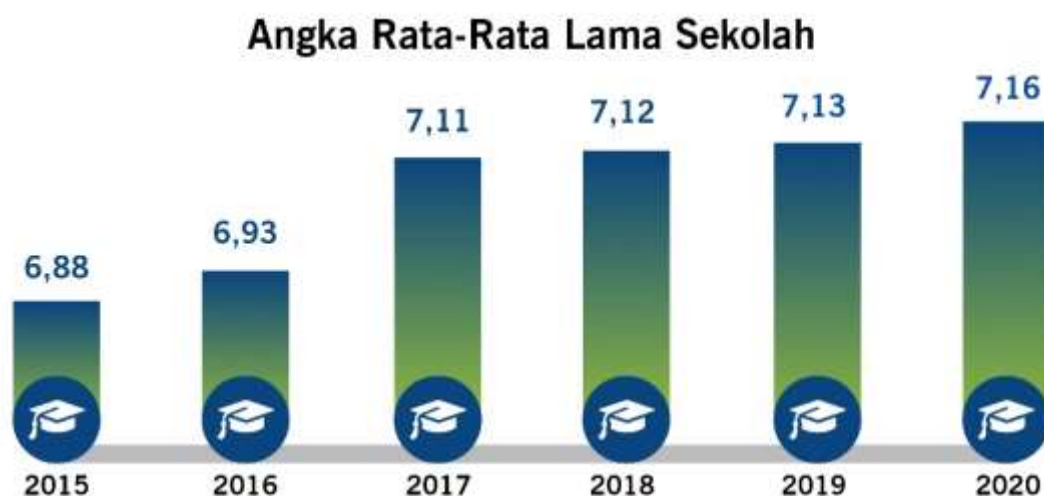


**Gambar 2.15 Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

#### 2.2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbentuk dari 3 dimensi Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran. Salah satu representasi dari kualitas pembangunan manusia direpresentasikan melalui pembangunan pendidikan itu sendiri. Secara umum Indeks Pendidikan dibentuk dari 2 indikator komposit yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Berikut capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Banyuwangi.

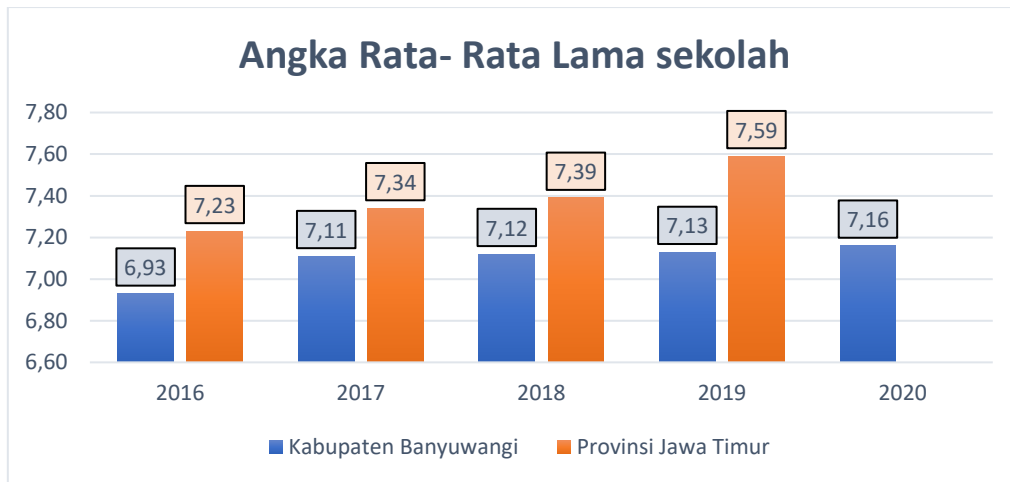


**Gambar 2.16 Angka rata-rata lama sekolah 2015-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Data angka rata-rata lama sekolah memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2015 sebesar 6.88, pada tahun 2016 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 6.93, pada tahun 2017 masih mengalami peningkatan menjadi 7.11, pada tahun 2018 masih mengalami peningkatan menjadi 7.12, Pada tahun 2019 masih mengalami peningkatan menjadi 7.13, dan pada tahun 2020 masih mengalami peningkatan menjadi 7.16. Sedangkan rata-rata lama sekolah secara nasional yaitu 7.95, yang artinya bahwa penduduk Indonesia dengan usia 25 tahun keatas telah menempun Pendidikan 7.95 tahun atau kelas VIII SMP. Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi dalam bidang Pendidikan yang relate dengan kasus reta rata lama sekolah ialah kurangnya akses Pendidikan menengah sebagai kelanjutan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Sehingga dalam data diatas angka yang dihasilnya hanya 7.16 yang artinya bahwa penduduk Banyuwangi dalam tahun 2020 dengan usia diatas 25 tahun menempuh sampai jenjang kelas VII SMP.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 12.78 tahun pada tahun 2019 menunjukkan rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.78 tahun atau setara dengan Diploma I. Secara keseluruhan capaian yang dihasilkan mengalami peningkatan, namun hal tersebut masih belum sepenuhnya sempurna. Hal tersebut dikarenakan oleh permasalahan mengenai masih adanya anak putus sekolah di Kabupaten Banyuwangi. Serta fasilitas sekolah seperti bangunan, listrik, internet dan computer sepenuhnya belum tersedia dan terfasilitasi.

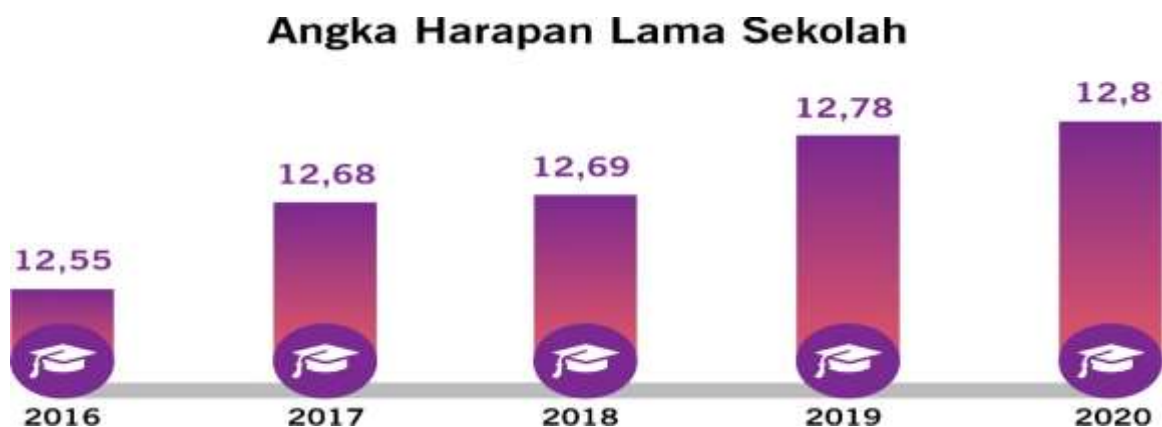


**Gambar 2.17 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Angka rata-rata lama sekolah pada Kabupaten Banyuwangi lebih rendah daripada hasil perhitungan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Meskipun pencapaian angka rata-rata lama sekolah pada Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan pada setiap tahunnya namun angka tersebut masih tergolong sedikit dengan angka yang cenderung stagnan. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah setempat khususnya pada bidang Pendidikan perlu meningkatkan kinerja dan program agar dapat mencapai hasil maksimal pada tahun selanjutnya.

#### 2.2.2.2.3. Harapan Lama Sekolah

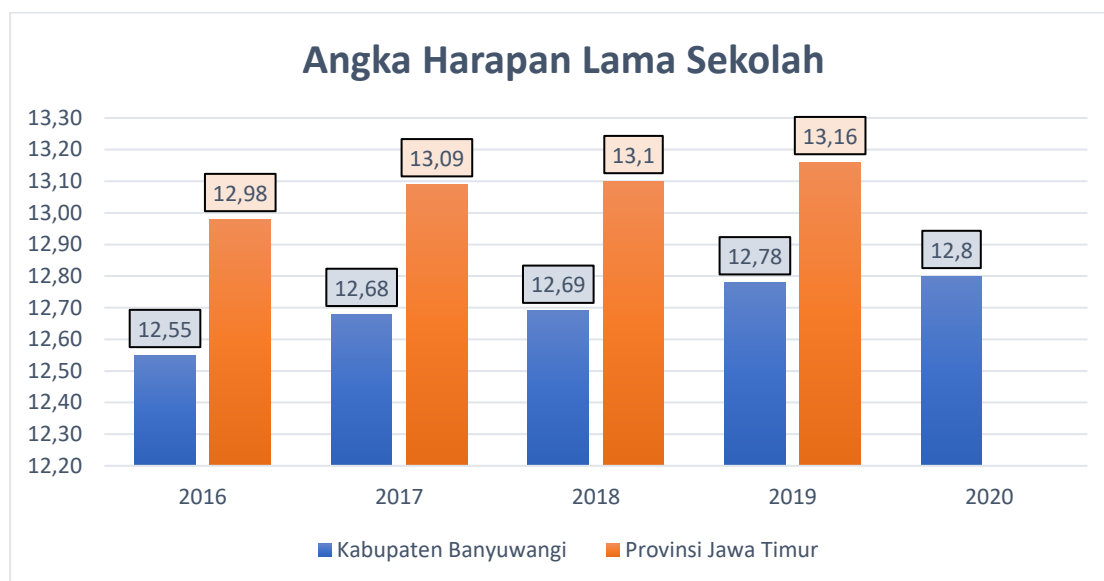


**Gambar 2.18 Angka Harapan lama Sekolah 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Masih terdapatnya gap antara RLS dan HLS menunjukkan sistem pendidikan yang mana bertujuan menjamin hak masyarakat untuk menempuh pendidikan sesuai jenjang yang diharapkan pada suatu daerah, nyatanya belum dapat berjalan dengan baik. Selain itu rendahnya RLS juga

bisa disebabkan oleh masih tingginya generasi tua diatas 25 tahun yang sudah terlanjur tidak mengenyam pendidikan lebih lanjut lagi, sehingga capaian RLS Kabupaten Banyuwangi cenderung rendah.



**Gambar 2.19: Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Jika dibandingkan antara capaian Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat bahwasannya capaian HLS kabupaten Banyuwangi secara terus menerus berada di Bawah Provinsi Jawa Timur.

#### 2.2.2.2.4. Angka melek huruf

Angka melek huruf merupakan indikator dalam urusan pendidikan yang secara langsung merepresentasikan tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf di sebuah daerah. Angka melek huruf dihitung dengan menghitung proporsi penduduk usia 15 tahun ketas, yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus memahami / mengerti apa yang dibaca dan ditulis. Secara umum dahulunya, angka melek huruf merupakan salah satu indikator penting yang merepresentasikan meratanya pendidikan di sebuah wilayah, hal tersebut dikarenakan keterampilan membaca dan menulis dianggap sebagai sebuah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka melek huruf juga masuk dalam salah satu indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia.

Namun seiring berjalannya waktu angka melek huruf perlahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah tolok ukur penting yang merepresentasikan akses, kualitas, maupun sistem pendidikan di sebuah wilayah. Hal tersebut dikarenakan capaian angka melek huruf di seluruh daerah telah melonjak pesat yang salah satunya dengan wajib belajar 9 tahun. Bahkan Angka Melek Huruf (AMH) yang sebelumnya masuk ke dalam indikator komposit IPM dikeluarkan dan diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS).



**Gambar 2.20 Angka Melek Huruf Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

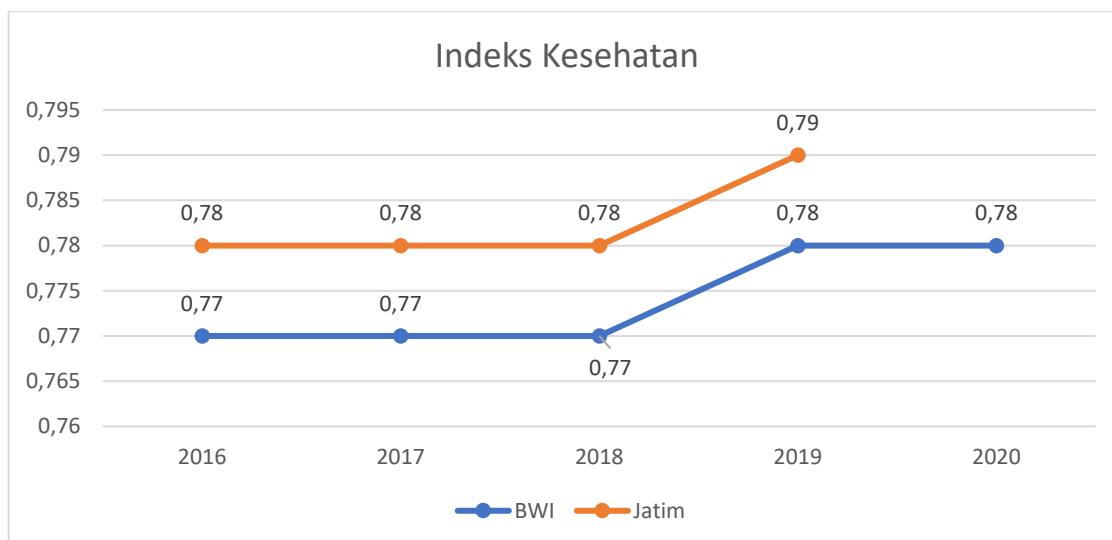
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Secara empiris, dalam 5 tahun terakhir capaian angka melek huruf di Kabupaten Banyuwangi berada diatas 99%, terlihat pada tahun 2016 yang memiliki capaian sebesar 99.1, Pada tahun 2017 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 99.2, Pada tahun 2018 terus mengalami kenaikan hingga 99.3. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 angka melek huruf menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 99.0 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 99.1. Tidak ada isu khusus dalam perjalanannya, untuk meningkatkan Angka Melek Huruf Pada tahun 2014, Kabupaten Banyuwangi telah meluncurkan inovasi Gempita Perpus (Gerakan Pemberantasan Tri Buta dan Anak Putus Sekolah). Inovasi ini melibatkan semua guru penerima sertifikasi untuk memberikan pengajaran baca, tulis, hitung kepada warga belajar yang pelaksanaan pembelajarannya dilaksanakan di balai desa, ruang kelas sekolah ataupun tempat ibadah pada sore dan malam hari. Belum tercapainya angka 100% sebagai kondisi ideal yang seharusnya, dikarenakan masih terdapat usia lanjut dan difabel berat yang memang buta huruf. Kendala terbesar adalah terbatasnya kemampuan masyarakat yang berusia lanjut, selain itu motivasi untuk belajar baca dan tulis di usia tersebut juga sangat rendah.

### **2.2.2.3. Kesehatan**

#### **2.2.2.3.1. Indeks Kesehatan**

Indeks kesehatan adalah indikator yang yang digunakan untuk mengukur capaian peningkatan kesehatan masyarakat. Indikator ini disusun berdasarkan angka harapan hidup maksimal dan angka harapan hidup minimal. Berikut meripakan data Indeks Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2020:



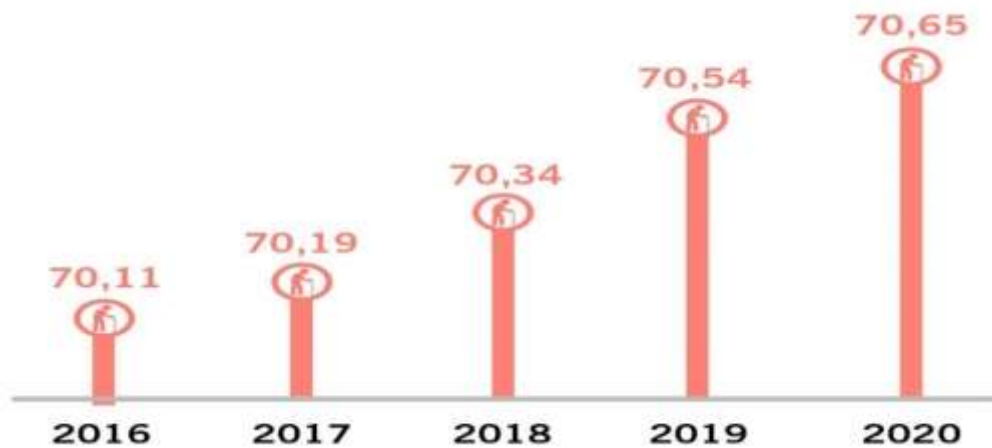
**Gambar 2.21 Indeks Kesehatan Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 indeks Kesehatan berada di angka yang stagnan yakni 0.77. sedangkan pada dua tahun selanjutnya yakni di tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan menjadi 0.78. Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Timur, capaian indeks kesehatan Kabupaten Banyuwangi masih dibawah Provinsi, meskipun hanya terpaut 0.01. Sedangkan indeks Kesehatan sendiri dapat diketahui melalui salah satu standar yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

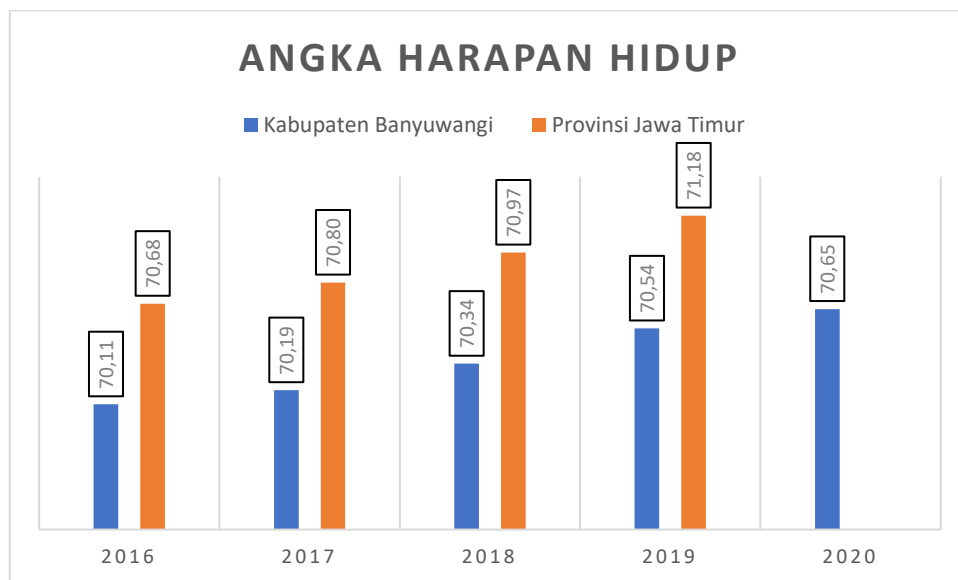
#### 2.2.2.3.2. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir memiliki tren capaian yang meningkat. Capaian Angka Harapan Hidup masyarakat Banyuwangi pada tahun 2016 adalah sebesar 70,11, angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 sebesar 70,65. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan untuk masyarakat mulai dari dalam kandungan hingga lanjut usia, antara lain Laskar Sakina, Lahir Procot Pulang Bawa Akta, Pemberian Makan Tambahan, Rantang Kasih, dan sebagainya. Dari capaian peningkatan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi diprediksi akan berpengaruh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Sehingga diperlukan intervensi pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.



**Gambar 2.22 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2021



**Gambar 2.23 Angka Harapan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dalam grafik diatas dapat diketahui bahwa Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banyuwangi berada dibawah rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2020 data mengenai Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur kosong, hal tersebut dikarenakan BPS Provinsi Jawa Timur belum merilis data terbaru.

### 2.2.2.3.3. Angka Kematian Ibu

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh.



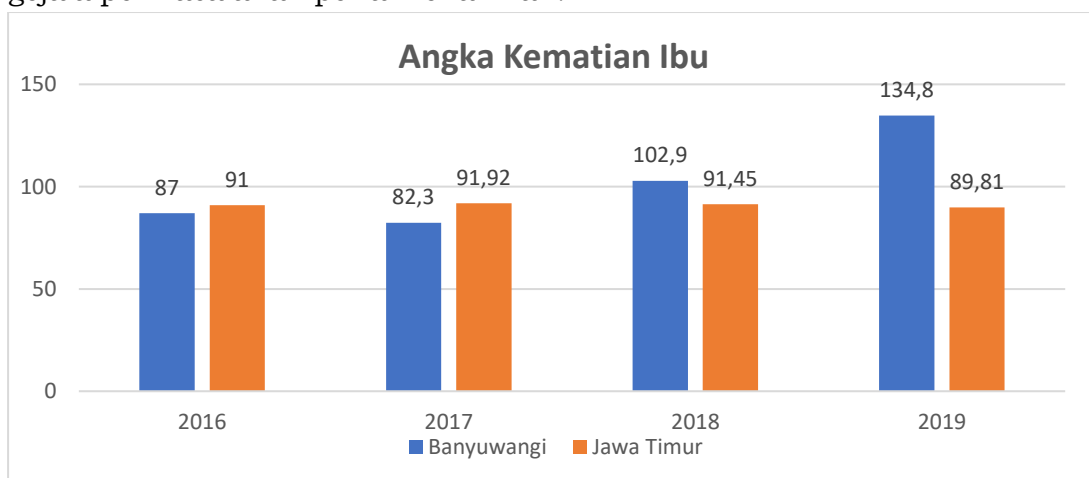
**Gambar 2.24 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2021

Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki tren menurun dengan capaian tahun 2015 sebesar 96.2 atau sebanyak 97 jiwa. Pada tahun 2016 menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 87 atau sebanyak 87 jiwa. Pada tahun 2017 masih mengalami penurunan capaian menjadi 82.3 atau sebanyak 83 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2018 terlihat adanya peningkatan capaian hingga menjadi 102.9 atau sebanyak 103 jiwa. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2019 angka capaian menjadi 134.8 atau sebanyak 135 jiwa.

Berbeda dari tahun sebelumnya, angka kematian ibu pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 113,0 atau sebanyak 113 jiwa. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyuwangi, AKI Jawa Timur memiliki capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Angka kematian ibu tertinggi Jawa Timur terjadi pada tahun 2017 yang meningkat hingga mencapai angka

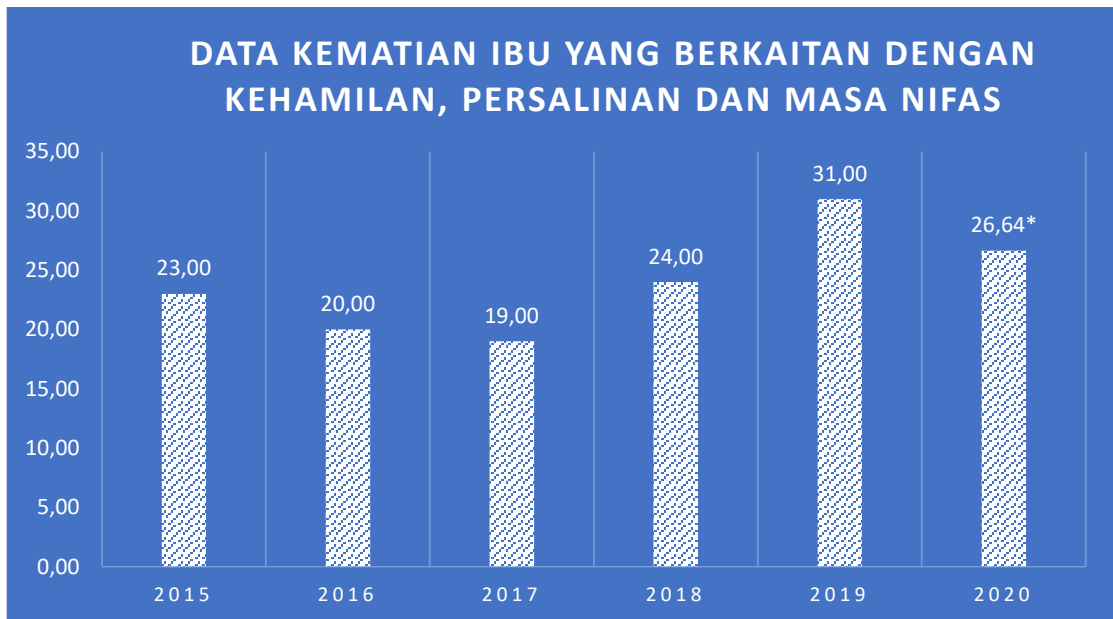
91.92 atau sebanyak 92 jiwa dan terus menurun pada tahun berikutnya hingga pada tahun 2019 mencapai angka 89.91 atau sebanyak 90 jiwa. Sementara itu AKI Kabupaten Banyuwangi justru mengalami peningkatan hingga mencapai 134.8 atau sebanyak 135 jiwa pada tahun 2019, yang mana pada tahun yang sama Jawa Timur memiliki capaian 89.81 atau sebanyak 90 jiwa. Peningkatan tren angka kematian ibu di Kabupaten Banyuwangi terjadi karena berbagai faktor diantaranya peningkatan trend kenaikan kematian ibu dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas, factor lainnya yaitu batas risiko normal menjadi abnormal sangat tipis sehingga kejadian abnormal yang menimbulkan kematian kadang terjadi sangat cepat, kadang kala kematian tidak dapat dicegah. Selain itu juga dipengaruhi oleh masih rendahnya pengetahuan ibu hamil dan juga keluarga ibu hamil mengenai gejala permasalahan perial kehamilan.



**Gambar 2.25 Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2020

Sama seperti Angka Kematian Ibu, data kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang negatif dengan adanya peningkatan angka capaian pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2015 tercatat sebesar 23 atau sebesar 23 jiwa. Kemudian pada tahun 2016 menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 20 atau sebanyak 20 jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2017 capaian menjadi 19 atau sebanyak 19 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2018 tercatat adanya peningkatan capaian hingga menjadi 24 atau sebanyak 24 jiwa dan peningkatan terus terjadi hingga pada tahun 2019 menjadi 31 atau sebanyak 31 jiwa. Pada tahun 2020 diproyeksikan kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 26.64 atau sebanyak 27 jiwa.

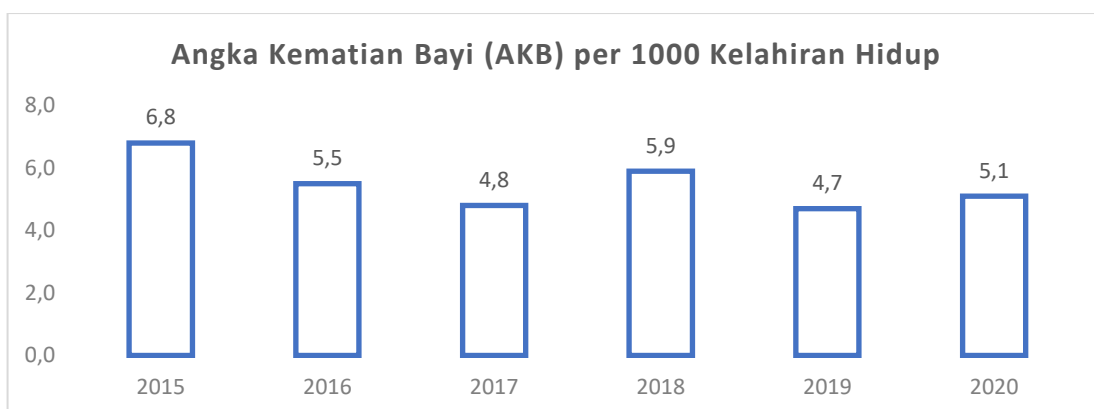


**Gambar 2.26 Data kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas di Kabupaten Banyuwangi 2015-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2021

#### 2.2.2.3.4. Angka Kematian Bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Realisasi capaian AKB dari tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki capaian yang cukup baik dengan tren menurun. Pada tahun 2015 terdapat 6.8 atau sebanyak 7 kematian bayi pada 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga mencapai 4.7 atau 5 kematian bayi setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka kematian bayi mengalami kenaikan menjadi 5.1 atau 6 kematian bayi pada 1000 kelahiran hidup. Meningkatnya tingkat kematian balita per 1000 kelahiran merupakan salah satu penyebab dari naiknya angka kematian bayi pada 1000 kelahiran, penyebab lainnya adalah batas risiko normal menjadi abnormal sangat tipis sehingga kejadian abnormal yang menimbulkan kematian kadang terjadi sangat cepat, kadang kala kematian tidak dapat dicegah. Jika dibandingkan dengan angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi masih berada di atas nilai tersebut. Capaian AKB secara lebih lengkap dari tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2.27 Angka Kematian Bayi 2015-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

### 2.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib

##### 2.3.1.1. Urusan Wajib Layanan Dasar

###### 2.3.1.1.1. Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu dari urusan wajib yang masuk dalam pelayanan dasar. Artinya adalah wajib diselenggarakan oleh seluruh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Sedangkan pelayanan dasar yang dimaksud adalah urusan pendidikan merupakan pelayanan dasar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Sejalan dengan penyelenggaraan urusan tersebut di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, khususnya pada periode pemerintahan 2016-2021 penyelenggaraan urusan pendidikan mendukung misi pertama yakni “*Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya*”. Berikut merupakan capaian penyelenggaraan urusan pendidikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

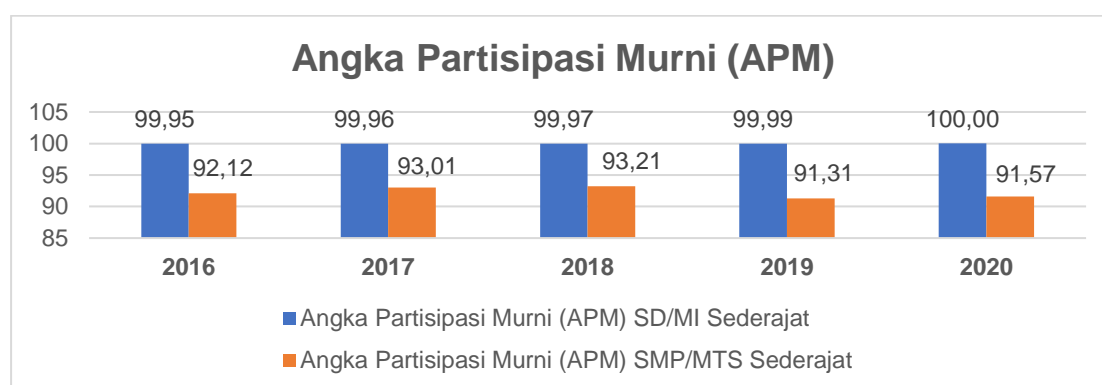
**Tabel 2. 14 Capaian indikator urusan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi**

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>						
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat	%	99.95	99.96	99.97	99.99	100.00
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Sederajat	%	92.12	93.01	93.21	91.31	91.57
<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SD/MI Sederajat	%	103.63	106.57	105.44	109.47	104.45
SMP/MTS Sederajat	%	103.8	106.57	103.33	102.81	102.04
SMA/SMK/MA Sederajat	%	104.97	107.15	104.64	105.24	110.24
<b>Akreditasi Sekolah Minimal B</b>						
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	91.21	96.71	97.68	97.68	100

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	79.65	80	85.56	87.03	87.38
<b>Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik</b>	<b>%</b>	<b>47.06</b>	<b>45.01</b>	<b>46.80</b>	<b>54.62</b>	<b>57.60</b>
TK	%	35.44	32.62	40.08	40.37	42.47
SD/MI Sederajat	%	48.73	45.85	45.92	58.03	62.01
SMP/MTS Sederajat	%	54.09	52.54	53.75	58.27	59.80
<b>Angka Putus Sekolah</b>						
SD/MI Sederajat	%	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
SMP/MTS Sederajat	%	0.25	0.22	0.17	0.17	0.15
SMA/SMK/MA Sederajat	%			0.269	0.389	
<b>Angka Melanjutkan Sekolah</b>						
SD/MI Sederajat	%	102.42	107.13	104.25	115.83	120.86
SMP/MTS Sederajat	%	99.06	97.45	100.62	126.78	138.45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2021

Salah satu representasi dari kinerja urusan pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) masing-masing jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sehingga APM pada suatu daerah dapat merepresentasikan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.



**Gambar 2.28 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

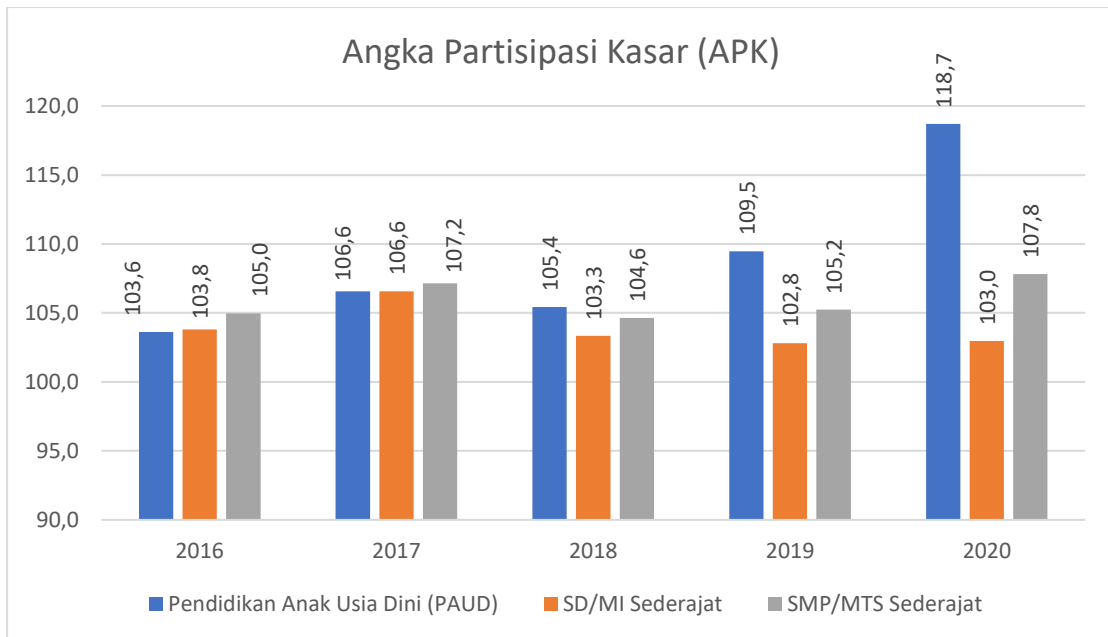
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2021

Grafik di atas menggambarkan capaian APM SD/MI sederajat dan APM SMP/MTS sederajat di Kabupaten Banyuwangi. Merujuk definisi APM pada paragraf sebelumnya, kondisi ideal APM di sebuah daerah direpresentasikan dengan capaian 100% APM di setiap jenjang. Capaian 100% pada APM merepresentasikan penduduk di sebuah daerah dapat bersekolah tepat

waktu, tidak ada yang tertinggal kelas, maupun terlalu atau terlalu muda sesuai jenjang seharusnya. Capaian grafik di atas menunjukkan bahwa capaian APM SD/MI sederajat secara progresif meningkat dari tahun 2016 yang sudah mencapai 99,95% dengan jumlah 151.102 jumlah penduduk umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/sederajat dari total jumlah penduduk umur 7-12 tahun mencapai 151.178. Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2016 siswa SD/MI sederajat yang di luar usianya sejumlah 76 siswa. Hingga tahun 2020 capaian APM SD/MI sederajat mencapai 100% yang artinya seluruh penduduk usia 7-12 tahun telah bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

Berbeda dengan capaian APM SD/MI sederajat, capaian APM SMP/MTS sederajat justru mengalami fluktuasi. Meningkat cukup progresif dari tahun 2016 yang mencapai 92.12% hingga pada tahun 2018 mencapai 93.21% namun justru mengalami penurunan pada tahun 2019 mencapai 91.31%. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 7.88% atau 5.822 penduduk umur 13-15 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMP/MTS sederajat. Angka tersebut terus ditekan hingga tahun 2018 yang mencapai 6.79% atau 4.929 penduduk umur 13-15 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMP/MTS sederajat. Namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 8.69% atau 6.299 penduduk umur 13-15 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMP/MTS sederajat, penurunan ini bisa terjadi karena masih rendahnya akses Pendidikan menengah sebagai kelanjutan program wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tipis yang mana APM meningkat menjadi 91.57% atau meningkat 0.26% dari tahun sebelumnya.

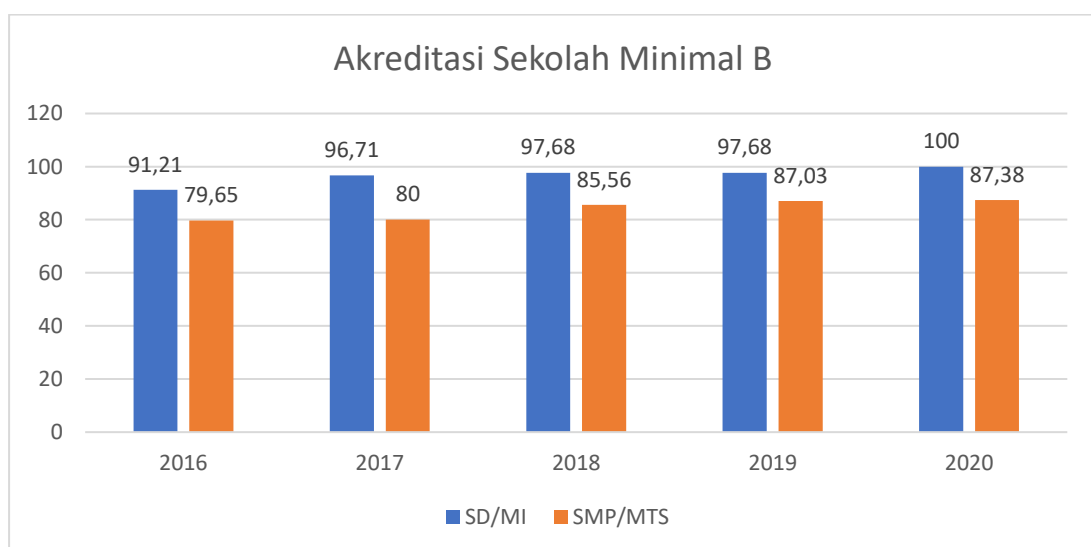
Indikator selanjutnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) masing-masing jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. APK merepresentasikan jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sehingga nilai APK dapat menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Berikut merupakan capaian APK Kabupaten Banyuwangi masing-masing jenjang



**Gambar 2.29 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada masing-masing jenjang APK Kabupaten Banyuwangi berada diangka 100% lebih. Artinya adalah jumlah penduduk yang sekolah pada jenjang tersebut melebihi jumlah penduduk usia tertentu pada jenjang tersebut. Keadaan tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa poin seperti adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Walaupun APK berada diangka 100% lebih, namun belum semua penduduk memperoleh layanan akses dan mutu pendidikan anak usia dini serta masih rendahnya mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

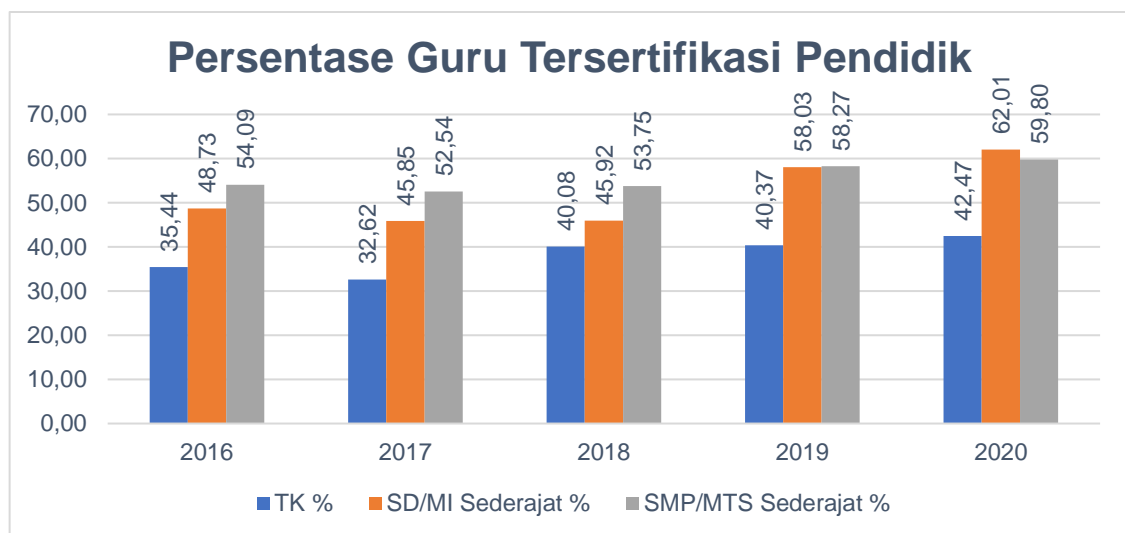


**Gambar 2.30 Akreditasi sekolah minimal B di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Akreditasi sekolah di Kabupaten Banyuwangi minimal B setiap tahun meningkat secara progresif, baik pada jenjang SD/MI sederajat maupun pada jenjang SMP/MTs sederajat. Untuk jenjang SD/MI sederajat meningkat lumayan pesat pada tahun 2017 yang mencapai 96.71% dari tahun 2016 yang hanya mencapai 91.21%. Kemudian secara stabil meningkat dan pada tahun 2020 telah mencapai 100% yang mana sekolah di Kabupaten Banyuwangi pada jenjang SD/MI sederajat telah memiliki akreditasi A dan B. Sedangkan untuk akreditasi pada jenjang SMP/MTs sederajat persentase sekolah dengan akreditasi minimal B terhadap total jumlah sekolah berada diangka 79.65% atau mencapai 137 dari total 172 SMP/MTs sederajat di Kabupaten Banyuwangi. Capaian tersebut meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 meningkat pesat mencapai 87,39%. Peningkatan pesat terjadi pada tahun 2018 yang mana meningkat 5.56% poin jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang masih mencapai 80%. Walaupun akreditasi sekolah minimal B cenderung mengalami peningkatan, namun masih terdapat Lembaga baru yang belum terakreditasi ataupun terakreditasi B

Indikator selanjutnya yang fokus sebagai representasi dari pembangunan kualitas pendidikan adalah Persentase guru tersertifikasi pendidik. Tenaga pengajar atau guru merupakan aktor utama dalam pembangunan pendidikan di daerah. Sertifikasi guru menunjukkan bahwa guru tersebut dapat memperoleh standar minimum kemampuan. Sehingga semakin tingginya guru tersertifikasi di daerah sekaligus juga dapat menunjukkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berikut merupakan persentase guru tersertifikasi di Kabupaten Banyuwangi per masing-masing jenjang pendidikan.



**Gambar 2.31 Persentase guru tersertifikasi pendidik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

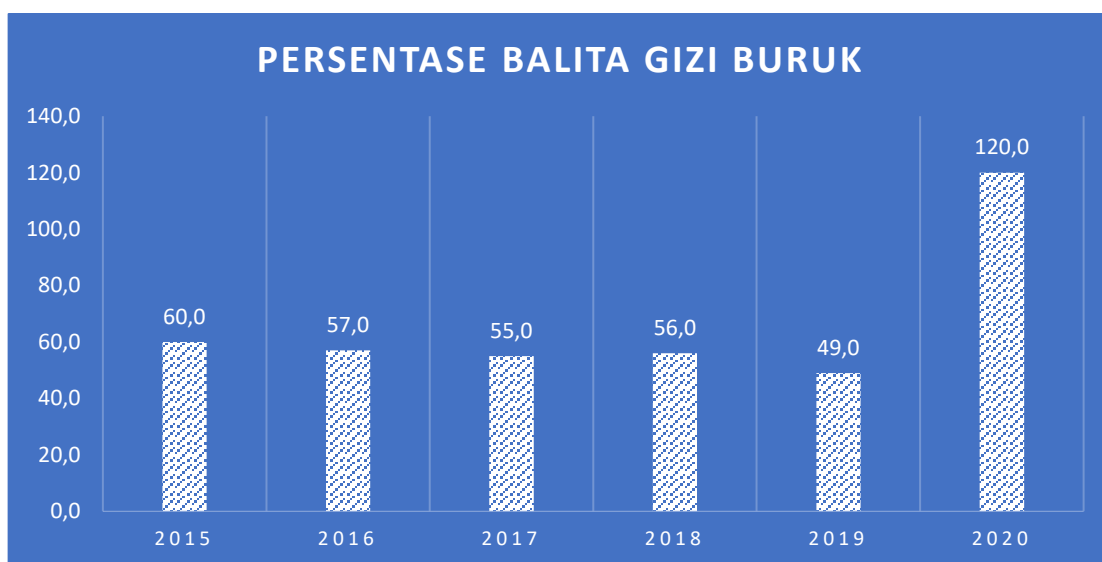
Grafik di atas menunjukkan secara keseluruhan pada setiap jenjang pendidikan memiliki pola yang sama. Menurun pada tahun 2017 kemudian meningkat progresif hingga tahun 2020. Secara umum guru SMP/MTs sederajat merupakan jenjang dengan persentase guru tersertifikasi pendidik

tertinggi dari pada jenjang yang lain. Pada jenjang tersebut pada tahun 2016 guru yang bersertifikat mencapai 54.09%, turun pada tahun 2017 menjadi 52.54% kemudian meningkat progresif hingga tahun 2020 mencapai 59.8%. Sedangkan jenjang pendidikan dengan persentase guru tersertifikasi paling rendah merupakan pada jenjang TK yang hanya mencapai 35.44% pada tahun 2016, turun 32.62% pada tahun 2017, kemudian progresif hingga tahun 2020 mencapai 42.47%. Meskipun pada prinsipnya penyelenggaraan sertifikasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan bantuan tim asesor terkait, namun pengembangan kompetensi hingga guru tersebut layak untuk memiliki sertifikat pendidik merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

### 2.3.1.1.2. Kesehatan

#### 2.3.1.1.2.1. Persentase Gizi Buruk

Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir memiliki tren capaian menurun, meskipun sempat meningkat pada tahun 2018 hingga pada angka 0.56 akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya Persentase gizi buruk di Banyuwangi dapat semakin menurun. Hal ini merupakan capaian yang baik hingga dapat menyentuh angka 0.49 di tahun 2019. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 persentase balita gizi buruk mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 1.2, keadaan ini berpengaruh pada masih tingginya angka kematian bayi. Sehingga perlu ditangani secara cepat dan tepat.

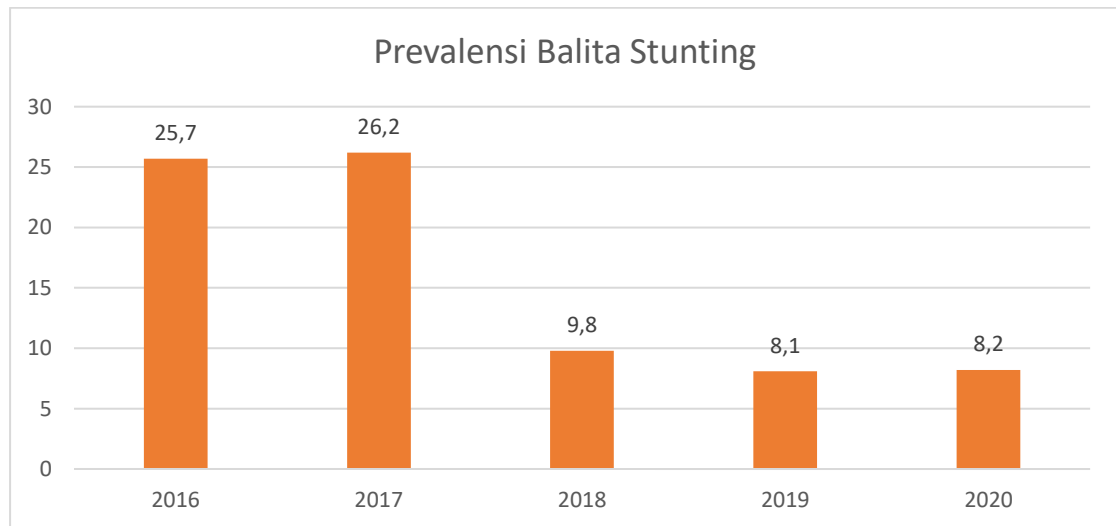


**Gambar 2.32 Prevalensi Balita gizi kurang di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

### 2.3.1.1.2.2. Stunting

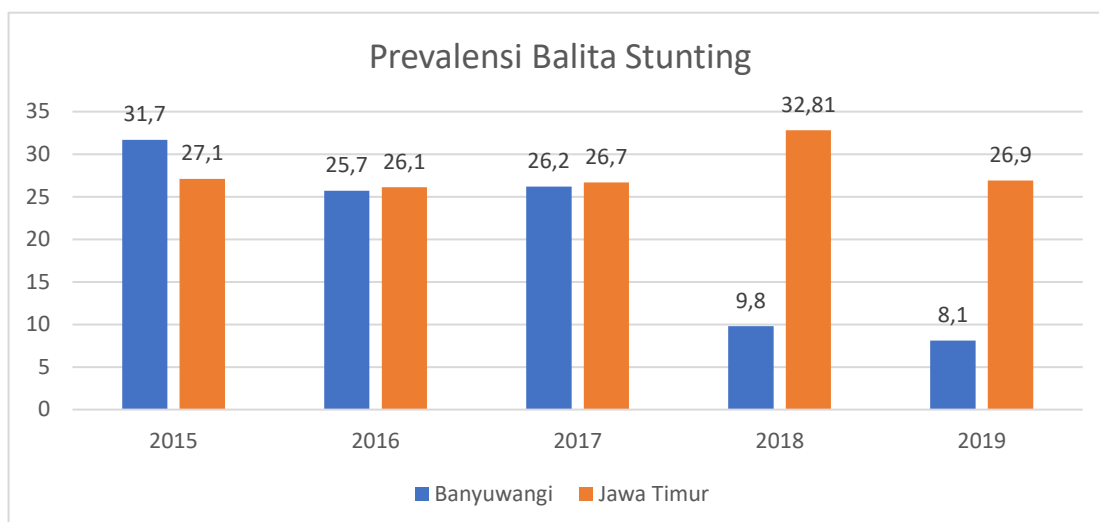
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun;



**Gambar 2.33 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren menurun jika dibandingkan Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan stunting terbesar di Kabupaten Banyuwangi terjadi pada tahun 2018 yang menurun sebanyak 16.4 jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai angka 26.2, hal ini berbanding terbalik dengan angka stunting Jawa Timur yang mengalami kenaikan menjadi 32.81 di tahun 2018 dari yang sebelumnya mencapai angka 26.7. Pada tahun 2019 prevalensi stunting di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan menjadi 8.1 dan Jawa Timur menjadi 26.9. Pada tahun 2020 prevalensi balita stunting di Banyuwangi mengalami sedikit peningkatan menjadi 8.2, peningkatan ini bisa terjadi karena masih adanya balita yang berstatus gizinya, pendek dan sangat pendek selain itu juga karena masih rendahnya pengetahuan ibu balita terhadap peningkatan gizi balitanya.



**Gambar 2.34 Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur Tahun 2015-2019**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

Upaya konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif dengan strategi pendekatan :

1. Kemandirian Keluarga;
2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
3. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan;
4. Posyandu;
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Implementasi dari strategi pendekatan tersebut di atas diwujudkan dalam program dan kegiatan berupa :

1. Pemantauan dan pendampingan gizi kepada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil dan menyusui serta bayi baru lahir dan balita, berupa kegiatan pemberian tablet tambah darah, vitamin, PMT, MP-ASI, pencegahan kecacingan bagi ibu hamil, kelas ibu hamil serta pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR);
2. Optimalisasi kegiatan posyandu/taman posyandu, germas, gerakan seribu hari pertama kehidupan dan PHBS, bersinergi dengan pemerintah desa/kelurahan dalam dukungan operasionalnya;
3. Penyelenggaraan kelas parenting tentang pola pengasuhan anak, peningkatan kualitas PAUD dan pembinaan UKS;
4. Optimalisasi layanan penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
5. Pengembangan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
6. Penataan kawasan kumuh, rumah layak huni, akses air bersih serta sanitasi perdesaan padat karya;
7. Pengelolaan persampahan;
8. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Upaya-upaya tersebut diatas telah dituangkan dalam landasan regulasi pelaksanaan konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Banyuwangi meliputi :

1. Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
2. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi
4. Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
5. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 68 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi;
7. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/12/KEP/429.011/2021 tentang Tim Percepatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi;
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/57/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Desa Prioritas Percepatan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.

### **2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **2.3.1.1.3.1. Status dan Panjang jalan**

Jalan di Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa kategori status kepemilikan, diantaranya adalah Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten. Jalan Nasional di kabupaten selama lima tahun memiliki panjang yang stagnan yaitu diangka 122.97 Km, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No : 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.15: Ruas Jalan Nasional Menurut Statusnya**

No.	No. Ruas			Nama Ruas	Panjang (Km)
1	026			Bajulmati (Bts.Kabupaten. Situbondo) – Ketapang	26,36
2	074			Bts. Kabupaten. Jember - Genteng Kulon	30,02
3	075			Genteng Kulon - Jajag - Benculuk	16,1
4	076			Benculuk – Rogojampi	17,01
5	077			Rogojampi - Bts. Kota Banyuwangi	10,23
6	077	11	K	Jln. S. Parman (Banyuwangi)	1,49
7	077	12	K	Jln. Adi Sucipto (Banyuwangi)	1,4
8	077	13	K	Jln. A. Yani (Banyuwangi)	1,31
9	077	14	K	Jln. Pb. Sudirman (Banyuwangi)	1,19
10	078	11	K	Jln. Basuki Rakhmat (Banyuwangi)	1,54
11	078	12	K	Jln. Yos Sudarso (Banyuwangi)	2,82
12	078	13	K	Jln. Gatot Subroto (Banyuwangi)	3,5
13	106			Srono – Muncar	10
<b>Total</b>					<b>122,97</b>

Sumber: Dinas PU. Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2021

**Tabel 2.16: Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Banyuwangi**

Kategori Jalan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Jalan Nasional</b>	Km	122,97	122,97	122,97	122,97	122,97
<b>Jalan Provinsi</b>	Km	89,41	91,07	91,07	91,07	91,07
<b>Jalan Kabupaten</b>	Km	2.771	2.771,25	2.771,25	2.771,25	2.771,25

Sumber: Dinas PU. Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2021

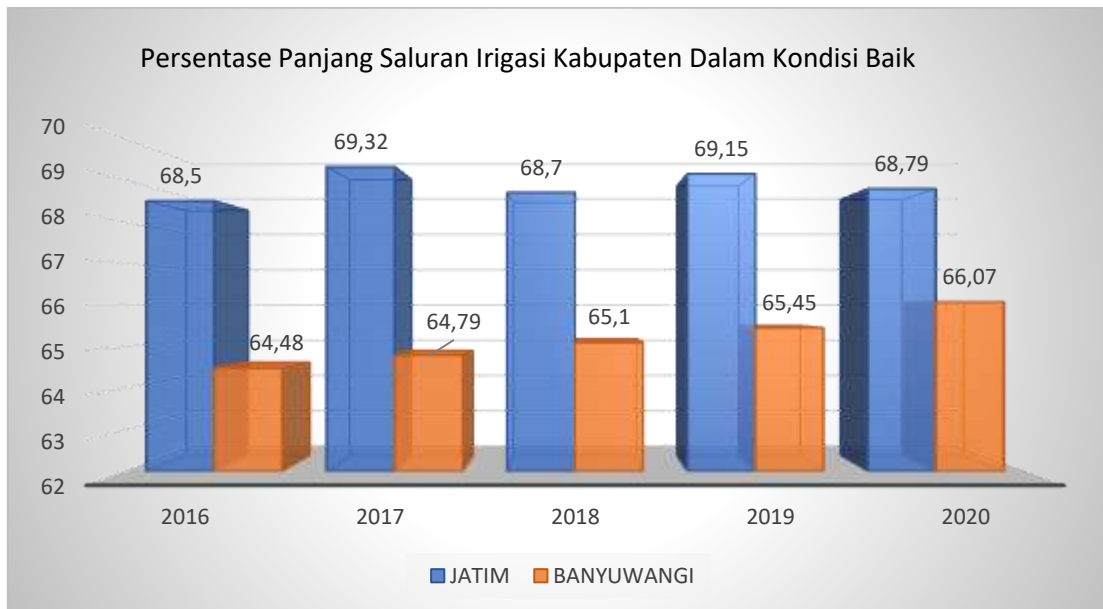
Berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur No : 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan. Jalan Provinsi juga memiliki panjang jalan yang stagnan dari tahun 2017-2020 sepanjang 91.07 km.

Panjang jalan Kabupaten menurut SK Bupati Banyuwangi No: 258 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, selama 5 tahun stagnan dengan penambahan pada tahun 2017 yang sebelumnya sepanjang 2.771 Km pada tahun 2016 menjadi 2.771,25 Km pada tahun 2017, dan terus stagnan hingga tahun 2020.

### 2.3.1.1.3.2. Persentase Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik

Persentase Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Timur memiliki capaian yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Capaian paling rendah terjadi pada tahun 2016 yang mencapai angka 68,5 dan capaian tertinggi pada saat tahun 2019 yaitu sebesar 69,32. Persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Banyuwangi dari

tahun 2016-2020 kondisi irigasi baik dan teknis mengalami peningkatan pada tiap tahun dikarenakan setiap tahunnya Dinas PU Pengairan berusaha meningkatkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, untuk mencukupi kebutuhan air irigasi dalam mencukupi ketersediaan kebutuhan air untuk pertanian.

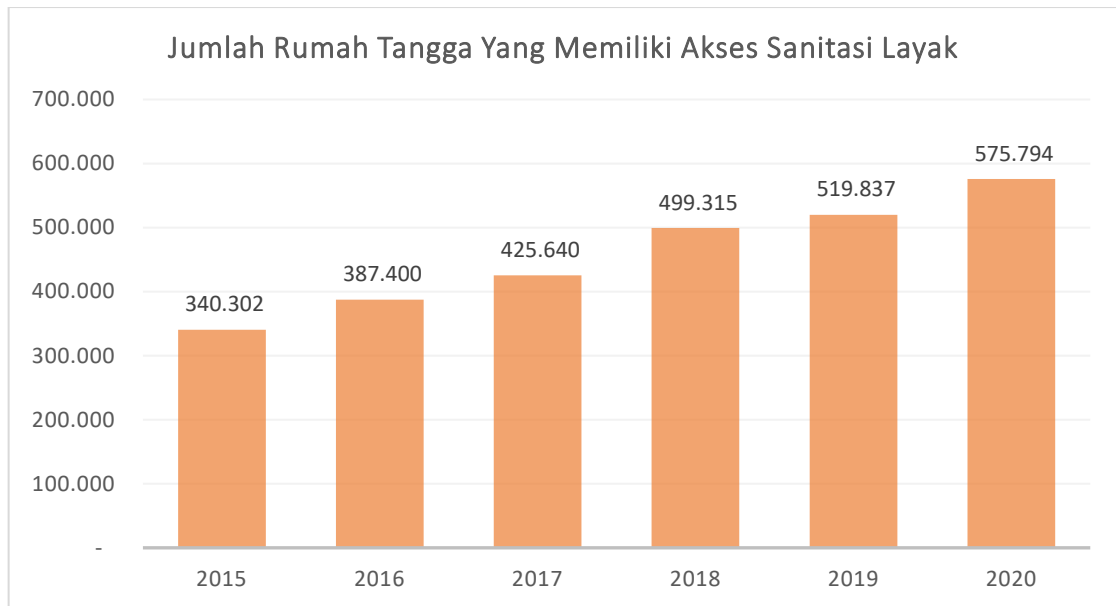


**Gambar 2.35 Persentase Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi 2021

#### **2.3.1.1.3.3. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak**

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

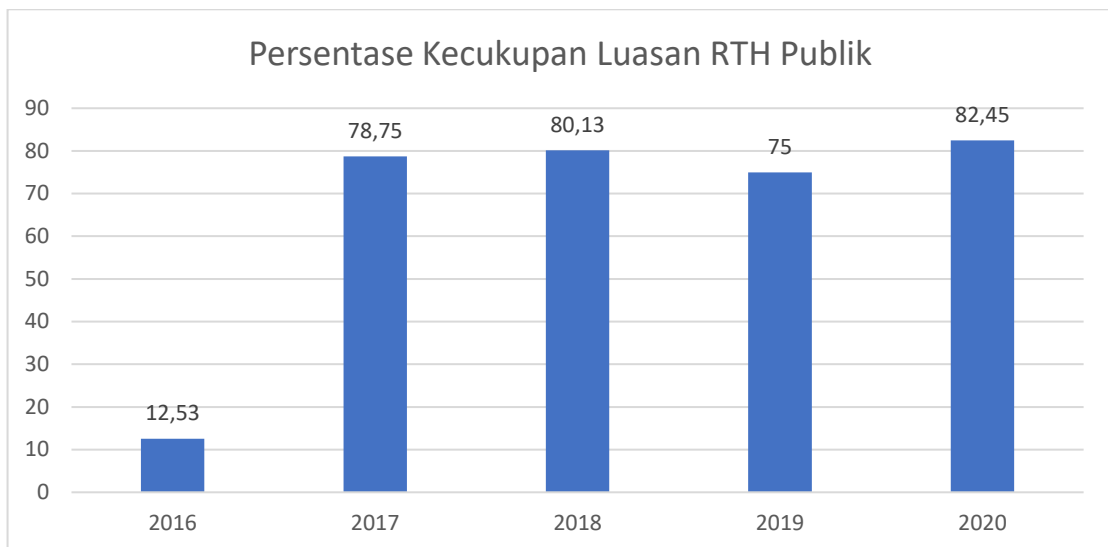


**Gambar 2.36 Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2021

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu beberapa tahun memiliki tren capaian yang positif dengan adanya peningkatan capaian pada setiap tahunnya. Dengan posisi awal ditahun 2015 sejumlah 340.302 rumah tangga, kemudian meningkat menjadi 387.400 rumah tangga ditahun 2016. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2017 menyentuh angka 425.640 dan kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 499.315. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih meningkat hingga 519.873 rumah tangga. Dengan adanya tren capaian meningkat tersebut maka dapat diproyeksikan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak akan meningkat menjadi 575.794 rumah tangga pada tahun 2020. Walaupun memiliki tren capaian yang positif, namun masih ada sebanyak 5,61% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. Sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga semakin lama kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga yang sehat dengan sanitasi yang layak maka akan semakin meningkat akses terhadap sanitasi yang layak. Hingga saat ini, di Kabupaten Banyuwangi masih belum ada kelurahan/desa yang telah memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

#### 2.3.1.1.3.4. Cakupan Luasan RTH Publik



**Gambar 2.37 Cakupan Luasan RTH Publik Tahun di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

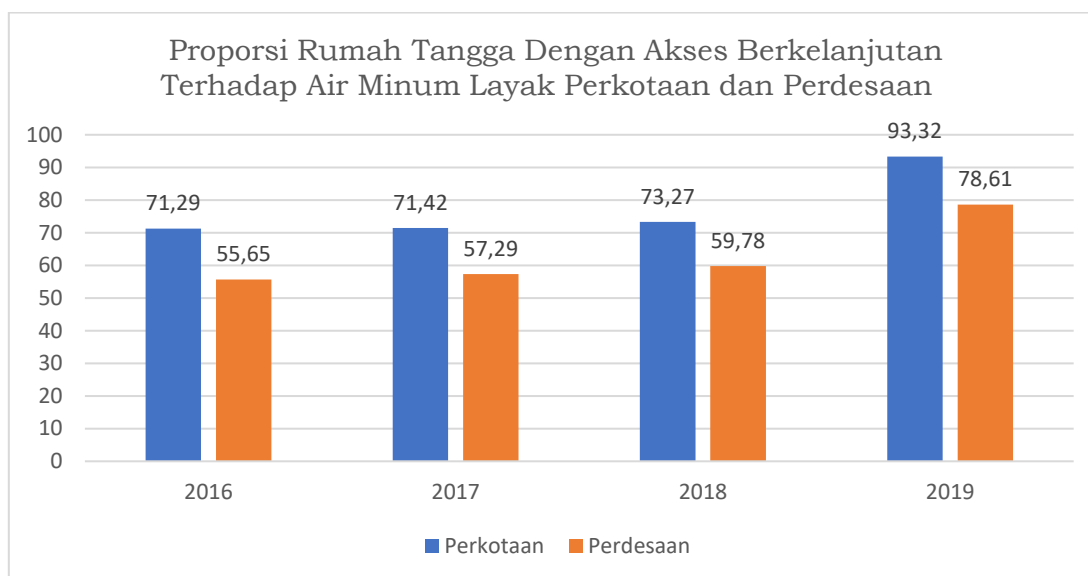
Sumber: Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi 2021

Luasan RTH publik pada tahun 2016 memiliki capaian 12.53% dan mengalami peningkatan yang drastis hingga mencapai 78.75% di tahun 2017. Pada tahun 2018 cakupan luasan RTH publik mengalami peningkatan hingga mencapai 80.13, namun di tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 75 dan Kembali meningkat menjadi 82.45 di tahun 2020. peningkatan ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadakan lomba pengelolaan RTH yang mendorong pemerintah desa untuk memaksimalkan pengelolaan RTH. Dari data di atas dapat diketahui bahwa persentase luasan RTH publik di Kabupaten Banyuwangi bersifat fluktuatif dan berubah-ubah sehingga diperlukan penambahan kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pengendalian ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan penindakan tegas bagi pelanggaran ijin tata bangunan dan lingkungan.

#### 2.3.1.1.3.5 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan

Air minum merupakan suatu kebutuhan bagi manusia untuk terus dapat bertahan hidup, oleh karena itu air minum yang layak sangat dibutuhkan agar manusia memperoleh kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga

dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya



**Gambar 2.38 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019**

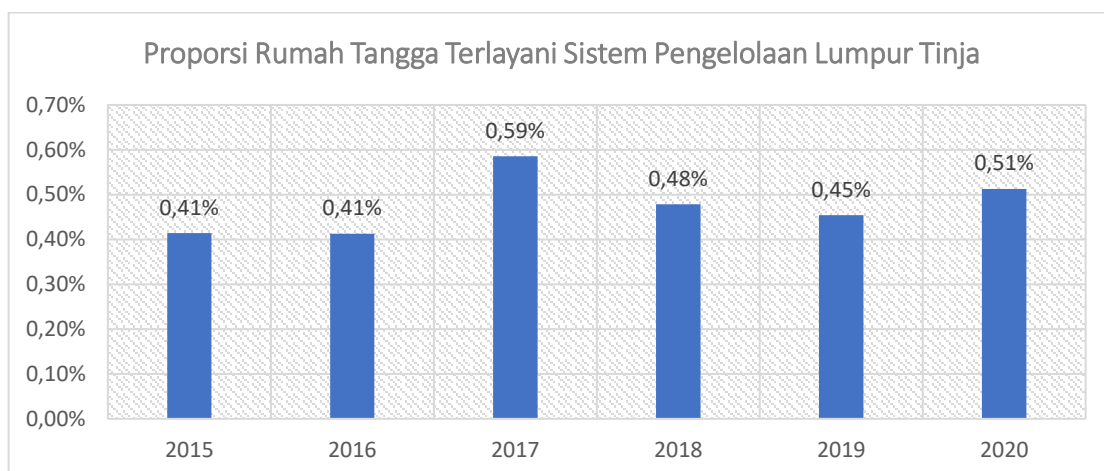
Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan di Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun terakhir memiliki capaian yang lebih tinggi daripada di pedesaan, walaupun sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di perkotaan akses terhadap air minum layak pada tahun 2016 memiliki capaian sebesar 71.29 sedangkan di pedesaan 55.65, pada tahun 2017 di perkotaan naik menjadi 71.42 dan di pedesaan mencapai 57.29. pada tahun 2018 akses air minum layak di perkotaan Kembali meningkat menjadi 73.27 dan di pedesaan meningkat menjadi 59.78, pada tahun 2019 di perkotaan meningkat menjadi 93.32 dan di pedesaan mencapai 78.61. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah sehingga harus dioptimalkan terutama dalam daerah pedesaan.

#### **2.3.1.1.3.5. Proporsi Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja**

Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terlihat memiliki tren capaian yang positif. Berdasarkan data yang tersaji dalam grafik di bawah maka dapat terlihat secara keseluruhan masih sedikit rumah tangga di Banyuwangi yang telah terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja yaitu <1%. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2017 di mana lebih dari 0.5% rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi telah terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Meskipun secara jumlah angka masih sangat sedikit tetapi sudah ada

peningkatan pada setiap tahunnya. Sehingga dengan tren capaian yang positif tersebut, pada tahun 2020 diproyeksikan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan tinja akan meningkat menjadi 0.51%.



**Gambar 2.39 Proporsi Rumah Tangga Terlayani Sistem Pengolahan Lumpur Tinja di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

#### **2.3.1.1.3.7 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**

Capaian untuk Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yaitu 86,4 %, dari target capaian 100 %. Realisasi capaian indikator tidak memenuhi target dikarenakan pada tahun 2020 ada sub kegiatan yang gagal dilaksanakan karena masalah sosial. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas PU Pengairan melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat sekitar, betapa pentingnya manfaat sarana dan prasarana air bersih.

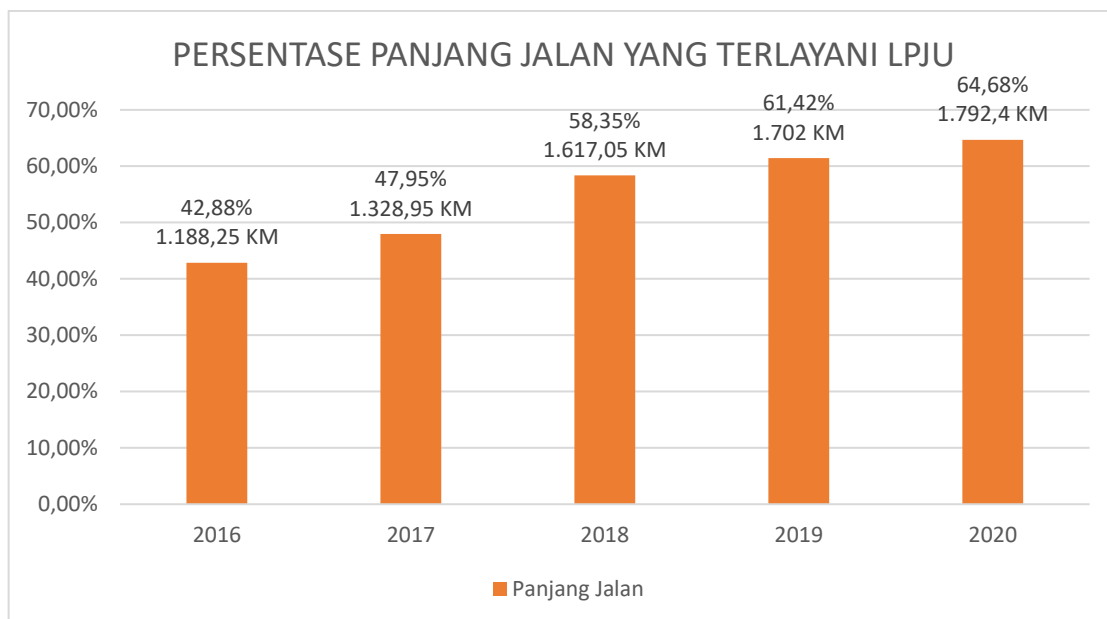
#### **2.3.1.1.3.8 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**

Capaian untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yaitu 92,1 %, dari target capaian 100 %. Permasalahan terhadap pelayanan pengolahan air limbah domestik secara ekstern, sebagian besar masyarakat bantaran sungai kurang peduli terhadap kebersihan sungai sedangkan permasalahan secara intern adalah susah mencari lahan/tempat yang akan dibangun IPAL Multiple Lateryn karena kepemilikannya tidak jelas.

#### **2.3.1.1.3.9 Persentase Panjang Jalan yang Terlayani LPJU**

Persentase panjang jalan yang terlayani LPJU di Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian yang meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Peningkatan capaian paling rendah terjadi pada tahun 2019 yang hanya mencapai 84,95 km atau 3,07 %, sedangkan capaian peningkatan tertinggi pada saat tahun 2018, yaitu sepanjang 288,1 km atau 10,4 %. Persentase panjang jalan yang terlayani LPJU di Kabupaten Banyuwangi selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya dikarenakan Pemerintah

Daerah Kabupaten Banyuwangi berusaha untuk mencukupi ketersediaan kebutuhan LPJU di Kabupaten Banyuwangi.



**Gambar 2. 40 Persentase Panjang Jalan yang Terlayani LPJU Tahun 2016-2020**

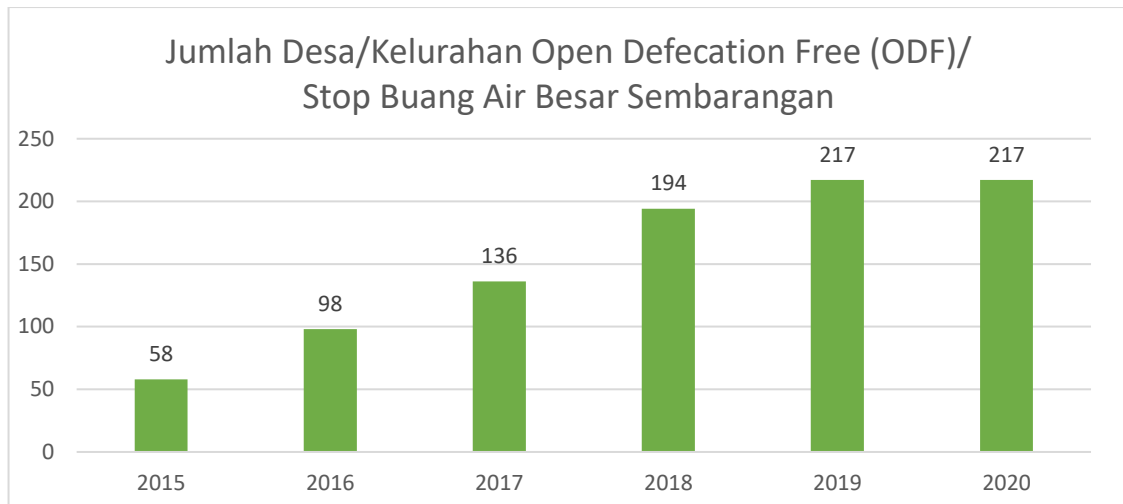
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang infrastruktur, maka dalam periode RPJMD kedepan, akan dilakukan penghitungan indikator baru pada urusan pekerjaan umum yaitu Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI). IKLI merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kualitas atas pembangunan infrastruktur. Penghitungan indeks ini dilakukan dengan metode survei secara langsung kepada masyarakat pengguna layanan infrastruktur.

#### 2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### 2.3.1.1.4.1. Jumlah desa/kelurahan Open Defecation Free (ODF).

Jumlah desa/kelurahan *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian meningkat yang sangat bagus. Berawal dengan sejumlah 58 desa/kelurahan yang ODF Kabupaten Banyuwangi dapat meningkat capaiannya pada setiap tahun sehingga ditahun 2019 seluruh desa/kelurahan yaitu yang berjumlah 217 desa/kelurahan telah dideklarasikan menjadi ODF. Secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



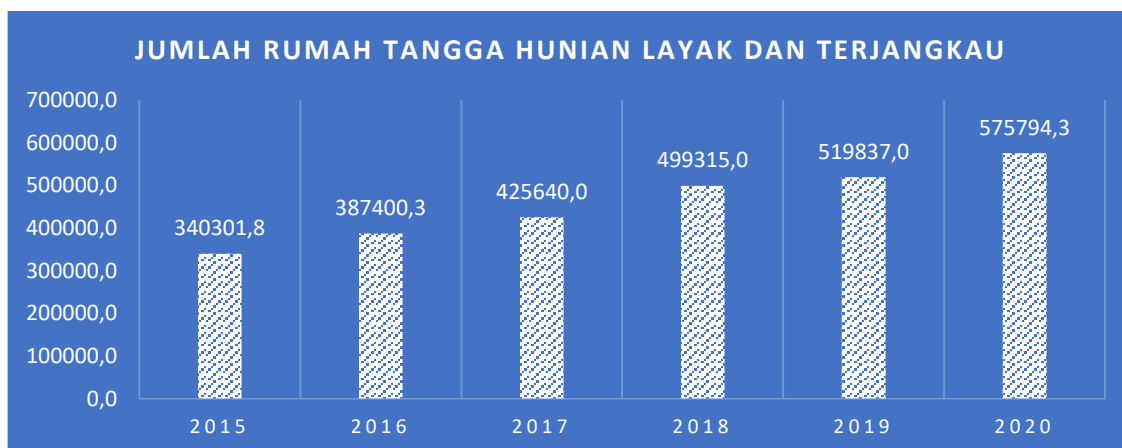
**Gambar 2.41 Jumlah Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 2021

Dalam mencapai ODF, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya dan berinovasi supaya kondisi ini dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga kedepannya Kabupaten Banyuwangi dapat dinyatakan ODF secara tingkat Kabupaten.

#### **2.3.1.1.4.2. JRTHLT: Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak Dan Terjangkau**

JRTHLT: Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang meningkat. Capaian pada tahun 2015 tercatat sebanyak 340.302. Pada tahun 2016 jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau meningkat menjadi 387.400. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2017 menjadi 425.640. Pada tahun 2018 masih terjadi peningkatan jumlah menjadi 499.315 dan terus meningkat pada tahun 2019 hingga menjadi 519.837. Oleh karena itu pada tahun 2020 dengan adanya penyediaan rumah bersubsidi yang semakin meningkat diproyeksikan jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau akan meningkat menjadi 575.794 .

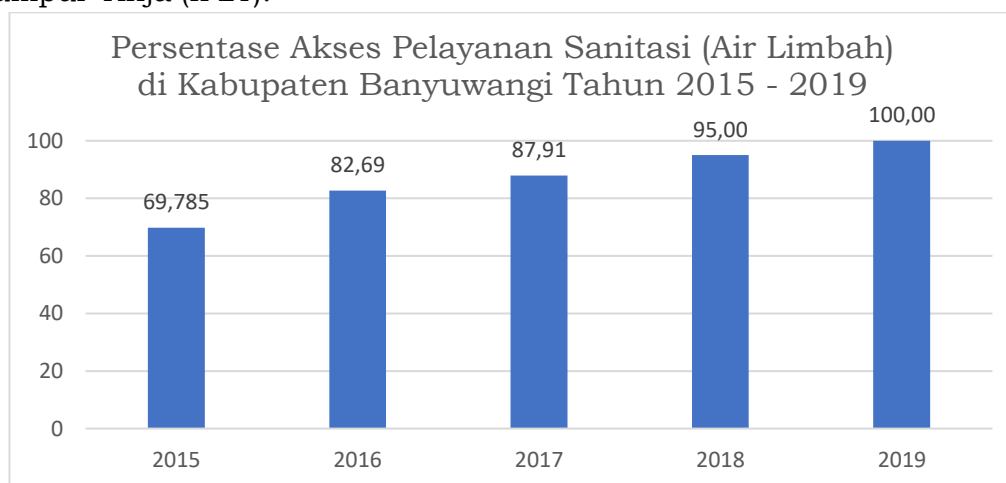


**Gambar 2.42 Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak Dan Terjangkau Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

#### 2.3.1.1.4.3. Persentase Akses Pelayanan Sanitasi (Air Limbah) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2019

Persentase akses pelayanan sanitasi (air limbah) di Kabupaten Banyuwangi terlihat memiliki tren capaian yang positif dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mencapai akses pelayanan sanitasi (air limbah) sebesar 100 %. Namun, walaupun Kabupaten Banyuwangi telah deklarasi sebagai Kabupaten Open Defecation Free (ODF), pengelolaan air limbah tetap harus ditingkatkan, karena target RPJMN 2020-2024 tidak boleh ada akses sharing, jadi kepemilikan jamban adalah 1 unit / KK, atau meningkatkan akses ke Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) komunal. Target RPJMN 2020 – 2024 juga mencanangkan capaian untuk akses aman, yang artinya air limbah harus diolah, jika berupa tanki septik individu, maka harus dikuras maksimal setiap 5 tahun, dan lumpur tinja harus dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

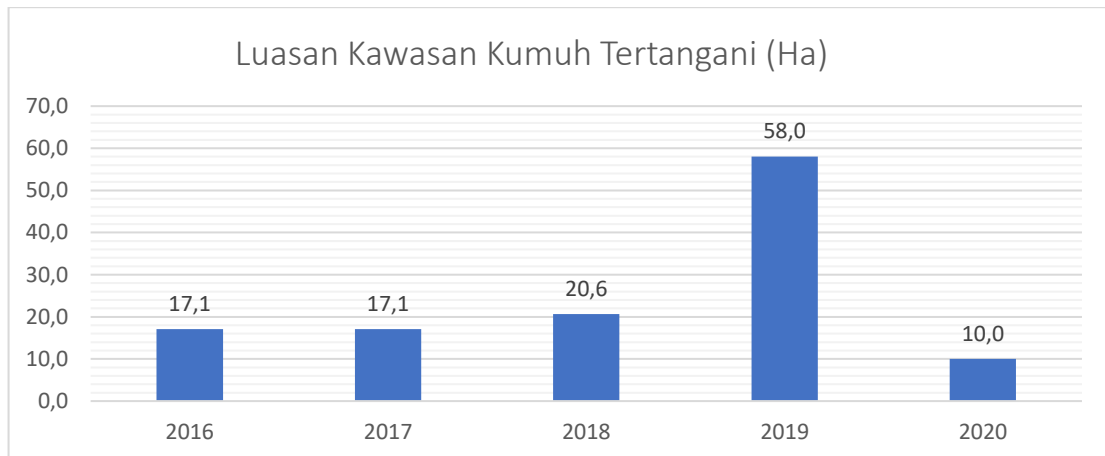


**Gambar 2.43 Persentase Akses Pelayanan Sanitasi (Air Limbah) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2019**

Sumber: Kementerian Kesehatan ([monev.stbm.kemkes.go.id](http://monev.stbm.kemkes.go.id))/monev

#### 2.3.1.1.4.4. Luasan Kawasan Kumuh Tertangani

Kondisi pemukiman kumuh di Kabupaten Banyuwangi secara umum berada pada Kawasan pesisir. Pada umumnya tingkat kepadatan bangunan dapat diklasifikasikan ke dalam kepadatan sedang dan kawasan pemukiman kumuh seluruhnya berada pada Kawasan perkotaan. Lokasi Kawasan kumuh di Kabupaten Banyuwangi tersebar di 3 kelurahan yakni Kelurahan Mandar, Kelurahan Lateng, dan Kelurahan Kepatihan yang semuanya berada di kecamatan Banyuwangi. Berikut luas Kawasan kumuh yang tertangani dalam kurun waktu 5 tahun.



**Gambar 2.44 Luasan kawasan Kumuh yang tertangani (Ha) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Tahun 2021

Luasan kawasan kumuh yang tertangani (Ha) memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2016 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 17.09. Kemudian pada tahun 2017 luasan Kawasan kumuh memiliki capaian yang masih stagnan dengan capaian sebesar 17.09 dan pada tahun 2018 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 20.63. Pada tahun 2019 masih terus mengalami peningkatan menjadi 58 dan pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 10. Menurunnya luasan Kawasan kumuh yang tertangani di Kabupaten Banyuwangi terjadi karena beberapa faktor seperti adanya 48,65% rumah tangga yang belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan, terdapat sebanyak 5,61% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, serta belum adanya kelurahan/ desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

#### 2.3.1.1.4.5. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian untuk Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yaitu 0 %, dari target capaian 100 %. Anggaran Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

pernah dianggarkan di awal tahun 2020, akan tetapi dikarenakan tidak adanya bencana sampai dengan tahun 2020, program ini diefisiensikan anggarannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk digunakan kegiatan - kegiatan Pemerintah Daerah yang lebih prioritas. Kedepannya, anggaran yang digunakan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Tidak Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/kota akan tetap dianggarkan hingga akhir tahun anggaran. Karena Program ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

#### **2.3.1.1.4.6. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian untuk Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yaitu 0 %, dari target capaian 100 %. Kedepannya, perlu adanya program/kegiatan pengantisipasi sebelum terjadi bencana, contohnya kegiatan sosialisasi pencegahan kawasan kumuh agar membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya.

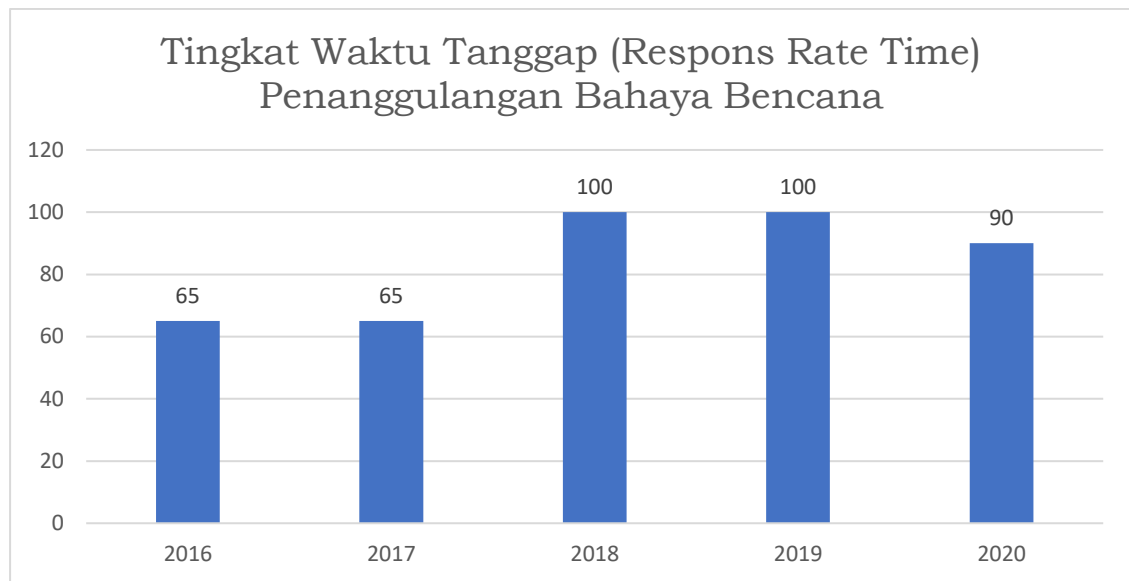
Selaras dengan urusan pekerjaan umum, pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga akan dilakukan pengukuran indeks kualitas layanan infrastruktur perumahan dan permukiman. Metode yang digunakan sama dengan urusan pekerjaan umum yaitu menggunakan metode survei.

#### **2.3.1.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

##### **2.3.1.1.5.1. Tingkat Waktu Tanggap (*Respons Rate Time*) Penanggulangan Bahaya Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang setiap saat bisa mengancam, mungkin tidak bisa dicegah, tetapi bisa diupayakan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Tingkat Waktu Tanggap (*respons rate time*) merupakan salah satu cara dalam mengupayakan penanggulangan bahaya bencana, jika waktu tanggapnya semakin cepat maka penanggulangan bahaya juga akan cepat diselesaikan. Tingkat Waktu Tanggap (*respons rate time*) Penanggulangan Bahaya Bencana di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang meningkat yang mana pada tahun 2016 dan 2017 mencapai angka 65% dan mengalami peningkatan menjadi 100% di tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 90%. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarpras damkar, dan tidak adanya dokumen mitigasi bencana

kebakaran merupakan kendala dalam penanggulangan bahaya bencana di Kabupaten Banyuwangi.

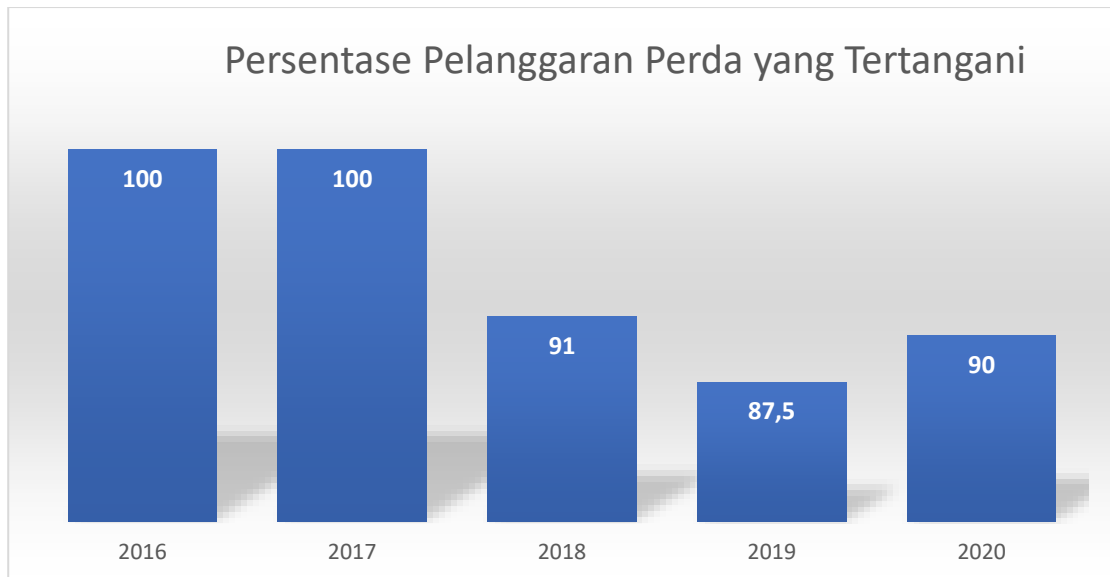


**Gambar 2.45 Tingkat Waktu Tanggap (Respons Rate Time) Penanggulangan Bahaya Bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi 2021

#### **2.3.1.1.5.2. Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani**

Penanganan terhadap pelanggaran perda sudah selayaknya ditegakkan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum yang aman dan kondusif. Pelanggaran perda yang tertangani di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 dan 2017 pelanggaran perda yang tertangani mencapai angka 100%, kemudian mengalami penurunan menjadi 91% di tahun 2018 dan Kembali menurun hingga mencapai 87.5% di tahun 2019. Walaupun selama dua tahun sebelumnya mengalami penurunan, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 90%. Adanya tren yang menurun dalam penanganan terhadap perda dikarenakan minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta masih adanya indikator pembentuk indeks rasa aman yang perlu di tingkatkan.

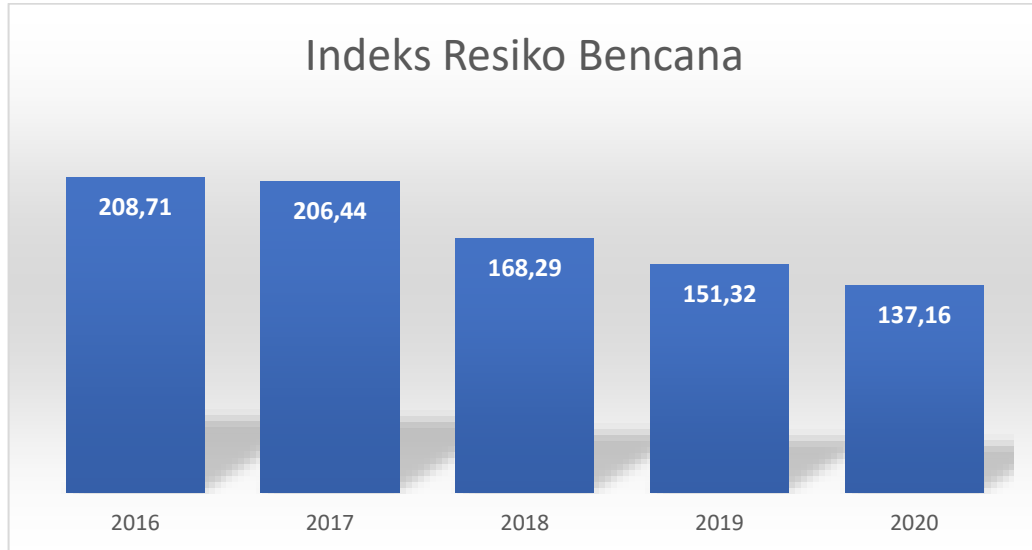


**Gambar 2.46 Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Satpol PP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Terkait dengan ketaatan terhadap peraturan daerah maupun peraturan negara terdapat indikator baru yang akan digunakan yaitu Indeks Kepatuhan Pada Peraturan Negara, indikator tersebut merupakan komposit dari indeks kesalehan sosial yang metode pengumpulan datanya menggunakan pendekatan survei. Indeks tersebut direpresentasikan dalam 8 indikator meliputi kepatuhan terhadap peraturan lalulintas, kepatuhan dalam membayar pajak, Tidak menyogok pada urusan layanan publik (denda lalu lintas, pembuatan KTP/Paspor, layanan nikah), Peraturan Desa/kelurahan, kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (kabupaten dan Provinsi), kepatuhan terhadap Peraturan perundangan yang berlaku, kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD, Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.3.1.1.5.3. Indeks Risiko Bencana

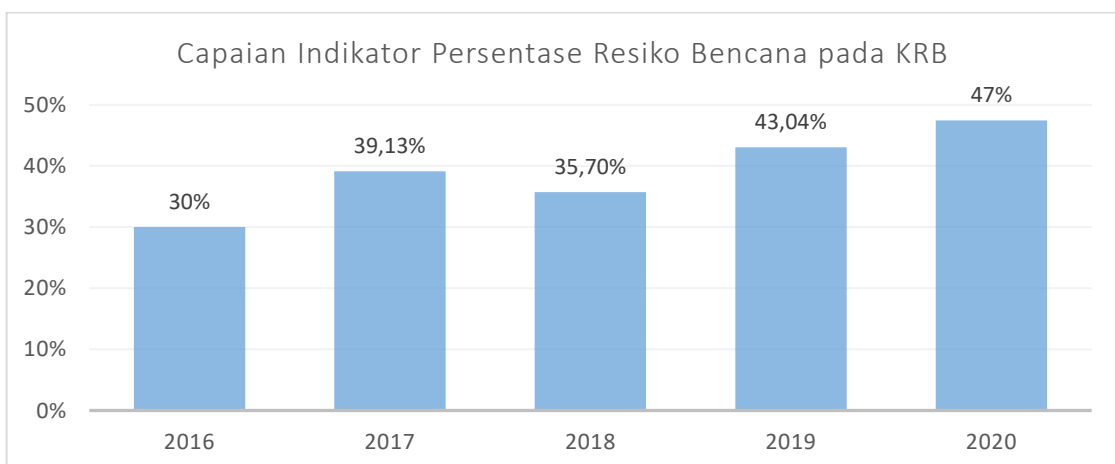


**Gambar 2.47 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi 2021

Penghitungan IRB dalam hal ini akan menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah berhasil dalam pencapaian atau lebih menekan resiko bencana. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang menunjukkan tren capaian menurun, sehingga Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan daerah dengan resiko yang menurun setiap tahunnya dan mendekati daerah aman bencana. Tren capaian menurun stagnan pada tahun 2017 ke tahun 2020 yakni menjadi 137.16.

### 2.3.1.1.5.4. Persentase Risiko Bencana



**Gambar 2.48 Capaian Indikator Persentase Risiko Bencana Pada KRB di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: BPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Salah satu indikator berkaitan dengan perlindungan masyarakat adalah persentase risiko bencana pada KRB di Kabupaten Banyuwangi. Persentase risiko bencana pada kawasan KRB di Kabupaten Banyuwangi bersifat fluktuatif yaitu terbukti dari data yang ditampilkan pada grafika di atas. Pada tahun 2016 nilai persentase mencapai angka 30%. Untuk selanjutnya angka realisasi pada tahun 2017 berada diangka 39.13%, hal ini menandakan jika terjadi peningkatan dari tahun 2016. Namun pada tahun 2018 persentase indikator risiko bencana di kawasan KRB Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan kembali menjadi 35.7%. Dan peningkatan angka Persentase Risiko Bencana pada KRB Kembali meningkat pada angka 43.04 % ditahun 2019, sehingga dapat diproyeksikan Persentase Risiko Bencana pada KRB di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 berada pada angka 47%.

Indikator terkait kebencanaan yang dirasa cukup penting dan perlu ditambahkan untuk dilakukan penghitungan dalam lima tahun kedepan adalah indikator Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Indeks ketahanan & keselamatan kebakaran. Penghitungan indikator Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran dilakukan dengan membagi wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan jumlah luas kabupaten dikalikan 100%. Sedangkan Indeks ketahanan & keselamatan kebakaran dihitung dengan formulasi 30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, ditambah 30% edukasi pteksi kebakaran, ditambah 40 % response time.

Capaian untuk Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yaitu 100 %, dari target capaian 100 %. Sementara capaian untuk Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yaitu 100 %, dari target capaian 100 %. Kedepannya, pembentukan sekretariat terpadu Call Center pelayanan kedaruratan perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan terhadap darurat bencana di Kabupaten Banyuwangi.

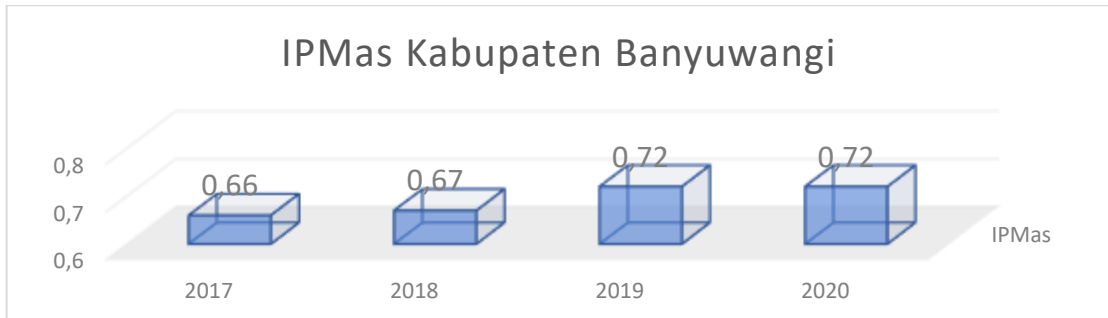
Capaian untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yaitu 100 %, dari target capaian 100 %. Kedepannya, pemenuhan kendaraan operasional perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, apabila terjadi bencana di Kabupaten Banyuwangi.

Capaian untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 yaitu 100 %, dari target capaian 100 %. Kedepannya, peremajaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pemasangan hidrant untuk supporting sistem pemadaman kebakaran perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Banyuwangi.

### 2.3.1.1.6. Sosial

#### 2.3.1.1.6.1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

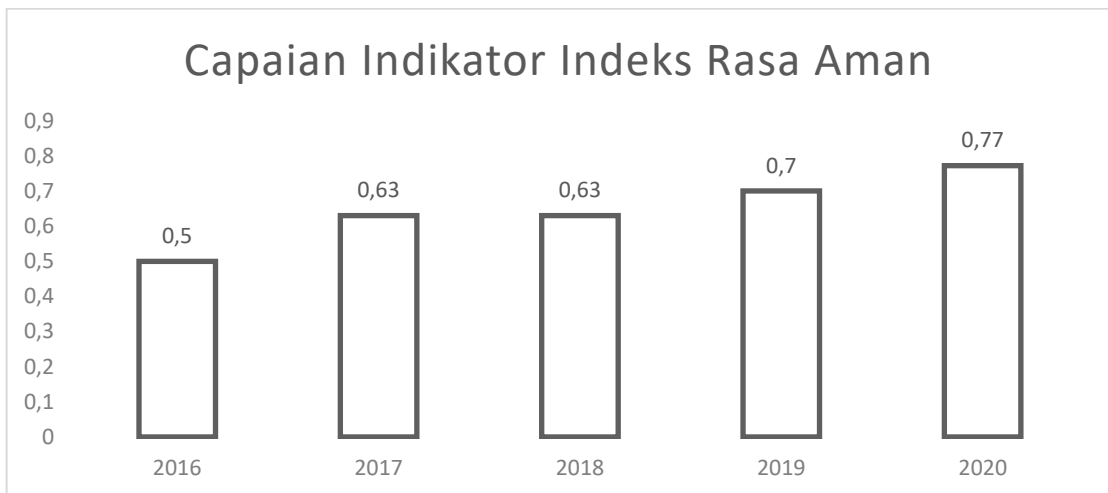
Indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 selalu mengalami kenaikan. Dari yang hanya sebesar 0.66 pada tahun 2016 menjadi 0.72 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 sudah mendapatkan kategori pembangunan masyarakat baik, jika dibandingkan dengan nasional maupun IPMas Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 masih lebih tinggi. Pada tahun 2020 sementara capaiannya masih dianggap sama atau dengan kata lain datanya masih sementara.



**Gambar 2.49 IPMas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017-2020**

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

#### 2.3.1.1.6.2. Indeks Rasa Aman



**Gambar 2.50 Capaian Indikator Indeks Rasa Aman Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

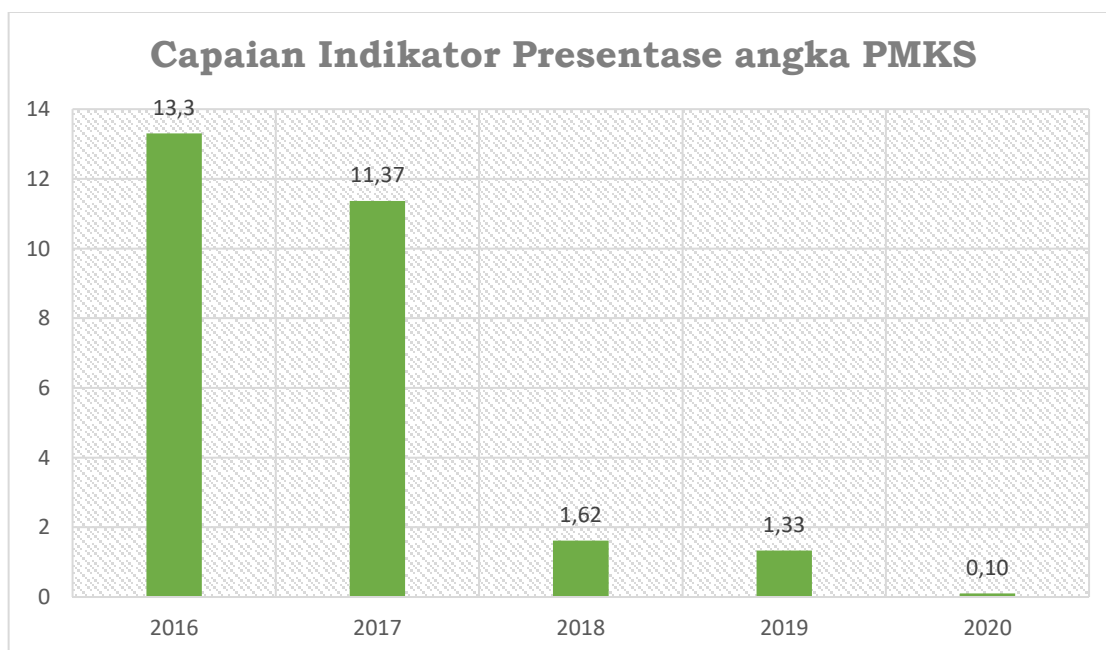
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Indeks rasa aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi risiko sosial, dan penyelesaian sengketa secara beradab. Indikator indeks rasa aman pada tahun 2016 mencapai angka realisasi 0.5 yang dilanjutkan dengan kenaikan yang signifikan pada tahun 2017 yaitu mencapai 0.63. Pada tahun selanjutnya pada tahun 2018 tetap

tidak mengalami kenaikan yaitu diangka 0.63. Pada tahun 2019 angka indeks rasa aman dapat menyentuh angka 0.7, kenaikan capaian ini menjadi bukti bahwa tingkat ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sudah cukup terjamin. Sehingga dapat diproyeksikan angka indeks rasa aman di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0.77 pada tahun 2020.

### 2.3.1.1.6.3. Persentase Angka PMKS

Keberhasilan capaian pada setiap indikator urusan sosial menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kebijakannya sudah menunjukkan *pro poor* serta memberikan perhatian lebih pada masyarakat yang memiliki kapasitas rendah. Hal ini terlihat dari menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Banyuwangi yang pada tahun 2016 sebesar 13,3%, turun menjadi 11,73% pada 2017. Perkembangan yang sangat baik terlihat dari capaian angka PMKS yang menurun drastis pada tahun 2018 yaitu mencapai angka 1,62% dan terus menurun hingga di tahun 2019 angka PMKS menyentuh angka 1.33. Oleh karena itu dapat diproyeksikan angka PMKS di Kabupaten Banyuwangi dapat menurun menjadi 0.10% pada tahun 2020. Penurunan pada tahun 2020 diambil dari hasil penghitungan tren data pada tahun sebelumnya sebelum adanya pandemi covid-19.



**Gambar 2.51 Capaian Indikator Presentase Angka PMKS di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Selain indikator yang diuraikan diatas, terdapat indikator baru yang akan digunakan dalam RPJMD yaitu indikator Indeks Kesalehan Sosial. Indikator tersebut didefinisikan sebagai sikap perilaku seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih), atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial tersebut meliputi: (a) solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtima'i*), (b)

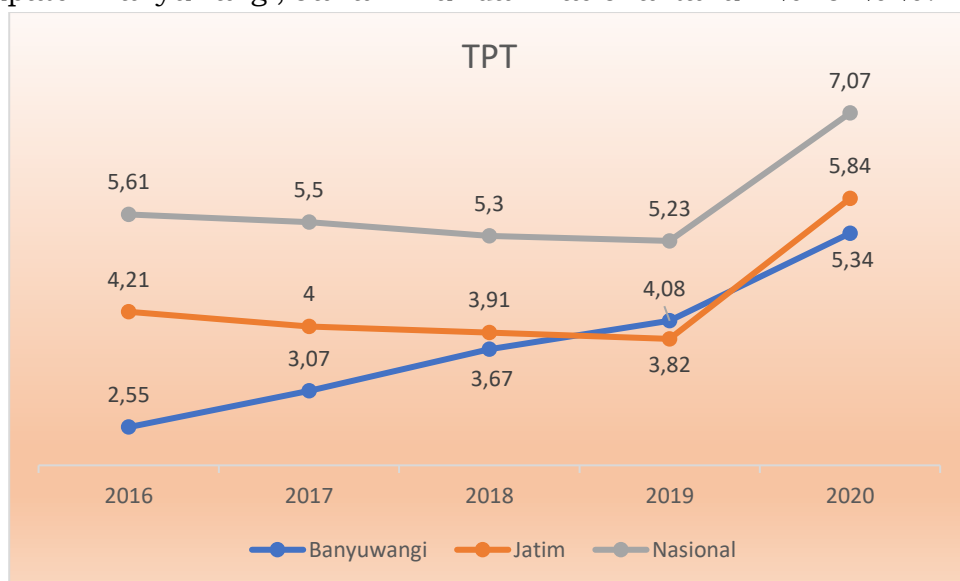
toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta'awun), (d) tengah-tengah (al-I'tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat). Metode pengumpulan data dalam penghitungan indeks tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan survei secara langsung kepada masyarakat.

### 2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

##### 2.3.1.2.1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Berikut merupakan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional tahun 2016-2020:



**Gambar 2.52 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang negatif dengan adanya peningkatan angka capaian pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 TPT Kabupaten Banyuwangi tidak tercatat dalam data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sehingga data TPT 2016 menggunakan angka yang di rilis bulan Agustus 2015. Di tahun 2020 angka TPT baik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Nasional meningkat tajam akibat munculnya pandemi covid-19 di bulan Maret 2020 yang masih belum selesai hingga akhir tahun 2020.

##### 2.3.1.2.1.2. Tingkat partisipasi angkatan kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



**Gambar 2.53 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2021

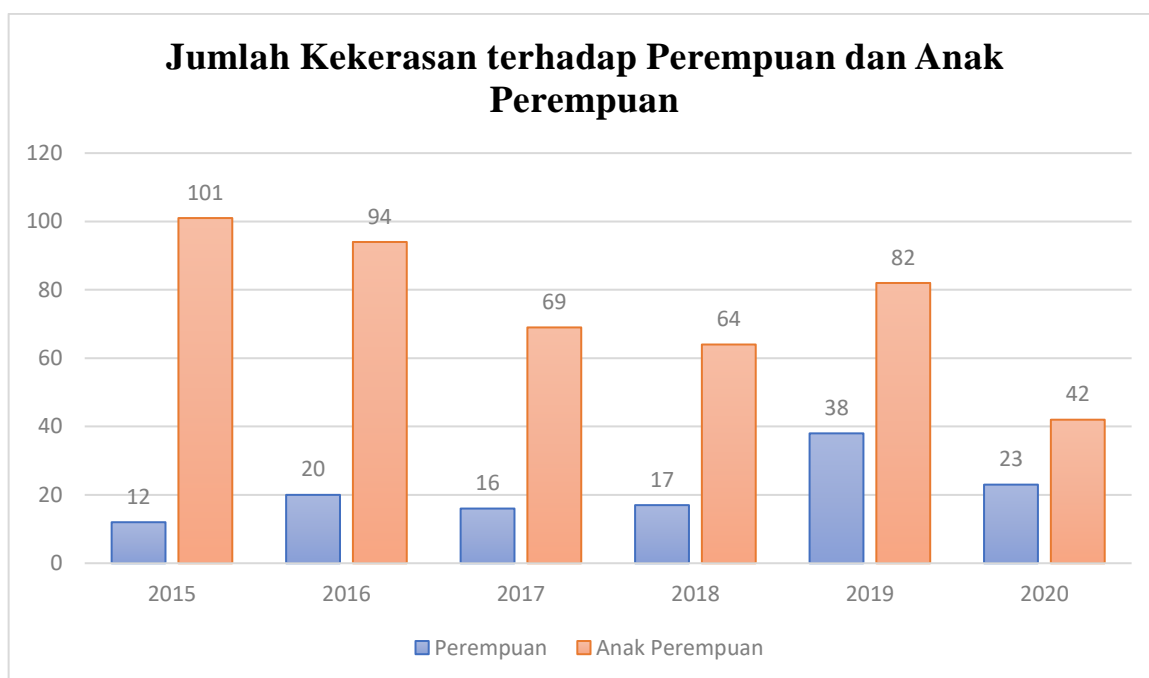
Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2016 capaian TPAK tidak dirilis oleh BPS sehingga data TPAK 2016 menggunakan rilis Bulan Agustus 2016. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angkatan kerja atau pasokan tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Banyuwangi cukup besar dan secara proporsional persentasenya selalu lebih tinggi dibanding dengan Jawa Timur secara keseluruhan. Besarnya pasokan tenaga kerja ini harus diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja yang cukup banyak agar tingkat pengangguran tidak semakin tinggi.

### 2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 2.3.1.2.2.1. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU. No. 35 Tahun 2014). Isu kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga membatasi pilihan hidup mereka. *Global Burden of Disease* memproyeksikan bahwa lebih dari 30% perempuan >15 tahun mendapat pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama masa hidup mereka.

Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran. Indikator ini mengukur terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan. Karena sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan intim, maka indikator ini tepat untuk menangkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami perempuan. Pengukuran kekerasan terhadap perempuan lebih cocok menggunakan *time lag* 12 bulan, karena dapat menggambarkan perubahan level dan risiko kekerasan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan pengukuran menggunakan *time lag* seumur hidup.



**Gambar 2.54 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Perempuan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2020 mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Jumlah kekerasan pada Perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebanyak 38 orang, dan terendah pada tahun 2012 sebanyak 12 orang. Pada tahun 2016 sebanyak 20 orang, di tahun 2017 sebanyak 16 orang, pada tahun 2018 sebanyak 17 orang dan di tahun 2020 sebanyak 23 orang. Sedangkan jumlah kekerasan pada anak perempuan tertinggi terjadi di tahun 2015 sebanyak 101 anak dan terendah di tahun 2020 sebanyak 42 anak. Kekerasan anak perempuan Pada tahun 2016 sebanyak 94 anak dan menurun di tahun 2017-2018 sebanyak 69 dan 64 anak perempuan. Di tahun 2019 jumlah kekerasan pada anak perempuan meningkat sebanyak 82 anak.

Tren yang fluktuatif ini dikarenakan masih tingginya angka kekerasan pada perempuan serta belum optimalnya sosialisasi penanganan kasus pada

perempuan. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini ditangani melalui P2TP2A yang merupakan hasil kolaborasi pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil.

Sesuai dengan SK Bupati Banyuwangi Nomor : 188/97/KEP/2011/2020 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyuwangi (P2TP2A) dengan tugas :

- Menyusun rencana pedoman umum implementasi rencana aksi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyuwangi
- Menyusun implementasi pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi perempuan dan anak dimaksud
- Memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada instansi/pihak lain terkait dan/atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat;

Bahwa pusat pelayanan terpadu tersebut dibantu oleh sekretariat tetap dan 3 (tiga) divisi antara lain : divisi penanganan dan reintegrasi korban, divisi advokasi dan penegakan hukum.

Melalui peran aktif P2TP2A Kabupaten Banyuwangi akan bertekad memperluas cakupan pelayanan terhadap Perempuan dan Anak. Beberapa diantaranya diimplementasikan melalui : Ruang Rindu, Banyuwangi *Children Center* dan Forum Anak sehingga diharapkan kasus kekerasan perempuan dan anak dapat ditemukan solusinya.

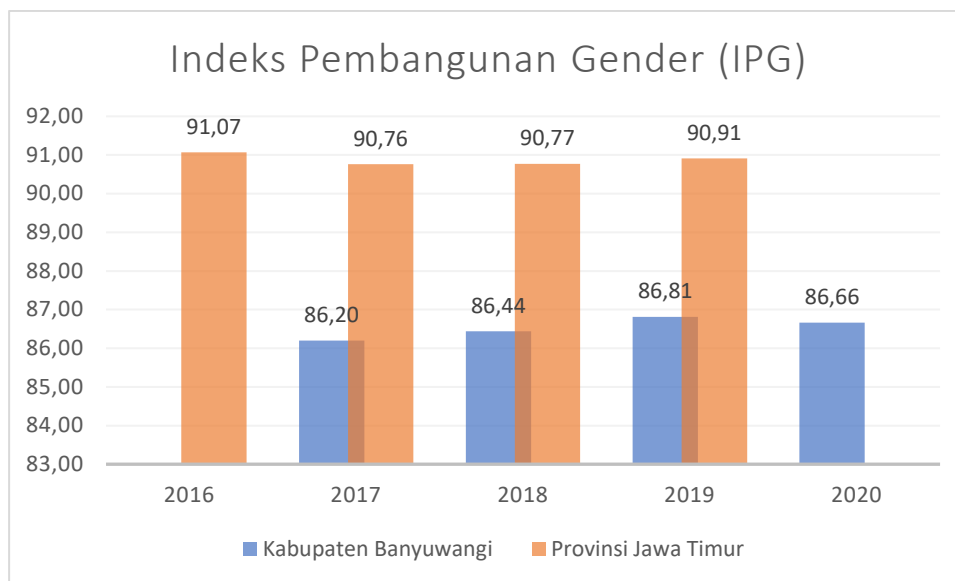
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dan melindungi hak perempuan dan anak antara lain berupa :”lahir procot pulang bawa akta, duta cegah perkawinan anak, sakina (stop kematian ibu dan anak), *one student one client* (satu mahasiswa dampingi ibu hamil), sekolah asuh sekolah, garda ampuh, rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan” dan lain sebagainya.

#### **2.3.1.2.2.2. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender**

Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan pentingnya menyusun RPJMD yang berkeadilan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. Penekanan kepada perencanaan pembangunan yang berkeadilan khususnya berkeadilan gender ini bukan tanpa sebab. Beberapa tahun ini makin dirasakan kesenjangan gender dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingkat kekerasan yang makin tinggi, kualitas hidup perempuan dan anak miskin yang makin rentan dan beberapa persoalan termasuk persoalan infrastruktur yang belum sesuai dengan kepentingan perempuan dan anak-anak.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia selain Indeks Pembangunan Manusia adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia

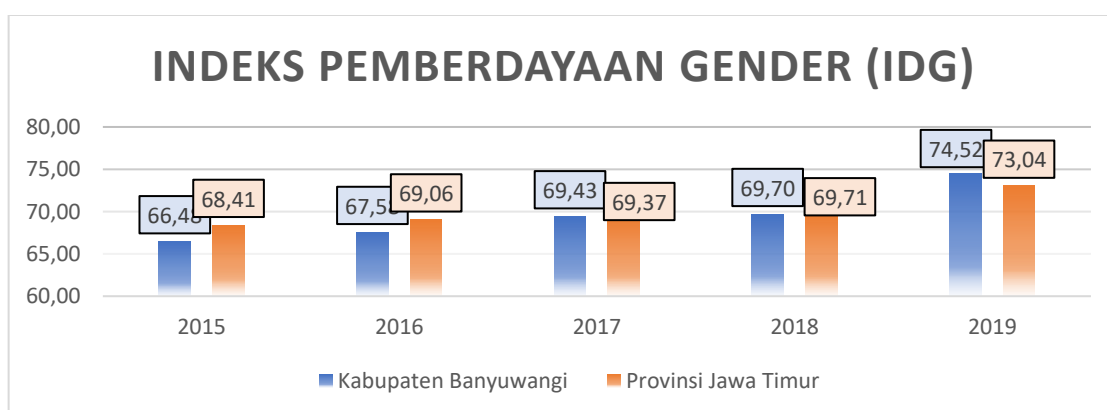
antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 : 86,81 (kategori tinggi).



**Gambar 2.55 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Timur mencapai angka tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 91,07 dan sempat menurun pada tahun 2017 sebesar 90,76 dan 2018 sebesar 90,77. Kondisi IPG di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir hingga di angka 86,81 pada tahun 2019. Capaian IPG Kabupaten Banyuwangi mencapai 86,66 pada tahun 2020 termasuk dalam kategori tinggi yang artinya harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, pengeluaran per kapita sudah hampir terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.



**Gambar 2.56 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov Jawa Timur, 2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 sebesar 74,52. Indikator indeks keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 26%, perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 48,20% dan sumber pendapatan perempuan sebesar 31,01%. Dibandingkan dengan data IDG dari Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2017 IDG Kabupaten Banyuwangi lebih tinggi dari IDG Jawa Timur. Begitu pula dibandingkan dengan daerah sekitarnya, IDG di Kabupaten Banyuwangi hanya lebih rendah dari Kabupaten Jember yaitu 70,45. Hal tersebut karena berbagai kegiatan di Kabupaten Banyuwangi mendukung responsif gender. Misal inovasi Banyuwangi *Children Center*, *Sakina*, dan kegiatan lain yang melindungi anak dan perempuan dalam setiap perannya. Belum adanya aplikasi untuk pemenuhan data gender dan anak merupakan salah satu yang harus segera diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan data.

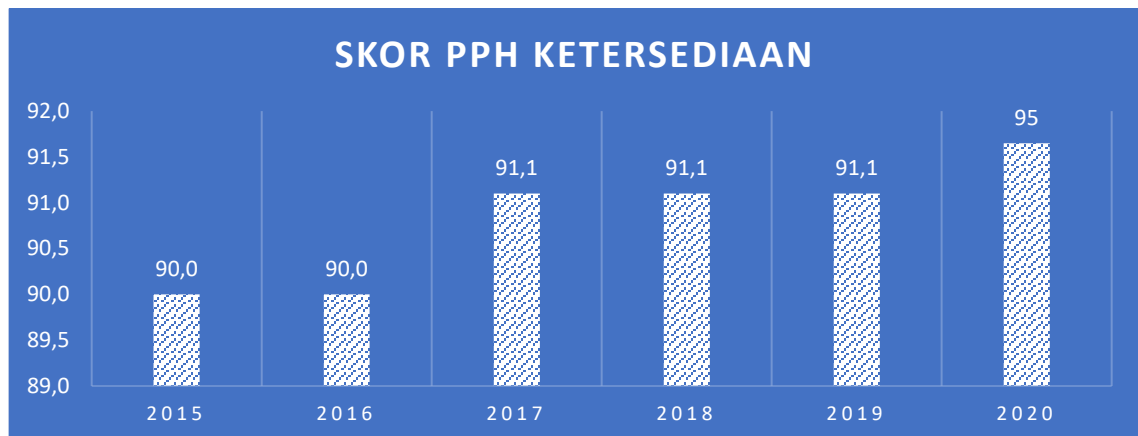
### **2.3.1.2.3. Pangan**

#### **2.3.1.2.3.1. Skor PPH Ketersediaan**

Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila di konsumsi dapat memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Konsep PPH merupakan manifestasi konsep gizi seimbang yang didasarkan pada konsep Triguna Pangan. Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi, dengan demikian PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan dan keanekaragaman pangan. Dengan terpenuhi kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH secara implisit kebutuhan zat gizi juga terpenuhi.

Skor PPH Ketersediaan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan di 3 tahun terakhir. Dua tahun pertama yaitu tahun 2015 & 2016 Skor PPH Ketersediaan di Banyuwangi berada pada angka capaian sebesar 90. Kemudian pada tahun 2017 capaian Skor PPH Ketersediaan dapat meningkat 1 poin menjadi 91 dan angka 91 tersebut bertahan hingga tiga tahun berikutnya yaitu sampai pada tahun 2019. Pada tahun 2020 Skor PPH Ketersediaan di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan hingga menjadi 95 yang merupakan angka tertinggi dari capaian 5 tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Banyuwangi sudah baik dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan keseimbangan gizi. Meskipun skor PPH ketersediaan memiliki tren yang positif, namun ada beberapa masalah yang harus menjadi perhatian seperti kurang optimalnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian yang disebabkan karena petani sebagai pelaku usaha sering kali dihadapkan pada realita rendahnya minat konsumen lokal terhadap produk olahan atau produk premium pertanian dengan label harga di atas rata-rata, sedangkan

jaringan pemasaran untuk menjangkau konsumen luar kota masih kurang optimal.

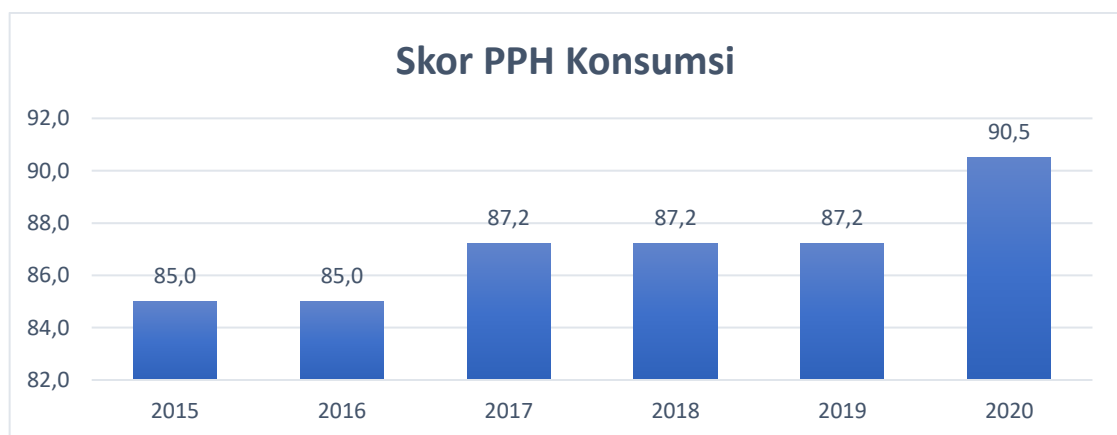


**Gambar 2.57 Skor PPH ketersediaan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

#### **2.3.1.2.3.2. Skor PPH Konsumsi**

Skor pola konsumsi pangan mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan dan seimbang. Penetapan PPH bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi berdasarkan cita rasa, daya cerna, daya terima, masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli.



**Gambar 2.58 Skor PPH konsumsi di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Sejalan dengan skor PPH ketersediaan Skor PPH Konsumsi di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan di 3 tahun terakhir. Dua tahun pertama yaitu tahun 2015 dan 2016 Skor PPH Konsumsi di Banyuwangi berada pada angka capaian sebesar 85. Kemudian pada tahun 2017 capaian Skor PPH Konsumsi dapat meningkat 2.2 poin menjadi 87.2 dan angka 87.2 tersebut

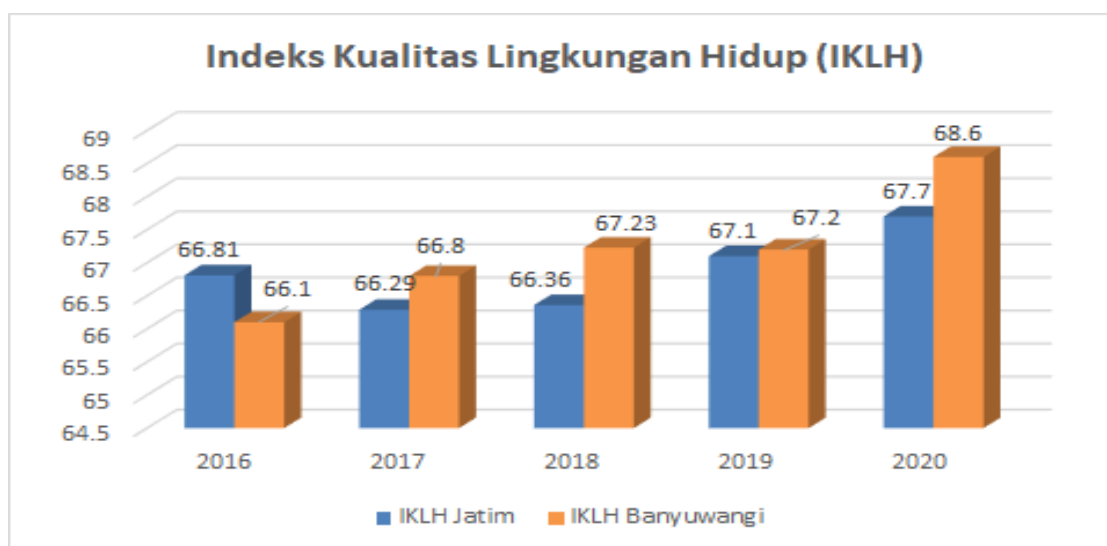
bertahan hingga tiga tahun berikutnya yaitu sampai pada tahun 2019. Sehingga pada tahun 2020 Skor PPH Konsumsi di Kabupaten Banyuwangi meningkat cukup signifikan menjadi 90,5, skor tersebut merupakan skor PPH Konsumsi tertinggi di Banyuwangi sejak 6 tahun terakhir. Masih belum optimalnya cadangan pangan yang dikelola masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat secara berkelanjutan merupakan satu hal yang perlu dimaksimalkan oleh Kabupaten Banyuwangi.

#### 2.3.1.2.4. Lingkungan Hidup

##### 2.3.1.2.4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun memiliki tren capaian yang meningkat. Pada tahun 2015 angka capaian menunjukkan angka 66.1 dan terus meningkat dan capaian yang lebih tinggi terjadi pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan pencapaian menjadi 68.66. IKLH Provinsi Jawa Timur mengalami capaian yang stabil mulai tahun 2016 – 2020 dengan kisaran angka mulai 66. 81 sempat turun di tahun 2017 sebesar 66, 29 dan naik pada tahun 2018 sebesar 66.36 hingga di tahun 2020 sebesar 67.70.

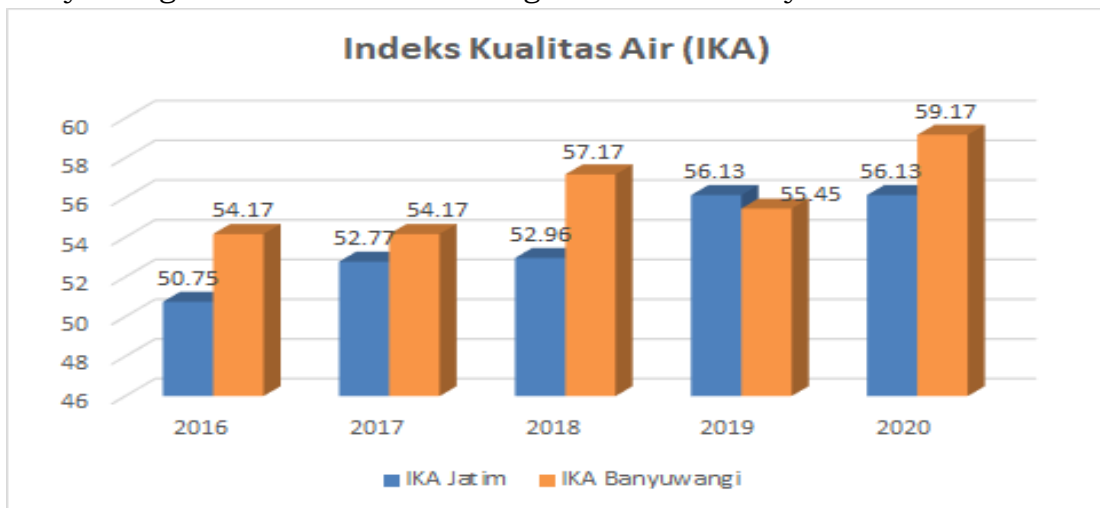


**Gambar 2.59** Indeks lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2021

Komponen IKLH yang pertama adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Kualitas air yang baik, bersih dan sehat menjadi kebutuhan penting bagi

manusia dan makhluk hidup yang lain. Indeks Kualitas Air dapat memberikan informasi kualitas air yang digunakan upaya pengendalian pencemaran air dengan konsep bahwa nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan kualitas air yang semakin baik. IKA Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian yang stabil dan cenderung naik pada tahun 2016 hingga tahun 2019, angka tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai angka 57.17. berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 IKA Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan menjadi 55.45 dan mencapai kenaikan kembali pada tahun 2020 sebesar 59,17. Penurunan IKA di Kabupaten Banyuwangi terjadi karena belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup serta adanya penurunan kualitas air. Hal ini berbanding terbalik dengan IKA Jawa Timur yang mengalami kenaikan capaian di tahun 2019 dan tahun 2020 yakni sebesar 56.13 yang merupakan angka capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. IKA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 menunjukkan bahwa kualitas air di kabupaten Banyuwangi semakin baik dibanding tahun sebelumnya.

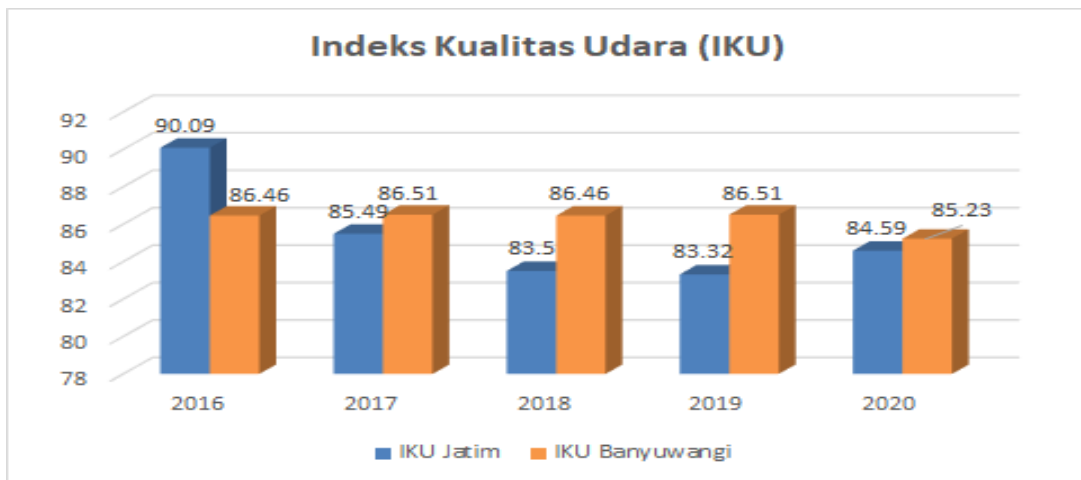


**Gambar 2.60 Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2021

Komponen IKLH selanjutnya adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Kualitas udara berhubungan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat dan kegiatan pembangunan. IKU Jawa Timur memiliki capaian yang cenderung turun mulai tahun 2015 hingga pada tahun 2019 yang mencapai angka 83.32 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 84.59. IKU Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016-2019 cenderung memiliki capaian yang stabil pada kisaran angka 86 dan tahun 2020 mengalami penurunan pada angka 85.23. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas udara diantaranya yaitu laju pertumbuhan penduduk yang cepat diiringi dengan pembangunan dan sarana transportasi yang meningkat akan menghasilkan polutan yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Selain itu adanya kegiatan pembangunan dan alih fungsi

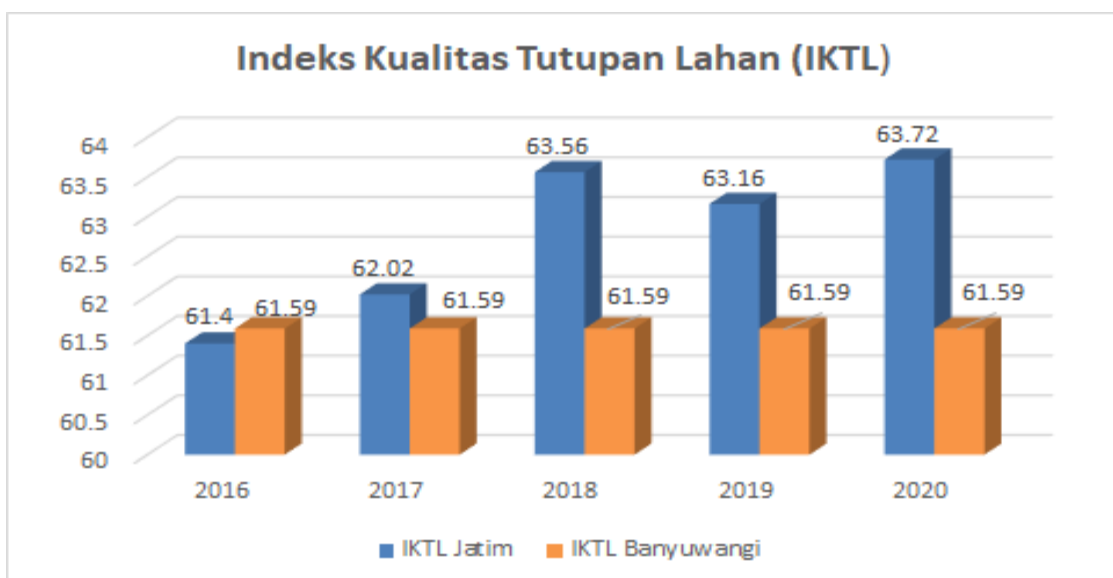
lahan serta kurang optimalnya pengendalian pencemaran udara juga berpengaruh terhadap kualitas udara.



**Gambar 2.61 Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2021

Komponen IKLH selanjutnya adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Tutupan Lahan Provinsi Jawa Timur yang dari tahun 2016 hingga 2020 rata-rata stabil dan cenderung naik dan sempat mengalami penurunan hanya di tahun 2019 yaitu sebesar 0.40 dari tahun 2018 atau sebesar 63.16 dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 63,72. Hal tersebut berbeda dengan IKTL Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian yang stagnan pada angka 61.59 dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan perubahan luasan tutupan lahan di Kabupaten Banyuwangi yang dikarenakan kurang optimalnya pengelolaan lahan dan sumber air.



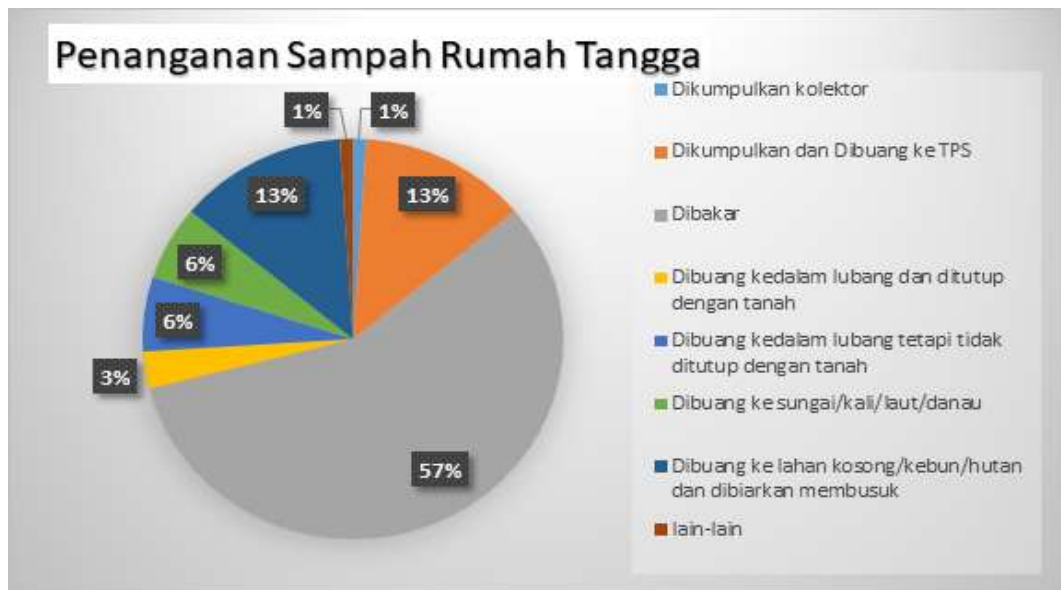
**Gambar 2.62 Indeks Tutupan Lahan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2021

#### 2.3.1.2.4.2. Persentase sampah yang dikelola

Sampah merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian di Kabupaten Banyuwangi karena sampah dapat mencemari serta merusak lingkungan terutama mencemari kualitas udara dan air dalam suatu Kawasan. Sampah yang belum tertangani tersebar di wilayah perdesaan terutama kawasan pesisir, hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi banyak terjadi di kawasan pesisir seperti wisata dan industri. Sumber-sumber sampah di Kabupaten Banyuwangi berasal dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan dan sampah perikanan. Besarnya produksi sampah di Kabupaten Banyuwangi berbanding lurus dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan.

Jumlah produksi sampah di Kabupaten Banyuwangi dalam satu tahun mencapai 6.900 ton. Dari jumlah produksi sampah tersebut tidak semua bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hanya sekitar 42 % atau 2.900 ton yang bisa diangkut ke TPA. Sisanya sebesar 60% dari produksi sampah tersebut masih memerlukan pengolahan supaya tidak mencemari lingkungan.



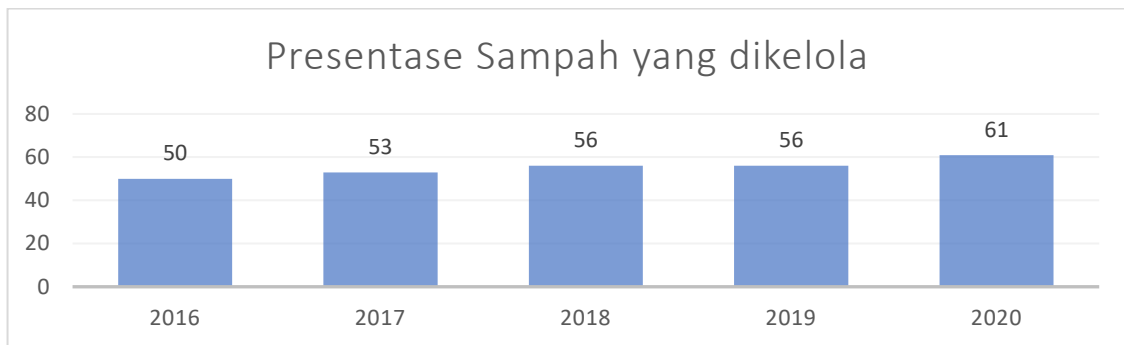
**Gambar 2.63 Penanganan Sampah rumah tangga**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2021

Pola penanganan sampah di Kabupaten Banyuwangi bertumpu pada kawasan perkotaan khususnya Ibu Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar lainnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan TPS 3R maupun Bank sampah. Pada kawasan-kawasan perdesaan, penanganan sampah dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan untuk pembuangan sampah dengan model galian.

Pemerintah Banyuwangi sudah melakukan berbagai cara seperti penambahan armada pengangkut sampah dan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai pengelolaan sampah. Berikut capaian persentase sampah yang dikelola Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.



**Gambar 2.64 Persentase sampah yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 2021

Pada tahun 2016 persentase sampah yang dikelola memiliki capaian angka sebesar 50% dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 53%. Kemudian pada tahun 2019 persentase sampah yang dikelola mengalami peningkatan pencapaian menjadi 56% dan pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan sebesar 5% sehingga mencapai angka 61%. Kontribusi dalam pengelolaan sampah tidak saja dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetapi juga masyarakat melalui pemilahan sampah organik dan anorganik dimulai dari lingkungan rumah tangga, hingga perusahaan sebagai wujud tanggung jawab sosial dengan penyediaan tempat sampah di wilayah pesisir/pantai dengan kerjasama dengan kelompok sadar wisata. Pelibatan dasa wisma dalam hal ini sangat membantu dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Beberapa inovasi dilakukan Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola sampah dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga pengelolaan sungai dan pesisir. Misalnya : inovasi Sekolah Membawa Sampah, Pengelolaan Sampah Karya Desa Muncar, Merdeka dari Sampah dan Festival Sungai Bersih, diharapkan dengan inovasi tersebut dapat mengurangi sampah dan daur ulangnya bisa bermanfaat. Banyaknya inovasi dalam pengelolaan harus diikuti dengan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

Salah satu upaya pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi mulai tahun 2014 hingga saat ini adalah dengan melakukan pengawasan, memonitor, sekaligus mendata timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan/industri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Hasil pengawasan yang dilakukan pada 49 industri dan/atau kegiatan usaha menunjukkan masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengelolaan lingkungan (dokumen UKL-UPL), belum mempunyai IPAL atau hasil uji kualitas limbah cairnya belum memenuhi baku mutu kualitas limbah cair, belum memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan izin pembuangan limbah cair.

### 2.3.1.2.5. Pertanahan

#### 2.3.1.2.5.1. Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan

Sertifikat tanah merupakan salah satu bukti kepemilikan atas tanah. Sertifikat tanah memiliki beberapa jenis diantaranya hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pengelolaan, wakaf, dan hak per Juni 1996 hak tanggungan. Sertifikat yang dikeluarkan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang meningkat, pada tahun 2016 sertifikat tanah yang dikeluarkan mencapai 25330 dan mengalami meningkat menjadi 44091 di tahun 2017. Pada tahun selanjutnya, mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai angka 73659 di tahun 2018 dan mencapai 85097 di tahun 2019, namun pada tahun 2020 angka ini menurun drastis hingga mencapai 40209.



**Gambar 2.65 Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

#### 2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut capaian indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil:

**Tabel 2. 17 Capaian indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2020**

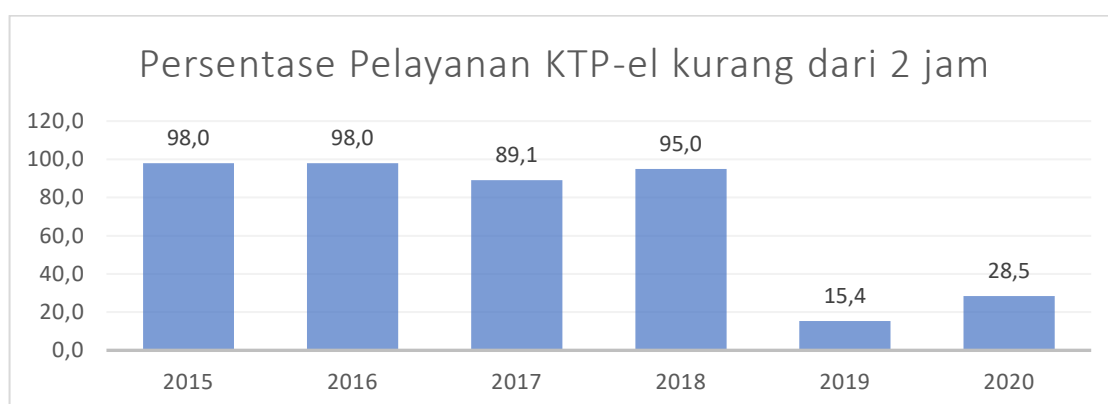
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam	%	98,0	89,1	95,0	15,4	28,5
2	Persentase Bayi lahir procot pulang bawa akta	%	71,0	74,8	82,0	80,9	86,4
3	Persentase Data Kependudukan yang valid dan update	%	88,0	91,0	93,0	92,0	94,5

Sumber: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2021

Capaian indikator di atas merupakan representasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari data di atas dapat dilihat terdapat indikator yang memiliki tren menurun pada setiap tahun yaitu indikator persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam, sedangkan untuk indikator persentase bayi lahir procot pulang bawa akta dan indikator persentase data kependudukan yang valid dan *update* mengalami penurunan pada tahun 2019.

#### 2.3.1.2.6.1. Persentase Pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam

Persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam merupakan salah satu indikator urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, capaian indikator ini bersifat fluktuatif semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Berikut capaian indikator persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam yang melekat pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil:



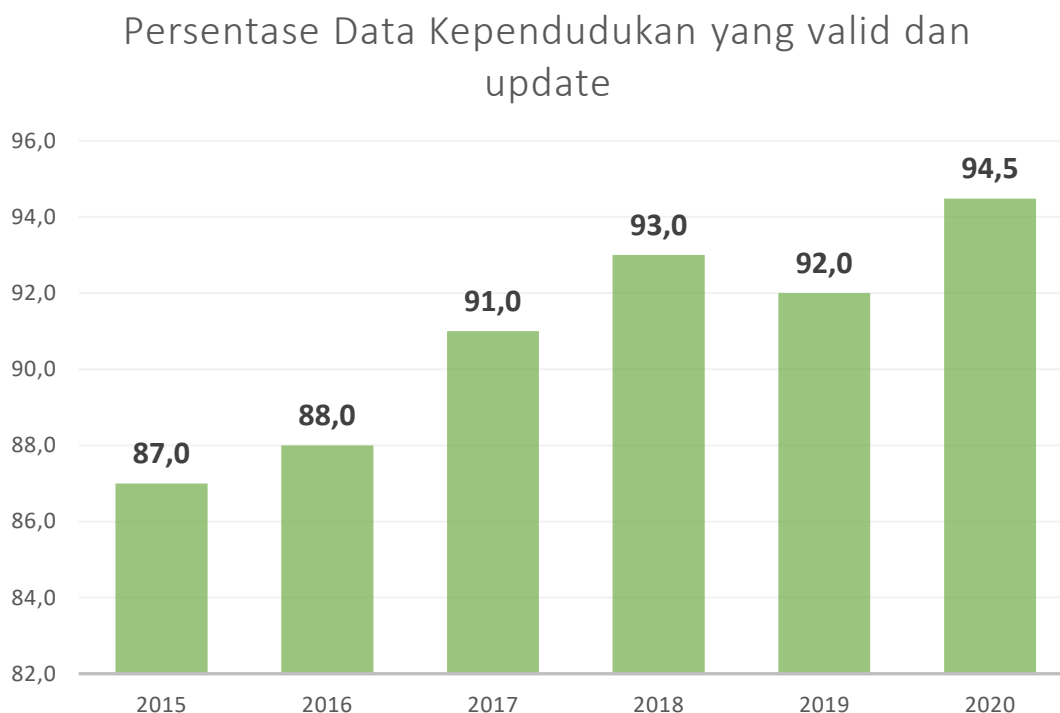
**Gambar 2.66 Persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2021

Berdasarkan grafik di atas, indikator persentase pelayanan KTP-el kurang dari 2 jam bergerak fluktuatif pada setiap tahunnya, pada tahun 2017 indikator tersebut mengalami penurunan dari 98% menjadi 89,1% sedangkan penurunan drastis terjadi pada tahun 2019 dari 95% menjadi 15,4%. Penurunan indikator pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2019 juga terjadi pada indikator lainnya, berikut gambaran penurunan pada indikator persentase data kependudukan yang valid dan *update*. Namun persentase tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 28,5%.

### 2.3.1.2.6.2. Persentase Data Kependudukan Yang Valid Dan Update

Capaian indikator persentase data kependudukan yang valid dan update memiliki tren data meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Berikut capaian indikator persentase data kependudukan yang valid dan update pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Banyuwangi.



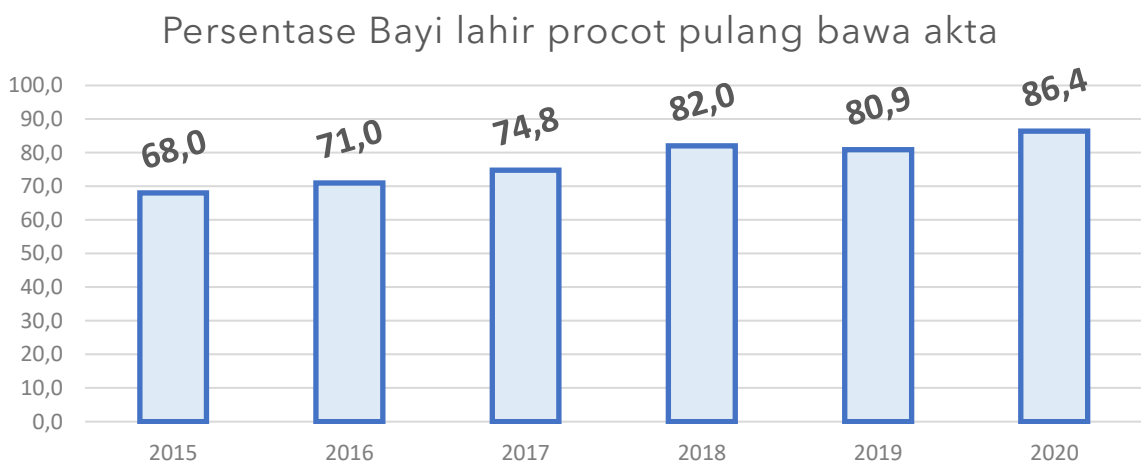
**Gambar 2.67 Persentase data kependudukan yang valid dan update di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2021

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa data kependudukan semakin tahun semakin valid dan semakin update. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dan update sangat membantu pemerintah daerah dalam mendukung tertib administrasi kependudukan dan tertib administrasi pelayanan publik.

### 2.3.1.2.6.3. Persentase Capaian Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akta

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam indikator ini mengukur persentase bayi lahir yang menggunakan pelayanan bayi lahir procot pulang bawa akta, berikut capaian indikator persentase bayi lahir procot pulang bawa akta.



**Gambar 2.68 Persentase Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akta Di Kabupaten Banyuwangi Pada Tahun 2015-2020**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi 2021

Berdasarkan grafik tersebut, Persentase bayi lahir procot pulang bawa akta tahun 2015 hingga tahun 2020 memiliki tren capaian yang meningkat. Namun mengalami penurunan ditahun 2019 yaitu menjadi 80,9. Sedangkan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 86,375, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar untuk melakukan kepengurusan administrasi secara tertib sejak bayi dalam kandungan.

### 2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang harus melekat pada setiap pemerintah daerah kabupaten atau kota. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki beberapa indikator yang dapat merepresentasikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam urusan tersebut, berikut indikator program kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banyuwangi:

**Tabel 2. 18 Indikator Program Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa Mandiri	<i>Jumlah</i>	40	60	43	51	52
2.	Indeks Desa Membangun	<i>Skala</i>	0,74	0,76	0,72	0,75	0,79

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi 2021

Indikator tersebut di atas menjadi salah satu acuan dalam menilai bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk dapat lebih mudah menganalisis capaian indikator di atas dapat dilihat pada grafik setiap indikator yang melekat dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

#### 2.3.1.2.7.1. Jumlah Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) lebih dari 75. Berikut capaian indikator jumlah desa mandiri yang ada di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.69 Jumlah desa mandiri di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2021

Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren angka yang fluktuatif pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tahun 2015 tercatat terdapat 45 desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) > 75 sehingga menjadi desa mandiri, Pada tahun 2016 berkurang 5 desa yang menjadi desa mandiri sehingga angka capaian menjadi 40. Akan tetapi pada tahun 2017 jumlah desa mandiri di Kabupaten Banyuwangi dapat bertambah 20 desa menjadi total 60 desa dan jumlah desa mandiri kembali menurun menjadi 43 desa di tahun 2018. Terdapat penambahan 8 desa mandiri pada tahun 2019 sehingga jumlah desa mandiri menjadi 51. Sehingga pada tahun 2020 jumlah desa mandiri bertambah 1 desa menjadi 52 desa mandiri.

### Indeks Desa Membangun Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020



**Gambar 2.70** Indeks Desa Membangun Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, 2021

Sebagaimana diketahui bahwa tren IDM Kabupaten Banyuwangi selama 6 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta stakeholder terkait untuk mengintervensi kemandirian desa melalui program dan inovasi diantaranya *smart* kampung dan pemberdayaan ekonomi berbasis desa.

#### 2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator program yang merupakan representasi dari kinerja pemerintah dalam menjalankan urusan tersebut, berikut indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Banyuwangi:

**Tabel 2. 19 Indikator Program Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

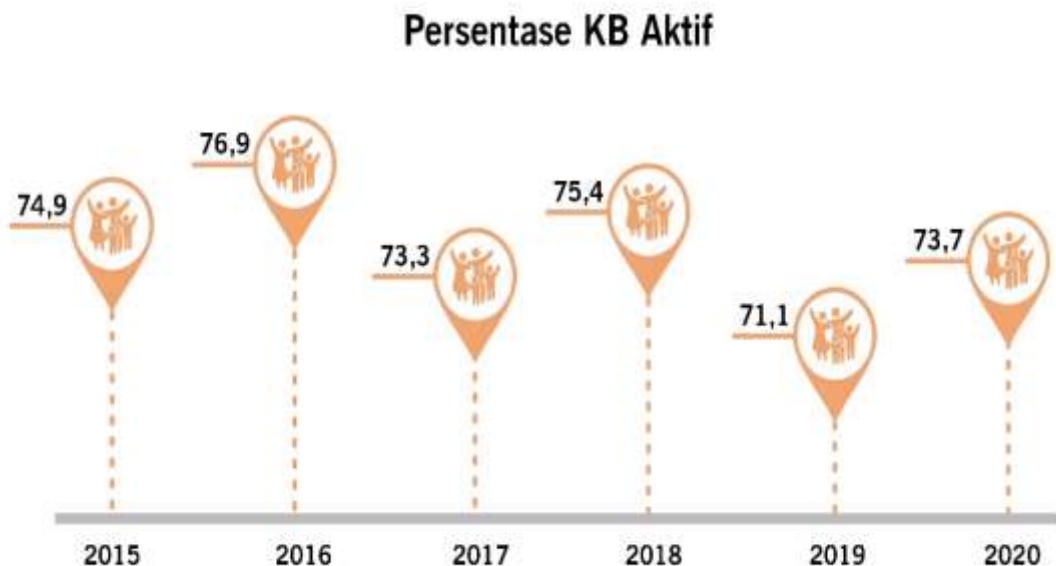
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase KB aktif	%	76,91	73,34	75,38	71,13	73,55
2	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKL BKR) dan UPPKS	%			85	97,5	97,53
3	laju pertumbuhan penduduk	%			0,35	0,36	0,94

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada indikator persentase KB aktif memiliki capaian yang bergerak fluktuatif sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk dapat menganalisis lebih lanjut pergerakan capaian kedua indikator tersebut maka dapat melihat pada uraian di bawah ini:

#### 2.3.1.2.8.1. Persentase KB aktif

KB aktif adalah jumlah peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi, di mana untuk menghitung persentase KB aktif maka jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah usia subur dikali 100, Keluarga berencana merupakan program yang sangat penting dalam upaya pengendalian penduduk sehingga Persentase KB aktif dijadikan sebagai indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.



**Gambar 2.71 Persentase KB Aktif di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui Persentase KB aktif di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang fluktuatif dan cenderung menurun. Dimana tahun 2016 persentase KB aktif sebesar 76.9% cenderung menurun hingga tahun 2020 sebesar 73,7%. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya cakupan peserta KB aktif yaitu ekonomi, budaya, pendidikan, agama dan status wanita dalam masyarakat.

### 2.3.1.2.8.2. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Terkait dengan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, dimana program ini mengarahkan bagaimana keluarga mempunyai rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten melaksanakan kegiatan pembinaan yang mencakup pada 3 aspek, yaitu keluarga, kependudukan dan kesehatan reproduksi, dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel 2. 20 Capaian Indikator Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020**

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	KETERANGAN
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,1	2,1	2,1	2,1	n/a	SUSENAS
Age Specific Fertility Rate (ASFR)	%	26,52	29,55	23,84	21,99	n/a	SUSENAS
Contracepsi Prevaensi Rate (CPR)	%	76,91	74,9	75,38	75,2	74,02	Statistik Rutin BKKBN
Unmeet Need (UN)	%	8,40	14,14	11,29	10,62	10,92	Statistik Rutin BKKBN
Usia Kawin Pertama (UKP) dibawah 21 Th	%	12,49	9,76	9,56	8,91	9,45	Statistik Rutin BKKBN

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi 2021

Capaian Total Fertility Rate (TFR) di angka 2,1 adalah bagian untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang di Kabupaten Banyuwangi. Capaian Unmeet Need (UN) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren menurun, ini menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Capaian kinerja tersebut tentu menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan layanan melalui peningkatan layanan penyuluhan Keluarga Berencana, penyuluhan dan pembinaan kesehatan reproduksi remaja, perluasan cakupan layanan peserta KB Mandiri.

### 2.3.1.2.9. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan urusan wajib dimana urusan ini mengatur tentang perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis bidang perhubungan, pengujian kendaraan bermotor, angkutan umum dan barang, pengawasan dan pengendalian izin perhubungan dan lain sebagainya. Berikut indikator dan capaian indikator urusan perhubungan di Kabupaten Banyuwangi:

**Tabel 2. 21 Indikator dan Capaian Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020**

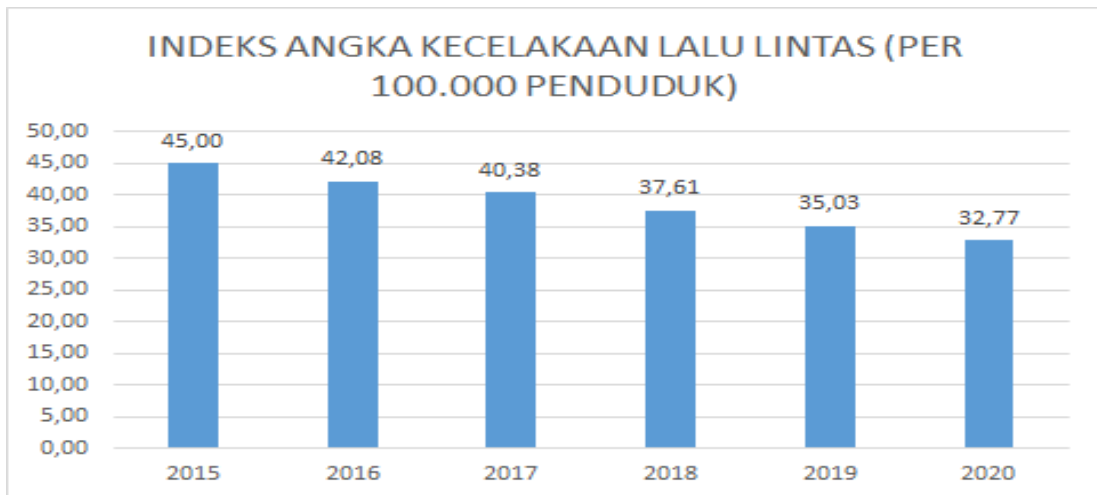
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Angka kecelakaan Lalu lintas ( per 100.000 penduduk)	Indeks	42,08	40,38	37,61	35,03	32,77
2	Persentase pengguna jasa angkutan penumpang umum di bidang transportasi darat	%	80	82	84	86	30
3	Persentase panjang jalan terlayani LPJU	%	31	31	37	41,71	49
4	Persentase pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan	%	75	77,5	80	82,5	85

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 2021

Capaian indikator program urusan perhubungan sebagaimana data diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan urusan perhubungan berjalan cukup maksimal dimana indikator yang terdapat dalam urusan tersebut memiliki tren yang cenderung membaik. Dapat diambil contoh adalah pada indikator indeks angka kecelakaan lalu lintas.

#### 2.3.1.2.9.1. Indeks Angka kecelakaan Lalu lintas (per 100.000 penduduk)

Indeks angka kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk mengetahui angka kecelakaan. Indeks angka kecelakaan lalu lintas digunakan sebagai data dalam menganalisis kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan urusan perhubungan sebagai langkah dalam mengevaluasi pelayanan di bidang perhubungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut grafik indeks angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 sampai tahun 2020:



**Gambar 2.72 Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk) Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi 2021

Terjadinya kecelakaan lalu lintas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain faktor manusia/pemakai jalan, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan, meningkatnya volume kendaraan, dan regulasi tentang transportasi. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Indeks Angka kecelakaan Lalu lintas (per 100.000 penduduk) di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun memiliki tren capaian yang positif dengan adanya penurunan pada setiap tahunnya. Di tahun 2020 indeks angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Banyuwangi berada pada angka 32,77. Adanya kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, melalui berbagai inovasi kegiatan membuahkan hasil yang positif. Disisi lain juga menandakan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam berkendara.

#### **2.3.1.2.9.2. Perkeretaapian**

Kereta Api adalah salah satu moda transportasi di Kabupaten Banyuwangi yang ada di bawah operasional DAOP 9 Jember. Dengan panjang jalan rel sejauh 55 KM, perkeretaapian di Kabupaten Banyuwangi memiliki profil sebagai berikut :

1. Jumlah Stasiun Aktif : 10 buah
2. Jumlah Kereta Api Komersil Aktif : 7 KA
3. Jumlah Perlintasan Kereta Api (PM 94 Tahun 2018) :
  - Perlintasan Resmi : 90
  - Perlintasan dijaga : 18
  - Perlintasan tidak dijaga : 51
  - Perlintasan tidak dijaga dengan EWS : 21
  - Perlintasan Liar : 23 (update PT. KAI Daop 9 Jember)

4. Daerah Terlintasi :

- 9 Kecamatan dan 25 Kelurahan/Desa
- 2 Jalan Propinsi dan 88 Jalan Kabupaten

Dengan banyaknya perlintasan yang ada, maka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api tidak dapat dihindari.

### **2.3.1.2.9.3. Penerbangan**

Perkembangan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang terbuka untuk investasi, tentunya membawa dampak di segala bidang. Industri strategis baik BUMN maupun swasta melakukan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dengan kemudahan akses yang diberikan dengan regulasi yang ada guna menjamin dan mengatur ketertiban dan kemudahan pelayanan. Di bidang transportasi, guna mendapat kecepatan dan ketepatan serta efisiensi waktu, penggunaan transportasi udara baik komersil maupun private menjadi kebutuhan. Dengan lokasi yang telah ditetapkan bandar udara sebagai terminal transportasi udara mengakomodir penerbangan secara komersil ataupun private dengan kepentingan tertentu. Penerbangan untuk kepentingan tertentu atau khusus guna pendaratan pesawat rotary wing (heli) diperlukan oleh beberapa stake holder, maka dibutuhkan regulasi untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Saat ini ada beberapa stake holder yang memiliki lokasi helipad di Kabupaten Banyuwangi, antara lain :

1. Pertamina
2. PT. Sumberyala Samudera
3. Plengkung
4. PT. BSI

Helipad tersebut dibangun dengan tidak memiliki rekomendasi pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan terbukanya iklim investasi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka akan ada lagi peluang pembangunan helipad. Penertiban dan pengaturan pembangunan tempat pendaratan dan penerbangan pesawat rotary wing (heli) wajib dilaksanakan.

### **2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika**

Urusan Komunikasi dan informatika merupakan urusan wajib yang artinya wajib diselenggarakan oleh seluruh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Berikut indikator program urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi beserta capaiannya pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

**Tabel 2. 22 Indikator Program Urusan Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

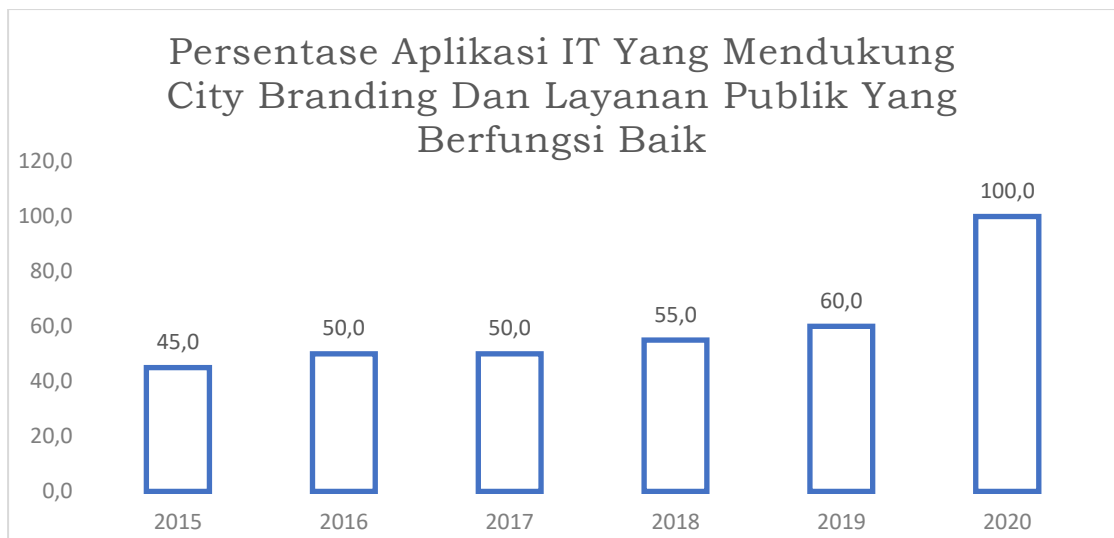
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik	%	62	62	65	68	69,5
2	Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan	Jumlah	250	250	275	300	313
3	Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik	%	50	50	55	60	62,5

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, seluruh capaian indikator yang melekat pada urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren yang terus meningkat. Indikator persentase infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik mengalami pada tahun 2016 sebesar 62% memiliki tren meningkat hingga angka 69,5 pada tahun 2020, indikator jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebar luaskan pada tahun 2016 sebesar 250 mengalami tren meningkat hingga sebesar 313 pada tahun 2020, indikator persentase aplikasi IT yang mendukung *City branding* dan layanan publik yang berfungsi dengan baik sebesar 50% pada tahun 2016 mengalami tren meningkat hingga 62% pada tahun 2020, peningkatan tersebut juga terjadi pada indikator persentase aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik. berikut beberapa grafik peningkatan capaian kinerja indikator yang melekat pada urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Banyuwangi:

#### **2.3.1.2.10.1. Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik**

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang sangat penting dalam pemenuhan fasilitas guna menunjang pelayanan informasi dan teknologi yang optimal. Berikut indikator persentase infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 hingga tahun 2020:



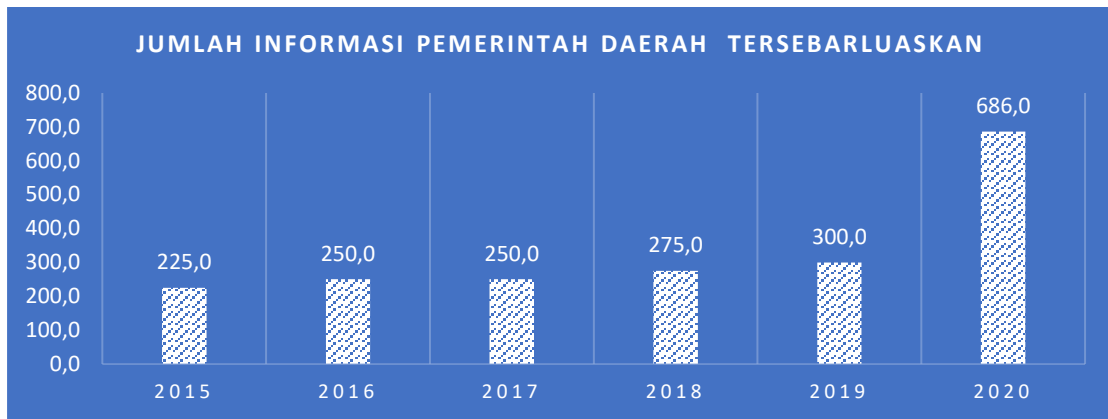
**Gambar 2.73 Persentase Aplikasi IT Yang Mendukung City Branding Dan Layanan Publik Yang Berfungsi Baik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Kabupaten Banyuwangi 2021

Beberapa inovasi berbasis IT yang digencarkan Bupati Azwar Anas beberapa tahun terakhir memiliki pengaruh yang baik terhadap indikator persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir indikator tersebut memiliki tren capaian yang positif. Di tahun 2015 tercatat infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik sebesar 45% dan terus naik hingga tahun 2020 sebesar 100% yang artinya seluruh pelayanan berbasis IT berfungsi dengan baik. Pengembangan aplikasi IT yang dikenal dengan *E-government* ini mempunyai banyak manfaat diantaranya yaitu pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh, serta Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.

#### **2.3.1.2.10.2. Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Tersebarluaskan**

Informasi merupakan kebutuhan dasar dalam segala aspek, berbagai macam perkembangan informasi perlu disebarluaskan agar dapat terjangkau kepada seluruh masyarakat begitu halnya informasi pemerintah daerah. Informasi pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten atau kota yang melekat pada urusan komunikasi dan informasi, sehingga indikator jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan dapat merepresentasikan kinerja pemerintah daerah dalam urusan tersebut. Berikut capaian indikator jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.74 Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Tersebarluaskan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2021

Sejalan dengan meningkatnya infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik maka informasi Pemerintah Daerah juga dapat ditingkatkan persebarannya. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir indikator jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebar luaskan tersebut memiliki tren capaian yang positif. Di tahun 2015 tercatat infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik sebesar 225, kemudian jumlah informasi pemerintah daerah yang ter sebarluaskan di Banyuwangi terus meningkat di tahun 2020 mencapai 686.

#### 2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan baik pada pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten atau kota. Setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut indikator program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Banyuwangi beserta capaiannya pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

**Tabel 2.23 Indikator Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi	Unit	866	866	876	876	876
2	Persentase koperasi aktif	%	80,02	81,29	82,99	83,56	84,13
3	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	9,58	14,85	15,60	15,72	16,04
4	Persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha	%	12,0	12,7	15,1	17,6	20

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Secara umum jumlah koperasi di Kabupaten Banyuwangi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tetapi dengan upaya dari Pemerintah Daerah jumlah koperasi aktif dan berkontribusi terhadap perekonomian cukup tinggi. Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Meskipun demikian masih terdapat 139 lembaga berbadan hukum koperasi yang tidak aktif.

Dari sisi usaha koperasi dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan volume usaha yang cukup signifikan. Bahkan pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda peningkatan volume usaha koperasi mencapai 16,04%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Banyuwangi khususnya yang menjadi anggota koperasi sangat membutuhkan dukungan dari koperasi.

Persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha memiliki capaian yang terus meningkat. Sejak 5 tahun terakhir hingga tahun 2020 usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha menjadi 20 persen. Namun, masih lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan usaha mikro, rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan usaha mikro, serta minimnya jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha menjadi masalah yang harus segera diatasi.

#### **2.3.1.2.12. Penanaman Modal**

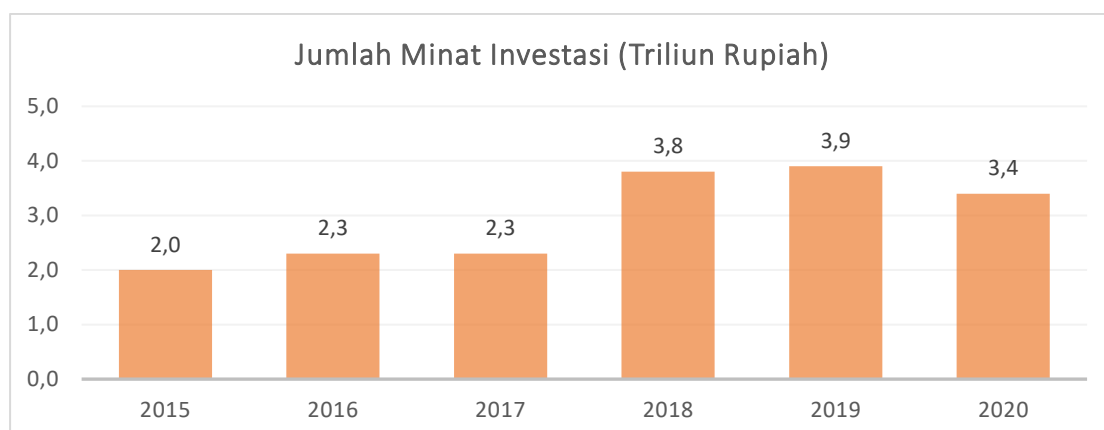
Urusan penanaman modal merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

##### **2.3.1.2.12.1. Jumlah Minat investasi**

Jumlah minat investasi merupakan indikator pada urusan penanaman modal dengan tujuan memetakan minat Investasi dari Investor untuk menanamkan investasi di Kabupaten Banyuwangi. Indikator ini memiliki tren naik berdasarkan data tahun 2015 hingga 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah minat investasi di masa pandemi covid-19 mengalami penurunan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong pengembangan infrastruktur jalan, fasilitas umum maupun listrik di kawasan wisata minat khusus untuk menggaet wisatawan sekaligus meningkatkan potensi investasi daerah. Di tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) khusus terkait pemberian insentif bagi penanam modal di daerah Kabupaten Banyuwangi. Bentuk insentif yang diberikan direncanakan berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, atau pemberian bantuan modal. Berikut grafik

capaian indikator jumlah minat investasi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi:



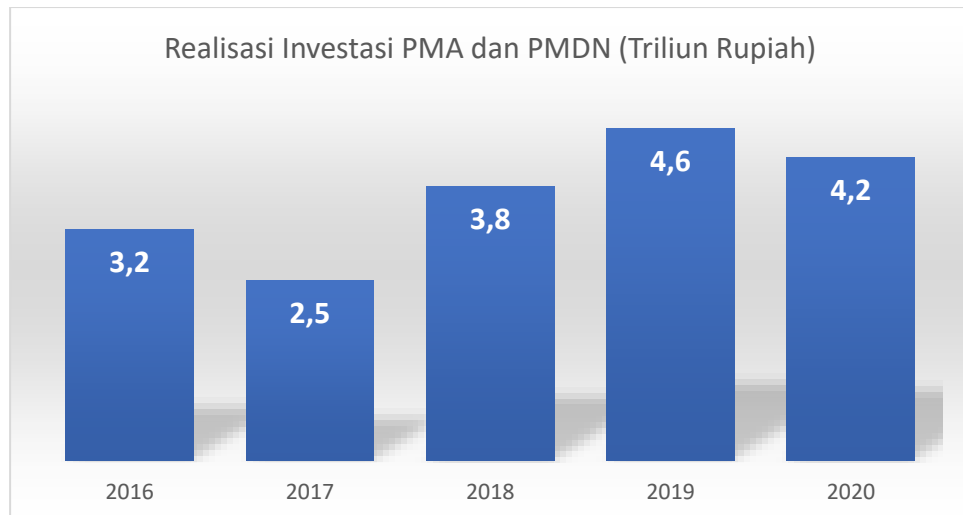
**Gambar 2.75 Jumlah Minat Investasi Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa jumlah minat investasi di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat. Dengan angka capaian 2,3 triliun rupiah di tahun 2016 & tahun 2017 kemudian dapat meningkat menjadi 3,8 triliun rupiah di tahun 2018. Pada tahun 2019 peningkatan angka capaian Kembali terjadi sehingga menjadi 3,9 triliun rupiah. Pada tahun 2020 jumlah minat investasi di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan sebesar 0,5 triliun rupiah atau menjadi 3,4 triliun rupiah. Adanya pandemi covid-19 dan adanya kebijakan pembatasan sosial dapat berdampak juga pada minat investasi yang cenderung turun di tahun 2020.

#### **2.3.1.2.12.2. Realisasi Investasi PMA dan PMDN**

Jika dilihat dari jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2020 mencapai 4,2 triliun rupiah. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat, karena investasi dan pariwisata merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi banyak diminati investor, karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga sektor ekonomi kreatif. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan kemudahan perizinan serta kenyamanan investasi. Pada tahun 2019, Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai prioritas pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berimbas terhadap nilai pertumbuhan investasi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah tujuan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia.



**Gambar 2.76 Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyuwangi 2021

### 2.3.1.2.12.3. Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan dengan SOP yang telah Ditetapkan

Pelayanan investasi dan perizinan memiliki proses yang cukup panjang serta memiliki standar operasional yang harus dijalankan secara runtut sehingga indikator persentase kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan perlu diperhitungkan guna menginterpretasikan kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi. Berikut grafik indikator persentase kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan pada urusan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.77 Persentase Kesesuaian Pelayanan Investasi dan Perizinan Dengan SOP Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Banyuwangi 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa persentase kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang telah

ditetapkan memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2016 sebesar 83% dan pada tahun 2020, kesesuaian pelayanan investasi yang sesuai perizinan dengan SOP meningkat menjadi 95%. Dengan adanya berbagai inovasi dan penggunaan IT di bidang pelayanan publik maka kesesuaian pelayanan investasi dan perizinan dengan SOP yang telah ditetapkan cenderung meningkat. Karena peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi tuntutan yang selalu disuarakan oleh berbagai kalangan, baik itu kalangan dunia usaha maupun masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan beberapa inovasi diantaranya yaitu Mall Pelayanan Publik, Pasar pelayanan Publik di Rogojampi, Pasar Pelayanan Publik di Genteng untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

#### 2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

**Tabel 2. 24 Indikator Program Urusan Kepemudaan Dan Olahraga di Kabupaten Banyuwangi**

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pemuda Terlatih Yang Menjadi Wirausaha Mandiri/Persentase Pemuda Terampil (*perubahan indikator RPJMD-P pada Tahun 2020)	%	42	53,85	40	65	100
2	Persentase Pemuda Terlatih	%		53,85	38	60	100
3	Persentase Anggota Pramuka Yang Terfasilitasi Kegiatannya	%		10,34	60	88	95

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, indikator program kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Banyuwangi bersifat fluktuatif baik pada indikator persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri, persentase pemuda terlatih, jumlah atlet berprestasi, jumlah Even, persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan, persentase

anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya dan persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar sedangkan hanya satu indikator yang memiliki data dengan tren meningkat, yaitu pada indikator jumlah insan olahraga yang berprestasi.

#### **2.3.1.2.13.1. Persentase Pemuda Terlatih Menjadi Wirausaha Mandiri**

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong pada pemuda di daerah Banyuwangi untuk dapat terlatih dan memiliki wirausaha mandiri. Dorongan tersebut memiliki dampak yang positif bagi persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri di Banyuwangi. Berikut data capaian indikator persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:



**Gambar 2.78 Persentase Pemuda Terlatih Yang Menjadi Wirausaha Mandiri/Persentase Pemuda Terampil di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

**Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021**

Berdasarkan data di atas dapat dilihat persentase pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri/persentase pemuda terampil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun memiliki tren capaian yang positif dan terus meningkat. Capaian tahun 2016 sebesar 42 meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai angka 50 meskipun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan di angka 40. Beberapa program pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan olahraga kepada para pemuda dapat membuahkan

hasil yang positif dengan semakin meningkatnya pemuda terlatih yang menjadi wirausaha mandiri.

Selain indikator yang diuraikan tersebut, terdapat indikator yang cukup representatif untuk melihat keaktifan pemuda yaitu indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Indikator tersebut merupakan indikator yang masuk dalam rekomendasi permendagri nomor 18 tahun 2020 pada urusan kepemudaan dan olahraga. Penghitungan indikator tersebut dilakukan dengan cara membagi jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) yang berwirausaha dengan jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) dikalikan dengan 100%

#### 2.3.1.2.14. Statistik

Urusan statistik merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

**Tabel 2. 25 Indikator Program Urusan Statistik Di Kabupaten Banyuwangi**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2021

#### 2.3.1.2.15. Persandian

Urusan Persandian merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan persandian di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

### 2.3.1.2.15.1. Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Baik



**Gambar 2.79 Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Baik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, 2021

Pengamanan informasi merupakan salah satu tupoksi yang dimiliki oleh Bidang Statistik dan Persandian di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan pengamanan informasi daerah di Kabupaten Banyuwangi terlihat berjalan dengan baik. Tercermin dengan selalu terpenuhinya target setiap tahunnya sehingga angka capaian persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik menunjukkan angka 100% di setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2015 sampai tahun 2020.

### 2.3.1.2.16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

#### 2.3.1.2.16.1. Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata

Pariwisata telah menjadi bidang yang di andalkan oleh Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir. Wisata yang ditawarkan tidak hanya berbentuk wisata alam akan tetapi juga merambah kepada pariwisata budaya yang disuguhkan melalui festival-festival yang beberapa tahun terakhir telah diselenggarakan. Jumlah festival yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus bertambah setiap tahunnya dari awalnya berjumlah 10 festival pada tahun 2012 hingga menjadi 123 festival yang tersebar di setiap bulan di tahun 2020. Jumlah festival yang terus bertambah tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata, capaian tahun 2015-2019 tersaji dalam grafik berikut :



**Gambar 2.80 Jumlah Budaya Lokal Yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi terus bertambah setiap tahunnya. Berjumlah 12 budaya lokal pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 21 budaya lokal di tahun 2016 dan 24 budaya lokal di tahun 2017. Jumlah budaya lokal yang dikembangkan terus meningkat hingga pada tahun 2018 berjumlah 32 dan terus meningkat menjadi 36 di tahun 2019 yang artinya jumlah tersebut telah meningkat 3x lipat dari tahun 2015. Pada tahun 2020 jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata menurun hanya menjadi 28 budaya lokal. Karena dampak dari adanya pembatasan sosial akibat pandemi covid-19 sehingga beberapa festival budaya yang batal dilaksanakan.

#### **2.3.1.2.16.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Indeks Pembangunan Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge-based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat

dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait pembangunan kebudayaan.

#### 2.3.1.2.17. Perpustakaan

Urusan perpustakaan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

##### 2.3.1.2.17.1. Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Persentase minat baca di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat dan hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan di Banyuwangi. Berikut data capaian persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 6 tahun:



**Gambar 2.81 Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa persentase jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian meningkat ditahun 2015 hingga tahun 2019, dengan capaian tahun 2015 sebesar 80% kemudian meningkat menjadi 97% di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 persentase pengunjung Perpustakaan mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 49,1%. Penurunan tersebut merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19, yang menyebabkan adanya pembatasan interaksi penduduk (kerumunan) selama tahun 2020. Selain itu beberapa masalah selain menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan adalah kurangnya koleksi buku perpustakaan, Kurang tenaga SDM Perpustakaan dan Pustakawan, Kurangnya jumlah Perpustakaan berstandart Nasional Perpustakaan. Kurangnya keterlibatan masyarakat

dalam kegiatan sosialisasi / promosi. Rendahnya minat masyarakat menjadi anggota perpustakaan. Belum meratanya layanan perpustakaan. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2020, diketahui bahwa IPLM Kabupaten Banyuwangi sebesar 5,6 cukup rendah jika dibandingkan dengan IPLM Nasional sebesar 12,93 dan IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 13,44.



**Gambar 2.82 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Sedangkan Indeks Tingkat Kegemaran Membaca (ITKM) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebesar 56,13 masuk dalam kategori sedang berada di atas ITKM nasional sebesar 55,74.



**Gambar 2.83 Indeks Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kabupaten Banyuwangi dan Nasional Tahun 2020**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Terhadap kondisi tersebut tentu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten akan terus berupaya untuk meningkatkan IPLM dan ITKM sebagai cerminan tingkat budaya literasi masyarakat, melalui layanan mobil perpustakaan keliling, penambahan koleksi buku, digitalisasi koleksi pustaka, sosialisasi kegiatan gemar membaca melalui event Banyuwangi Festival serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk perluasan jangkauan layanan perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### 2.3.1.2.18. Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan pada pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten atau kota, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

**Tabel 2. 26 Indikator Program Urusan Kearsipan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

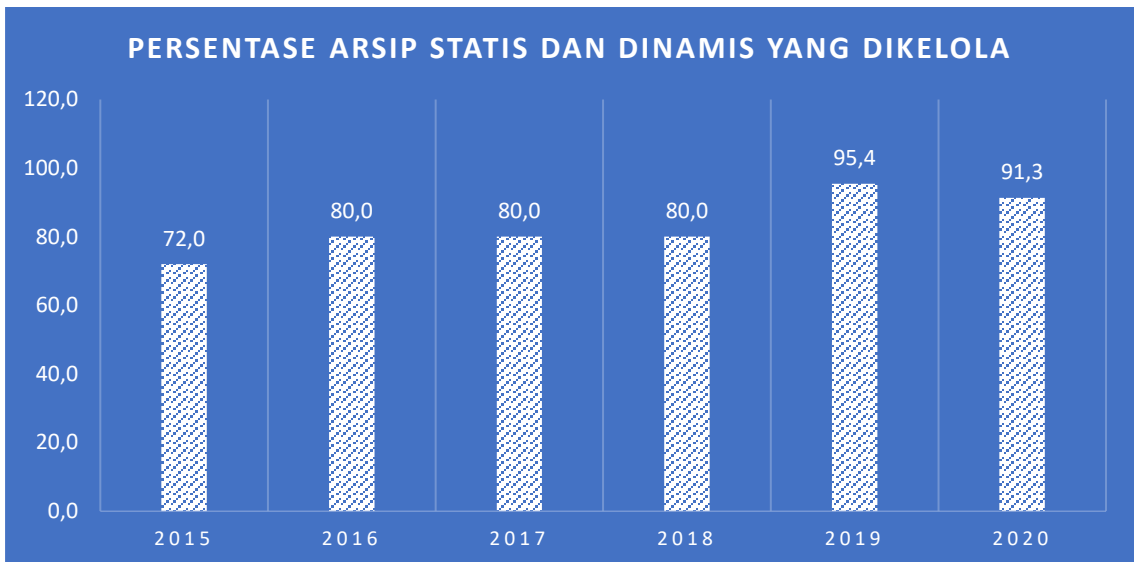
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Arsip Statis Dan Dinamis Yang Dikelola	%	80	80	80	95	95
2	Persentase Arsip/Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik	%	80	87	89	93	98

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui indikator persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola, indikator persentase arsip/dokumen daerah dalam kondisi baik, indikator persentase sarpras kearsipan dalam kondisi baik memiliki tren data meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Berikut grafik capaian beberapa indikator urusan kearsipan di Kabupaten Banyuwangi:

##### 2.3.1.2.18.1. Persentase Arsip Statis Dan Dinamis Yang Dikelola

Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Berikut merupakan data capaian persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun:



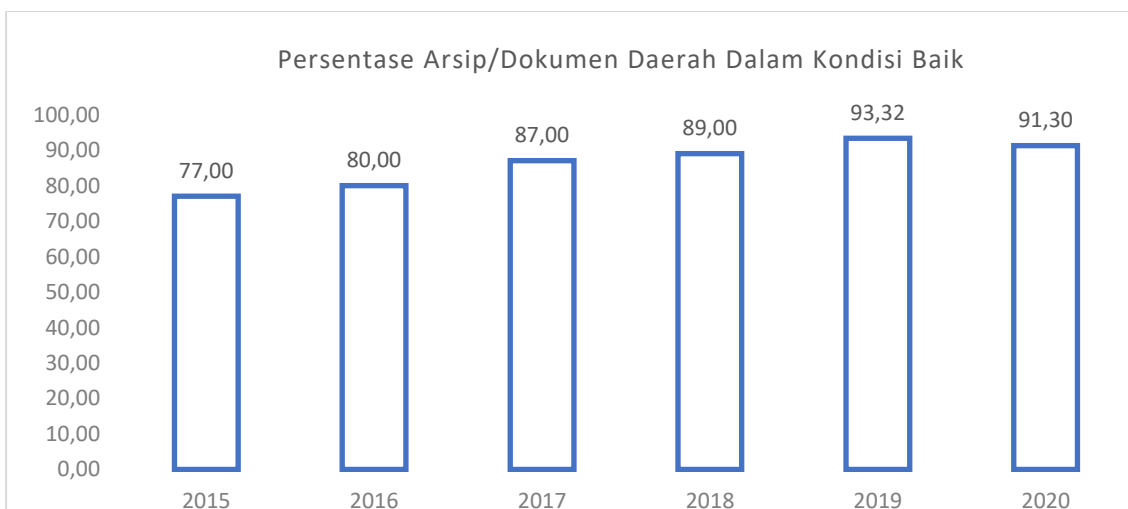
**Gambar 2.84 Persentase Arsip Statis Dan Dinamis Yang Dikelola di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Data di atas memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2020 persentase arsip statis dan arsip dinamis yang dikelola Di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang positif dengan capaian yang terus meningkat. Tahun 2015 sebesar 72% kemudian meningkat menjadi 91,3% di tahun 2020.

#### **2.3.1.2.18.2. Persentase Arsip/Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik**

Pengelolaan arsip daerah juga harus memerhatikan kondisi dari arsip tersebut. Selain adanya peningkatan pada arsip yang dikelola, maka persentase kondisi baik dari arsip tersebut juga terus meningkat di Kabupaten Banyuwangi. Secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



**Gambar 2.85 Persentase Arsip/ Dokumen Daerah Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi, 2021

Berdasarkan gambar grafik di atas, dalam kurun waktu 6 tahun (tahun 2015 – tahun 2020) persentase arsip/dokumen daerah dalam kondisi baik memiliki tren capaian meningkat. Capaian tahun 2015 sebesar 77% dan terus meningkat menjadi 91,3% di tahun 2020.

### 2.3.2. Unsur penunjang

#### 2.3.2.1. Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai perencanaan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari beberapa indikator urusan perencanaan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

##### 2.3.2.1.1. Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas dalam Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang di susun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun atau yang selanjutnya disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dokumen perencanaan 5 tahun yang selanjutnya disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 tahun rencana yang selanjutnya disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Berikut merupakan data capaian persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.86 Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan Tahun 2016-2020**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan memiliki tren capaian yang meningkat. Pada tahun 2016 persentase kualitas dokumen perencanaan Kabupaten Banyuwangi 80%. Pada tahun 2017 sedikit meningkat menjadi 82% dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 83%. Pada tahun 2019 kembali terlihat adanya peningkatan yang cukup baik pada persentase terpenuhinya aspek kualitas dokumen perencanaan di Kabupaten Banyuwangi hingga mencapai angka 90%. Hal ini berpengaruh pada nilai komponen perencanaan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kabupaten Banyuwangi sebagaimana komponen perencanaan dalam penilaian AKIP mempunyai bobot 30%, untuk nilai komponen perencanaan dalam penilaian AKIP Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut : Tahun 2016 sebesar 26,85, pada tahun 2017 mengalami penurunan sedikit menjadi 26,69 kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 25,75 dan pada tahun 2019 naik menjadi 26,59 dan terakhir mencapai 26,82 pada tahun 2020. Sehingga capaian nilai komponen perencanaan dalam AKIP Kabupaten Banyuwangi adalah 89,4%. Dalam uraian di atas dapat dilihat dari permasalahan mengenai adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah. Hal tersebut yang menyebabkan bahwa dalam tahun 2019 dan 2020 capaian bersifat stagnan.

#### **2.3.1.24.2 Persentase SKPD yang Tercapai Target Programnya**

Perangkat Daerah (PD) merupakan perpanjangan tangan kepala daerah dalam mengimplementasikan visi misi yang ingin dicapai dalam periode kepemimpinannya. Visi misi yang telah di bentuk oleh kepala daerah selanjutnya diturunkan hingga menjadi program-program yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah dalam suatu daerah. Kabupaten Banyuwangi memiliki 52 PD yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, Satpol PP, 6 Badan, 25 Kecamatan. Berikut merupakan data capaian persentase PD yang tercapai target programnya di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.87 Persentase SKPD Yang Tercapai Target Programnya di Kabupaten Banyuwangi**

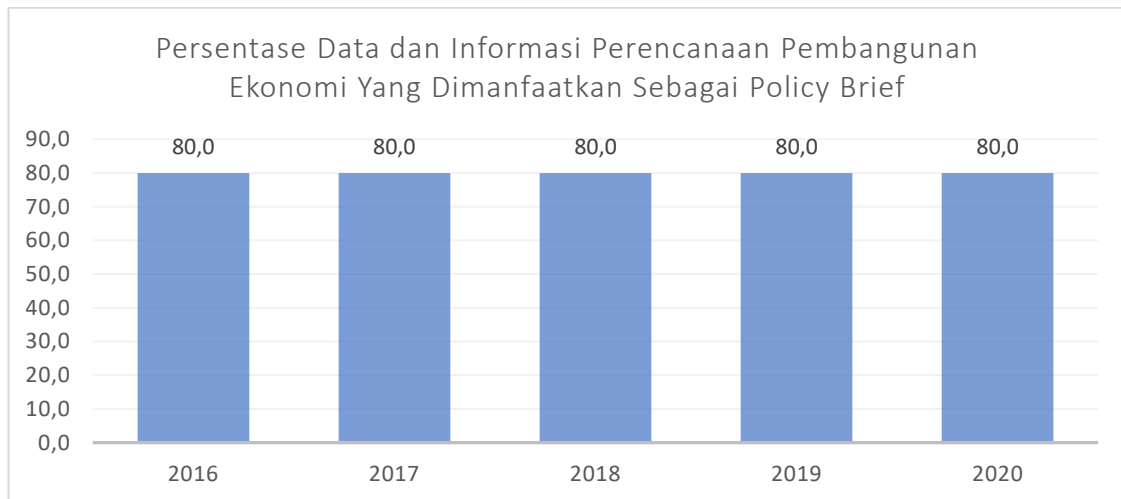
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Persentase PD yang tercapai target programnya pada Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren capaian yang stagnan. Berdasarkan grafik di atas maka terlihat bahwa capaian persentase PD yang tercapai target programnya Kabupaten Banyuwangi tahun 2015-2020 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 90%. Hal ini seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah tahun 2017 dari pendekatan *money follow function* menjadi *money follow program*. Permasalahan pembangunan daerah pada perencanaan pembangunan kesra dan pemerintahan yang begitu kompleks serta bersifat dinamis sesuai dengan perubahan kebijakan dan regulasi yang ada. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu dan berdampak pada pembangunan PD yang tercapai sesuai target cenderung bergerak stagnan.

#### **2.3.2.1.2. Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang dimanfaatkan sebagai *Policy Brief***

Penentu kebijakan membutuhkan sebuah *policy brief* dalam proses menentukan keputusan. *Policy brief* adalah ringkasan dari analisis terhadap suatu kebijakan yang ditujukan untuk level penentu kebijakan tertinggi dan bertujuan mengidentifikasi isu-isu tertentu, serta membuat pilihan kebijakan, bukti-bukti baru, dan rekomendasi baru bagi kebijakan yang akan dirancang. Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan membutuhkan analisis mengenai perencanaan pembangunan sehingga keputusan yang diambil benar-benar menjadi solusi atas masalah perencanaan pembangunan yang terjadi. Data dan informasi perencanaan pembangunan di kelompok dalam tiga bidang yaitu data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, data dan informasi perencanaan

pembangunan bidang kesra dan pemerintahan dan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah dan lingkungan hidup. Berikut merupakan data capaian persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.88 Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Yang Dimanfaatkan Sebagai Policy Brief di Kabupaten Banyuwangi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren capaian yang stagnan. Berdasarkan grafik di atas maka terlihat bahwa capaian Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* tahun 2015-2020 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 80. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah dalam pembangunan daerah yang terletak pada perencanaan pembangunan kesra dan pemerintahan yang bersifat dinamis dan berubah-ubah. Permasalahan yang harus ditangani oleh SKPD setempat mengenai tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

#### 2.3.2.1.3. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai keuangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari beberapa indikator urusan keuangan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

#### 2.3.2.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD

Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PAD yang diperoleh Banyuwangi didominasi oleh sektor pariwisata yang beberapa tahun terakhir memang digencarkan pembangunannya. Berikut merupakan rincian data peningkatan PAD Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun:



**Gambar 2.89 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

Sumber: Bapenda Kabupaten Banyuwangi, 2021

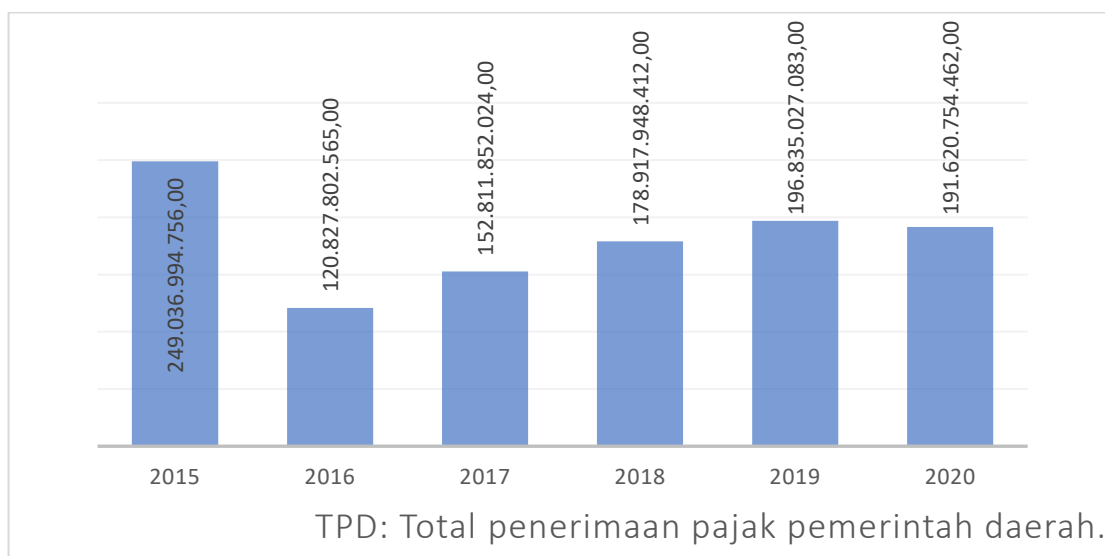
Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 2016 – 2020 sebesar 7,24%. Pada Tahun 2017 PAD Kabupaten Banyuwangi sebesar 388,94 M meningkat 5,73%, kondisi ini terus berlanjut sampai dengan Tahun 2019 dimana PAD meningkat 10,14% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 PAD Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan sebesar Rp. 12,95 miliar (menurun 2,61%) menjadi Rp. 482,740 Miliar, hal ini terjadi dikarenakan turunnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akibat terdampak oleh pandemi Covid-19. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak Self Assesment Dalam Membayar Kewajiban Pajaknya sehingga pada tahun 2020 pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya.

#### 2.3.2.1.5. Total Penerimaan Pajak Daerah

Sejalan dengan peningkatan PAD, Penerimaan Pajak Daerah (TPD) Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian meningkat. Tahun 2016 Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 120,827 miliar. Dan terus terjadi peningkatan hingga pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 196,83 miliar. Namun, pada tahun 2020, realisasi TPD mengalami penurunan sebesar Rp. 5,21 miliar menjadi Rp. 191,62 miliar (turun 5,21%). COVID-19 yang telah terjadi hampir 1,5 tahun sangat memukul semua sektor utamanya

pariwisata. Banyuwangi yang menjadikan pariwisata sebagai payung pembangunan otomatis sangat berdampak.

Seperti diketahui salah satu penyumbang terbesar Pajak Daerah adalah sektor pariwisata. Selama Bulan April hingga Juni 2020 (3 bulan) destinasi wisata tutup, tentu dengan ditutupnya destinasi wisata ini memberikan dampak kepada hotel, restoran dan usaha jasa pariwisata lainnya sehingga juga mengakibatkan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan mengalami penurunan selama Tahun 2020. Hal tersebut juga dikarenakan karena adanya isu permasalahan data wajib pajak belum terdata dan terupdate secara optimal, sehingga para wajib pajak tidak merasa memiliki kewajiban dalam membayar pajak.



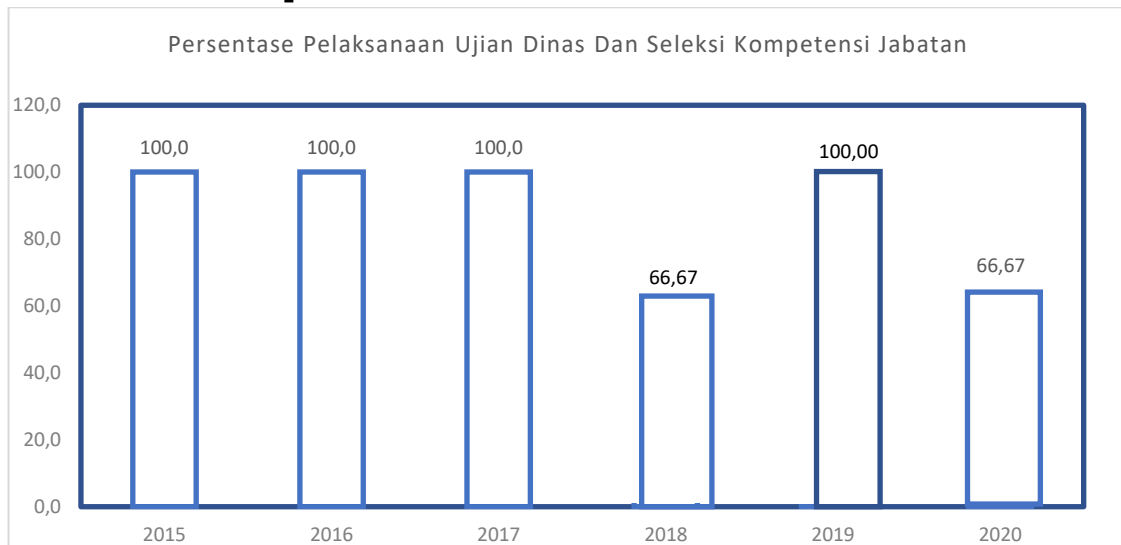
**Gambar 2.90 TPD: Total Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: BAPENDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

#### 2.3.2.1.6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari indikator urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada poin berikut:

### 2.3.2.1.6.1. Persentase Pelaksanaan Ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan



**Gambar 2.91 Persentase Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Seleksi Kompetensi Jabatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

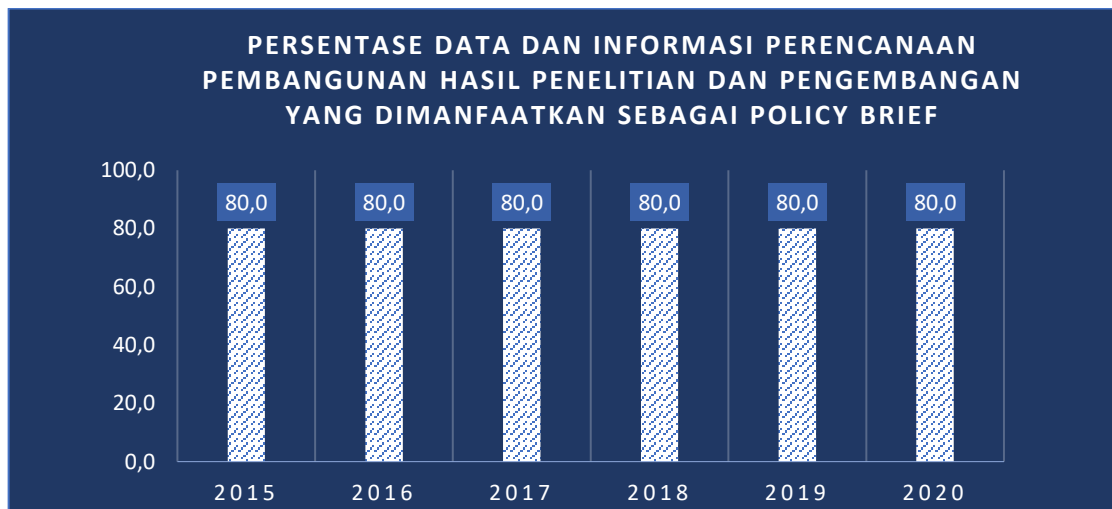
Sumber: BKPP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian menurun. Tiga tahun awal angka capaian menunjukkan tren capaian yang stabil yaitu pada tahun 2015-2017 capaian persentase pelaksanaan ujian dinas dan seleksi kompetensi jabatan memiliki angka capaian 100. Akan tetapi pada tahun 2018 dan tahun 2020 angka capaian menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 66,67. Hal tersebut dikarenakan PNS yang mengusulkan seleksi penyetaraan Ijazah tidak sesuai dengan kompetensinya dengan kebutuhan analisa jabatan masing-masing perangkat daerah sehingga pelaksanaan seleksi penyetaraan ijazah tidak dapat dilaksanakan.

### 2.3.2.1.7. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari indikator urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada poin berikut:

### 2.3.2.1.7.1. Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan sebagai *Policy Brief*



**Gambar 2. 92 Persentase Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan Sebagai Policy Brief di Kabupaten Banyuwangi**

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu beberapa tahun menunjukkan tren capaian yang stagnan. Berdasarkan grafik diatas maka terlihat bahwa capaian persentase data dan informasi perencanaan pembangunan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai *policy brief* tahun 2015-2020 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 80. Masih belum adanya SDM dalam bidang kelitbangan (peneliti) yang kompeten di dalam bidangnya. Selain itu juga disebabkan oleh permasalahan mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan.

### 2.3.3. Unsur Pendukung

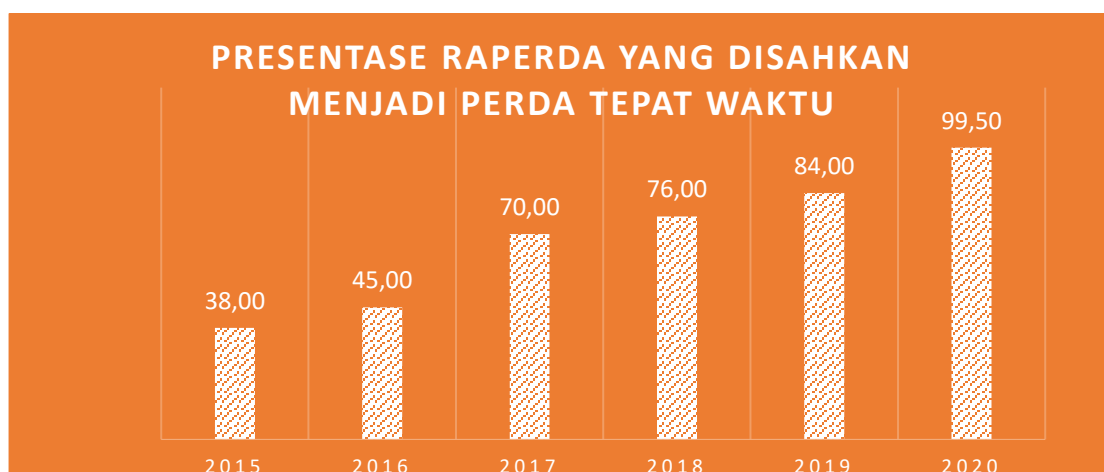
#### 2.3.3.1.1. Sekretariat DPRD

Urusan Sekretariat DPRD merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai kesekretariatan DPRD yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari indikator-indikator urusan kesekretariatan DPRD dapat dilihat pada poin-poin berikut:

#### 2.3.3.1.1.1. Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu

Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tepat waktu di Kabupaten Banyuwangi

memiliki tren capaian yang positif. Secara rinci datanya tersaji dalam grafik berikut:



**Gambar 2.93** Persentase Raperda yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

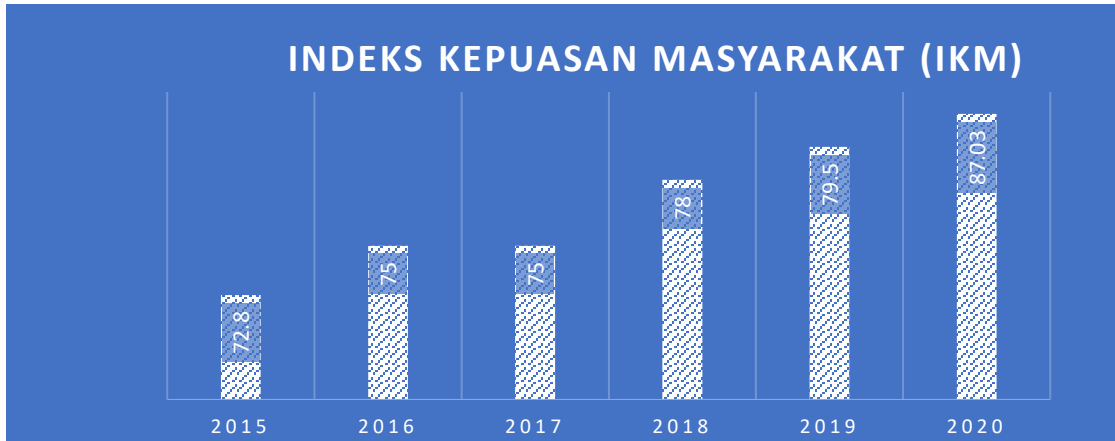
Berdasarkan grafik di atas maka dapat dilihat bahwa persentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2015 sebesar 38%. Pada tahun 2016 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 45. Pada tahun 2017 masih mengalami peningkatan menjadi 70 dan terus meningkat sampai pada tahun 2018 sebesar 76. Kemudian pada tahun 2019 masih mengalami peningkatan menjadi 84 dan meningkat menjadi 99.5 pada tahun 2020. Dengan demikian maka capaian raperda yang disahkan menjadi perda dengan tepat waktu berhasil ditingkatkan oleh PD setempat. Meskipun angka yang dihasilkan menunjukkan progress yang meningkat namun terdapat permasalahan banyaknya permasalahan di masyarakat tidak terselesaikan karena minimnya payung hukum sehingga angka masih belum menyentuh 100%.

#### **2.3.3.1.2. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari indikator-indikator urusan kesekretariatan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

##### **2.3.3.1.2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang positif yang secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:



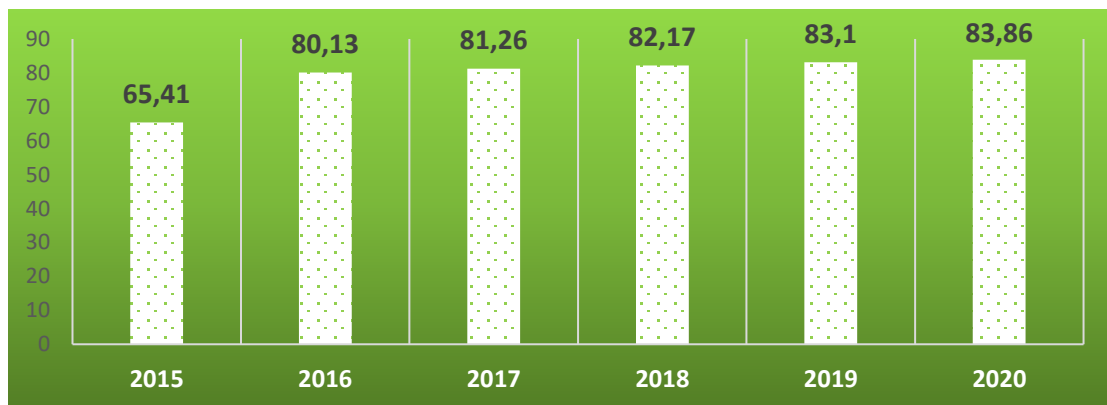
**Gambar 2.94 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 2021

Tercatat adanya peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu mulai tahun 2015-2020. Dengan capaian tahun 2015 sebesar 72.8. Kemudian pada tahun 2016 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 75 dan angka tersebut bertahan sampai tahun 2017 sehingga capaian pada tahun 2017 masih stagnan dengan capaian sebesar 75. Pada tahun 2018 angka IKM memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 78 dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 memiliki peningkatan menjadi 79.5. Pada tahun 2020 angka IKM terus mengalami peningkatan pencapaian sehingga menjadi 87.03. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi baik dan menjadi penilaian positif dari masyarakat sekitar.

#### 2.3.3.1.2.2. Nilai SAKIP

Banyuwangi merupakan Kabupaten yang memiliki predikat SAKIP A selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Berikut rincian skor atas perolehan predikat SAKIP yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.95 Nilai SAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2021

Berdasarkan grafik tersebut Nilai SAKIP Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang positif dengan adanya peningkatan skor di setiap tahunnya. Capaian pada tahun 2015 tercatat sebesar 65,41. Kemudian pada tahun 2016 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 80,13 dan dapat menerima predikat SAKIP A. Predikat A terus diperoleh Kabupaten Banyuwangi hingga empat tahun setelahnya. Dimana skor 2017 sebesar 81,26; pada tahun 2018 sebesar 82.17; tahun 2019 sebesar 83,1; dan tahun 2020 sebesar 83,86 dengan predikat A.

#### 2.3.4. Unsur Pengawasan

##### 2.3.4.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**Tabel 2. 27 Indikator urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi**

No	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban I	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban II	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban III	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi 2020

Berdasarkan tabel diatas, secara garis besar indikator-indikator dari urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki tren capaian yang positif. Secara rinci capaian dari masing-masing indikator urusan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut dijelaskan pada poin-poin berikut:

#### 2.3.4.1.1. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban I



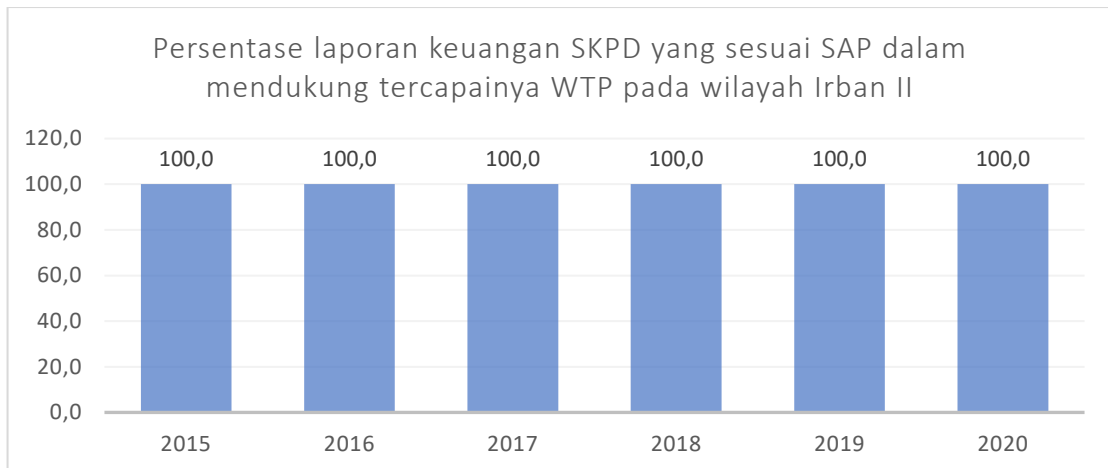
**Gambar 2.96 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban I**

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2020

Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren capaian positif yang stabil. Berdasarkan grafik berikut maka terlihat bahwa capaian persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I tahun 2015-2020 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 100.

#### 2.3.4.1.2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban II

Seperti halnya persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I maka pada wilayah irban II persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP nya selama kurun waktu 5 tahun juga menunjukkan tren capaian positif yang stabil. Berdasarkan grafik berikut maka terlihat bahwa capaian persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban II tahun 2015-2020 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 100.



**Gambar 2.97 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban II**

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2021

#### 2.3.4.1.3. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban III

Seperti halnya persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I dan wilayah Irban II maka pada wilayah Irban III persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP nya selama kurun waktu 5 tahun juga menunjukkan tren capaian positif yang stabil. Berdasarkan grafik berikut maka terlihat bahwa capaian persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban III tahun 2015-2020 memiliki angka capaian yang stabil yaitu berada pada angka 100.



**Gambar 2.98 Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah irban III**

Sumber: Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2020

## 2.3.5. Urusan Pilihan

### 2.3.5.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

#### 2.3.5.1.1. Produksi Perikanan

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang berada di ujung Pulau Jawa. Letak wilayahnya tersebut menyebabkan Banyuwangi memiliki sebagian batas wilayah berupa laut. Sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai memiliki profesi pekerjaan sebagai nelayan, contohnya seperti daerah Muncar yang dikenal sebagai daerah penghasil ikan di daerah Banyuwangi. Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar juga merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, dan nomor dua Nasional. Komoditas utama yang dihasilkan nelayan Banyuwangi adalah ikan lemuru yang menjadi bahan baku ikan kalengan seperti sarden. Berikut merupakan grafik data produksi perikanan kelompok tani di Kabupaten Banyuwangi:



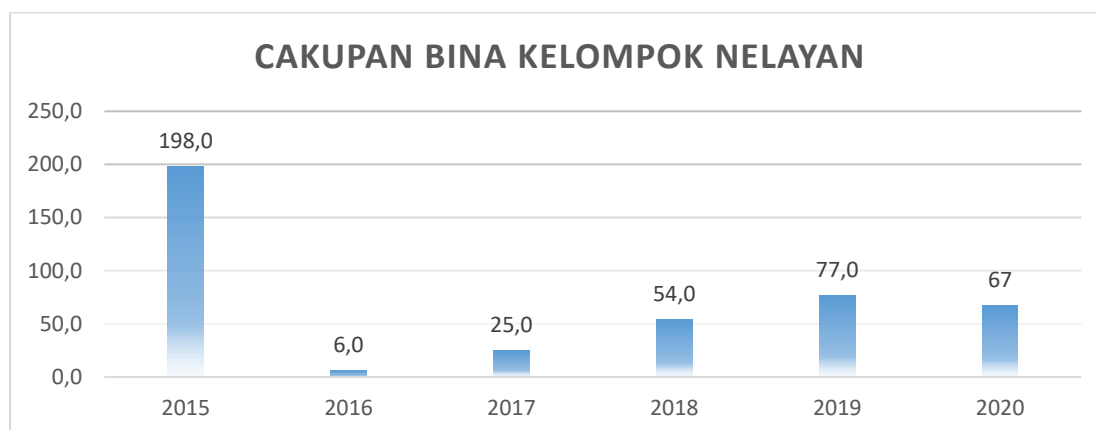
**Gambar 2.99 Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, 2020

Grafik data diatas menunjukkan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2015 sebesar 86,428 Ton. Kemudian pada tahun 2016 angka capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan menjadi 73,133 Ton dan terus menurun menjadi 68,353 Ton di tahun 2017. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang terus menurun, produksi perikanan pada tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 103,082 Ton dan menjadi 110,231 Ton pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 produksi perikanan mengalami penurunan drastis menjadi 39,611 Ton.

### 2.3.5.1.2. Cakupan bina Kelompok Nelayan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan pembinaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan dan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dengan harapan dapat meningkatkan kemandirian pelaku usaha perikanan. Berikut grafik angka capaian cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.100 Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi 2020

Berdasarkan grafik diatas cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian menurun. Di tahun pertama yaitu tahun 2015 angka capaian menunjukkan angka sebesar 198 dan capaian tersebut telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 57 kelompok. Namun angka capaian yang tinggi tersebut menunjukkan adanya penurunan yang sangat tinggi pada tahun 2016 sehingga angka capaian menjadi 6 kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan dapat kembali ditingkatkan pada tahun 2017 menjadi 25 kelompok dan terus meningkat menjadi 54 kelompok pada tahun 2018. Pada tahun 2019 angka capaian terus meningkat menjadi 77 kelompok. Pada tahun 2020 cakupan bina nelayan menurun menjadi 67 kelompok.

### 2.3.5.2. Pariwisata

Urusan pariwisata merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang sedang gencar melakukan pembangunan pada bidang pariwisata. Selain gencarnya pembangunan, kegiatan promosi pariwisata juga sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Saat ini Banyuwangi telah dikenal sebagai daerah yang kaya akan pariwisata alam yang wajib dikunjungi para wisatawan. Berikut capaian kinerja indikator program urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

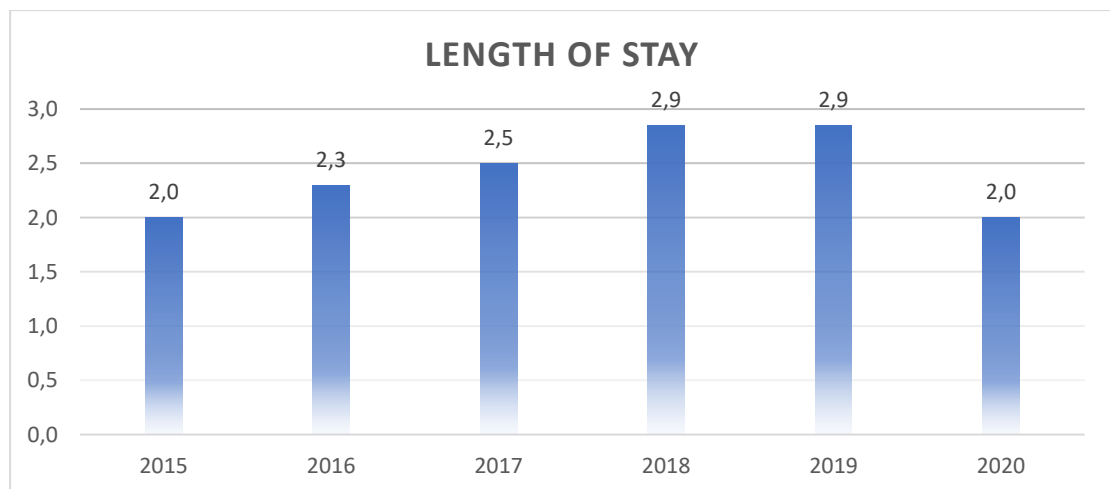
**Tabel 2.28 Indikator program urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Length of stay	Hari	2,3	2,5	2,9	2,9	2
2	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	77.139	98.970	99.198	100.622	15.517
3	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	4.022.449	4.832.999	4.939.934	5.307.054	2.579.460

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Berdasarkan data diatas, capaian indikator pada urusan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi secara garis besar memiliki tren data meningkat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, yakni dengan pertumbuhan sebesar 30,44% (untuk kunjungan wisatawan mancanegara) dan sebesar 31,94% (untuk kunjungan wisatawan nusantara). Pada tahun 2020 capaian indikator ini cenderung menurun seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang melanda dunia dikarenakan dampak pandemic covid-19.

Dengan banyaknya jumlah wisata yang kali ini dikenal wisatawan memiliki dampak positif terhadap lamanya wisatawan tinggal (*Length of stay*) di Banyuwangi. Para wisatawan rata-rata membutuhkan waktu dua sampai tiga hari untuk tinggal di Banyuwangi dan menikmati pariwisata yang ada. Berikut data capaian *Length of stay* di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.101 Length of stay di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2021

Berdasarkan data diatas indikator *Length Of Stay* di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu beberapa tahun memiliki tren capaian meningkat dengan capaian Tahun 2015 sebesar 2. Capaian tersebut kemudian meningkat menjadi 2.3 di tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 2.5 di tahun 2017. *Length of Stay* di Banyuwangi terus meningkat hingga pada tahun 2018 angka capaian menjadi 2.9. Angka capaian 2.9 tersebut bertahan hingga tahun 2019. Sedangkan *Length of stay* turis di Banyuwangi pada tahun 2020, hanya selama 2 hari.

Selain tiga indikator yang disebutkan diatas, terdapat satu indikator yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja pada urusan pariwisata yaitu indeks daya saing pariwisata. Indeks daya saing pariwisata adalah kemampuan tujuan wisata (destinasi) untuk mempertemukan kebutuhan pengunjung dari berbagai aspek dengan pengalaman wisata.

### 2.3.5.3. Pertanian

Urusan pertanian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, setiap urusan memiliki indikator program yang dapat merepresentasikan kinerja pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan urusan tersebut. Berikut capaian kinerja indikator program urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga tahun 2020:

**Tabel 2. 29 Indikator program urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi**

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	2,81	1,49	-0,73	-0,56	-2,96
3	Produksi daging	Ton	10.984,9	10.596,12	10.114,48	7.770,93	3.836,89
4	Produksi telur	Ton	15.162,8	12.351,10	12.200,89	12.843,48	7.422,77
5	Produksi susu	Ton	1948,7	1673,5	1397,6	1392,8	769,8
6	Jumlah kelompok dan Usaha peternakan yang tumbuh	Kelompok	596	606	615	625	538
7	Angka kejadian penyakit	%	4,74	3,9	4,22	2,8	3
9	Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV	Unit	3	4	5	6	7
10	Produktivitas padi atau bahan pangan	Kwintal/ Hektar	65,94	65,50	65,88	66,2	66,24

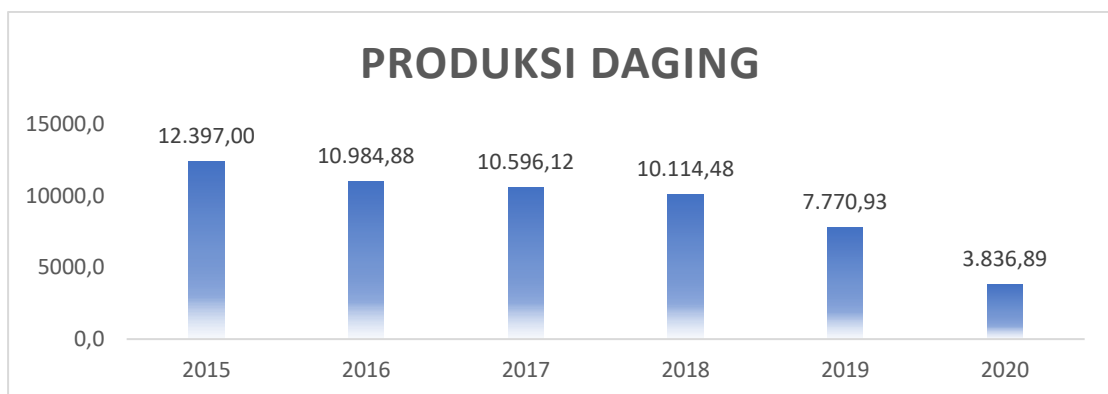
No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
	utama lainnya per Hektar						
13	Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura unggulan daerah	%	3,33	3,35	3,35	3,41	3,57

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, 2021

Berdasarkan data diatas, capaian indikator urusan pertanian memiliki tren yang meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berikut beberapa grafik capaian indikator kinerja pada urusan pertanian di Kabupaten Banyuwangi:

#### 2.3.5.3.1. Produksi daging

Produksi daging di Kabupaten Banyuwangi di dominasi oleh produksi daging ayam dan daging sapi. Sedangkan produksi daging terkecil adalah pada produksi daging kuda dan babi. Berikut data capaian produksi daging secara keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi:



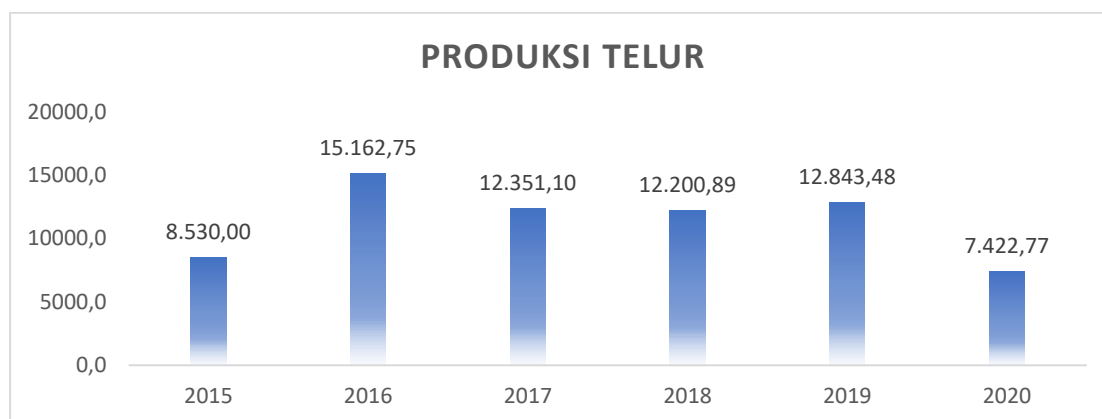
**Gambar 2.102 Produksi daging di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, 2020

Gambar diatas menunjukkan bahwa produksi daging di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang fluktuatif. Dengan capaian Tahun 2015 sebesar 12397.00 Ton, kemudian capaian tersebut menurun pada tahun 2016 menjadi 10984.88 Ton dan terus menurun hingga menjadi 7,770.93 Ton pada tahun 2019. Selain itu pada tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid-19, produksi daging secara keseluruhan menurun menjadi hanya sebesar 3,836.89 Ton.

### 2.3.5.3.2. Produksi telur

Produksi telur di Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh produksi telur burung puyuh dan telur ayam. Sedangkan produksi telur terkecil yaitu produksi telur dari itik. Berikut data capaian produksi telur secara keseluruhan di Kabupaten Banyuwangi:



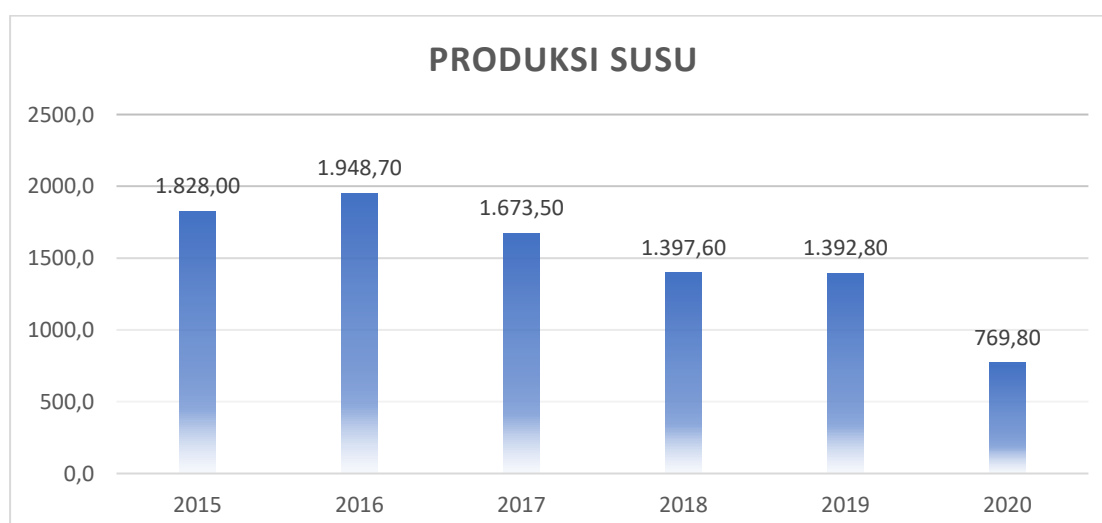
**Gambar 2.103 Produksi telur di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, 2020

Gambar diatas menunjukkan bahwa produksi telur di Kabupaten Banyuwangi memiliki tren capaian yang fluktuatif. Dengan capaian Tahun 2015 sebesar 8,530.00 Ton, kemudian capaian tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi 15,162.75 Ton. Pada tahun 2020, Produksi Telur mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi hanya 7,422.77 Ton.

### 2.3.5.3.3. Produksi susu

Susu yang di produksi di Kabupaten Banyuwangi merupakan susu sapi perah rakyat. Secara garis besar jumlah produksi susu di Kabupaten Banyuwangi terus menurun jumlahnya pada setiap tahun. Secara rinci datanya tersaji pada grafik berikut:



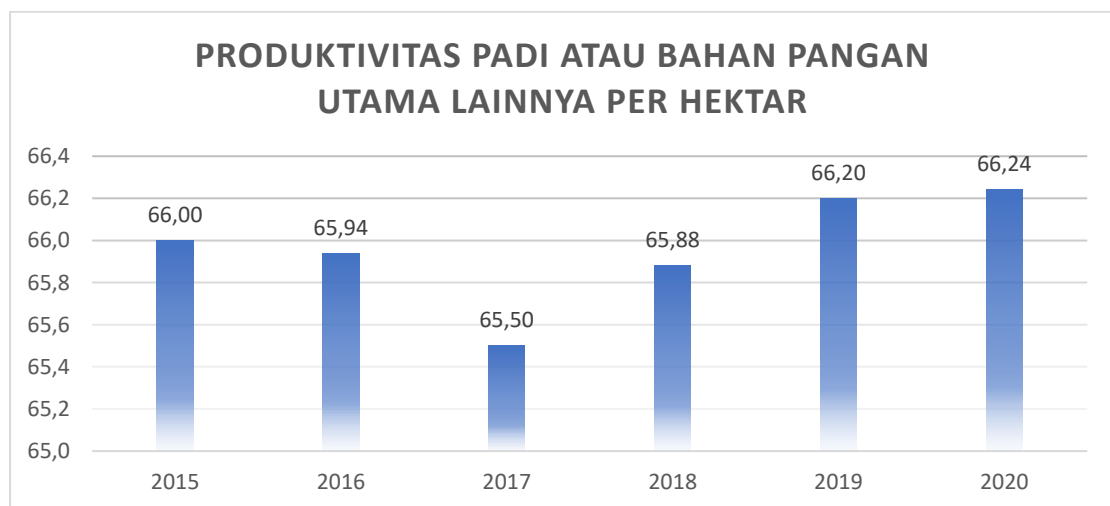
**Gambar 2.104 Produksi Susu di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, 2020

Gambar diatas menunjukkan produksi susu di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian menurun. Di tahun awal yaitu pada tahun 2015 jumlah produksi susu tercatat sebesar 1,828.00 Ton. Angka capaian produksi susu pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan menjadi 1,948.70 Ton. Setelah tahun 2016, produksi Susu cenderung menurun, dan pada tahun 2020, produksi susu di Kabupaten Banyuwangi hanya sebesar 769.90 Ton.

#### 2.3.5.3.4. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar

Rata-rata produktivitas bahan pangan utama per hektar di Kabupaten Banyuwangi di dominasi oleh ubi kayu dan ubi jalar. Meskipun produksi dan luas panen tertinggi masih didominasi oleh padi. Sedangkan produktivitas/hektar terendah adalah kacang hijau. Secara lengkap data capaian produktivitas bahan pangan secara menyeluruh tersaji dalam grafik berikut:



**Gambar 2.105 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

Gambar diatas menunjukkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian meningkat. Di tahun awal yaitu pada tahun 2015 produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar tercatat sebesar 66,00 kw/ha. Angka capaian produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar terus meningkat pada setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 angka produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar menjadi 66,2 kw/ha. Pada tahun 2020 produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per Hektar di Kabupaten Banyuwangi hanya meningkat tipis 0,04 kw/ha sehingga menjadi sebesar 66,24 kw/ha.

## 2.3.5.4. Perdagangan

### 2.3.5.4.1. Jumlah Realisasi Ekspor



**Gambar 2.106 Jumlah realisasi ekspor di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Jumlah realisasi ekspor Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 terlihat mengalami peningkatan. Meskipun sempat turun jauh di tahun 2016 menjadi 85.6 dari awalnya 103.6 pada tahun 2015. Akan tetapi angka realisasi ekspor Kabupaten Banyuwangi dapat berangsur meningkat di mulai pada tahun 2017 menjadi 95.9 hingga pada tahun 2019 mencapai angka 121. Beberapa komoditas yang berhasil di ekspor Kabupaten Banyuwangi meliputi beras organik, beberapa komoditas hortikultura seperti manggis, kopi, hingga komoditas perikanan. Kopi menjadi produk unggulan berkualitas ekspor yang di miliki Kabupaten Banyuwangi. pada tahun 2019 Kabupaten Banyuwangi dapat mengeksport kopi robusta ke Italia, Jepang, dan Inggris sebesar 378 ton. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan pelatihan peningkatan kompetensi petani kopi, mulai dari pelatihan budidaya hingga pascapanen dengan harapan dapat meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan ekspor kopi. Pada tahun 2020 jumlah realisasi ekspor Kabupaten Banyuwangi menurun hanya mencapai angka 103.81 Juta.

### 2.3.5.4.2. Rata-rata Persentase Kenaikan Harga Komoditas

Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas Kabupaten Banyuwangi terlihat menunjukkan tren yang fluktuatif. Fluktuasi rata-rata persentase kenaikan harga komoditas terlihat berjalan selaras dengan laju inflasi Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2015 rata-rata persentase kenaikan harga komoditas memunculkan angka terendah dari tahun-tahun setelahnya yaitu pada angka 1.8. pada tahun 2016 rata-rata persentase kenaikan harga komoditas mengalami sedikit kenaikan pada angka 2.2 dan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi 5.6. Pada tahun 2018 rata-rata persentase kenaikan harga komoditas kembali menurun pada angka 3.8 tetapi masih lebih tinggi dari tahun 2015 dan 2016. Kenaikan rata-rata persentase kenaikan harga komoditas Kembali meningkat

pada tahun 2019 hingga menyentuh angka 6.4, dan pada tahun 2020 rata-rata persentase kenaikan harga komoditas hanya sebesar 2.3%.



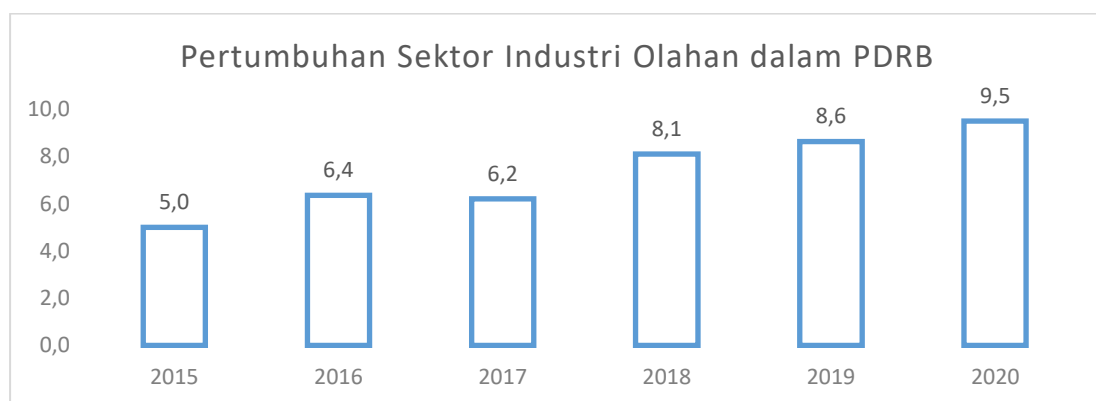
**Gambar 2.107 Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

### 2.3.5.5. Perindustrian

#### 2.3.5.5.1. Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB

Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang positif. Meskipun sempat sedikit menurun di tahun 2017, akan tetapi secara keseluruhan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 angka Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB sedikit menurun pada angka 6.2 setelah sebelumnya terjadi peningkatan menjadi 6.4 di tahun 2016 dari angka 5.0 di tahun 2015. Kemudian Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB Kabupaten Banyuwangi perlahan meningkat menjadi 8.1 pada tahun 2018 dan angka tersebut terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 8.6. Sehingga dengan tren data tersebut dapat diproyeksikan pada tahun 2020 Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB dapat menyentuh angka 9.5.

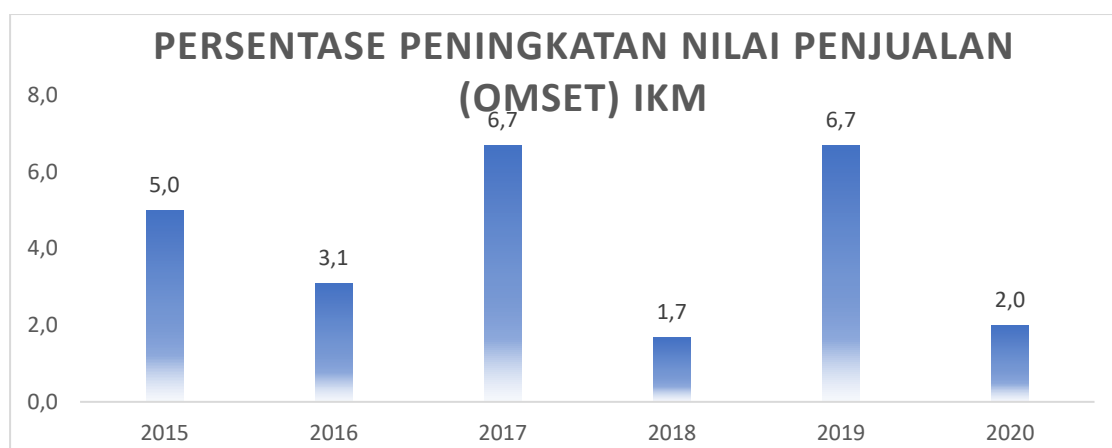


**Gambar 2.108 Pertumbuhan sektor industri olahan dalam PDRB di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi 2021

### 2.3.5.5.2. Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omset) IKM

Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omset) IKM Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan data yang sangat fluktuatif. Dengan posisi awal di tahun 2015 pada angka 5.0 kemudian menurun menjadi 3.1 pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omset) IKM meningkat 2x lipat pada angka 6.7. Kemudian pada tahun 2018 menurun drastis hingga menyentuh angka 1.7 yang merupakan capaian terendah dari tahun-tahun lainnya. Pada tahun 2019 angka Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omset) IKM Kembali meningkat pada posisi 6.7 seperti pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020 Persentase Peningkatan Nilai Penjualan (Omset) IKM di Kabupaten Banyuwangi menurun di angka 2.0.



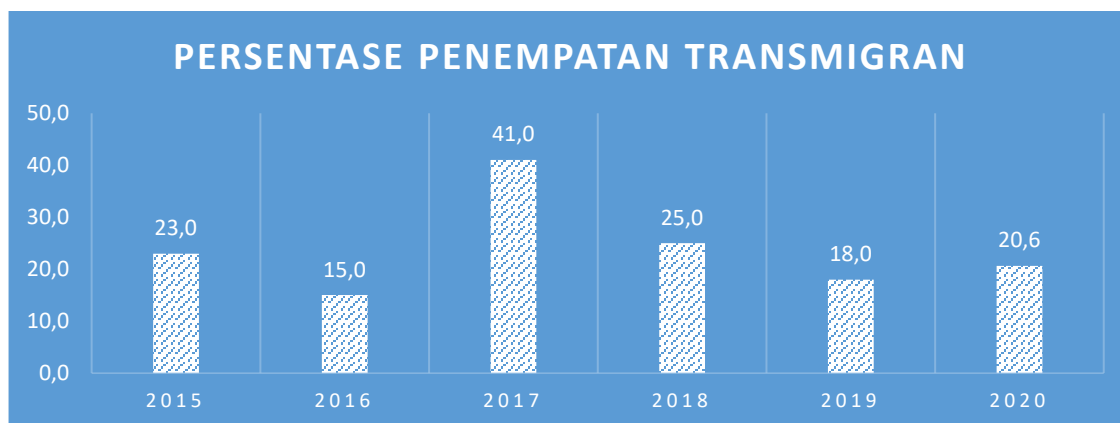
**Gambar 2.109 Persentase peningkatan nilai penjualan (Omset) IKM di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi 2021

### 2.3.5.6. Transmigrasi

#### 2.3.5.6.1. Persentase Penempatan Transmigran

Program transmigrasi yang di berikan pemerintah mendapatkan respons baik dari masyarakat Banyuwangi. Tidak sedikit masyarakat Banyuwangi berminat untuk menjadi transmigran ke kabupaten lain, khususnya di daerah luar Pulau Jawa. Pemerintah daerah mendukung minat masyarakat menjadi transmigran dengan memberikan pembinaan dan pelatihan sehingga nantinya para calon transmigran bisa lebih terampil dan bertahan. Respons yang diberikan pihak penerima transmigran asal Banyuwangi juga cukup bagus, transmigran asal Banyuwangi dinilai berhasil dan diminati oleh beberapa daerah penerima. Sehingga transmigran asal Banyuwangi tidak ada yang kembali ke Banyuwangi setelah diberangkatkan. Akan tetapi kuota transmigran yang diterima Kabupaten Banyuwangi tidak selalu sesuai dengan jumlah KK yang mendaftarkan diri. Berikut data persentase penempatan transmigran di Kabupaten Banyuwangi:



**Gambar 2.110 Persentase penempatan transmigran di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi 2021

Persentase penempatan transmigran di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang fluktuatif. Dengan posisi awal capaian pada tahun 2015 sebesar 23% kemudian pada tahun 2016 menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 15%. Persentase penempatan transmigran terlihat meningkat cukup tinggi pada tahun 2017 hingga menjadi 41%. Akan tetapi pada tahun 2018 kembali menunjukkan adanya penurunan hingga menjadi 25% dan angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2019 menjadi 18%. Dengan tren data tersebut pada tahun 2020 diproyeksikan persentase penempatan transmigran dapat Kembali meningkat dan angka capaian menjadi 20.6%.

### 2.3.6. Urusan Pemerintahan Umum

#### 2.3.6.1. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya

Semakin banyak angka golput dan kurangnya minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan baik nasional ataupun regional, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan berimbas pada kualitas demokrasi. Hal ini tidak sebanding dengan hasil pemilihan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh elemen masyarakat melalui peraturan berikut kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi calon yang sudah terpilih. Sikap acuh terhadap pesta demokrasi ini, juga tak sebanding dengan harapan yang tinggi masyarakat terhadap kemajuan pembangunan dimasa mendatang.

**Tabel 2. 30 Persentase Masyarakat Menggunakan Hak Politiknya**

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	-	-	65%	70%	65%

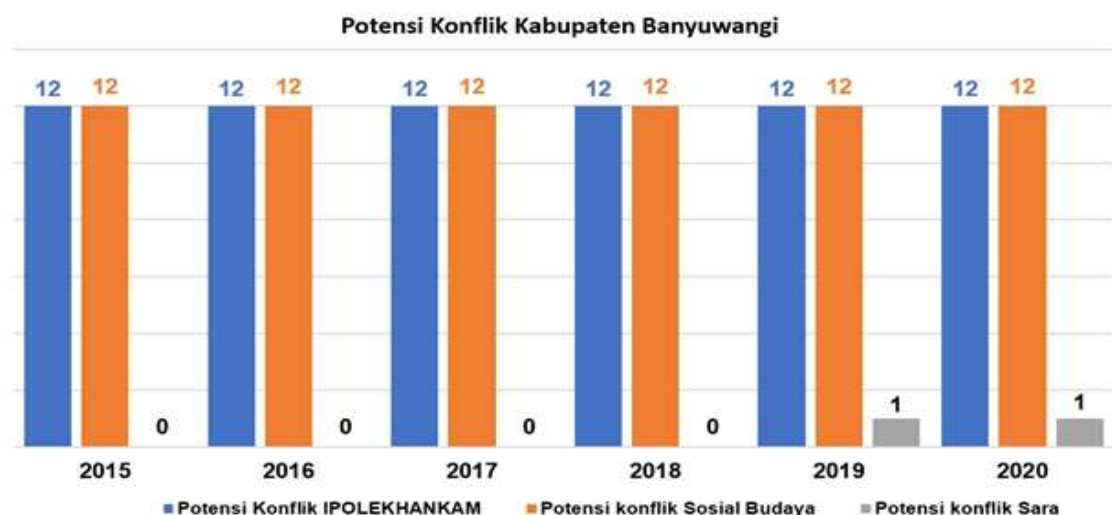
Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, 2020

Berdasarkan data yang terdapat dalam table diatas, dalam tahun 2018 persentase masyarakat yang menggunakan hak politiknya mencapai angka 65%. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga 70% yang artinya bahwa pada tahun 2019 masyarakat mulai sadar akan partisipasi mereka dalam kegiatan politik. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65% kembali, hal tersebut seiring dengan adanya pandemic covid-19 yang mengharuskan untuk menjaga protokol Kesehatan.

### 2.3.6.2. Potensi Konflik

Posisi strategis Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa berbatasan dengan Pulau Bali merupakan jalur utama lintas nasional yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kondisi Sosio kultural di Banyuwangi terdiri dari beraneka ragam suku adat dan kebudayaan yang turut membawa potensi terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Tren selama lima tahun terakhir sejak Tahun 2015 hingga 2020, menunjukkan bahwa angka potensi konflik IPOLEKHANKAM dan konflik Sosial budaya berada pada posisi stagnan yakni sebesar 12 kasus yang terjadi setiap tahunnya. Sedangkan selama lima tahun terakhir untuk angka potensi konflik sara mengalami kenaikan khususnya di dua tahun terakhir yakni pada Tahun 2019 – 2020 dimana terjadi satu konflik tiap tahunnya. Fakta ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan stabilitas Banyuwangi baik dari segi sosial, ekonomi maupun ketertiban masyarakat, dimana hal tersebut menjadi modal utama bagi masyarakat diluar Banyuwangi untuk mau berkunjung bahkan berinvestasi di Banyuwangi.



**Gambar 2.111 Potensi Konflik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**  
 Sumber: Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, 2020

Berdasarkan gambar diatas bahwa potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi paling banyak adalah satu kali dalam sebulan atau

12 kali dalam setahun. Target ini untuk menjadi perhatian stakeholder di Banyuwangi agar kejadian konflik yang terjadi di Banyuwangi tidak melebihi target yang ditetapkan. Ukuran berhasil atau tidaknya metode yang diterapkan terlihat dari banyaknya konflik dalam satu bulan. Jika tidak terjadi konflik apapun maka kebijakan dapat dinilai tepat sasaran. Sebaliknya jika kejadian konflik terjadi lebih dari angka potensi maka perlu mendapat perhatian dari pihak terkait untuk merumuskan kembali kebijakan yang lebih efektif yang lebih diterima masyarakat.

Untuk menjaga stabilitas dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkolaborasi dengan stakeholder terkait secara intensif perlu melaksanakan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui wadah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dengan sasaran generasi muda. Selain itu pengawasan terhadap organisasi masyarakat dan peningkatan kewaspadaan nasional dan deteksi dini penanganan konflik sosial juga harus dilaksanakan secara komprehensif melalui wadah Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA). Melalui program dan kegiatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah.

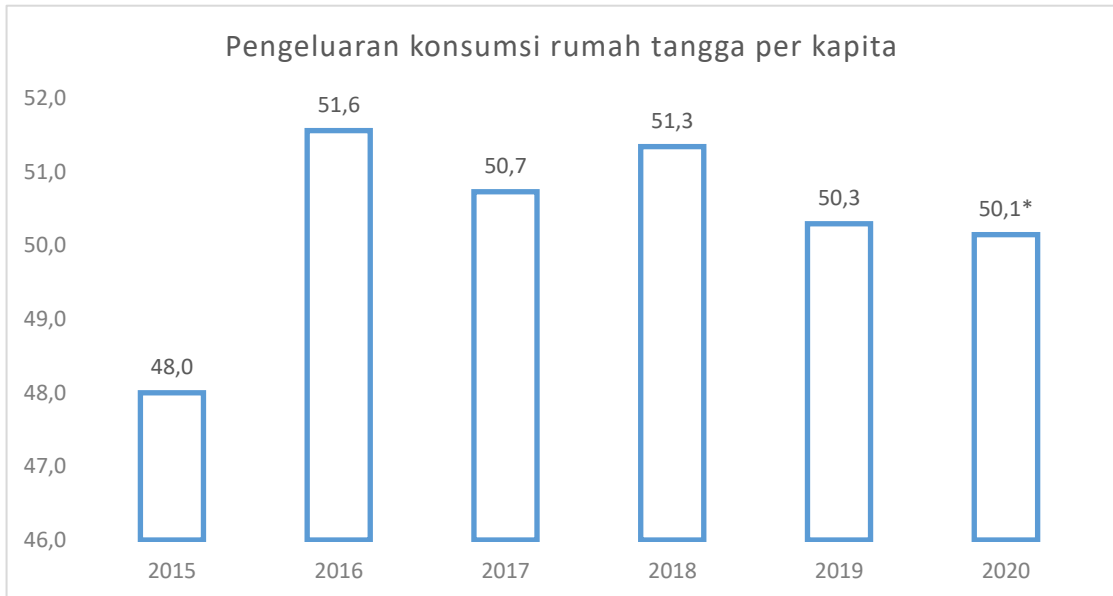
## **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

### **2.4.1. Kemampuan Ekonomi**

#### **2.4.1.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

##### **2.4.1.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian yang fluktuatif dengan capaian tahun 2015 sebesar 48. Kemudian pada tahun 2016 memiliki peningkatan capaian hingga menjadi 51.56 dan capaian tersebut menurun di tahun 2017 menjadi 50.73. Pada tahun 2018 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita terlihat kembali meningkat hingga menjadi 51.34 dan kembali menurun lagi di tahun 2019 menjadi 50.3. Pada tahun 2020 persentase konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan capaian menjadi 50.15.

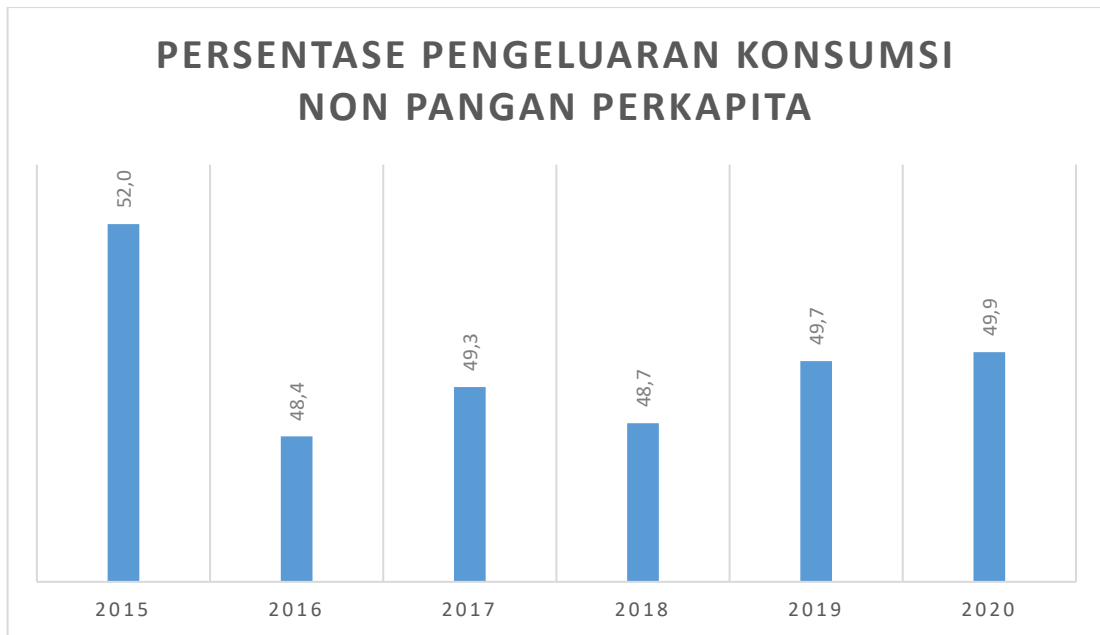


**Gambar 2.112 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2021

#### 2.4.1.1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun juga memiliki tren capaian yang fluktuatif dengan capaian tahun 2015 sebesar 52 kemudian capaian tersebut menurun menjadi 48.44 di tahun 2016. Pada tahun 2017 persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita menunjukkan adanya peningkatan capaian hingga menjadi 49.27 dan angka capaian kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 48.66. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita terlihat kembali meningkat hingga menjadi 49.7 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita mengalami peningkatan menjadi 49.9.



**Gambar 2.113 Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi, 2021

#### 2.4.2. Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah khususnya pada sumber daya manusia dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya Indeks relasi antar manuasia, dan Indeks etika dan budi pekerti. Kedua indeks tersebut merupakan komposit pembentuk indeks kesalehan sosial yang penghitungannya dilakukan secara survei. Secara umum definisi kedua indeks tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks relasi antar manuasia

Indeks ini digunakan untuk melihat atau menilai, bagaimana manusia hadir, bagaimana manusia membangun relasinya, bagaimana manusia berpengetahuan, bagaimana manusia berperilaku. Pengukuran direpresentasikan dengan 4 variabel pengukuran yaitu, kerjasama, menghormati perbedaan agama, menghormati perbedaan suku, menjaga kelestarian budaya luhur.

2. Indeks etika dan budi pekerti

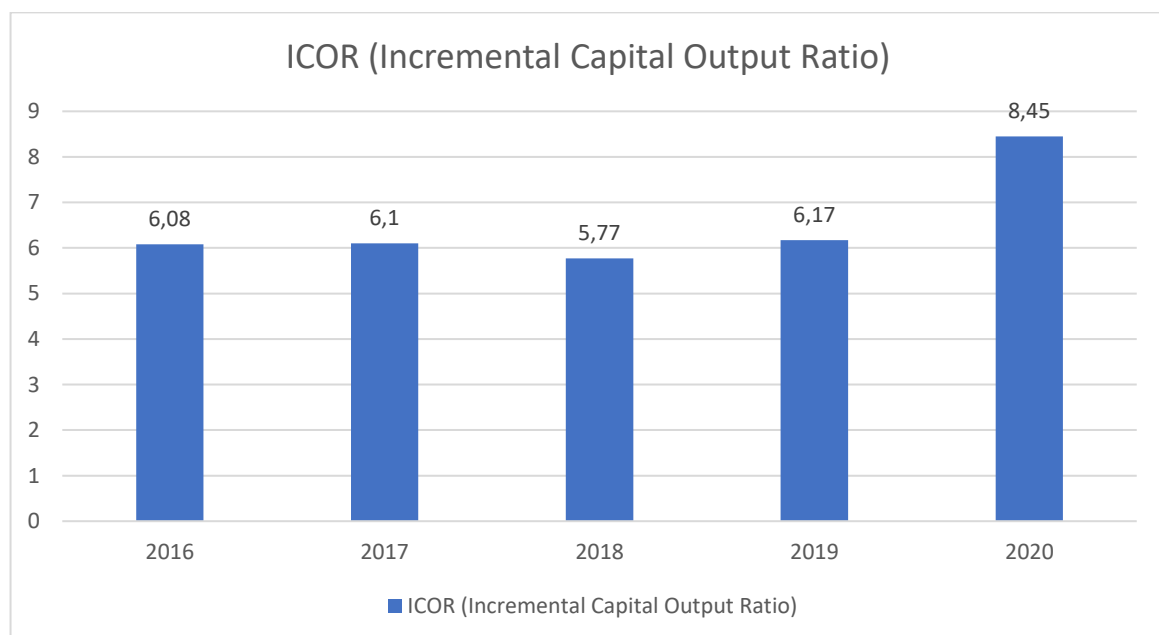
Berdasarkan pendekatan etika atau filsafat moral, budi pekerti adalah watak atau tabiat khusus seseorang untuk berbuat sopan dan menghargai pihak lain yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya. Indeks budi dan pekerti dapat diketahui dari beberapa aspek yang diantaranya yaitu komunikasi, perilaku dan lingkungan tempat dia berada. Indeks ini diukur melalui beberapa variabel diantaranya, Rendah Hati, Sopan santun, Bijaksana, Dapat Dipercaya, Adil.

### 2.4.3. Iklim Investasi

#### 2.4.3.1. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah sebuah parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran), sebagai contoh, misalnya besarnya investasi pada satu tahun di negara A adalah sebesar Rp 300 miliar, sedangkan tambahan output yang diperoleh dari hasil penanaman investasi itu adalah Rp 60 miliar, maka nilai ICOR negara A adalah sebesar 5 ( $300\text{miliar}/60\text{ miliar}$ ). Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan 1 unit output diperlukan investasi sebesar 5 unit. Kabupaten Banyuwangi memiliki tren nilai yang meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pada tahun 2016 ICOR memiliki capaian sebesar 6.08 dan meningkat menjadi 6.1 di tahun 2017. Berbeda dengan sebelumnya, pada tahun 2017 ICOR mengalami penurunan menjadi 5.77 dan Kembali meningkat menjadi 6.17 di tahun 2019. Pada tahun 2020 ICOR Kabupaten Banyuwangi memiliki capaian yang cukup drastis yakni mencapai 8.45 yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi investasi di Kabupaten Banyuwangi cenderung kurang efisien, mengingat nilai modal yang dibutuhkan semakin besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai ICOR yang semakin besar jika dilihat dari perbandingan antara tahun 2016 dengan tahun 2020 atau tahun 2019 sekalipun (sebelum adanya pandemi COVID-19).



**Gambar 2.114 ICOR Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2020**

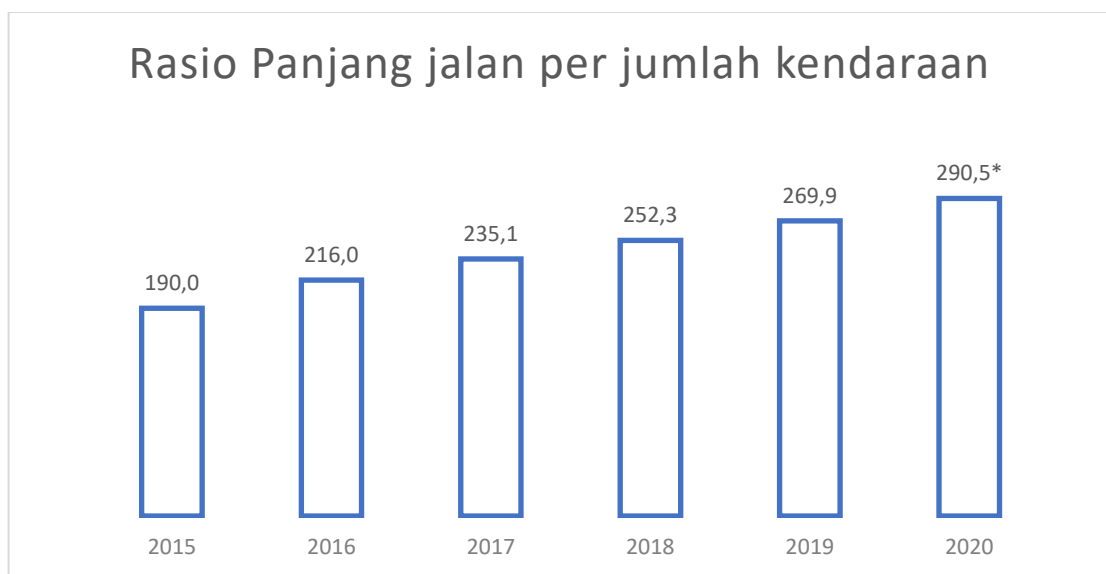
Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi tahun 2021

## 2.4.4. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

### 2.4.4.1. Perhubungan

#### 2.4.4.1.1. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun memiliki tren capaian meningkat dengan capaian tahun 2015 sebesar 190 dan kemudian meningkat menjadi 216 pada tahun 2016 dan terus meningkat menjadi 235,1 di tahun 2017. Peningkatan rasio Panjang jalan masih menunjukkan peningkatan capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 252,3 dan masih meningkat kembali pada tahun 2019 hingga menjadi 269,9. Dengan tren data yang terus meningkat tersebut maka pada tahun 2020 diproyeksikan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan masih akan mengalami peningkatan menjadi 290,5.



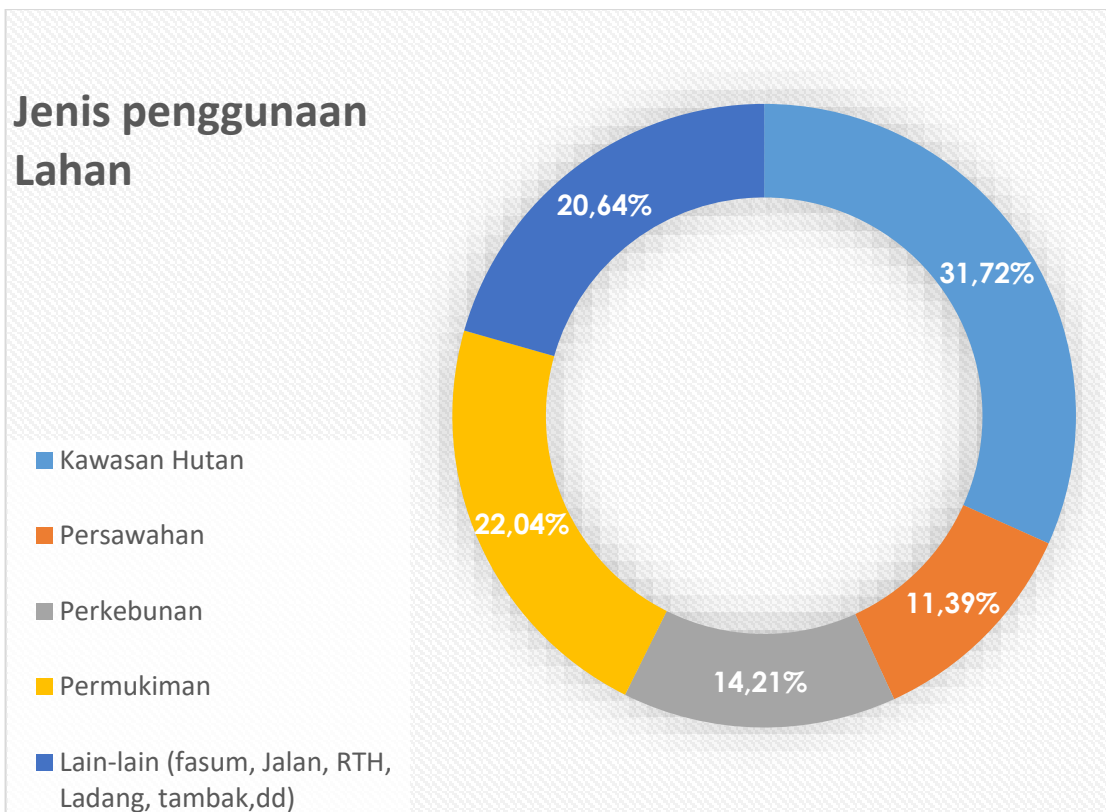
**Gambar 2.115 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2020**

Sumber: Data Diolah Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, 2021

### 2.4.4.2. Penataan Ruang

#### 2.4.4.2.1. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari proporsi penggunaan lahan. Kabupaten Banyuwangi mempunyai luas wilayah 578.250 Ha, dari luas tersebut penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi masih didominasi lahan tidak terbangun berupa hutan, sawah dan lain sebagainya. Profil tersebut menunjukkan bahwa lahan produktif memiliki proporsi yang masih cukup besar mencapai 25% dari keseluruhan lahan yang ada.



**Gambar 2.116 Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi**

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Nilai tersebut diperoleh dengan menjumlahkan lahan yang dipergunakan untuk persawahan dan perkebunan. Dengan proporsi masing-masing sebesar 11% dan 14%. Berikut merupakan detail proporsi penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi.

**Tabel 2. 31 Jenis penggunaan lahan di Kabupaten Banyuwangi**

No	Jenis penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Kawasan Hutan	183.396,34	31,72%
2	Persawahan	66.152	11,39%
3	Perkebunan	82.143,63	14,21%
4	Permukiman	127.454,22	22,04%
5	Lain-lain (fasum, Jalan, RTH, Ladang, tambak,dd)	119.103,81	20,64%
<b>Jumlah</b>		<b>578.250</b>	<b>100%</b>

Sumber: Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

**Tabel 2. 32 Realisasi indikator kinerja tahun 2016-2020**

Indikator	Capaian kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Aspek Kesejahteraan Sosial					
Angka Melek Huruf	99,14	99,23	99,31	99,02	99,10
Angka Harapan Hidup	70,11	70,19	70,34	70,54	70,65
Aspek Pelayanan Umum					
Pelayanan Urusan Wajib					
<b>Urusan Pendidikan</b>					
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik	47,06	45,01	46,8	54,62	57,6
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik TK	35,44	32,62	40,08	40,37	42,47
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik SD/MI	48,73	45,85	45,92	58,03	62,01
Total Persentase Guru Tersertifikasi Pendidik SMP/MTS	54,09	52,54	53,75	58,27	59,8
Jumlah Rumah Sakit	14	14	14	13	13
Jumlah Puskesmas	45	45	45	45	45
Jumlah tenaga kesehatan	2.278	2.278	3.574	3.927	4.167
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	0,14	0,14	0,22	0,22	0,24
Proporsi peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	2.808	3.724	3.682	3.640	3.493
Jumlah penduduk yang terdaftar jaminan kesehatan (BPJS)	789.116	823.819	906.491	949.355	924.963
Persentase penduduk yang terdaftar jaminan kesehatan (BPJS)	45,46	48,67	56,32	58,8	57,2
KABR: kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (juta)	18,24	17,23	17,26	18,10	17,42
Peningkatan Jumlah Bangunan Pelayanan Publik Berfungsi Baik	64	65	28	40	106
Persentase Panjang Jaringan Irigasi Rusak yang Diperbaiki	60	60	61	62	92
Persentase Ketersediaan air baku	80	82	84	88	92
Luas cakupan Air bersih	75	80	81	82	83
Persentase ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS)	60	65	70	75	80
Jumlah Ketersediaan Database Sumberdaya Air	45	50	55	60	65
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air	50	60	70	75	80
Persentase Daerah bebas bencana akibat daya rusak air	85	90	91	92	93

Indikator	Capaian kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan > 20 km	98,30	92,20	97,67	97,69	74,45
Jumlah korban meninggal akibat bencana	14	21	5	1	8
Persentase penanganan darurat bencana	96,56	96,56	99	99	99
Persentase pemulihan dampak bencana	98,17	98,17	98,13	98,13	98,13
Indeks gotong royong	0,55	0,63	0,63	0,69	0,74
Persentase tenaga kerja formal	11.421	11.032	10.347	10.347	9.249
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	44	33	33	33	27,5
Persentase Kelompok Usaha Perempuan Mandiri	52	52	52	66,7	67,6
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,01	8,2	86,44	86,81	86,66
Persentase keamanan pangan $\geq 80\%$	80	80	80	90	88
Banyaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan	25.330	44.091	73.659	85.097	40.209
Jumlah Inovasi Pelayanan Kependudukan Yang Dikembangkan	0	1	1	1	2
Jumlah Desa Tertinggal.	1	0	0	0	0
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,74	0,76	0,72	0,75	0,79
Indeks Ketahanan Lingkungan	0,79	0,8	0,77	0,8	0,82
Indeks Ketahanan Sosial	0,79	0,8	0,82	0,86	0,87
Persentase Remaja Yang Bermasalah Dengan Seks Bebas Napza Termasuk HIV/AIDS	0,03	0,27	0,23	0,28	0,35
Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	48	50	72	90	90
Jumlah Dermaga Penyeberangan.	3	3	3	3	3
Jumlah Pelabuhan Strategis.	2	2	2	2	2
Persentase Peningkatan Aksesibilitas Transportasi Laut	12,1	13,08	14,2	15,2	15,9
Persentase Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	82	84	86	88	90
Persentase Potensi Local Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	75	77,5	80	82,5	85
Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi Darat	64,1	67,8	71,5	79	82,1
Indeks Angka Kecelakaan Transportasi Darat	43,3	40,8	37,6	35	32,3
Kualitas Prasarana Dan Fasilitas Transportasi Darat	100	100	100	100	100

Indikator	Capaian kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Persentase Aplikasi IT Yang Mendukung City Branding Dan Layanan Publik Yang Berfungsi Baik	50	50	55	60	62,5
Persentase Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	2,8	3,7	0,5	0,7	0,0
Persentase Koperasi Sehat	24,5	34,2	34,9	35,2	16,0
Persentase Wirausaha Mikro Baru Yang Tumbuh	0,25	0,3	0,35	0,45	0,5
Rasio Pemerataan Unit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	22,2	20,5	21	21,5	22
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Data dan Informasi Penanaman Modal	83	83	86	91	92,5
Jumlah Atlit Berprestasi	220	588	135	913	712
Jumlah Insan Olahraga Yang Berprestasi	0	14	60	70	72
Jumlah Even	9	10	9	11	1
Jumlah Pemuda Pelopor Meningkatkan	17	9	14	0	0
Persentase Organisasi Pemuda Yang Memenuhi Ketentuan	72	40	80	12	16
Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Memenuhi Standart	136	80	100	60	80
Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Baik	100	100	100	100	100
Persentase Sarpras Kearsipan Dalam Kondisi Baik	80	87	89	89	93
Pendapatan Asli Daerah (Rp. Milyar)	367,87	388,94	450,06	495,69	482,74
Persentase Pelaksanaan Ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan	100	100	66,67	100	66,67
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah	0,22	0,22	0,24	0,26	0,26
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	78	79,5	87,03
Nilai SAKIP	80,13	81,26	82,17	83,23	83,86
Persentase Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan.	21,3	21,3	19,1	42	37,5
Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Urban I	100	100	100	100	100
Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai ditindaklanjuti: Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi pada Wilayah Urban I	55	55	40	65	80

Indikator	Capaian kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Persentase Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai Minimal A pada wilayah Irban I	50	50	56	80	80
Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban II	100	100	100	100	100
Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai ditindaklanjuti: Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi pada Wilayah Irban II	55	55	40	75	100
Persentase Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai Minimal A pada Wilayah Irban II	50	50	56	80	80
Persentase Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP dalam Mendukung Tercapainya WTP pada Wilayah Irban III	100	100	100	100	100
<b>Pelayanan urusan pilihan</b>					
Konsumsi Ikan (ton)	30,2	30,3	31,1	33,1	32
Persentase Kunjungan Wisatawan	107.9	150.1	155.5	174.2	3
Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	2.81	1.49	-0.73	-0.56	-2.96
Angka kematian ternak	0.46	0.42	0.3	0.3	0,22
Persentase sarana dan Prasarana tanaman pangan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100
Jumlah sertifikasi produk tanaman pangan	1	2	2	4	2
Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan unggulan daerah	3,33	3,35	3,35	3,41	3,57
Jumlah sertifikasi produk perkebunan dan hortikultura	4	4	3	5	2
Persentase peningkatan produksi tembakau	3,14	3,25	3,25	3,41	3,57
Presentasi Tertib Niaga Barang Kena Cukai	2,2	5,6	3,8	6,4	2,3
Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	8,4	8,4	11,3	11,3	19,6
Persentase cakupan pengembangan sentra industri	50	53,7	57,9	53,7	98,8
Rasio ketimpangan pendapatan IKM wilayah kecamatan	16	15	15,2	15	18
Persentase peningkatan sertifikasi standardisasi dan HKI	50	27,4	27	39,1	25
Jumlah IKM	19.253	19.428	19.446	18.130	18.992

Indikator	Capaian kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Persentase peningkatan jumlah IKM yang bermitra dalam klaster	17,1	17,1	17,1	22	30



# BAB III

## GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaan dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Banyuwangi, terdapat 2 (dua) penerimaan daerah yang memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. APBD menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. **Fungsi otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. **Fungsi pengawasan**, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. **Fungsi alokasi**, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Fungsi distribusi**, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. **Fungsi stabilisasi**, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta untuk pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, penyertaan modal (investasi daerah), dan pembayaran pokok utang.

Perkembangan APBD Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir (2016-2020) disajikan dalam tabel 3.1. Rata-rata Pendapatan Daerah sebesar 2.989,36 Miliar Rupiah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 3,98%. Trend nilai pendapatan cenderung meningkat kecuali pada tahun 2017 terjadi penurunan. Sementara rata-rata belanja daerah sebesar 2.957,39 Miliar Rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,64%. Trend belanja daerah dan pembiayaan daerah memiliki pola yang serupa, yaitu turun dari tahun 2016 ke 2018 dan naik dari tahun 2018 ke tahun 2020. Nilai rata-rata pembiayaan daerah sebesar 104,62 Miliar Rupiah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar (-87,79%).

**Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020  
(Berdasarkan Permendagri 13/2006)**

No.	Uraian	Miliar (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.805,62</b>	<b>2.732,02</b>	<b>2.997,64</b>	<b>3.143,28</b>	<b>3.268,23</b>	<b>3,98%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>367,87</b>	<b>388,94</b>	<b>450,07</b>	<b>495,69</b>	<b>482,74</b>	<b>7,24%</b>
<b>1.1.1.</b>	Pajak daerah	120,83	152,81	178,92	196,84	191,63	12,73%
<b>1.1.2.</b>	Retribusi daerah	34,59	35,71	45,46	48,29	45,63	7,82%
<b>1.1.3.</b>	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15,07	16,10	15,17	16,66	20,67	8,74%
<b>1.1.4.</b>	Lain-lain PAD yang sah	197,39	184,33	210,52	233,90	224,81	3,70%
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.847,14</b>	<b>1.793,66</b>	<b>1.960,99</b>	<b>2.005,26</b>	<b>1.852,13</b>	<b>0,26%</b>
<b>1.2.1.</b>	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	89,42	73,02	161,49	163,51	0,00	1,02%
<b>1.2.2.</b>	Dana alokasi umum	1.400,38	1.375,78	1.375,78	1.438,46	1.463,77	1,14%
<b>1.2.3.</b>	Dana alokasi khusus	357,34	344,86	423,72	403,29	388,36	2,71%
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>590,61</b>	<b>549,41</b>	<b>586,58</b>	<b>642,33</b>	<b>933,37</b>	<b>13,65%</b>
<b>1.3.1</b>	Hibah	160,99	131,30	131,53	126,51	147,88	-1,30%
<b>1.3.2</b>	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3.3</b>	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	255,23	238,43	212,85	236,07	173,82	-8,19%
<b>1.3.4</b>	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	174,39	179,68	242,21	271,89	305,83	15,64%
<b>1.3.5</b>	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	7,86	7,76	24,69%
<b>1.3.6</b>	Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	298,08	25,00%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.095,29</b>	<b>2.776,03</b>	<b>2.753,67</b>	<b>3.021,32</b>	<b>3.140,64</b>	<b>0,64%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.518,19</b>	<b>1.445,91</b>	<b>1.478,88</b>	<b>1.587,92</b>	<b>1.723,35</b>	<b>3,36%</b>
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai	1.209,91	1.017,87	1.067,56	1.104,16	1.032,54	-3,51%
<b>2.1.2</b>	Belanja Bunga	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00	-25,00%
<b>2.1.3</b>	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.1.4</b>	Belanja Hibah	60,03	85,37	61,22	63,17	180,85	50,85%
<b>2.1.5</b>	Belanja Bantuan Sosial	8,06	3,95	7,40	16,73	25,67	54,01%
<b>2.1.6</b>	Belanja Bagi Hasil	2,44	7,32	11,43	26,32	26,39	96,58%
<b>2.1.7</b>	Belanja Bantuan Keuangan	236,80	328,45	316,43	377,25	367,68	12,93%
<b>2.1.8</b>	Belanja Tidak Terduga	0,94	2,95	0,00	0,30	90,22	7630,16%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.577,10</b>	<b>1.330,12</b>	<b>1.274,79</b>	<b>1.433,39</b>	<b>1.417,29</b>	<b>-2,13%</b>
<b>2.2.1</b>	Belanja Pegawai	103,62	81,99	117,71	77,13	56,54	-9,62%
<b>2.2.2</b>	Belanja Barang dan Jasa	561,90	591,05	676,70	826,71	807,36	9,88%
<b>2.2.3</b>	Belanja Modal	911,58	657,08	480,38	529,54	553,40	-10,02%

No.	Uraian	Miliar (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>371,78</b>	<b>82,11</b>	<b>-178,90</b>	<b>65,11</b>	<b>183,00</b>	<b>-87,79</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>371,78</b>	<b>82,11</b>	<b>257,08</b>	<b>65,11</b>	<b>187,10</b>	<b>61,96%</b>
<b>3.1.1.</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	371,73	82,07	38,17	65,08	187,10	31,64%
<b>3.1.2.</b>	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.1.3.</b>	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.1.4.</b>	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	218,86	0,00	0,00	-25,00%
<b>3.1.5.</b>	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,05	0,04	0,05	0,04	0,00	-29,08%
<b>3.1.6.</b>	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>-25,00%</b>
<b>3.2.1.</b>	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3.2.2.</b>	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00%
<b>3.2.3.</b>	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	435,98	0,00	0,00	-25,00%
<b>3.2.4.</b>	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Dalam rangka penyesuaian nomenklatur struktur APBD sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek, maka Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020 telah dilakukan konversi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020 (Berdasarkan PP 12/2019)**

No.	Uraian	Miliar (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.805,61</b>	<b>2.732,02</b>	<b>2.997,64</b>	<b>3.143,28</b>	<b>3.267,18</b>	<b>3,97%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>367,87</b>	<b>388,94</b>	<b>450,06</b>	<b>495,69</b>	<b>482,74</b>	<b>7,24%</b>
<b>1.1.1.</b>	Pajak daerah	120,82	152,81	178,92	196,84	191,63	12,73%
<b>1.1.2.</b>	Retribusi daerah	34,59	35,71	45,46	48,29	45,63	7,82%
<b>1.1.3.</b>	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	15,07	16,09	15,17	16,66	20,67	8,74%
<b>1.1.4.</b>	Lain-lain PAD yang sah	197,39	184,33	210,51	233,9	224,81	3,70%
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.276,75</b>	<b>2.211,78</b>	<b>2.416,05</b>	<b>2.521,08</b>	<b>2.339,53</b>	<b>0,88%</b>
<b>1.2.1.</b>	Transfer Pemerintah Pusat	2.021,52	1.973,35	2.203,20	2.277,15	2.157,95	1,85%
<b>1.2.2.</b>	Transfer Antar-Daerah	255,23	238,43	212,85	243,93	181,58	-7,07%
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>160,99</b>	<b>131,30</b>	<b>131,53</b>	<b>126,51</b>	<b>444,91</b>	<b>57,40%</b>

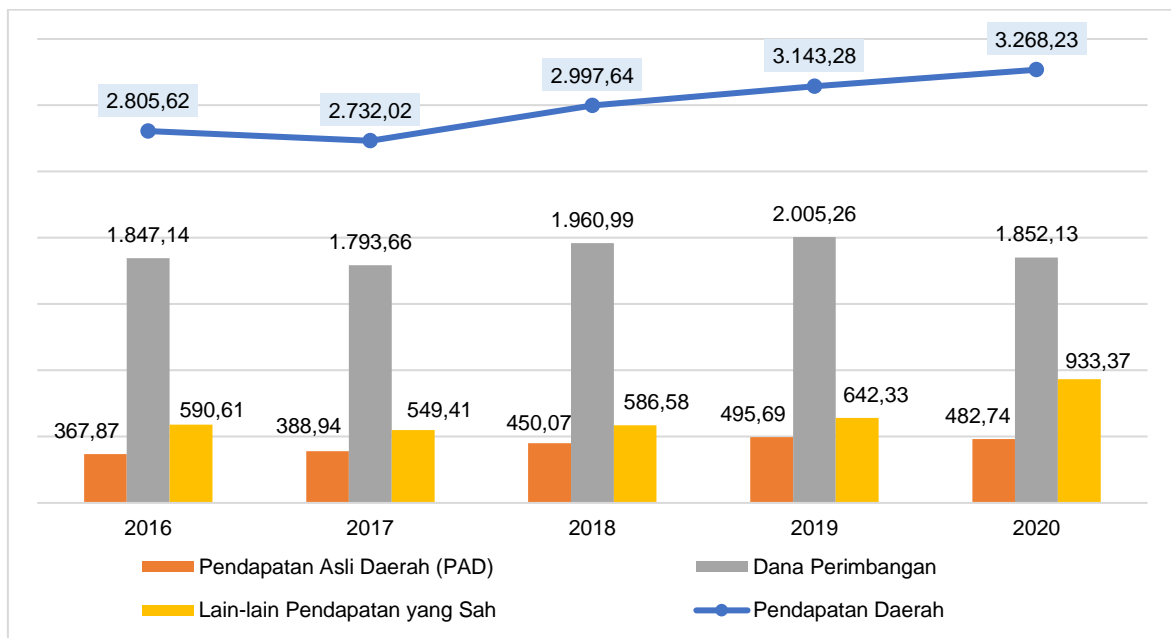
No.	Uraian	Miliar (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.3.1	Hibah	160,99	131,30	131,53	126,51	146,83	-1,50%
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0,00%
1.3.3	Lain-lain pendapatan	0	0	0	0	298,08	0,00%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>3.095,29</b>	<b>2.776,03</b>	<b>2.753,66</b>	<b>3.021,31</b>	<b>3.140,47</b>	<b>0,64%</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.943,52</b>	<b>1.780,23</b>	<b>1.945,42</b>	<b>2.087,90</b>	<b>2.097,94</b>	<b>2,17%</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.313,53	1.099,86	1.185,27	1.181,29	1.089,07	-4,16%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	561,9	591,05	676,69	826,71	802,36	9,73%
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	14,84	0	0	-25,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	60,03	85,37	61,22	63,17	180,85	50,85%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8,06	3,95	7,4	16,73	25,67	54,01%
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>911,58</b>	<b>657,07</b>	<b>480,38</b>	<b>529,54</b>	<b>558,24</b>	<b>-9,79%</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	12,05	0,59	17,23	0,16	0,05	637,89%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154,42	127,61	89,53	91,46	122,67	-2,73%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	158,28	99,01	109,61	135,23	129,36	-1,93%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	584,97	429,2	260,54	302,05	304,98	0,00%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,86	0,66	3,47	0,64	1,19	90,94%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,95</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>90,22</b>	<b>7630,16%</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>239,24</b>	<b>335,78</b>	<b>327,86</b>	<b>403,57</b>	<b>394,07</b>	<b>14,68%</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>371,78</b>	<b>82,11</b>	<b>-178,9</b>	<b>65,12</b>	<b>183</b>	<b>-87,79%</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>371,78</b>	<b>82,11</b>	<b>257,08</b>	<b>65,12</b>	<b>187,1</b>	<b>61,96%</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	371,73	82,07	38,17	65,08	187,1	31,64%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00%
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	218,86	0	0	-25,00%
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,05	0,04	0,05	0,04	0	-29,08%
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435,98</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>	<b>-25,00%</b>
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0	4,1	0,00%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	435,98	0	0	-25,00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0	0,00%

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Selanjutnya penjabaran terhadap masing-masing akun, kelompok, jenis, obyek tersebut dapat diuraikan sebagaimana penjelasan berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara umum pendapatan daerah dapat dihasilkan dari beberapa sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tabel 3.1 disajikan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi serta rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan pada realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai salah satu komponen Pendapatan Daerah memiliki nilai rata-rata pertumbuhan paling baik yaitu sebesar 13,65%. Rata-rata pertumbuhan yang tinggi pada Lain-Lain Pendapatan yang Sah didukung oleh adanya rata-rata pertumbuhan yang besar pada komponennya yaitu Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang tumbuh sebesar 15,64% serta adanya penambahan Pendapatan Lainnya sebesar 298,08 Miliar Rupiah di tahun 2020. Jika dibandingkan 2 komponen lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai pertumbuhan sebesar 7,24% dan Dana Perimbangan memiliki rata-rata pertumbuhan hanya pada angka 0,26%. Sehingga secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2016 hingga 2020 Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi tumbuh sebesar 3,98%.



**Gambar 3.1. Realisasi Pendapatan Dearah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020 (dalam Miliar Rupiah)**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berangsur meningkat hingga pada tahun 2020 menyentuh angka Rp. 3.268 Miliar Rupiah yang merupakan nilai pendapatan tertinggi yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020). Pendapatan Daerah terus diupayakan peningkatannya, dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2017 Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sempat menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2017 Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menurun dari Rp. 2.805 Miliar Rupiah di tahun 2016 menjadi Rp. 2.732 Miliar di tahun 2017, sehingga angka pertumbuhan pada tahun 2016 - 2017 sebesar (-2,62%). Tahun 2017 walaupun jumlah Pendapatan Daerah menurun, PAD merupakan satu-satunya komponen yang tidak mengalami penurunan.

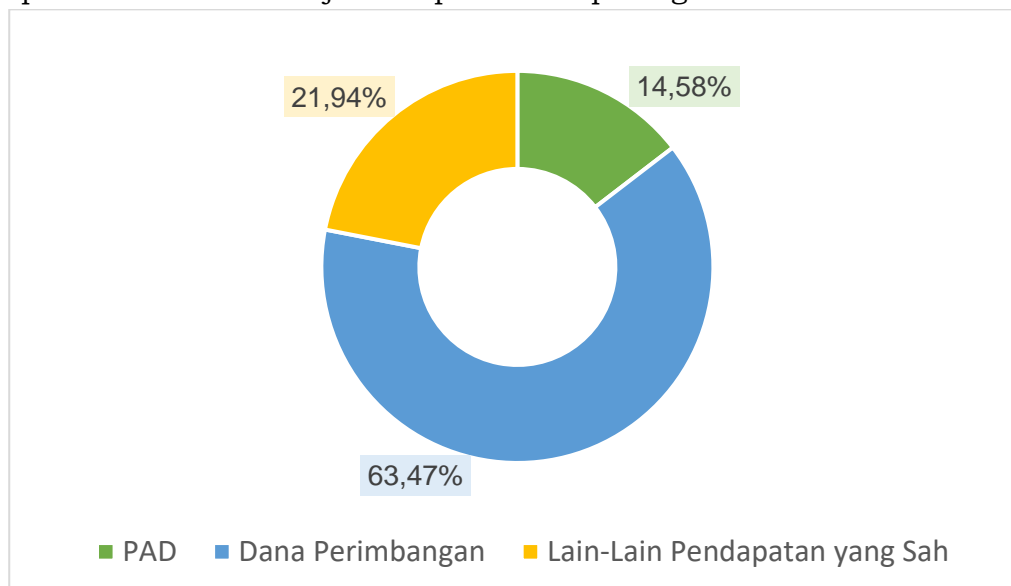
Melihat pada realisasi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi maka ketiganya memiliki trend yang fluktuatif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum mengalami peningkatan pada 4 tahun terakhir dari angka Rp. 367,87 Miliar Rupiah di tahun 2016 menjadi Rp. 495 Miliar Rupiah di tahun 2019. Tetapi dengan terjadinya pandemi covid-19 di tahun 2020 yang sangat berdampak pada perekonomian baik dalam skala lokal, nasional maupun global, PAD Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan menjadi Rp. 482,72 Miliar Rupiah. Banyuwangi sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya ditopang dari sektor pariwisata, sangat terdampak dengan adanya pandemi covid-19. Beberapa sektor PDRB mengalami penurunan, antara lain sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar (-13,85%) dan sektor Jasa Lainnya sebesar (-13,20%). Hal ini juga berdampak pada jumlah PAD yang menurun pada tahun 2020 yang disebabkan adanya penurunan pada ketiga komponennya jika dibandingkan tahun 2019 yaitu Pajak Daerah dengan pertumbuhan (-2,64%), Retribusi Daerah dengan pertumbuhan (-5,51%) dan Lain-Lain PAD yang Sah dengan pertumbuhan (-3,89%).

Dana Perimbangan memiliki tren realisasi yang fluktuatif dengan adanya peningkatan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Dana Perimbangan sebesar 1.847,14 Miliar Rupiah sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 1.793,66 Miliar Rupiah. Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.960,99 Miliar Rupiah. Akan tetapi di tahun 2020 Dana Perimbangan kembali menurun pada angka 1.852,13 Miliar Rupiah atau dengan pertumbuhan sebesar (-7,64%) setelah pada tahun 2019 mencapai 2.005,26 Miliar Rupiah. Hal ini dikarenakan tidak adanya realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak di tahun 2020 serta menurunnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menyebabkan secara keseluruhan jumlah Dana Perimbangan juga menurun.

Komponen Pendapatan Daerah selanjutnya adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang secara garis besar mengalami tren yang meningkat hanya saja sempat mengalami penurunan pada tahun 2017. Pada tahun 2016 realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 590,61 Miliar Rupiah kemudian menurun menjadi 549,41 Miliar Rupiah di tahun 2017. Akan tetapi realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah dapat kembali meningkat ditahun 2018 dan terus meningkat hingga menyentuh angka Rp. 933,37 Miliar Rupiah ditahun 2020.

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah tersebut merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun serta tumbuh sebesar 45,31% dari tahun 2019.

Dana Perimbangan memiliki proporsi yang paling besar dalam menyumbang Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian sumbangsih selanjutnya berasal dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan yang terakhir berasal dari PAD dengan proporsi paling kecil. Untuk mengetahui proporsi masing-masing jenis pendapatan daerah secara jelas dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 3.2. Rata-rata Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun didominasi oleh Dana Perimbangan yang memberikan sumber pendapatan lebih dari 50% yaitu sebesar 63,47%. Sisanya disumbang oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 21,94% dan sumbangsih terkecil yaitu dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 14,58%.

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui beberapa sumber diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Proporsi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Proporsi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

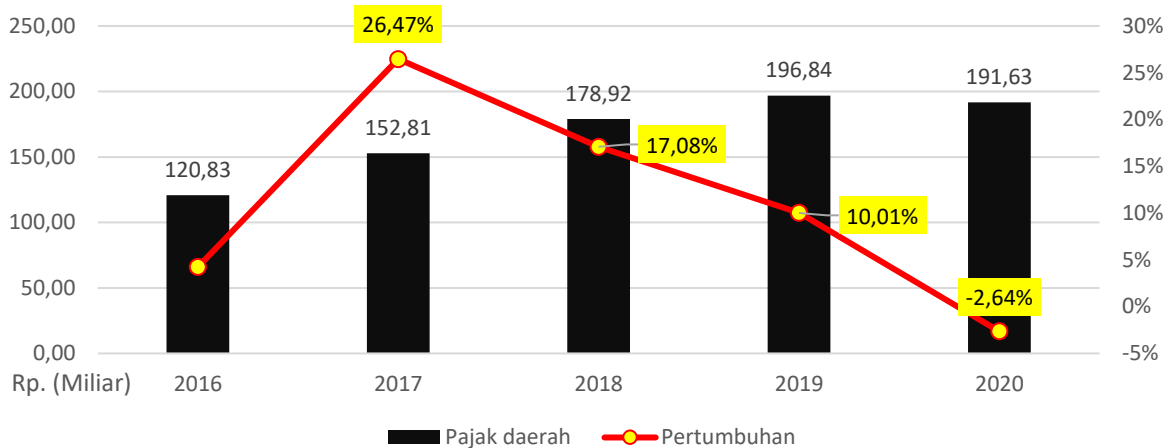
No	Uraian	Proporsi					Rata-rata Proporsi
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Pajak daerah	32,85%	39,29%	39,75%	39,71%	39,70%	<b>38,26%</b>
1.1.2	Retribusi daerah	9,40%	9,18%	10,10%	9,74%	9,45%	<b>9,58%</b>
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4,10%	4,14%	3,37%	3,36%	4,28%	<b>3,85%</b>
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	53,66%	47,39%	46,77%	47,19%	46,57%	<b>48,32%</b>

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

Proporsi sumber PAD terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah hingga mencapai rata-rata 48,32% dalam 5 tahun terakhir. Proporsi terbesar selanjutnya yaitu bersumber dari pajak daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 38,26% dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan 2 komponen lainnya yaitu Retribusi Daerah memiliki rata-rata proporsi sebesar 9,58% dalam 5 tahun terakhir dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan hanya memberikan sumbangsih dengan rata-rata proporsi sebesar 3,85% dalam waktu 5 tahun. Secara rinci realisasi dan pertumbuhan masing-masing komponen sumber PAD akan dijelaskan pada masing-masing poin komponen.

#### **1) Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya. Nilai pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahunnya. Pajak daerah di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019, akan tetapi sedikit mengalami penurunan di tahun 2020. Pertumbuhan realisasi Pajak Daerah terlihat cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Gambar 3.3. Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

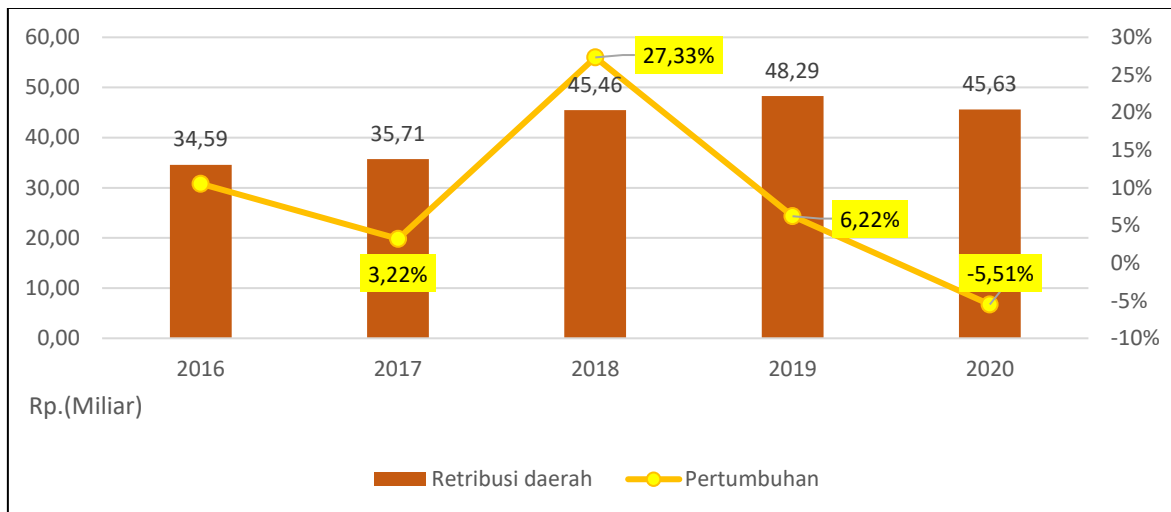
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa pada empat tahun pertama yaitu tahun 2016 hingga 2019 jumlah Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya yaitu dari 120,83 Miliar Rupiah di tahun 2016 hingga mencapai angka Rp. 196,84 Miliar Rupiah pada tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26,47%. Akan tetapi di tahun 2020 Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi terlihat menurun dengan pertumbuhan sebesar -2,65% sehingga menjadi 191,63 Miliar Rupiah. Dimana tingkat capaian Pajak Daerah adalah sebesar 95,73% dari target perolehan Pajak Daerah yang dianggarkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 200,18 Miliar Rupiah.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dan kaya akan potensi wisata. Memiliki letak geografis yang berada di ujung pulau Jawa menjadikan Banyuwangi dikelilingi oleh lautan, hutan dan pegunungan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki yang akhirnya berdampak terhadap PAD Kabupaten Banyuwangi melalui Pajak Daerah. Pajak daerah tertinggi yang dihasilkan pada tahun 2019 yaitu Pajak Penerangan Jalan sebesar 73.89 Miliar Rupiah. Angka tersebut mencapai realisasi sebesar 98,49% dari target yang ditetapkan. Terdapat 2 hasil pajak yang cukup tinggi dan dapat melampaui target yang ditentukan pada tahun 2019 yaitu Pajak Hotel & Restoran. Pajak Hotel dapat mencapai capaian 118,48% dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 13.09 Miliar Rupiah dan Pajak Restoran dengan capaian 116,47% yaitu dengan nilai 22.78 Miliar Rupiah.

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau Badan. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 - 2020:



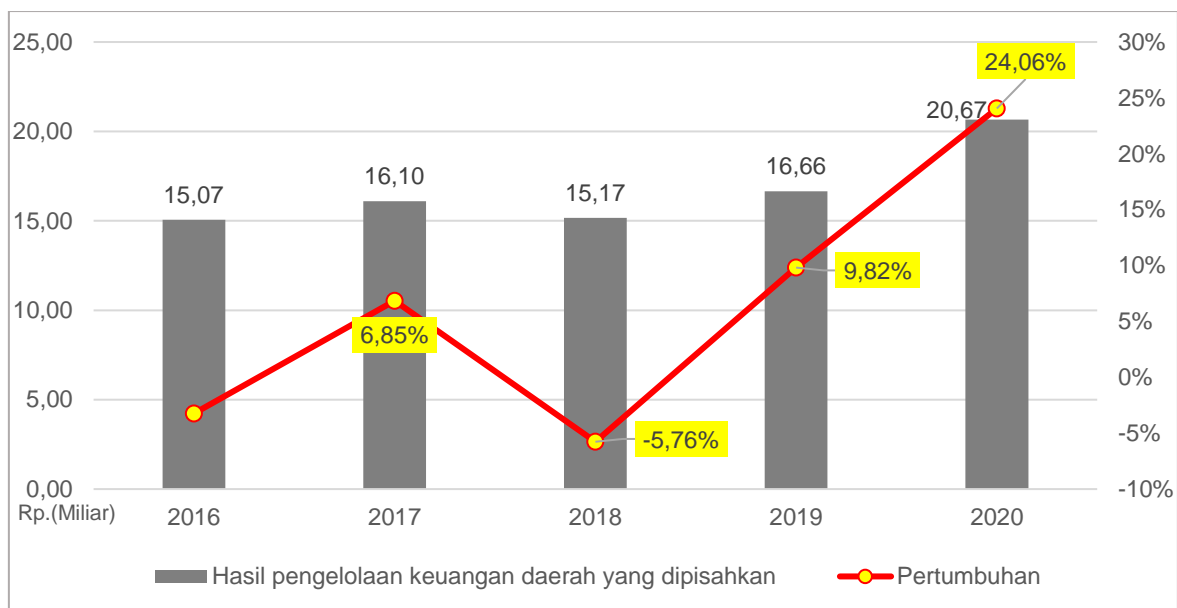
**Gambar 3.4. Realisasi dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi pada empat tahun pertama menunjukkan adanya peningkatan. Dari 34,59 Miliar Rupiah pada tahun 2016 hingga menjadi 48,29 Miliar Rupiah pada tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Akan tetapi pada tahun 2020 Pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah terlihat menurun dengan pertumbuhan sebesar (-5,51%) sehingga menjadi 45,63 Miliar Rupiah. Capaian Retribusi Daerah sebesar 65,76% dari anggaran retribusi di tahun 2020 yaitu sebesar 69,39 Miliar Rupiah.

### **3) Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 hingga 2020:



**Gambar 3.5. Realisasi dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

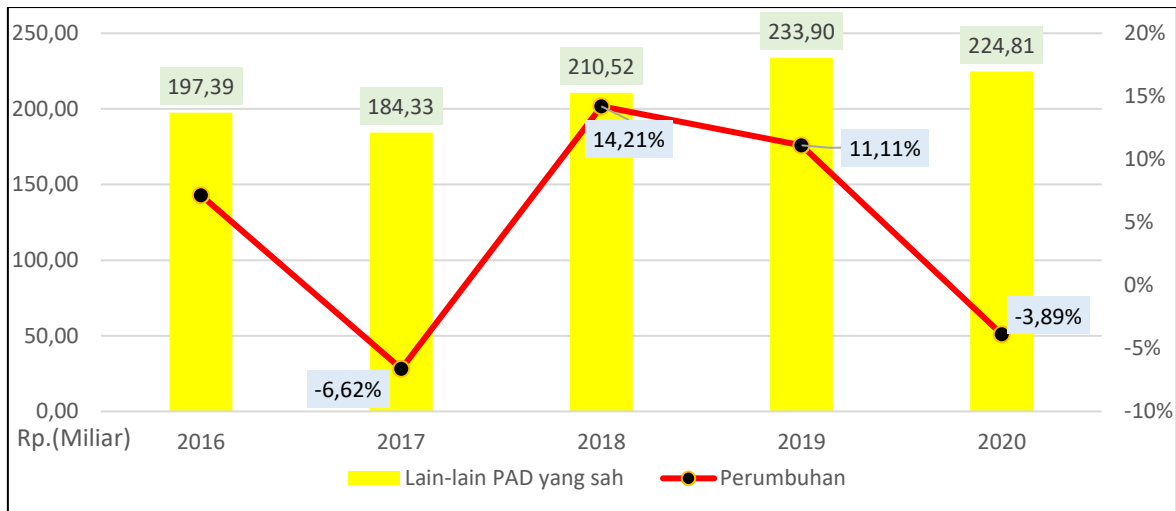
*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Banyuwangi cukup fluktuatif pada lima tahun terakhir yaitu dengan nilai yang naik turun pada kisaran 15 sampai dengan 20 Miliar Rupiah. Pada tahun 2020 nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Banyuwangi meningkat sebesar 24,06% menjadi 20,67 Miliar Rupiah. Capaian pada tahun 2020 tersebut belum dapat mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 24,38 Miliar Rupiah, dengan kata lain capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 84,77%.

Pada tahun 2019 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Banyuwangi bersumber dari PT. Bank Jatim, PT. Bank BPR Jatim dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana ketiganya dapat melampaui target yang ditentukan. Sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbesar didapatkan dari PT. Bank Jatim yakni sebesar 12,32 Miliar Rupiah atau dengan capaian sebesar 103,42%.

#### **4) Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber yang sah dan bersifat tidak tetap. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Banyuwangi pada 2016 hingga 2020:



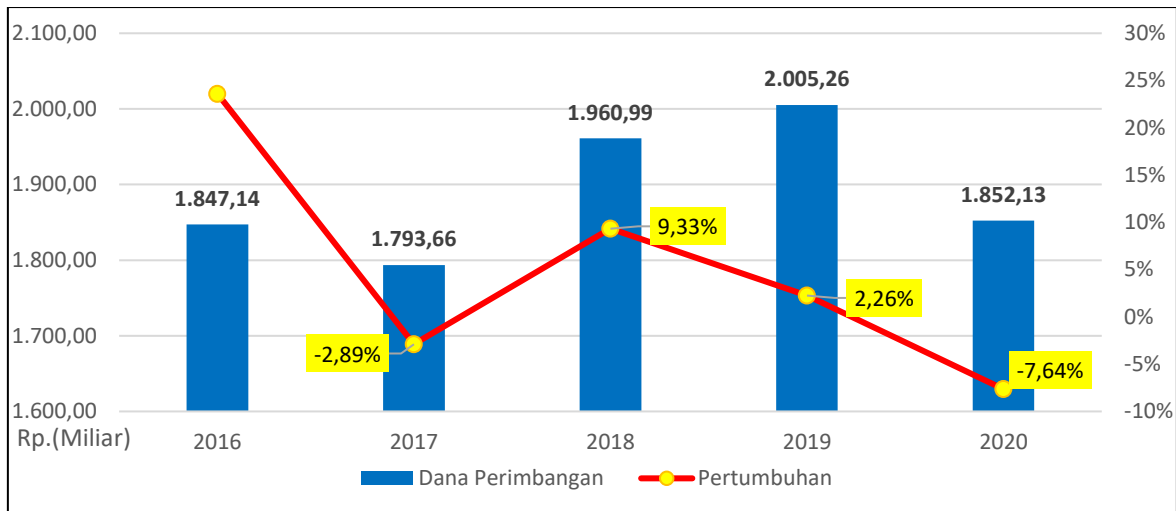
**Gambar 3.6. Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Penurunan nilai Lain-lain PAD yang Sah terlihat terjadi pada tahun 2017 dengan pertumbuhan (-6,62%) dan pada tahun 2020 dengan pertumbuhan (-3,89%). Sementara nilai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 14,21%. Sedangkan realisasi tertinggi dari Lain-lain PAD yang Sah adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 233,90 Miliar Rupiah. Pendapatan Badan Layanan Umum menyumbang Lain-lain PAD yang Sah dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 159,66 Miliar Rupiah dengan capaian 102,35%. Angka tersebut didapatkan dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Blambangan dan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Genteng. Sedangkan sumbangsih terkecil terhadap Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang yaitu Pendapatan Bunga atas Pinjaman Bergulir kepada Koperasi, UKM dan IKM sebesar 9,26 juta rupiah dengan capaian 89,93%.

#### **b. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020:



**Gambar 3.7. Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

Dana Perimbangan menjadi penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. Perolehan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi cukup fluktuatif pada setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir sumbangan Dana Perimbangan dengan nilai paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.793,66 Miliar Rupiah. Sementara sumbangan Dana Perimbangan paling besar terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 2.005,26 Miliar Rupiah.

Pertumbuhan paling baik pada Dana Perimbangan terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 9,33%. Pada tahun 2020 terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan pada nilai Dana Perimbangan. Tahun 2020 pertumbuhan Dana Perimbangan mencapai (-7,64%) dengan nilai sebesar 1.852,13 Miliar Rupiah. Capaian realisasi Dana Perimbangan tahun 2020 sebesar 97,53% dari target anggaran sebesar 1.899,08 Miliar Rupiah. Nilai Dana Perimbangan yang terlihat menurun disebabkan oleh tidak adanya Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2020 sehingga perolehan Dana Perimbangan hanya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan (DAK) yang menyebabkan jumlah Dana Perimbangan lebih rendah dari dua tahun sebelumnya.

Dana Perimbangan bersumber dari tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut merupakan proporsi masing-masing komponen Dana Perimbangan pada 5 tahun terakhir:

**Tabel 3.4. Proporsi Sumber-sumber Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

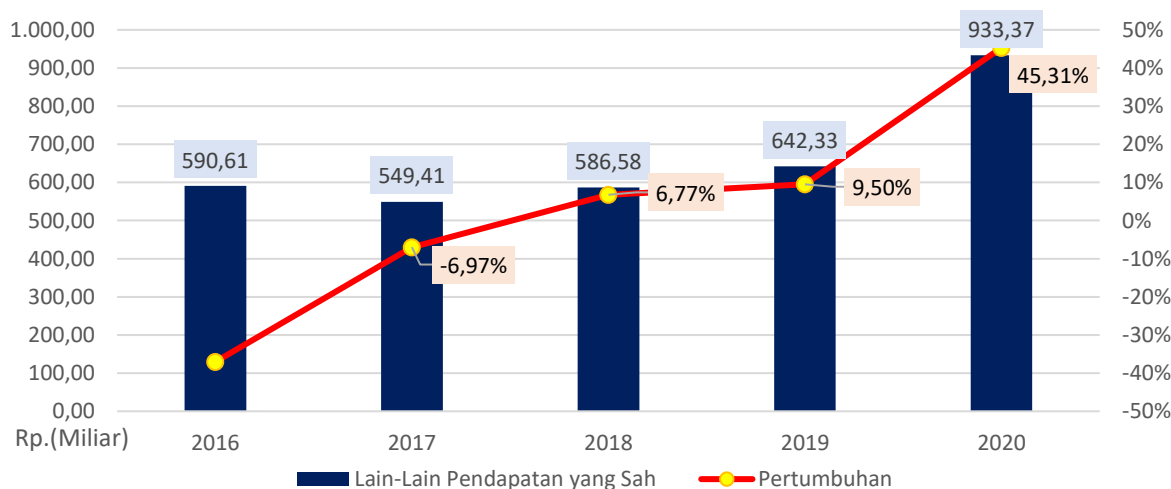
No	Uraian	Proporsi					Rata-rata Proporsi
		2016	2017	2018	2019	2020	
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	4,84%	4,07%	8,24%	8,15%	0,00%	5,06%
1.2.2	Dana alokasi umum	75,81%	76,70%	70,16%	71,73%	79,03%	74,69%
1.2.3	Dana alokasi khusus	19,35%	19,23%	21,61%	20,11%	20,97%	20,25%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Sebagian besar Dana Perimbangan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terlihat dari proporsinya yang melebihi 70% pada setiap tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rata-rata proporsi mencapai 74,69%. Artinya hanya sekitar seperempat bagian Dana Perimbangan yang berasal dari luar DAU. Selanjutnya Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki rata-rata proporsi sebesar 20,25% dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak menyumbang dengan proporsi terkecil setiap tahunnya yaitu dengan rata-rata proporsi hanya 5,06%.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan realisasi dan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020:



**Gambar 3.8. Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Secara garis besar Lain-Lain Pendapatan yang Sah memiliki tren yang meningkat dengan nilai pertumbuhan yang meningkat pula. Setelah sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 590,61 Miliar Rupiah menjadi 549,41 Miliar Rupiah ditahun 2017 dengan perumbuhan (-6,97%). Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Banyuwangi kemudian meningkat pada tahun 2018 mendekati nilai pada posisi awal yaitu sebesar Rp. 586,58 Miliar Rupiah dan terus meningkat menjadi 642,33 Miliar Rupiah pada tahun 2019. Terlihat adanya pertumbuhan yang sangat tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 45,31% dengan nilai Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 933,37 Miliar Rupiah.

Terdapat 6 komponen yang menyumbang Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yaitu Hibah, Dana Darurat, Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Pendapatan Lainnya. Berikut merupakan proporsi masing-masing komponen terhadap Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel 3.5. Proporsi Sumber-sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Proporsi					Rata-rata Proporsi
		2016	2017	2018	2019	2020	
	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Hibah	27,26%	23,90%	22,42%	19,69%	15,84%	21,82%
	Dana darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	43,21%	43,40%	36,29%	36,75%	18,62%	35,65%
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	29,53%	32,70%	41,29%	42,33%	32,77%	35,72%
	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	0,83%	0,41%
	Pendapatan lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Proporsi terbesar pada Lain-Lain Pendapatan yang Sah selama 5 tahun terakhir yaitu berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan rata-rata proporsi sebesar 35,72% dan 35,83%. Berikutnya adalah Hibah dengan rata-rata proporsi sebesar 21,82%.

## 2. Belanja Daerah

Belanja daerah untuk mendanai urusan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang

pemerintahan. Belanja daerah diprioritaskan mendanai pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah dibedakan menjadi dua, yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan komponen belanja daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan komponen belanja daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

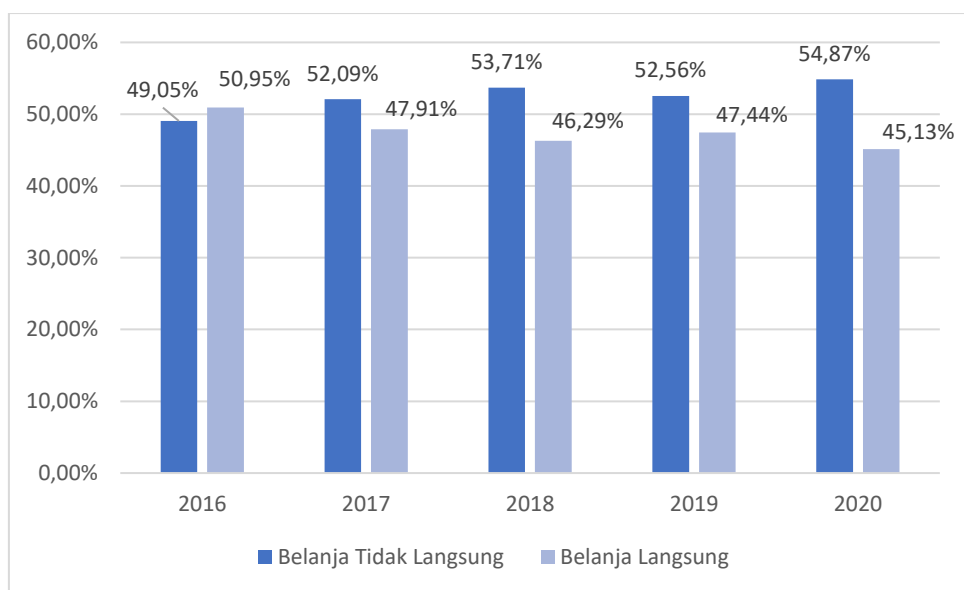
Belanja daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 0,64%. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren yang fluktuatif. Penurunan komponen belanja yang paling tajam terjadi pada tahun 2017, dimana belanja langsung turun sampai dengan (-15,66%) dan belanja tidak langsung turun (-4,76%). Pertumbuhan paling tinggi terjadi di tahun 2016, dimana belanja langsung tumbuh sampai dengan 20,81%. Komponen belanja langsung yang meningkat tajam pada tahun 2016 adalah belanja modal, meningkat sebesar 212,17 Miliar Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 30,34%. Pertumbuhan belanja daerah dalam lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Belanja</b>	12,89%	-10,31%	-0,81%	9,72%	3,95%
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	5,70%	-4,76%	2,28%	7,37%	8,53%
<b>Belanja Langsung</b>	20,81%	-15,66%	-4,16%	12,44%	-1,12%

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

Gambaran proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada gambar berikut. Secara umum proporsi Belanja Langsung dalam lima tahun terakhir berada di bawah proporsi Belanja Tidak Langsung. Hanya pada tahun 2016 proporsi Belanja Langsung melebihi Belanja Tidak Langsung, dengan selisih proporsi sebesar 1,90% senilai 58,92 Miliar Rupiah. Sementara dari tahun 2017 sampai dengan 2020 proporsi Belanja Tidak Langsung di atas proporsi Belanja Langsung, dimana selisih proporsi keduanya paling tajam terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 9,75% atau senilai 306,07 Miliar Rupiah.



**Gambar 3.9. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

**a. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung sebagai komponen belanja daerah yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari delapan (8) unsur, yaitu: a) Belanja Pegawai, b) Belanja Bunga, c) Belanja Subsidi, d) Belanja Hibah, e) Belanja Bantuan Sosial, f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik, serta h) Belanja Tidak Terduga. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.7. Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Uraian	Proporsi				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>49,05%</b>	<b>52,09%</b>	<b>53,71%</b>	<b>52,56%</b>	<b>54,87%</b>
Belanja Pegawai	39,09%	36,67%	38,77%	36,55%	32,88%
Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,54%	0,00%	0,00%
Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	1,94%	3,08%	2,22%	2,09%	5,76%
Belanja Bantuan Sosial	0,26%	0,14%	0,27%	0,55%	0,82%
Belanja Bagi Hasil	0,08%	0,26%	0,42%	0,87%	0,84%
Belanja Bantuan Keuangan	7,65%	11,83%	11,49%	12,49%	11,71%
Belanja Tidak Terduga	0,03%	0,11%	0,00%	0,01%	2,87%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Struktur proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah tahun anggaran 2016 hingga 2020 di dominasi oleh Belanja Pegawai yaitu dengan rata-rata proporsi sebesar 36,79% dengan nilai rata-rata lima tahun sebesar 1.086,41 Miliar Rupiah. Proporsi terbesar selanjutnya adalah dari Belanja Bantuan Keuangan dengan rata-rata proporsi sebesar 11,03% dan Belanja Hibah dengan rata-rata proporsi sebesar 3,02%.

Pertumbuhan komponen Belanja Tidak Langsung Kabupaten Banyuwangi disajikan pada tabel berikut. Nampak bahwa pada tahun 2020 terjadi lanjutan Belanja Tidak Terduga yang sangat signifikan, mengingat pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. Pertumbuhan Belanja Tidak Terduga tahun 2020 sebesar 30.406,35% atau meningkat senilai 89,93 Miliar Rupiah. Pada Belanja Hibah juga terjadi lonjakan pertumbuhan di tahun 2020, sebesar 186,29% atau meningkat sebesar 117,68 Miliar Rupiah.

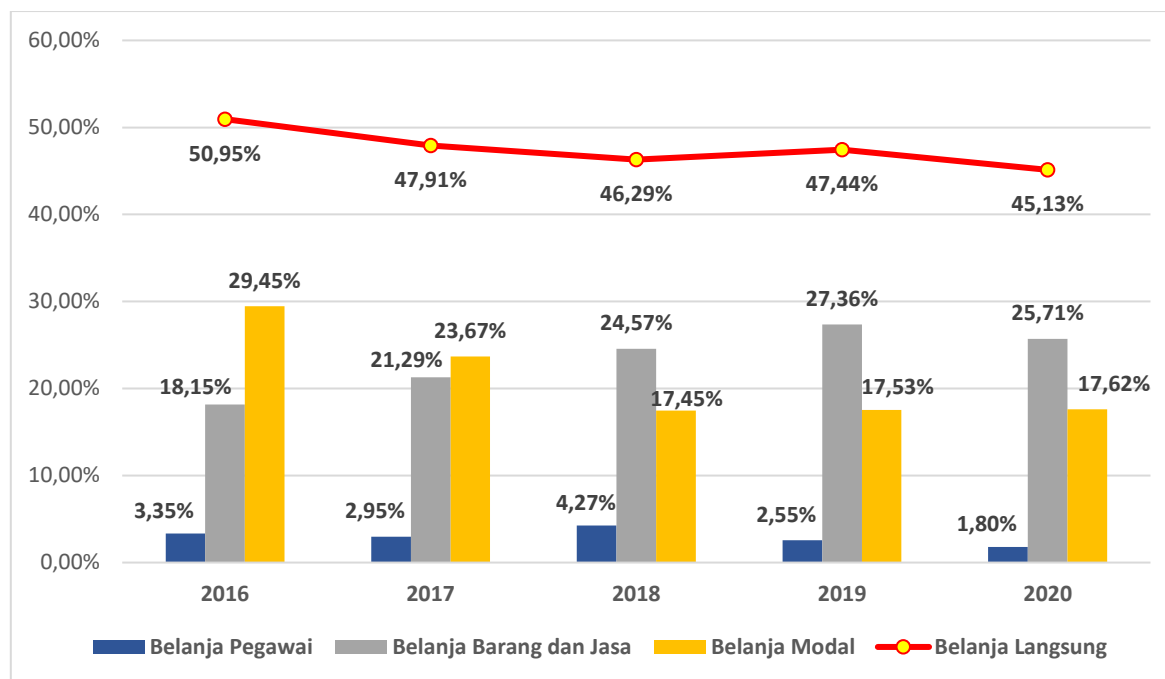
**Tabel 3.8. Pertumbuhan Komponen Belanja Tidak Langsung Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Uraian	Pertumbuhan				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>5,70</b>	<b>-4,76</b>	<b>2,28</b>	<b>7,37</b>	<b>8,53</b>
Belanja Pegawai	3,60	-15,87	4,88	3,43	-6,49
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	-51,09	42,20	-28,29	3,18	186,29
Belanja Bantuan Sosial	31,50	-51,07	87,47	126,15	53,49
Belanja Bagi Hasil	5,02	199,70	56,03	130,32	0,26
Belanja Bantuan Keuangan	72,47	38,70	-3,66	19,22	-2,54
Belanja Tidak Terduga	0,00	214,31	-100,00	0,00	30.406,35

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

#### **b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung dalam komponen belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Jumlah Belanja Barang dan Jasa merupakan jumlah paling besar dalam komponen Belanja Langsung. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan persentase komponen Belanja Langsung keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.10 Proporsi Komponen Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Struktur Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah tahun anggaran 2016 hingga 2020 memiliki trend menurun, meskipun di tahun 2019 sempat sedikit naik. Pada tahun 2020 proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah adalah yang paling kecil dalam lima tahun terakhir.

Proporsi komponen Belanja Langsung didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Rata-rata proporsi Belanja Barang dan Jasa sebesar 23,42% sementara untuk Belanja Modal sebesar 21,14%. Tahun 2016 dan 2017 proporsi komponen belanja langsung yang paling besar adalah Belanja Modal. Sementara tahun 2018 sampai dengan 2020 proporsi yang paling besar adalah Belanja Barang dan Jasa.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Transfer dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran. Pengeluaran Pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/ saham), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Asumsi yang digunakan dalam analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka *equilibrium* yakni Rp. 0,-.

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam lima tahun terakhir sebagaimana tertera pada tabel 3.1. Komponen Penerimaan Pembiayaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dengan rata-rata realisasi per tahun sebesar 148,83 Miliar Rupiah;
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah, realisasi tahun 2018 sebesar 218,86 Miliar Rupiah;
- 3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman nilainya relatif kecil, dimana tahun 2020 tidak ada realisasi, sedangkan realisasi tahun 2016 sampai dengan 2019 sebesar 0,04 Miliar Rupiah.

Sementara komponen Pengeluaran Pembiayaan yang ada realisasi adalah:

- 1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, realisasi tahun 2020 sebesar 4,10 Miliar Rupiah;
- 2) Pembayaran Pokok Utang, realisasi tahun 2018 sebesar 435,98 Miliar Rupiah.

Nilai penerimaan pembiayaan Kabupaten Banyuwangi memiliki pola yang fluktuatif dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah penerimaan pembiayaan tercatat sebesar 371,78 Miliar Rupiah yang merupakan nilai Penerimaan Pembiayaan tertinggi dalam 5 tahun anggaran. Kemudian pada tahun 2017 Penerimaan Pembiayaan menurun dengan pertumbuhan sebesar -77,91% sehingga nilainya menjadi 82,11 Miliar Rupiah. Pada tahun 2018 Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi meningkat dengan pertumbuhan sebesar 213,10% hingga menjadi 257,08 Miliar Rupiah. dan kembali mengalami penurunan sebesar -74,67% pada tahun 2019 sehingga menjadi 65,11 Miliar Rupiah yang merupakan nilai Penerimaan Pembiayaan terendah dalam kurun waktu 2016 hingga 2020. Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi kemudian kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 187,10 Miliar Rupiah. Sehingga fluktuasi anggaran penerimaan pembiayaan Kabupaten Banyuwangi dalam 5 tahun memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 61,96%.

Untuk mengetahui gambaran ringkas terkait proporsi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9. Pertumbuhan Komponen Pembiayaan  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Kode	PEMBIAYAAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Proporsi
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	99,99%	99,95%	14,85%	99,94%	100,00%	82,95%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	85,13%	0,00%	0,00%	17,03%
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,01%	0,05%	0,02%	0,06%	0,00%	0,03%
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,93%
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	99,07%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

Proporsi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 hingga 2020 paling banyak didukung oleh adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan rata-rata proporsi sebesar 82,95%. Kemudian ditunjang oleh adanya Penerimaan Pinjaman Daerah dengan rata-rata proporsi sebesar 17,03% senilai 218,86 Miliar Rupiah yang terjadi pada tahun 2018.

Bila melihat pada realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dapat diketahui bahwa dalam setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Sesuai dengan tujuan dan maksud analisis pembiayaan daerah diupayakan dapat menutup kekurangan atas angka belanja yang melebihi pendapatan yang diterima daerah (asumsi defisit), maka SiLPA tahun berkenaan ditinjau dari efektivitas keuangan juga dapat difungsikan sebagai saving yang tidak diduga. Namun dalam hal perencanaan SiLPA yang tinggi menunjukkan adanya perencanaan/pelaksanaan belanja yang kurang baik. Pada tahun 2019 dan 2020 penerimaan pembiayaan dari SiLPA Kabupaten Banyuwangi kembali meningkat setelah sebelumnya sempat menurun secara progresif.

Pengeluaran Pembiayaan di Kabupaten Banyuwangi hanya terdapat realisasi dari dua jenis komponen Pengeluaran Pembiayaan, yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada tahun 2020 kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) yang tercatat senilai 4,1 Miliar Rupiah. Kemudian terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan yang berasal dari Pembayaran Pokok Utang pada tahun 2018 yaitu senilai 435,98 Miliar Rupiah. Tidak terdapat realisasi dari dua komponen Pengeluaran Pembiayaan lainnya, yaitu Pembentukan Dana Cadangan dan Pemberian Pinjaman Daerah selama tahun anggaran 2016 hingga 2020.

### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Neraca Daerah merupakan salah satu komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diharapkan mampu memberikan peranan penting dalam mendukung kegiatan manajemen keuangan pemerintahan daerah, untuk keperluan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal. Neraca daerah dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dan ekuitas dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Peningkatan yang terjadi pada Jumlah Aset Kabupaten Banyuwangi didorong oleh adanya pertumbuhan yang progresif pada masing-masing komponen aset tersebut. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan neraca daerah, Aset Lainnya memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 38,57%. Hal ini didukung dari sumber Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Kemudian Aset Lancar dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 30,13%, dimana komponen yang memiliki dukungan pertumbuhan yang besar adalah Kas dan Penyisihan Piutang.

Selain didukung oleh pertumbuhan Aset Lainnya, peningkatan total Aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga didorong oleh adanya Investasi jangka Panjang memiliki rata-rata pertumbuhan 11,99%, serta Aset Tetap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,97%. Posisi Dana Cadangan sebagai komponen aset tidak memberikan sumbangsih nominal pada pertumbuhan total aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dikarenakan dalam kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2015 hingga 2019 nilai dana cadangan adalah Rp. 0,00. Dapat diartikan bahwa selama kurun waktu 5 tahun tidak terbentuk Dana Cadangan. Keberadaan Dana Cadangan memang tidak setiap tahun dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut tergantung pada tingkat kebutuhan untuk membiayai pengeluaran yang memerlukan dana relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, seperti halnya untuk penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan tabel neraca daerah juga dapat dilihat adanya Kewajiban. Kewajiban daerah terdiri dari 2 komponen yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Akan tetapi, pada Kabupaten Banyuwangi Kewajiban Jangka Panjang tertera Rp. 0,00 pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5

tahun terakhir. Sehingga Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi hanya bersumber dari Kewajiban Jangka Pendek yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 199,75%.

Selain aset dan kewajiban, salah satu komponen dari neraca adalah ekuitas. Ekuitas menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah. Berdasarkan tabel neraca daerah terlihat bahwa nilai Ekuitas mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,85%.

Tabel berikut menyajikan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir (2016 - 2020):

**Tabel 3.10. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
<b>1</b>	<b>ASET</b>	
<b>1.1.</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>30,13%</b>
1.1.1.	Kas	66,00%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0,00%
1.1.3.	Piutang Pendapatan	-208,98%
1.1.4.	Penyisihan Piutang	32,77%
1.1.5.	Belanja Dibayar Dimuka	18,87%
1.1.6.	Persediaan	14,17%
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-23,74%
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>11,99%</b>
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-25,00%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	12,08%
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>1,97%</b>
1.3.1.	Tanah	-1,20%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	12,62%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	7,22%
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9,57%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	-3,96%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-34,50%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	11,75%
<b>1.4.</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0,00%</b>
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00%
<b>1.5.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>38,57%</b>
1.5.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00%
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-25,00%
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	320,91%
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	18,83%

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan
1.5.5	Akumulasi Amortisasi	26,23%
1.5.6.	Aset Lain-lain	-19,40%
		0,00%
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,94%</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.1.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>199,75%</b>
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-18,29%
2.1.2.	Utang Bunga	0,00%
2.1.3.	Utang Pajak	-25,00%
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00%
2.1.5.	Pendapatan Diterima Dimuka	174,86%
2.1.6.	Utang Belanja	596,61%
2.1.7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	720,37%
<b>2.2.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0,00%
2.2.2.	Utang Luar Negeri	0,00%
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>199,75%</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.1.</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>3,85%</b>
3.1.1.	Ekuitas	3,85%
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3,85%</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3,94%</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Berikutnya disajikan nilai neraca daerah Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

**Tabel 3.11. Neraca Daerah  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
1	<b>ASET</b>					
1.1.	<b>ASET LANCAR</b>	<b>230,17</b>	<b>179,11</b>	<b>198,95</b>	<b>414,64</b>	<b>510,86</b>
1.1.1.	Kas	82,49	39,86	66,21	188,02	311,31
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Piutang Pendapatan	116,59	111,36	106,04	196,86	163,49
1.1.4.	Penyisihan Piutang	-13,92	-24,47	-30,17	-35,46	-40,59
1.1.5.	Belanja Dibayar Dimuka	2,23	2,57	2,12	3,16	4,07

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
1.1.6.	Persediaan	42,78	49,73	54,67	62,05	72,59
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
	Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2.</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>132,74</b>	<b>154,67</b>	<b>162,11</b>	<b>165,96</b>	<b>206,23</b>
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	132,30	154,23	162,11	165,96	206,23
<b>1.3.</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>3.396,69</b>	<b>3.678,57</b>	<b>3.552,49</b>	<b>3.594,41</b>	<b>3.660,77</b>
1.3.1.	Tanah	1.172,03	1.197,02	1.101,16	1.109,50	1.112,85
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	686,09	775,58	887,69	969,77	1.102,87
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.559,29	1.706,45	1.714,48	1.907,35	2.054,96
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.950,66	3.413,07	3.675,09	3.984,46	4.244,32
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	45,33	58,74	61,01	61,66	30,62
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	125,75	32,20	36,94	21,97	13,67
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-3.142,46	-3.504,51	-3.923,87	-4.460,30	-4.898,53
<b>1.4.</b>	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>192,92</b>	<b>75,67</b>	<b>240,93</b>	<b>238,37</b>	<b>232,95</b>
1.5.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20,47	12,25	174,21	172,70	177,30
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	5,65	6,61	7,62	9,33	11,26
1.5.5.	Akumulasi Amortisasi	-3,22	-4,45	-5,73	-6,77	-8,10
1.5.6.	Aset Lain-lain	170,02	61,25	64,82	63,11	52,49
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.952,53</b>	<b>4.088,02</b>	<b>4.154,48</b>	<b>4.413,37</b>	<b>4.610,81</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>2.1.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>25,78</b>	<b>246,92</b>	<b>45,04</b>	<b>57,47</b>	<b>54,86</b>
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1,67	1,13	0,94	0,72
2.1.2.	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Utang Pajak	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,55	5,01	4,40	1,01	0,75
2.1.6.	Utang Belanja	9,43	239,41	38,31	55,36	48,27
2.1.7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	15,52	0,82	1,20	0,16	5,12

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
2.2.	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>25,78</b>	<b>246,92</b>	<b>45,04</b>	<b>57,47</b>	<b>54,86</b>
3	<b>EKUITAS</b>					
3.1.	<b>EKUITAS</b>	<b>3.926,74</b>	<b>3.841,10</b>	<b>4.109,44</b>	<b>4.355,90</b>	<b>4.555,95</b>
3.1.1.	Ekuitas	3.926,74	3.841,10	4.109,44	4.355,90	4.555,95
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.926,74</b>	<b>3.841,10</b>	<b>4.109,44</b>	<b>4.355,90</b>	<b>4.555,95</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3.952,53</b>	<b>4.088,02</b>	<b>4.154,48</b>	<b>4.413,37</b>	<b>4.610,81</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Aset Kabupaten Banyuwangi terbentuk dari empat jenis yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, karena untuk jenis Dana Cadangan tidak ada realisasi (nihil). Berdasarkan data tabel Neraca Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat dilihat bahwa jumlah aset yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi terus meningkat pada setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bergerak dari angka 3.952,53 Miliar Rupiah pada tahun 2016 dapat terus meningkat hingga menyentuh angka 4.610,81 Miliar Rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,94%. Komponen Aset dengan sumbangsih terbesar diperoleh melalui Aset tetap yang berbentuk Tanah; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Peralatan Mesin dan sebagainya.

Berdasarkan jenis Kewajiban, Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Kewajiban Jangka Pendek meningkat signifikan pada tahun 2017 dengan nilai 246,92 Miliar Rupiah. Sementara rata-rata kewajiban dalam lima tahun terakhir berada jauh di bawahnya yakni sebesar 86,02 Miliar Rupiah. Peningkatan tajam pada Kewajiban Jangka Pendek tahun 2017 ini dikarenakan ada peningkatan yang sangat besar pada Utang Belanja yakni sebesar 239,41 Miliar Rupiah. Secara keseluruhan jumlah Utang Belanja pada tahun 2017 tersebut memunculkan selisih yang cukup tinggi pada Kewajiban Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 dengan Kewajiban pada tahun-tahun lainnya. Selain Utang Belanja, sumber yang cukup besar dari Kewajiban Jangka Pendek adalah Utang Jangka Pendek Lainnya dan Pendapatan Diterima Dimuka masing-masing dengan nilai rata-rata selama lima tahun adalah sebesar 4,57 Miliar Rupiah dan 2,35 Miliar Rupiah.

Sementara dari jenis Ekuitas, dalam lima tahun terakhir memiliki nilai rata-rata sebesar 4.157,83 Miliar Rupiah. Sempat mengalami penurunan di tahun 2017, kemudian naik kembali menuju tahun 2018 hingga 2020.

Berdasarkan data neraca selanjutnya dapat dilakukan perhitungan dan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 3.12. Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

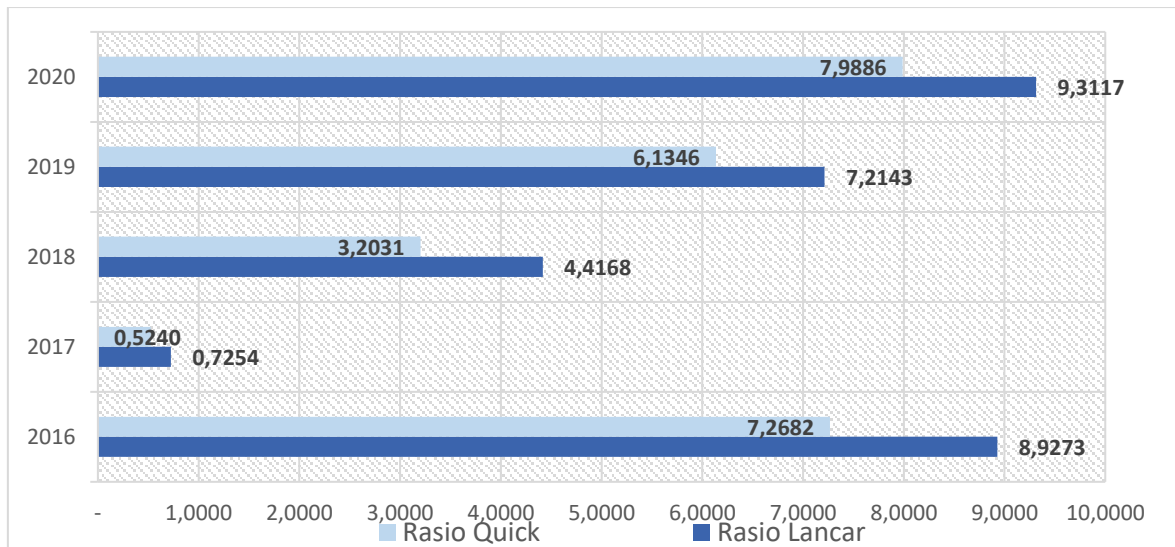
No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>A</b>	<b>RASIO LIKUIDITAS</b>					
<b>1</b>	Rasio Lancar	8,9273	0,7254	4,4168	7,2143	9,3117
<b>2</b>	Rasio Quick	7,2682	0,5240	3,2031	6,1346	7,9886
<b>B</b>	<b>RASIO SOLVABILITAS</b>					
<b>1</b>	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0065	0,0604	0,0108	0,0130	0,0119
<b>2</b>	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0066	0,0643	0,0110	0,0132	0,0120
<b>C</b>	<b>RASIO AKTIVITAS</b>					
<b>1</b>	Rata-rata Umur Piutang	12,91	15,23	13,24	17,59	20,12
<b>2</b>	Rata-rata Umur Persediaan	89,49	97,32	97,29	93,99	93,24

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Secara rinci hasil penghitungan neraca daerah yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 akan dijelaskan pada masing-masing poin rasio dibawah ini:

### 1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain adalah Rasio Lancar dan Rasio *Quick*. Berikut merupakan hasil perhitungan Rasio Lancar dan Rasio *Quick* Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016 - 2020):



**Gambar 3.11. Rasio Lancar dan Rasio Quick Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

**a. Rasio Lancar (Current Ratio)**

Rasio lancar menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Rumus perhitungan rasio lancar yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana disajikan pada gambar Rasio Lancar dan Rasio Quick, maka dapat diketahui bahwa nilai Rasio Lancar Kabupaten Banyuwangi cukup fluktuatif dengan titik terendah pada tahun 2017 yakni sampai pada angka <1 sebesar 0,7254. Hal ini selain disebabkan oleh menurunnya aktiva lancar yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi pada tahun itu juga disebabkan oleh bertambahnya kewajiban jangka pendek yang cukup tinggi, yaitu dikarenakan adanya Utang Belanja yang bernilai lebih dari 5x lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan angka 0,7254 pada tahun 2017 tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dianggap memiliki masalah keuangan saat itu yaitu mengalami penurunan kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Akan tetapi ketika melihat angka-angka Rasio Lancar selain tahun 2017 mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancar yang dimiliki sudah cukup baik dan dinilai lebih baik dari kemampuannya pada tahun 2017. Semakin tinggi nilai rasio lancar pada dasarnya menunjukkan bahwa kemampuan keuangan (penggunaan aset lancar) untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Meskipun sempat turun pada tahun 2017 akan tetapi Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan kembali nilai Rasio Lancar pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2020

mencapai angka 9,3117. Nilai tersebut merupakan capaian tertinggi dari rasio lancar yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun terakhir.

**b. Rasio Quick (Cair)**

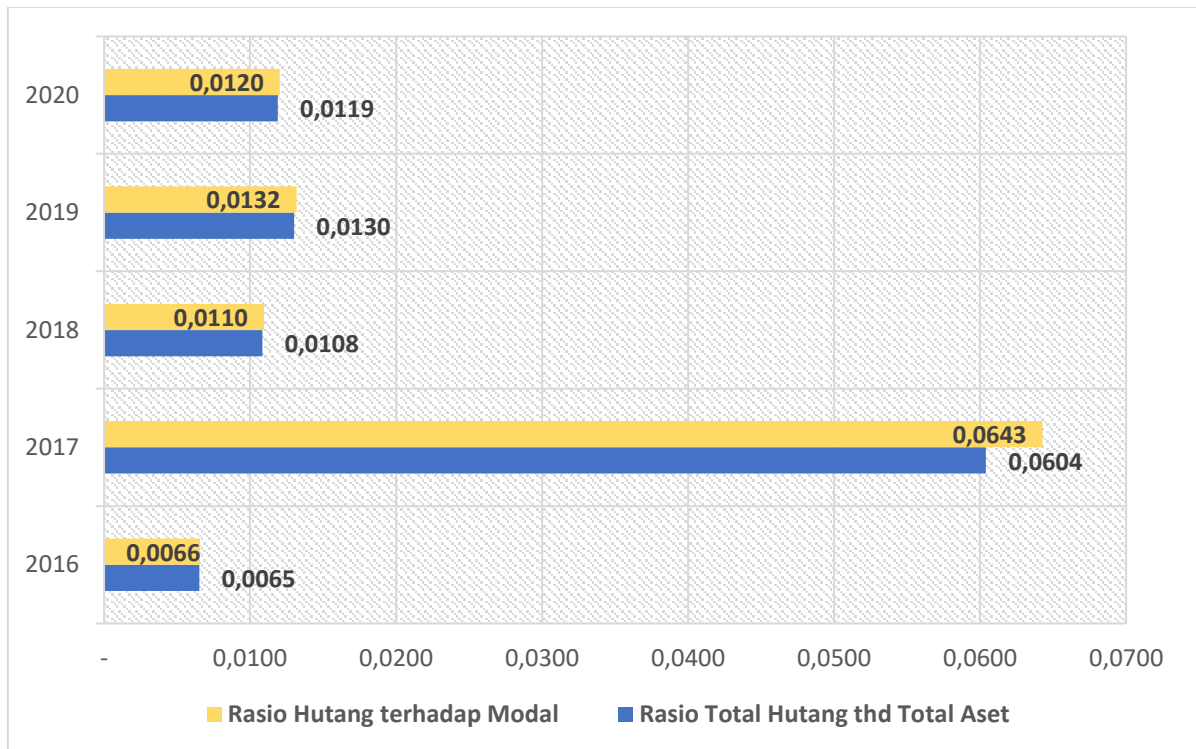
Rasio *quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rumus perhitungan rasio *quick* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Quick} = \frac{(\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar di atas, maka dapat terlihat bahwa angka Rasio *Quick* Kabupaten Banyuwangi berjalan selaras dengan angka Rasio Lancar. Sama halnya dengan Rasio Lancar, dimana penurunan Rasio *Quick* terjadi pada tahun 2017 dengan angka <1 yaitu sebesar 0,5240. Hal ini terjadi karena menurunnya posisi aktiva lancar yang lebih *liquid* (aktiva lancar-persediaan) pada tahun 2017, serta meningkatnya kewajiban jangka pendek pada tahun tersebut. Nilai persediaan Kabupaten Banyuwangi terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,17%, sehingga dengan adanya nilai persediaan yang semakin besar, maka nilai aktiva lancar yang lebih *liquid* (aktiva lancar - persediaan) akan semakin kecil dan menyebabkan angka Rasio *quick* lebih kecil dari Rasio lancar. Maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki masalah keuangan sehingga kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang lebih *liquid*. Sama halnya juga dengan Rasio lancar, ketika melihat angka-angka Rasio *quick* pada tahun-tahun selain tahun 2017 dapat melebihi 1 dan dapat dikatakan bahwa kemampuannya dalam membayar kewajiban dengan aset lancar yang lebih cair sudah baik. Pada tahun 2020 nilai Rasio *Quick* mencapai titik tertinggi yaitu pada angka 9,3117.

**2. Rasio Solvabilitas**

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan antara lain:



**Gambar 3.12. Rasio Hutang terhadap Modal dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

*Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah*

**a. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset**

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Solvabilitas dapat diketahui bahwa angka Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 tergolong rendah yaitu sebesar 0,0065. Semakin rendah angka Rasio hutang terhadap total aset maka dapat diartikan semakin kecil pula pengaruh hutang terhadap pembiayaannya. Akan tetapi pada tahun 2017 angka Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Kabupaten Banyuwangi meningkat drastis sampai pada angka 0,0604. Berjalan selaras dengan Rasio likuiditas, terdapat hutang belanja yang cukup tinggi pada tahun 2017 sehingga menyebabkan rendahnya nilai Rasio lancar dan Rasio quick. Maka dalam hal ini pada tahun 2017 terjadi peningkatan cukup tinggi pada angka Rasio Total Hutang terhadap Total Aset ketika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Pada tahun 2018 dan 2019 angka rasio hutang terhadap total aset kembali menurun meskipun tetap lebih tinggi dari tahun 2016, akan tetapi hal ini sudah mengindikasikan adanya peningkatan solvabilitas keuangan Kabupaten Banyuwangi dan semakin kecilnya resiko yang dihadapi Kabupaten Banyuwangi karena menurunnya presentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/ donatur/ pihak ketiga dalam pembiayaan pembangunan. Adanya penurunan jumlah hutang dan meningkatnya aset pada tahun 2020 maka menyebabkan nilai rasio Rasio Total Hutang terhadap Total Aset kembali menurun mendekati pada angka 0,119.

### b. Rasio Total Hutang terhadap Modal

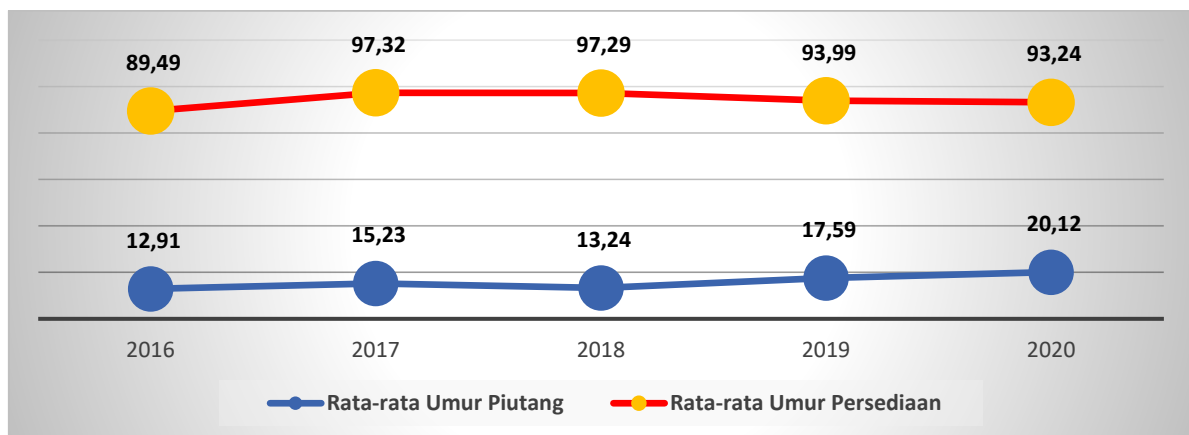
Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rumus perhitungan rasio total hutang terhadap modal yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Hutang Terhadap Modal} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Semakin kecil nilai Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri, yaitu tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Berdasarkan data hasil perhitungan pada gambar di atas dapat dilihat bahwa angka Rasio Total Hutang Terhadap Modal dalam kurun waktu 5 tahun tidak jauh dari angka Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset. Pada 2016 tercatat angka Rasio Hutang Terhadap Modal sebesar 0,0066. Angka tersebut menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 masih jauh dibawah modal yang dimiliki yaitu sebesar 0,66%. Sedangkan pada tahun 2017, adanya peningkatan nilai hutang belanja yang menyebabkan bertambahnya kewajiban pemerintah maka angka Rasio Total Hutang Terhadap Modal naik menjadi 6,43%. Fluktuasi nilai Rasio Hutang Terhadap Modal terlihat terjadi pada tahun 2018 hingga 2020. Setelah dapat menurun dari tahun 2017 menjadi 0,0110 pada tahun 2018 kemudian nilai Rasio Hutang Terhadap Modal kembali meningkat pada angka 0,0132 di tahun 2019 dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 0,0120.

### 3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan antara lain:



**Gambar 3.13. Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

**a. Rata-rata Umur Piutang**

Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Rumus perhitungan rata-rata umur piutang yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata Umur Piutang} = \frac{365}{\text{Perputaran Piutang}}$$

\* Dimana :

*Perputaran Piutang = pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah.*

*Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2.*

Berdasarkan hasil perhitungan Rata-Rata Umur Piutang Kabupaten Banyuwangi pada gambar di atas terlihat bahwa Rata-Rata Umur Piutang mengalami kecenderungan tren meningkat dari tahun 2016 sebanyak 12,91 hari menjadi 20,12 hari di tahun 2020. Pada tahun 2018 sempat terjadi penurunan dari 15,23 hari menjadi 13,24 hari. Jika kembali pada Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas pada pembahasan sebelumnya, maka nilai rata-rata umur piutang Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan baik. Karena Rata-rata umur piutang Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 cukup selaras dengan tahun-tahun lainnya sehingga peningkatan utang/kewajiban yang terjadi pada tahun 2017 tidak meningkatkan Rata-rata umur piutang pada tahun tersebut. Secara keseluruhan Rata-Rata Umur Piutang yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi tidak lebih dari 3 minggu yakni selama 15,82 hari. Sehingga dengan demikian tingkat risiko terkait pengembalian piutang selama 1 tahun dinilai masih sangat rendah.

**b. Rata-rata Umur Persediaan**

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Rumus perhitungan rata-rata umur persediaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{Rata - Rata Umur Persediaan} = \frac{365}{\text{Perputaran Persediaan}}$$

\* Dimana :

*Perputaran persediaan = nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun : rata-rata nilai persediaan.*

*Sedangkan rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2.*

Berdasarkan hasil perhitungan Rata-Rata Umur Persediaan Kabupaten Banyuwangi pada gambar di atas dalam 5 tahun terakhir terlihat adanya fluktuasi dengan tren menurun pada 3 tahun terakhir (2018 - 2020) jika dibandingkan dengan nilai pada tahun 2017. Posisi awal nilai rata-rata umur persediaan

menunjukkan angka 89,49 hari kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2017 menjadi 97,32 hari. Akan tetapi sejak tahun 2018 terlihat perlahan menurun pada angka 97,29 dan terus menurun menjadi 93,99 pada tahun 2019 dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 93,24 hari. Namun Rata-Rata Umur Persediaan tahun 2020 masih lebih tinggi dari tahun 2016. Jika pada tahun-tahun berikutnya rata-rata umur persediaan terus menurun maka akan menghasilkan nilai rata-rata umur persediaan yang lebih rendah dari tahun 2016. Sehingga hal tersebut mengindikasikan penggunaan dana persediaan yang semakin menurun, kurang efisien dan manajemen pengelolaan persediaan di Kabupaten Banyuwangi semakin menurun juga.

### **3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun lalu, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan.

Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Pada penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada asas umum APBD sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain :

1. Pasal 16 ayat (1) bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Pasal 17 ayat (2) bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
3. Pasal 18 ayat (1) bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

#### **1. Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur menggambarkan belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti: belanja gaji dan tunjangan; tambahan penghasilan; Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH; pemungutan dan insentif pemungutan; honorarium; uang lembur; belanja terkait dengan pengembangan SDM, kesejahteraan, dan perlengkapan Aparatur; perjalanan dinas, serta Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan).

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 mengalami penurunan walaupun menuju tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah belanja kebutuhan aparatur tercatat sebanyak 1.490,41 Miliar Rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1.305,88 Miliar Rupiah. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka Rp. 1.285,02 Miliar Rupiah. Tahun 2020 sebagai capaian terbaik dalam lima tahun terakhir terkait penurunan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur.

Adapun realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas dan rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.13. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah	Miliar Rupiah
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.209,91</b>	<b>1.017,87</b>	<b>1.067,56</b>	<b>1.104,16</b>	<b>1.032,54</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	839,00	799,48	967,08	983,27	905,05
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	361,50	208,90	82,60	101,68	100,35
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,31	7,10	15,89	15,21	27,14
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	0,83	0,61	0,32	0,82	0,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3,31	1,42	1,68	2,15	0,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,95	0,36	0,00	1,03	0,00
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>280,50</b>	<b>288,01</b>	<b>306,88</b>	<b>290,41</b>	<b>252,48</b>
1	Belanja Honorarium PNS**)	17,49	20,33	20,81	21,39	13,17
	Belanja Honorarium Non-PNS	22,33	28,87	67,39	26,29	17,89
2	Belanja Uang Lembur**)	9,21	12,64	11,20	10,73	7,45
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	1,73	1,37	0,97	4,45	3,61
5	Belanja premi asuransi kesehatan	0,14	1,13	1,17	0,92	0,04
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	29,75	31,76	45,26	54,10	35,78
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	0,28	0,54	0,49	0,69	0,39
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1,32	2,56	4,40	7,20	4,72
9	Belanja perjalanan dinas**)	43,82	61,15	65,68	73,19	51,60
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	154,42	127,61	89,53	91,46	117,82
	<b>TOTAL</b>	<b>1.490,41</b>	<b>1.305,88</b>	<b>1.374,44</b>	<b>1.394,57</b>	<b>1.285,02</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan belanja kebutuhan aparatur sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, maka untuk data proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.14. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020**

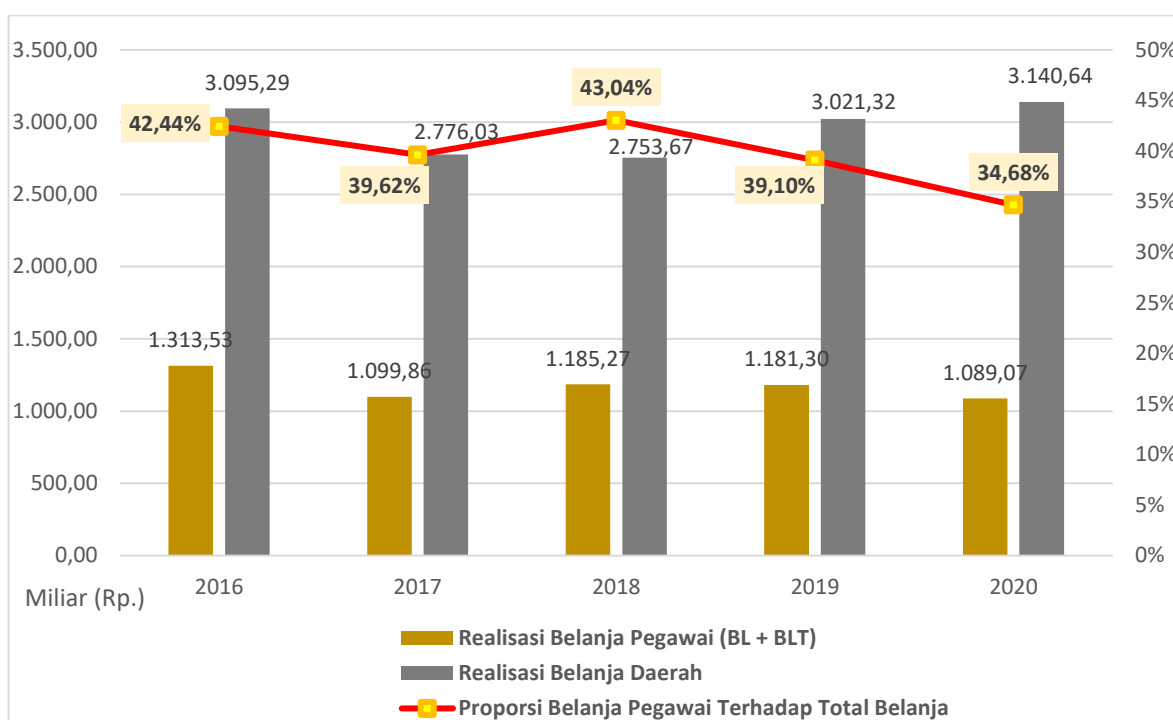
No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Miliar Rupiah)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Miliar Rupiah)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	1.490,41	3.095,29	48,15%
2	Tahun Anggaran 2017	1.305,88	2.776,03	47,04%
3	Tahun Anggaran 2018	1.374,44	3.189,65	43,09%
4	Tahun Anggaran 2019	1.394,57	3.021,32	46,16%
5	Tahun Anggaran 2020	1.285,02	3.144,74	40,86%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami fluktuasi, dimana kondisi pada tahun 2016 menunjukkan terjadinya proporsi tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar 48,15%. Dan pada tahun 2020 mencapai kondisi terbaik dengan proporsi sebesar 40,86%. Sementara rata-rata Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2016 hingga 2020 adalah sebesar 45,06%.

## 2. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Proporsi ini memperlihatkan postur belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka proporsinya maka semakin besar proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung (BPL) dan Belanja Pegawai Tidak Langsung (BTL). Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas dapat disajikan pada grafik di bawah ini:



**Gambar 3.14. Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

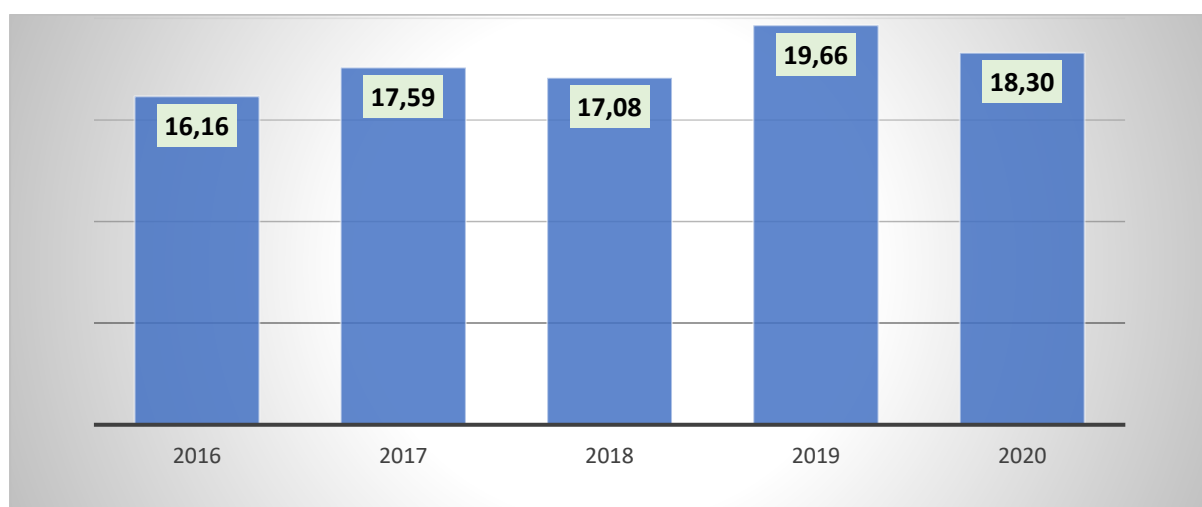
Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa proporsi belanja pegawai terhadap total belanja Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif. Proporsi belanja pegawai Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 tercatat sebesar 42,44%, sedangkan pada tahun 2016 hingga 2019 secara bertahap mengalami penurunan menjadi 39,62% pada tahun 2017, 43,04% pada tahun 2018, dan 39,10% pada tahun 2019. Penurunan proporsi belanja pegawai terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai 34,68%. Sehingga capaian tahun 2020 menjadi capaian terbaik pada lima tahun terakhir. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tahun 2016 hingga 2020 masih berada di bawah 50% yakni dengan rata-rata proporsi 39,78%, artinya kondisi tersebut masih relatif baik dimana porsi belanja tidak didominasi oleh belanja pegawai.

### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Berikut disajikan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan kriteria dari rasio tersebut.



**Gambar 3.15. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Pada gambar dapat dijelaskan bahwa Rasio Kemandirian Daerah ada kecenderungan meningkat ke tahun 2019 kemudian turun di tahun 2020. Namun capaian di tahun 2020 yakni sebesar 18,30% masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sampai dengan 2018.

**Tabel 3.15. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

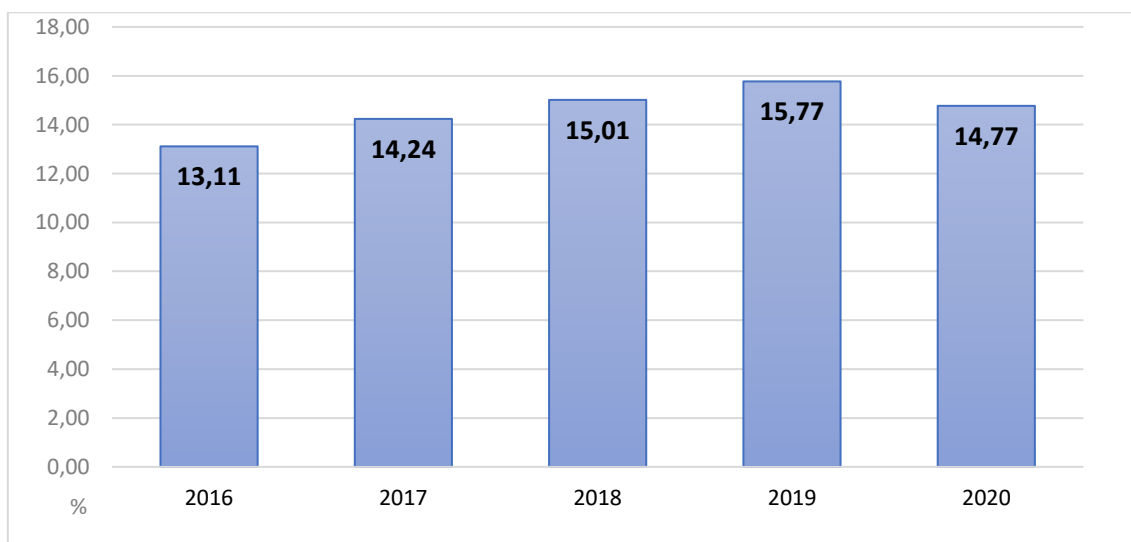
Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
<b>Rendah Sekali</b>	0 - 25	Instruktif
<b>Rendah</b>	25 - 50	Konsultatif
<b>Sedang</b>	50 - 75	Partisipatif
<b>Tinggi</b>	75 - 100	Delegatif

Berdasarkan pada grafik pada di atas terlihat bahwa tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Angka yang tercatat berada dalam skala 16,16 - 19,66 tergolong dalam kemampuan keuangan yang sangat rendah dan memiliki pola hubungan yang instruktif. Dengan pola hubungan Instruktif selama 5 tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Banyuwangi masih memiliki ketergantungan tinggi pada transfer dana pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi terlihat menunjukkan tren yang positif pada 4 tahun

pertama (2016 - 2019) dengan mengalami peningkatan tingkat kemandirian keuangan pada setiap tahunnya. Walaupun keseluruhan tingkat kemandirian keuangan tersebut masih tergolong sangat rendah dengan pola hubungan yang masih instruktif (peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah/ daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial) tetapi peningkatannya sampai pada tahun 2019 dapat mendekati rasio dengan hubungan konsultatif (campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berusaha menjadi daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Akan tetapi pada tahun 2020 tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya penurunan dari angka 19,66 di tahun 2019 menjadi 18,30 pada tahun 2020.

#### 4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Berikut disajikan data mengenai Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun beserta kriterianya.



**Gambar 3.16. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

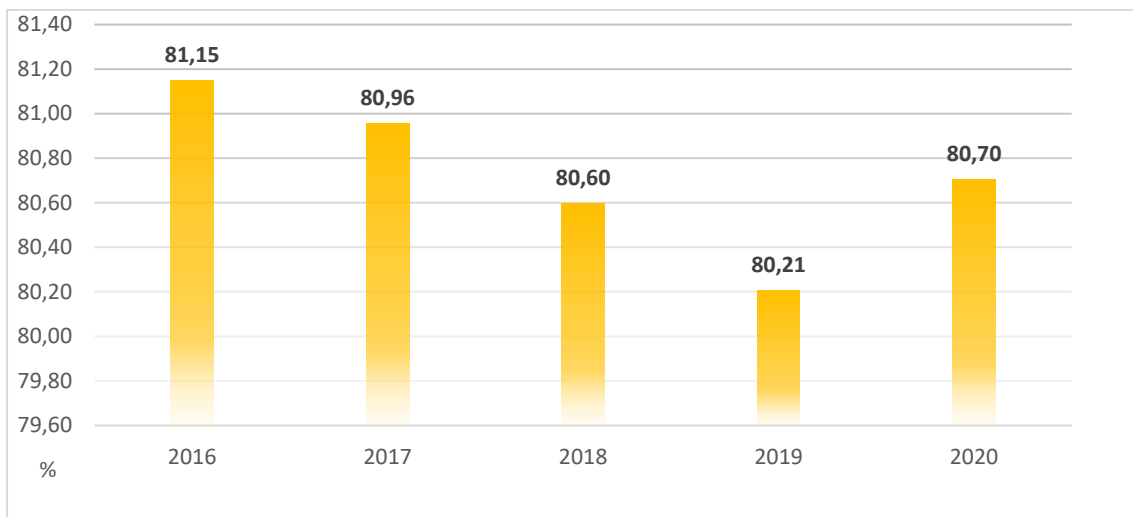
**Tabel 3.16. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal**

<b>Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah</b>	<b>Tingkat Desentralisasi Fiskal</b>
<b>0,00 - 10,00</b>	Sangat Kurang
<b>10,01 - 20,00</b>	Kurang
<b>20,01 - 30,00</b>	Sedang
<b>30,01 - 40,00</b>	Cukup
<b>40,01 - 50,00</b>	Baik
<b>&gt;50,00</b>	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi dalam gambar di atas selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan rentan angka 13,11 - 15,77 sehingga menunjukkan tingkat desentralisasi yang “**Kurang**”. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi 5 tahun terakhir dalam memaksimalkan PAD terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya masih kurang. Meskipun keseluruhan angka menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal yang kurang, akan tetapi sama seperti tingkat kemandirian keuangan daerah maka Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi perlahan terjadi peningkatan pada setiap tahunnya pada 4 tahun pertama (2016 - 2019) dengan menunjukkan angka yang semakin mendekati prosentase tingkat desentralisasi fiskal yang sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Banyuwangi terus berusaha mengoptimalkan PAD untuk dapat menjalankan fungsi desentralisasi lebih baik dalam sisi keuangan daerah. Akan tetapi pada tahun 2020 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Banyuwangi menunjukkan nilai yang menurun hingga lebih rendah dari tahun 2018-2019.

#### **5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Berikut tersaji data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir beserta kriterianya.



**Gambar 3.17. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

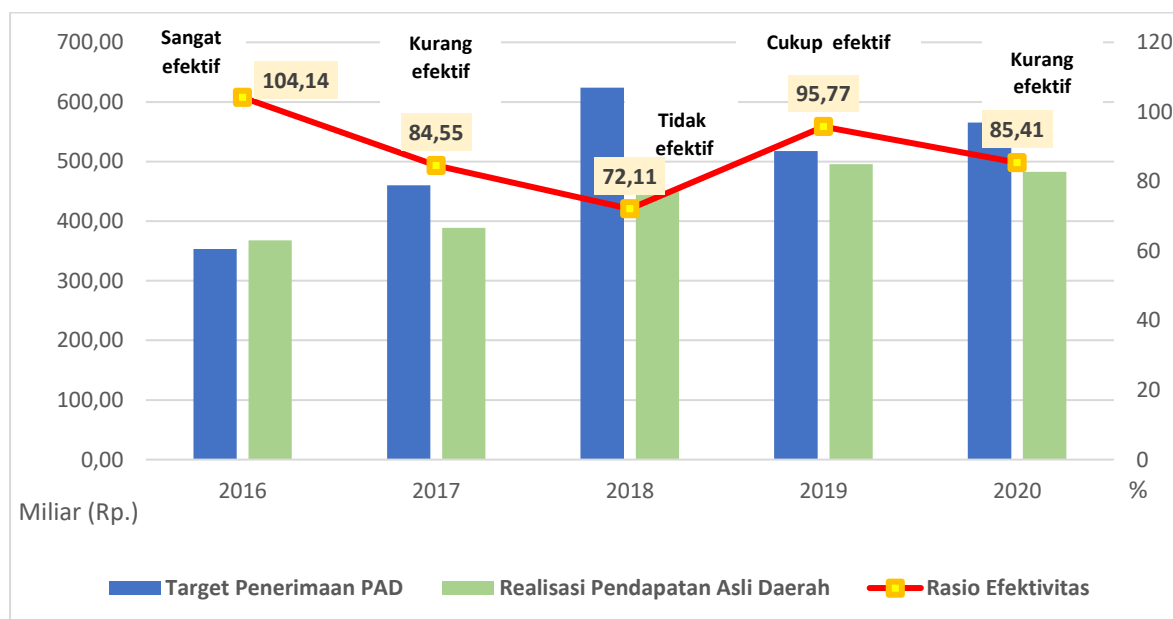
**Tabel 3.17. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada gambar di atas selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan rentan angka 81,15% - 80,21%, sehingga menunjukkan tingkat ketergantungan yang “Sangat Tinggi” karena berada pada rentan nilai >50,00. Hal ini dapat diartikan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi. Rasio ketergantungan Kabupaten Banyuwangi juga berjalan selaras dengan nilai yang muncul pada rasio kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu terlihat adanya tren positif dengan terjadinya penurunan tingkat ketergantungan pada setiap tahunnya pada 4 tahun pertama (2016 - 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mengurangi ketergantungannya terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat/provinsi dengan lebih mengoptimalkan PAD yang dimiliki pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Walaupun pada tahun 2020 nilai Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terlihat sedikit meningkat kembali pada angka 80,70% yang dipengaruhi oleh adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 6. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berikut tersaji data Rasio Efektivitas Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir beserta kriteria dari hasil perhitungannya.



**Gambar 3.18. Rasio Efektivitas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

**Tabel 3.18. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas**

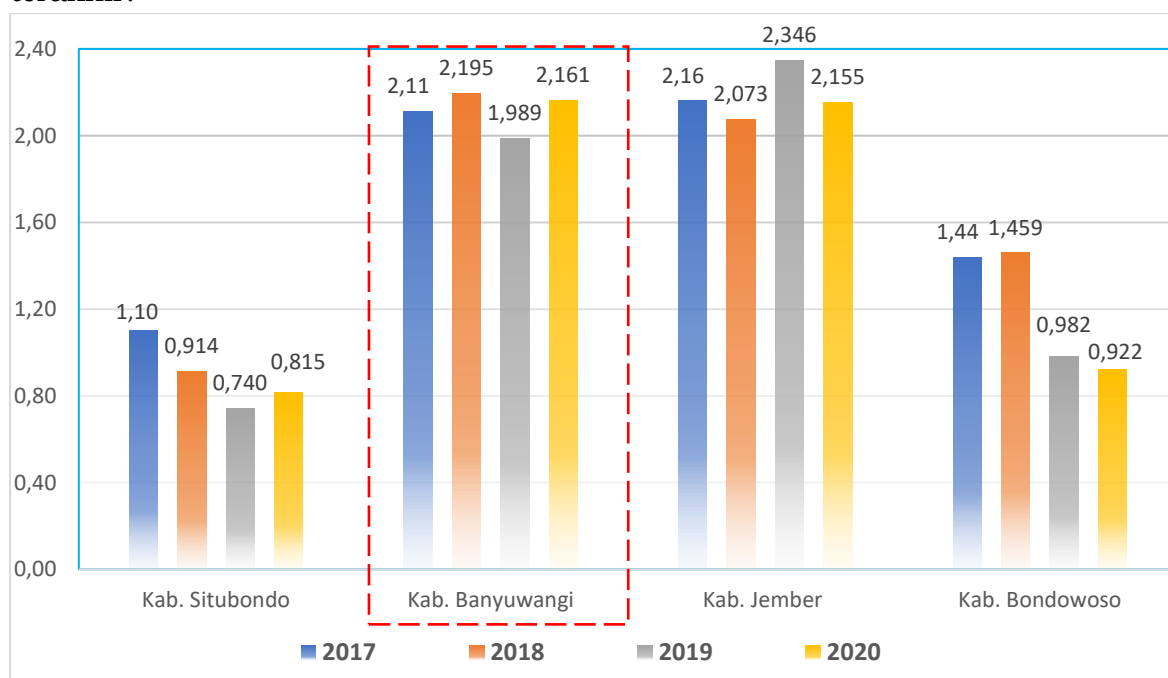
Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Banyuwangi pada gambar di atas selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan data yang fluktuatif. Pada tahun 2016 Rasio Efektivitas Kabupaten Banyuwangi dapat menyentuh angka 104,14% yang artinya pada tahun tersebut PAD yang dimiliki dapat direalisasikan dengan **sangat efektif**. Akan tetapi pada tahun 2017 Rasio Efektivitas Kabupaten Banyuwangi menurun pada angka 84,55% dan kriteria efektivitas penggunaan PAD Kabupaten Banyuwangi menjadi **kurang efektif**. Keadaan ini terus berlanjut hingga

pada tahun 2018, dimana efektivitas penggunaan PAD Kabupaten Banyuwangi pada kondisi terendah dalam lima tahun terakhir yakni dengan rasio sebesar 72,11%. Sehingga tingkat efektivitas dalam merealisasikan PAD tahun 2018 termasuk dalam kategori **tidak efektif**. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan angka Rasio Efektivitas sampai pada angka 95,77 yang hampir mendekati 100%, sehingga penggunaan PAD pada tahun 2019 dinilai **cukup efektif**. Kemudian pada tahun 2020 nilai Rasio Efektivitas terlihat kembali menurun hingga menyentuh angka 85,41 dan menunjukkan tingkat efektivitas realisasi PAD yang **kurang efektif**.

## 7. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Banyuwangi dan daerah sekitarnya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.



**Gambar 3.19. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017 - 2020**

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017 - 2020

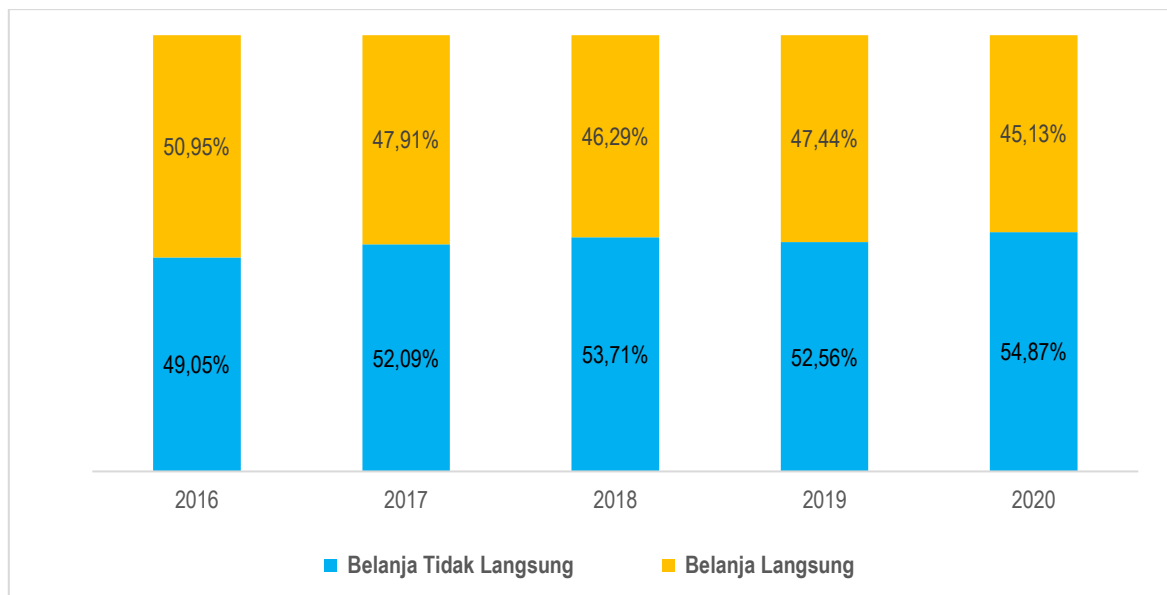
**Tabel 3.19. Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Berdasarkan PMK No. 120/PMK.07/2020**

Nilai IKFD	Kriteria
$IKFD \geq 2,145$	Sangat Tinggi
$2,145 < IKFD < 1,168$	Tinggi
$1,168 < IKFD < 0,747$	Sedang
$0,747 \leq IKFD < 0,517$	Rendah
$IKFD < 0,517$	Sangat Rendah

Berdasarkan data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Banyuwangi dan 3 daerah sekitarnya yang tertera pada gambar di atas terlihat bahwa IKFD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 dan 2020 mencapai nilai tertinggi jika dibandingkan 3 daerah disekitarnya, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. IKFD Kabupaten Banyuwangi cukup bersaing dengan Kabupaten Jember. Melihat masing-masing nilai IKFD Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahunnya maka terlihat bahwa IKFD Kabupaten Banyuwangi tergolong dalam kriteria sangat tinggi pada tahun 2017,2018, dan 2020. Sementara pada tahun 2019 berada pada kategori tinggi. Rata-rata IKFD Kabupaten Banyuwangi dalam empat tahun terakhir adalah sebesar 2,11 (kategori tinggi), berada di atas rata-rata IKFD Kabupaten Situbondo (0,89 atau kategori sedang) dan Kabupaten Bondowoso (1,20 atau kategori tinggi).

#### **8. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja**

Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Idealnya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan. Proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja tersaji pada grafik di bawah ini:



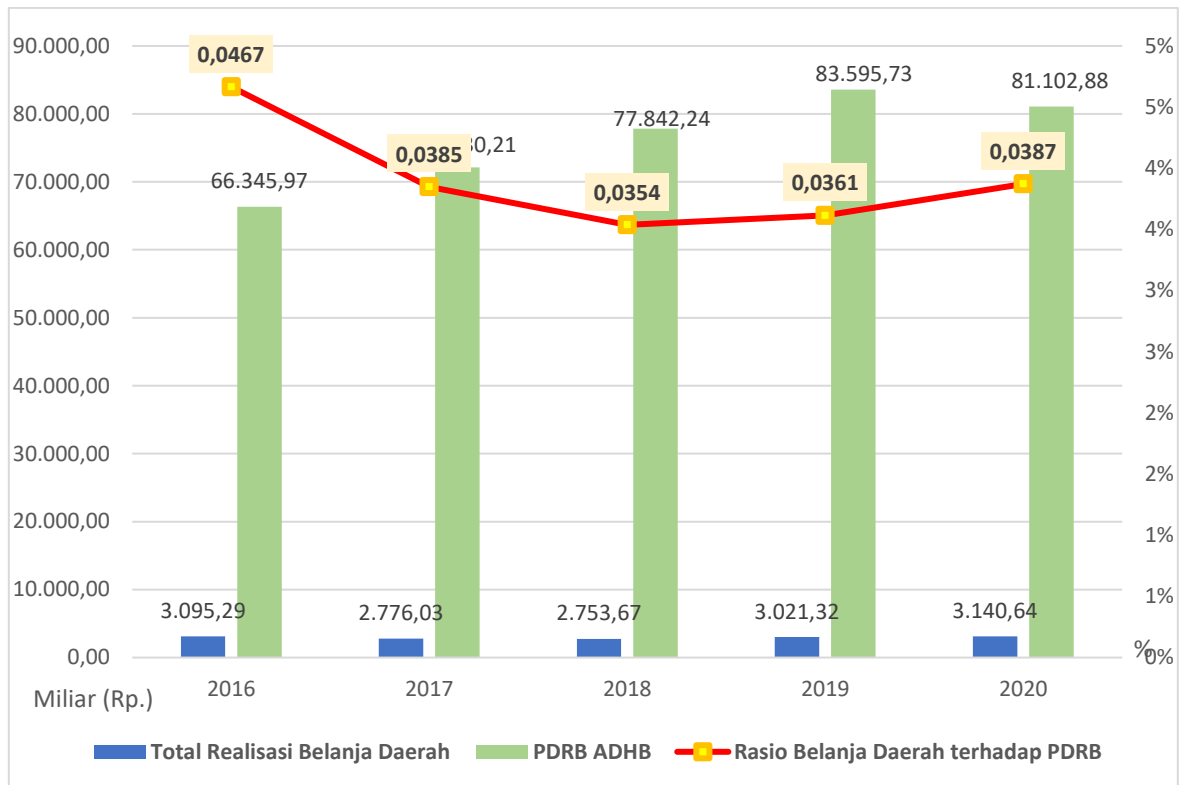
**Gambar 3.20. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tren proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 hingga 2020 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lebih banyak mengalokasikan dalam bentuk belanja tidak langsung daripada belanja langsung, dimana pada tahun 2020 mencapai 54,87%. Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran/belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Namun, jika dilihat dengan lebih teliti, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah berupaya menurunkan proporsi belanja tidak langsung dan menaikkan proporsi belanja langsung. Terlihat pada tahun 2019 dimana proporsi belanja tidak langsung memiliki nilai yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

## 9. Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

Rasio belanja daerah terhadap PDRB merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi dijelaskan pada grafik di bawah ini:



**Gambar 3.21. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 -2020**

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi dan BPS Banyuwangi, data diolah

Rasio belanja daerah terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 hingga 2018 menunjukkan adanya penurunan dan mulai menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2019 dan 2020, namun pertumbuhannya kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Kabupaten Banyuwangi konsisten dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas belanja daerahnya hingga mencapai angka 0,0354 pada tahun 2018. Besaran nilai rasio ini dipengaruhi oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan total belanja daerah, sehingga semakin rendah rasionya berarti semakin efektif pemerintah dalam membelanjakan anggarannya, karena rasio belanja terhadap PDRB merupakan perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah dengan PDRB daerah tersebut.

## 10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran wajib dan mengikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 secara lebih jelas disajikan melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 3.20. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>845,76</b>	<b>813,90</b>	<b>1.009,23</b>	<b>1.024,81</b>	<b>958,58</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	839,00	799,48	967,08	983,27	905,05
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,31	7,10	15,89	15,21	27,14
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00
4	Belanja Bagi Hasil	2,44	7,32	11,43	26,32	26,39
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	435,98	0,00	0,00
	<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>845,76</b>	<b>813,90</b>	<b>1.445,22</b>	<b>1.024,81</b>	<b>958,58</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran wajib dan mengikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 total pengeluaran belanja wajib dan mengikat mengalami penurunan di angka 813,90 Miliar Rupiah dari tahun 2016 yang sebesar 845,76 Miliar Rupiah. Kemudian pada tahun 2018 dan tahun 2019 secara bertahap mengalami peningkatan hingga mencapai angka 1.024,81 Miliar Rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 pengeluaran wajib mengikat Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan kembali sehingga berada pada angka 958,58 Miliar Rupiah. Pengeluaran terbesar dari pengeluaran wajib dan mengikat terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan, sedangkan pengeluaran paling sedikit terdapat pada belanja bunga dan pembentukan dana cadangan.

Berdasarkan pada data historis belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seperti yang telah dibahas dan disajikan pada tabel di atas, maka untuk mengetahui perkiraan pengeluaran untuk tahun-tahun yang akan datang dilakukan proyeksi terhadap masing-masing komponen belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 hingga 2026.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal adanya pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Begitu pula dengan pengeluaran pembiayaan yaitu pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

#### 1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Langkah awal yang dilaksanakan terkait dengan analisis tersebut adalah membuat tabel Penutup Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.21. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.805,62	2.732,02	2.997,64	3.143,28	3.268,23
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	3.095,29	2.776,03	2.753,67	3.021,32	3.140,64
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	435,98	-	4,10
A	Defisit riil	-289,67	-44,01	-192,00	121,97	123,49
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	371,73	82,07	38,17	65,08	187,10
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	218,86	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,05	0,04	0,05	0,04	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	371,78	82,11	257,08	65,11	187,10
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	82,11	38,10	65,08	187,08	310,59

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

**Tabel 3.22. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-128,33%	-186,50%	-19,88%	53,36%	151,51%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	-113,99%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-0,02%	-0,08%	-0,02%	0,03%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-128,34%	-186,58%	-133,89%	53,39%	151,51%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

## 2. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2017 hingga 2020.

**Tabel 3.23. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyuwangi 2017 – 2020**

No.	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020		Rata-rata
		Miliar Rp.	% dari SiLPA	Miliar Rp.	% dari SiLPA	Miliar Rp.	% dari SiLPA	Miliar Rp.	% dari SiLPA	Miliar Rp.	% dari SiLPA	Pertumbuhan
	<b>Jumlah SiLPA</b>	<b>82,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>187,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>310,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,56%</b>
1	Pelampauan penerimaan PAD	14,61	17,80%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-83,30%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	0,00%	-	0,00%	56,06	86,15%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	29,77	36,25%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	123,49	39,76%	-4,78%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	37,73	45,95%	38,10	100,00%	9,02	13,85%	187,08	100,00%	187,10	60,24%	362,54%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
6	Kegiatan lanjutan		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk memberikan gambaran tentang komposisi SiLPA Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan, serta Kegiatan Lanjutan. Pada tahun 2016 pelampauan pendapatan daerah terjadi pada Pelampauan Penerimaan PAD, Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Tahun 2017 dan 2019 sumber SiLPA hanya berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Tahun 2018 sumber SiLPA berasal dari Pelampauan Dana Perimbangan dan Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Sedangkan pada tahun 2020 sumber SiLPA adalah Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya dengan total nilai 310,59 Miliar Rupiah.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA tersebut harus diuraikan kembali pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan.

### 3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.24. Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2020**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
1	Saldo kas neraca daerah	82,49	39,86	66,21	188,02	311,31
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran</b>	<b>82,49</b>	<b>39,86</b>	<b>66,21</b>	<b>188,02</b>	<b>311,31</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Banyuwangi, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016

hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar 82,49 Miliar Rupiah. Kemudian pada tahun 2017 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menurun hingga mencapai 39,86 Miliar Rupiah, dan kemudian mengalami peningkatan secara bertahap hingga tahun 2020 mencapai 311,31 Miliar Rupiah.

#### **4. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah**

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sisa lebih perhitungan anggaran dalam setiap tahun pada tahun-tahun yang akan datang dalam periode perencanaan. Perhitungan proyeksi pembiayaan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi SiLPA dan saldo kas yang dihasilkan berdasarkan data historis. Melihat pada data SiLPA dan saldo kas neraca daerah dalam beberapa tahun terakhir, selanjutnya dapat diketahui proporsi SiLPA terhadap saldo kas, yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan proyeksi saldo kas neraca daerah pada tahun 2022 hingga 2026, dengan turut memperhatikan hasil proyeksi SiLPA pada tahun 2022 hingga 2026.

Proyeksi sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran dihitung berdasarkan hasil proyeksi saldo kas neraca daerah dikurangi dengan hasil proyeksi kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikandan nilai kegiatan lanjutan. Sehubungan dengan tidak adanya kewajiban yang dimiliki, serta kegiatan lanjutan yang akan dijalankan, maka nilai sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 hingga 2026 hanya diperoleh dari hasil proyeksi saldo kas neraca daerah.

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yaitu : (1) **Prioritas Pertama**, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (2) **Prioritas Kedua**, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah; (3) **Prioritas Ketiga**, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2022-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

#### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai perkiraan pendapatan daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2022 hingga 2026 dengan memperhatikan pada kondisi ekonomi dan kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, serta belanja yang akan dikeluarkan dengan memperhatikan pada perkiraan pendapatan yang akan diterima serta kebijakan-kebijakan terkait dengan belanja daerah, maupun pembiayaan daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah dan kondisi peningkatan pendapatan daerah, serta pertimbangan/ kebijakan lainnya.

Berdasarkan pada hasil proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2022 sampai 2026 secara keseluruhan diperkirakan mencapai 0,81%. Bila dilihat secara lebih rinci pada masing-masing jenis pendapatan, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 3,76% dengan rata-rata pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 3,71% dan 3,68%, mengingat kondisi ekonomi daerah maupun secara nasional khususnya pada tahun 2022 diperkirakan masih dalam tahap masa pemulihan (*recovery*) setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 hingga berada pada posisi minus untuk menuju kondisi normal, disisi lain belum ada

kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Selain itu upaya optimalisasi terhadap PAD melalui diversifikasi terhadap obyek pajak dan retribusi daerah dibatasi oleh regulasi, antara lain: retribusi pelayanan tera, pajak galian C/ tambang yang kewenangannya telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Untuk obyek Lain-lain PAD yang sah merupakan pos pendapatan yang bersumber dari BLUD dan JKN, sehingga tidak dapat diproyeksikan sebagai sumber pembiayaan untuk belanja APBD yang bersifat *block grant* (bebas/ tidak terikat), untuk itu dalam kondisi saat ini rata-rata pertumbuhan dari Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar 3,82%.

Keberadaan pendapatan transfer yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 sampai 2026 diproyeksikan memiliki pertumbuhan sebesar 0,00% atau diperkirakan sebesar 1.769,03 Miliar Rupiah pada akhir periode RPJMD. Mengingat dengan kondisi saat ini, dimana anggaran Pemerintah Pusat mengalami defisit dan kebutuhan belanja Pemerintah Pusat yang sangat tinggi, maka tidak menutup kemungkinan keberadaan dana transfer untuk dilakukan penyesuaian, sehingga dengan demikian Pemerintah Daerah lebih mengambil asumsi moderat dengan tidak adanya kenaikan belanja transfer dalam setiap tahunnya. Untuk pagu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Bantuan Keuangan (BKK) tidak dianggarkan dalam perencanaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD (mengacu pada pagu definitif sesuai UU/ Perpres/ PMK). Bila melihat pada proporsi masing-masing jenis pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui bahwa PAD pada tahun 2022 hingga 2026 diproyeksikan memiliki rata-rata proporsi sebesar 22,9% dari total pendapatan, atau memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata realisasi yang saat ini terjadi sebesar 14,58%, sehingga perlu adanya dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk mencapainya dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi maupun untuk meningkatkan kemandirian daerah. Keberadaan pendapatan transfer diperkirakan masih menjadi salah satu jenis pendapatan yang dominan dengan proporsi sebesar 71,83% dari total pendapatan daerah, sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan memiliki proporsi sebesar 5,27%.

Hasil proyeksi belanja daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja secara keseluruhan selama tahun 2022 sampai 2026 rata-rata diperkirakan mencapai 0,8%, dimana untuk belanja operasi diperkirakan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0,44%. Untuk pos belanja pegawai diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebagai penyediaan terhadap kebijakan pengangkatan PPPK dan kemungkinan adanya kenaikan gaji pokok PNS sesuai arahan Bapak Presiden dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,31%. Sedangkan pada pos belanja barang dan jasa diperkirakan mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 0,57% dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk belanja modal pada tahun 2022 sampai 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,9%, dalam rangka untuk menunjang pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk belanja tidak terduga diperkirakan memiliki nilai yang sama setiap tahun sebesar 10,00 Miliar Rupiah. Pada belanja

transfer untuk tahun 2022 sampai 2026 diperkirakan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0,34%.

Bila ditinjau berdasarkan tingkat proporsinya dapat diketahui bahwa diantara jenis belanja yang ada, rata-rata proporsi untuk belanja operasi pada tahun 2022 sampai 2026 diperkirakan memiliki proporsi yang lebih besar dan berada pada angka 72,15%, selanjutnya terdapat belanja transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 15,90%. Untuk belanja modal berada pada urutan ketiga dengan proporsi rata-rata sebesar 11,54%, sedangkan untuk belanja tidak terduga diperkirakan memiliki rata-rata proporsi sebesar 0,40%. Bila melihat pada proporsi belanja pegawai dapat diketahui bahwa proporsi untuk belanja pegawai pada tahun 2022 sampai 2026 rata-rata diperkirakan sebesar 40,78%. Dimana proporsi sejak tahun 2022 hingga 2026 adalah selalu menurun. Meskipun ada kenaikan belanja pegawai dalam setiap tahunnya, postur belanja pegawai masih jauh berada di bawah 50% dan masih berada dalam kondisi yang baik.

Komposisi pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 hingga 2026 diperkirakan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang memiliki nilai diperkirakan sebesar 25,00 Miliar Rupiah sepanjang tahun. SiLPA diproyeksi *flat* sebesar 25,00 Miliar Rupiah (kurang lebih 1% dari proyeksi rata-rata belanja daerah) sebagai wujud optimalisasi realisasi belanja daerah. Bila dibandingkan dengan kondisi eksisting (tahun 2020), maka keberadaan SiLPA diperkirakan mengalami penurunan, dimana posisi pada tahun 2020 mencapai 310,59 Miliar Rupiah. Semakin rendahnya posisi SiLPA menunjukkan bahwa semakin optimalnya penggunaan SiLPA untuk menunjang kegiatan belanja daerah ditengah pertumbuhan pendapatan daerah yang belum optimal. Sehingga dengan perbaikan pola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, maka posisi SiLPA pada tahun-tahun mendatang diharapkan tidak mengalami lonjakan/ pertumbuhan yang tinggi dan selalu berada pada posisi yang ideal dalam rangka untuk menutupi bila terjadi defisit anggaran, artinya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang direpresentasikan melalui belanja daerah di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan secara efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 hingga 2026 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.25. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 – 2026**

No	Uraian	APBD Tahun 2021	Proyeksi/ Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	
1	<b>PENDAPATAN</b>	3.036,32	2.418,99	2.452,85	2.468,00	2.478,03	2.498,06	0,81%
1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	592,74	518,01	554,00	570,00	580,04	600,07	3,76%
1.1.1	Pajak daerah	224,77	181,01	193,50	198,92	202,40	209,28	3,71%
1.1.2	Retribusi daerah	72,95	59,63	63,72	65,45	66,60	68,86	3,68%
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	24,38	23,32	24,95	25,65	26,10	27,01	3,76%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	270,64	254,05	271,84	279,99	284,94	294,91	3,82%
1.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	2.309,61	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	0,00%
1.2.1	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	2.200,95	1.660,37	1.660,37	1.660,37	1.660,37	1.660,37	0,00%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.938,43	1.440,29	1.440,29	1.440,29	1.440,29	1.440,29	0,00%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	147,33	147,33	147,33	147,33	147,33	147,33	0,00%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.335,73	1.292,95	1.292,95	1.292,95	1.292,95	1.292,95	0,00%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	455,36	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	42,44	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	220,08	220,08	220,08	220,08	220,08	220,08	0,00%
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2	<b>Transfer Antar-Daerah</b>	108,66	108,66	108,66	108,66	108,66	108,66	0,00%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	108,66	108,66	108,66	108,66	108,66	108,66	0,00%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	133,97	131,95	129,82	128,97	128,97	128,97	-0,57%
1.3.1	Hibah	133,97	131,95	129,82	128,97	128,97	128,97	-0,57%
								0,00%

No	Uraian	APBD Tahun 2021 Miliar Rp.	Proyeksi/ Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
			Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	
2	<b>BELANJA</b>	3.216,20	2.443,99	2.477,85	2.493,00	2.503,03	2.523,06	0,80%
2.1	<b>Belanja Operasi</b>	2.177,71	1.779,81	1.787,45	1.794,95	1.802,80	1.811,01	0,44%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.225,63	1.008,64	1.011,33	1.014,42	1.017,65	1.021,04	0,31%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	846,97	733,04	737,58	741,50	745,61	749,90	0,57%
2.1.5	Belanja Hibah	27,48	9,97	10,08	10,20	10,34	10,48	1,26%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	77,64	28,16	28,47	28,83	29,20	29,60	1,26%
2.2	<b>Belanja Modal</b>	609,00	261,16	286,13	292,47	293,28	303,66	3,90%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-8,33%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78,98	35,90	36,38	36,94	37,53	38,14	1,53%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131,62	53,44	52,45	52,92	54,30	55,74	1,08%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	394,34	152,56	183,96	189,19	187,95	196,18	6,79%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,05	3,26	3,34	3,42	3,51	3,60	2,46%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	1,00	-	-	-	-	0,00%
2.3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%
2.4	<b>Belanja Transfer</b>	419,49	393,02	394,27	395,57	396,95	398,39	0,34%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	21,01	28,91	30,16	31,46	32,84	34,28	4,35%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	398,48	364,11	364,11	364,11	364,11	364,11	0,00%
								0,00%

No	Uraian	APBD Tahun 2021	Proyeksi/ Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
			2022	2023	2024	2025	2026	
			Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	
3	<b>PEMBIAYAAN</b>							0,00%
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	184,28	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	184,28	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00%
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	4,40	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4,40	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyuwangi pada waktu yang akan datang, maka perlu dirumuskan beberapa kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2021 hingga 2026 yang dapat dijadikan sebagai arahan secara umum terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 hingga 2026 adalah sebagai berikut.

#### **A. Pendapatan Daerah**

1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah. Optimalisasi formulasi tata kelola pada setiap potensi harus terus dilakukan dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam rangka penguatan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi Sistem Informasi *Online*, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan;
  - b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment*;
  - c. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
  - e. Melakukan optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui:
    - o Pelayanan pendaftaran obyek pajak dan mutasi obyek/ subyek PBB;
    - o Pelayanan pembetulan, pembatalan dan salinan atas SPPT/ SKPD/ STP PBB;
    - o Permohonan keberatan dan pengurangan atas pajak terutang;
    - o Restitusi/ pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
    - o Memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah khususnya PBB dengan sistem *online* yang bekerjasama dengan beberapa Bank Umum yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi;

- o Melakukan evaluasi dan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan PBB di Kabupaten Banyuwangi.
  - f. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banyuwangi;
  - g. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat.
2. Melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan pemanfaatan/ pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk pendapatan dari pihak ketiga;
  3. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif;
  4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan maupun Dana Bagi Hasil dari Provinsi;
  5. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

**B. Belanja Daerah**

1. Pengelolaan belanja daerah diarahkan memihak pada kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, program prioritas berbasis pada hasil, instrumen dalam pencapaian target pembangunan daerah, penyesuaian berbagai besaran komponen APBD sejalan dengan dinamika yang terus berkembang serta mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi;
2. Belanja pegawai diarahkan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari APBD;
3. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan: beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
4. Belanja barang/jasa dialokasikan dalam bentuk program/kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah;
5. Belanja hibah dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Dalam pengalokasian belanja hibah turut memperhatikan

- alokasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan PP No. 1 Tahun 2018;
6. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat, serta untuk penanggulangan kemiskinan dan bencana;
  7. Untuk menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi, maka sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) dialokasikan/ digunakan untuk belanja infrastruktur, dimana Dana Transfer Umum (DTU) meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
  8. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk mengantisipasi pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  9. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi dan kinerja keuangan daerah;
  10. Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dengan memperhatikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebagai jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK;
  11. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan yaitu mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota karena Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah kabupaten yang memiliki 28 kelurahan;
  12. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas, rujukan di RSUD Blambangan dan RSUD Genteng, serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  13. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan paling sedikit sebesar 20% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat;
  14. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;

15. Pengalokasian anggaran *mandatory* lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
16. Melakukan koordinasi secara rutin dengan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

### **C. Pembiayaan Daerah**

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah;
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran. Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Bila memungkinkan Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memberikan gambaran hasil perhitungan kapasitas riil keuangan daerah yang diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan Daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda), serta Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

Berdasarkan pada hasil proyeksi terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, maka selanjutnya dilakukan perhitungan dan dapat diketahui nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2022 hingga 2026. Berikut ini hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 hingga 2026:

**Tabel 3.26. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 – 2026**

No	Uraian	Tahun				
		2022 Miliar Rp.	2023 Miliar Rp.	2024 Miliar Rp.	2025 Miliar Rp.	2026 Miliar Rp.
1	Pendapatan	2.418,99	2.452,85	2.468,00	2.478,03	2.498,06
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>2.443,99</b>	<b>2.477,85</b>	<b>2.493,00</b>	<b>2.503,03</b>	<b>2.523,06</b>
	Dikurangi:					
1	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>2.443,99</b>	<b>2.477,85</b>	<b>2.493,00</b>	<b>2.503,03</b>	<b>2.523,06</b>

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Berikut ini rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah dalam lima tahun ke depan:

**Tabel 3.27. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 – 2026**

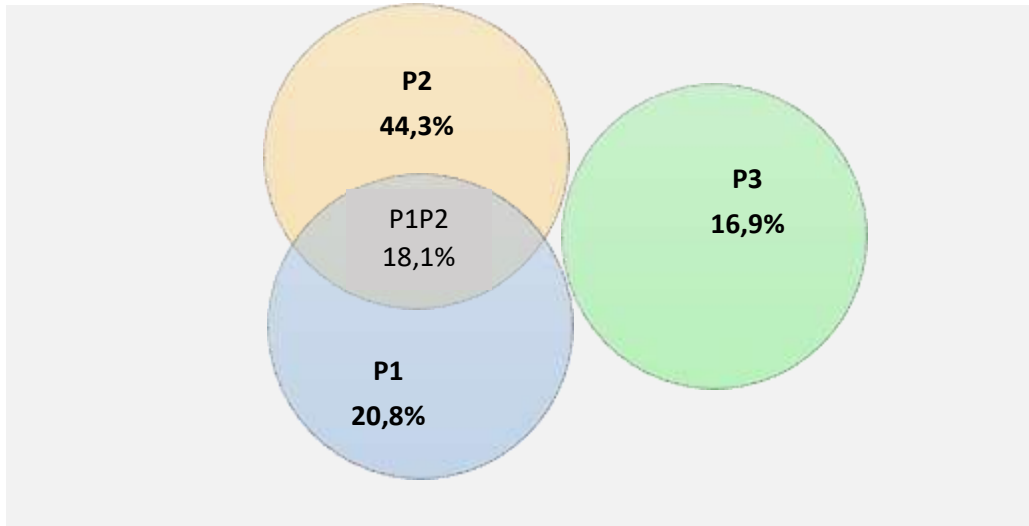
No	Uraian	Tahun				
		2022 Miliar Rp.	2023 Miliar Rp.	2024 Miliar Rp.	2025 Miliar Rp.	2026 Miliar Rp.
1	<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>	<b>2.443,99</b>	<b>2.477,85</b>	<b>2.493,00</b>	<b>2.503,03</b>	<b>2.523,06</b>
2	Prioritas I	1.421,35	1.575,03	1.582,76	1.586,44	1.590,06
3	Prioritas II	584,60	491,02	496,09	499,99	513,82
4	Prioritas III	438,03	411,80	414,15	416,61	419,18

Prioritas Pertama (Prioritas I) adalah penyediaan anggaran untuk program-program pada Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Sosial.

Nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan pada Prioritas I sebagaimana disajikan pada tabel 3.27, sebagiannya merupakan Prioritas Kedua (Prioritas II) yang tergolong Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar. Prioritas II adalah penyediaan anggaran untuk program-program yang mendukung pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah, dimana sebagiannya merupakan program-program pada Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar, maka terdapat irisan antara Prioritas I dan Prioritas II.

Rata-rata proporsi pada Prioritas I adalah sebesar 62,3%, Prioritas II sebesar 38,9% dan Prioritas Ketiga (Prioritas III) sebesar 16,9%. Hal ini dapat digambarkan sebagaimana diagram berikut:



**Gambar 3.22. Rata-rata Proporsi Prioritas I, II, dan III**

**Keterangan Gambar:**

- P1 = Prioritas I (tetapi bukan Prioritas II)
- P2 = Prioritas II (tetapi bukan Prioritas I)
- P1P2 = Prioritas I dan Prioritas II
- P3 = Prioritas III

Berdasarkan diagram venn di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat proporsi sebesar 18,1% dari total Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan yang termasuk pada Prioritas I dan sekaligus Prioritas II, yakni daerah yang berada pada area irisan dalam diagram 3.21.

Sementara Prioritas III adalah untuk mendanai program-program selain yang termasuk dalam Prioritas I dan Prioritas II.



# BAB IV

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

### 4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan pada sub bab ini merupakan permasalahan pembangunan yang diperoleh dari bab sebelumnya yang berkaitan dengan gambaran umum kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan terkait beserta juga dengan *stakeholders* lain. Sehingga permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan buah pikir dari proses diskusi dan telaah terhadap kondisi kinerja pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

Secara keseluruhan, berikut rekapitulasi identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi:

#### 1. Urusan Pendidikan:

- Belum merata dan optimalnya layanan akses dan mutu pendidikan anak usia dini
- Belum optimalnya mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- Belum optimalnya layanan pendidikan inklusif
- Belum optimalnya Indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- Belum optimalnya Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- Belum memadainya kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan
- Turunnya capaian proporsi sekolah dengan akses fasilitas tertentu pada tahun 2019 (listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar, fasilitas cuci tangan)
- Belum terselenggaranya kurikulum muatan lokal yang terstandar
- Belum optimalnya jumlah tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar terutama di daerah dengan akses sulit dan daerah pedesaan
- Belum optimalnya tingkat pendidikan Tenaga Pendidik di satuan pendidikan
- Masih terdapatnya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi maupun masih terakreditasi B

## **2. Urusan Kesehatan:**

- Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan di wilayah Kabupaten Banyuwangi
- Masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarganya dalam mengetahui gejala dan permasalahan kehamilan
- Seluruh layanan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada urusan kesehatan belum mencapai target
- Masih adanya balita yang berstatus gizinya, pendek dan sangat pendek
- Belum tingginya pengetahuan ibu terhadap peningkatan gizi balitanya
- Masih tingginya kasus kematian bayi di Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur
- Masih tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular di masyarakat
- Belum tingginya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular
- Belum tingginya kepedulian masyarakat terhadap imunisasi bayi, balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
- Masih adanya izin praktik tenaga kesehatan yang melewati batas waktu perizinan
- Masih adanya tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar kompetensinya
- Masih kurang meratanya persebaran tenaga kesehatan yang sesuai teknis kompetensinya
- Masih adanya izin pendirian usaha fasilitas layanan kesehatan yang melewati batas waktu perizinan
- Belum tingginya kepedulian masyarakat terhadap standarisasi sertifikasi usahanya
- Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat Laik Hygiene Sanitasi usahanya
- Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap program kesehatan
- Belum optimalnya ketersediaan prasarana edukasi promosi kesehatan ke masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan UKBM aktif di masyarakat

## **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

- Masih adanya jaringan irigasi dengan kondisi belum baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan debit air pada musim kemarau II menjadi 10%
- Masih perlunya perbaikan beberapa kawasan pemukiman di wilayah sungai diakibatkan banjir, tanah longsor dan erosi
- Belum optimalnya penyediaan akses air bersih terutama di kawasan pedesaan
- Masih adanya 48,65% rumah tangga belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- Belum banyaknya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak
- Masih adanya 5,61% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

- Masih adanya drainase dengan kondisi buruk/rusak
- Masih adanya ruas jalan lingkungan yang rusak
- Masih adanya target pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang belum tercapai
- Masih adanya ruas jalan yang belum terlayani LPJU
- Masih banyaknya ruas jalan yang mengalami kerusakan
- Masih kurangnya jumlah tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi
- Masih banyaknya wilayah yang belum memiliki rencana tata ruang serta rencana tata ruangnya belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

#### **4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- Masih adanya ketidaksesuaian antara PSU yang tercantum pada *siteplan* dan PSU yg akan diserahkan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
- Tidak adanya *law enforcement* bagi pengembang yang tidak mematuhi aturan yang berlaku pada penyerahan PSU
- Belum adanya kelurahan/desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

#### **5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

- Masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran
- Masih terdapatnya anggota Linmas yang belum terampil dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat
- Meningkatnya indeks risiko bencana di wilayah Kabupaten Banyuwangi sebesar 7,34 poin pada tahun 2019
- Kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana (bencana alam, non-alam dan wabah)
- Belum tersedianya strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah
- Kurangnya peningkatan kapasitas operator pusdalops, Petugas TRC dan Petugas Pembantuan PB
- Masih minimnya ketersediaan peralatan Penanggulangan Bencana
- Belum optimalnya pemulihan pasca bencana

#### **6. Urusan Sosial**

- Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana
- Sulitnya memprediksi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
- Kurangnya penyediaan sarana prasarana untuk pemberdayaan sosial
- Masih terdapatnya Keluarga Miskin yang belum mendapatkan bantuan Program PKH
- Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran

- Belum optimalnya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Banyuwangi, terkendala validasi data yang belum selesainya integrasi data DTKS yang di SIGN -NG

#### **7. Urusan Tenaga Kerja**

- Tingginya angka pengangguran
- Kurangnya pemahaman dan ketaatan para pelaku hubungan industrial terhadap peraturan perundang undangan ketenagakerjaan
- Masih kurangnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
- Belum optimalnya perlindungan Pekerja Migran

#### **8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- Belum optimalnya sosialisasi penanganan kasus pada perempuan
- Kurangnya pengawasan dan pengetahuan terhadap perlindungan anak
- Belum optimalnya kebutuhan dasar keluarga

#### **9. Urusan Pangan**

- Masih belum optimalnya cadangan pangan yang dikelola masyarakat melalui pemberdayaan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat secara berkelanjutan
- Masih perlu ditingkatkannya Penganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- Kurang optimalnya pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian karena petani sebagai pelaku usaha seringkali dihadapkan pada realita rendahnya minat konsumen lokal terhadap produk olahan atau produk premium pertanian dengan label harga di atas rata-rata, sedangkan jaringan pemasaran untuk menjangkau konsumen luar kota masih kurang optimal
- Masih kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan olahan pangan lokal yang bergizi, bercitarasa, berestetika dan bernilai ekonomi

#### **10. Urusan Lingkungan Hidup**

- Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- Belum optimalnya pengelolaan lahan dan sumber air, pengelolaan lingkungan perkotaan dan pengendalian pencemaran udara
- Masih terjadinya penurunan kualitas air
- Belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup

#### **11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- Terjadinya penurunan persentase pelayanan bayi lahir prokot pulang bawa akta pada tahun 2019 mencapai 1,1 % menjadi 80,9 %
- Masih adanya anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya

## **12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Masih banyaknya desa yang belum memiliki minat ekspansi usaha melakukan kerjasama dengan pihak lain khususnya lembaga perekonomian dan jasa pariwisata yang lebih besar baik swasta maupun pemerintah
- Masih banyaknya kelembagaan desa yang belum sesuai standar regulasi yang berlaku
- Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat

## **13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- Masih kurangnya kepesertaan masyarakat dalam program Keluarga Berencana
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengendalian angka kelahiran
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem informasi kependudukan

## **14. Urusan Perhubungan**

- Masih minimnya sarana dan parasarana perhubungan di Kabupaten Banyuwangi
- Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan transportasi umum, khususnya angkutan darat
- Belum terselenggaranya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten kota
- Belum terselenggaranya fasilitasi pendirian tempat tinggal landas dan pendaratan helikopter

## **15. Urusan Komunikasi dan Informatika**

- Nilai SPBE pada kebijakan tata kelola, kebijakan layanan dan perencanaan belum mencapai target terutama nilai kelembagaan
- Belum optimalnya Pemeliharaan Keamanan Sistem Informasi di Kabupaten Banyuwangi

## **16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif
- Belum optimalnya tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi
- Minimnya SDM pengelola koperasi yang memiliki sertifikasi kompetensi
- Minimnya diversifikasi usaha koperasi
- Menurunnya volume usaha koperasi akibat pandemi
- Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri
- Belum maksimalnya kemampuan SDM usaha mikro
- Minimnya diversifikasi usaha mikro
- Lemahnya perluasan jaringan dan kemitraan usaha mikro
- Belum optimalnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar.
- Belum optimalnya mentoring, fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro

#### **17. Urusan Penanaman Modal**

- Masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan
- Belum ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banyuwangi dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal
- Menurunnya minat investasi di masa pandemi Covid-19
- Belum optimalnya pengendalian penanaman modal
- Belum terintegrasinya data dan informasi penanaman modal

#### **18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

- Tingginya Tingkat Pengangguran terbuka usia kerja (pemuda)
- Tingginya tingkat kriminalitas pemuda
- Minimnya legalitas organisasi kepemudaan
- Belum optimalnya kualitas manajemen organisasi kepemudaan dan kepramukaan
- Belum optimalnya SDM keolahragaan
- Belum meratanya sentra keolahragaan
- Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kompetisi/festival keolahragaan
- Terbatasnya bibit atlet potensial
- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga

#### **19. Urusan Statistik**

- Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah
- Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

#### **20. Urusan Persandian**

Belum tercapainya target nilai per area keamanan informasi yang diamankan

#### **21. Urusan Kebudayaan**

- Belum optimalnya pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi
- Belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya
- Belum optimalnya pengelolaan museum

#### **22. Urusan Perpustakaan**

- Belum maksimalnya indeks kegemaran membaca masyarakat
- Belum maksimalnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- Belum optimalnya pengadaan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan

#### **23. Urusan Kearsipan**

- Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip
- Belum maksimalnya pemanfaatan arsip yang bersifat tertutup

#### **24. Urusan Kelautan dan Perikanan**

- Menurunnya volume produksi dan permintaan hasil produksi perikanan
- Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, Poklahsar, dan Pokdakan)

#### **25. Urusan Pariwisata**

- Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata
- Menurunnya jumlah kunjungan wisata akibat pandemi Covid-19
- Belum optimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif

#### **26. Urusan Pertanian**

- Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi
- Masih banyaknya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- Semakin menurunnya tingkat kesuburan atau produktivitas lahan karena penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan
- Masih lemahnya peran kelembagaan petani dalam meningkatkan produktivitas dan manajemen pengelolaannya
- Masih adanya usaha produk hewan yang belum bersertifikat PRA/NKV
- Masih rentannya ancaman penyakit zoonosis (yg menular dari hewan ke manusia) seperti rabies, flu burung, brucellosis, antrax, dll akibat posisi Banyuwangi sebagai pintu masuk lalu lintas ternak dari luar pulau Jawa
- Belum memadainya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air

#### **27. Urusan Perdagangan**

- Melemahnya pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran akibat pandemi
- Belum maksimalnya kualitas sarana distribusi perdagangan.
- Belum optimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar ekspor.
- Minimnya SDM penera alat UTPP
- Belum maksimalnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri
- Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

#### **28. Urusan Perindustrian**

- Minimnya keterisian database informasi industri dalam SIINAS
- Belum maksimalnya pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah
- Minimnya cakupan pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah

#### **29. Unsur Penunjang Pemerintahan**

- Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.
- Masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan.

- Belanja modal kecenderungan mengalami penurunan.
- Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu.
- kekurangan sebesar 26,23% terkait persentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Baik dari target SDG's sebesar 45%.
- perlunya mengoptimalkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

## 4.2 Isu Strategis

### 4.2.1 Telaah Dinamika Global

#### 1. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi melalui Telaah KLHS

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan transisi dari berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut:



**Gambar 4. 1: 17 Tujuan SDGs**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Air bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Ketersediaan Data SDG's Kabupaten Banyuwangi yang masih juga sangat minim. Dari total data yang tersedia, terdapat 89 indikator atau 40,45% yang tersebar dalam 17 tujuan SDG's telah mencapai target. Sedangkan 38 indikator atau 17,27% indikator belum mencapai target, dan sisanya adalah 17 indikator atau 7,73% indikator belum dilaksanakan, dan 58 indikator atau 26,36% indikator tidak terdapat datanya. Untuk itu tantangan kedepan Kabupaten Banyuwangi terhadap capaian SDG's yang paling utama adalah mencakup kebutuhan data, melaksanakan indikator yang belum dilaksanakan, dan terakhir adalah mencapai indikator yang belum tercapai.

Melihat pada pengelompokkan indikator dalam skenario tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan, selanjutnya dapat digunakan sebagai

dasar dalam merumuskan isu strategis dan rekomendasi. Perumusan isu strategis KLHS RPJMD diperoleh dengan memperhatikan pada hasil analisis capaian TPB, dimana dari masing-masing indikator yang relevan selanjutnya akan diambil permasalahan dan isu utama. Selain itu, perumusan isu strategis KLHS RPJMD dilakukan dengan melihat pada berbagai permasalahan yang dihasilkan dari analisis Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT). Mengingat dari keseluruhan permasalahan yang terjadi nantinya perlu mendapatkan penanganan khusus (dengan upaya tambahan) yang dituangkan dalam rekomendasi. Berdasarkan permasalahan dan isu utama yang dihasilkan selanjutnya dilakukan perumpunan berdasarkan kelompok urusan untuk mempermudah dalam perumusan isu strategis. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan permasalahan, isu utama dan rumusan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1: Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Banyuwangi**

Kode Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat masih kurang sebesar 11,28% dari target nasional	Menjamin Aksesibilitas Pendidikan yang Adil dan Merata
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat masih kurang sebesar 1,7% dari target nasional.	
4.5.1*	Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP/ MTs masih kurang sebesar 1,9% dari target nasional.	
4.6.1.(a)	Presentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun masih kurang sebesar 4,39% dari target nasional	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses fasilitas tertentu (listrik, internet, komputer, infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar, fasilitas cuci tangan) masih kurang sebesar 0,12% dari target nasional	Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Dasar Pendidikan
1.3.1.(a) & 3.8.2.(a)	Sebanyak 58,60% penduduk masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Kesehatan	Menjamin Kesehatan Masyarakat Melalui kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1.3.1.(b) & 10.4.1.(b)	Sebanyak 46,81% penduduk yang bekerja masih belum menjadi peserta SJSN Bid. Ketenagakerjaan	
3.8.2*	Penduduk yang memperoleh cakupan asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,53% dari tahun 2018	

Kode Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
1.4.1.(b)	Masih terdapat sebesar 62,53% anak umur 12-23 bulan yang belum menerima imunisasi dasar lengkap	Pentingnya pemenuhan Gizi Bayi, Imunisasi dasar dan Peningkatan Kesadaran
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 0,05	
3.4.1.(b)	Sebanyak 0,34% penduduk masih menderita tekanan darah tinggi	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal belum mencapai target nasional sebesar 48,81%	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemerataan Ekonomi
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian belum mencapai target nasional	
8.5.2*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) belum mencapai target nasional	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 0,53% dari tahun 2018	
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani masih kurang sebesar 55% dari target nasional	Pentingnya Penanganan Sampah Yang Komprehensif
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola masih kurang sebesar 294.307,665 Ton dari target nasional	
12.5.1.(a)	Timbulan sampah yang didaur ulang memiliki kekurangan sebesar 12,24 Kg per hari dari target nasional.	
6.5.1.(c)	Masih terdapat 5 jaringan informasi sumber daya air yang belum dibentuk	Pentingnya Pengelolaan Sumber daya Air
6.4.1.(b)	Tidak terdapat insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	
1.4.1.(d) & 6.1.1.(c)	Sebanyak 48,65% rumah tangga belum memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Perlunya Pemerataan terhadap Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak
6.1.1.(a)	Masih terdapat 5,61% rumah tangga yang belum memiliki akses pada air minum layak	
6.2.1.(a)	Penurunan populasi masyarakat yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun sebesar 5,85% dari tahun 2018	
1.4.1.(e)	Sebanyak 5,61% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Perlunya Pemerataan terhadap infrastruktur Sanitasi Layak
6.2.1.(b)	Sebanyak 5,61% rumah tangga belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	

Kode Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
6.2.1.(c)	Belum ada kelurahan/ desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	
6.3.1.(b)	Rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja mengalami penurunan	
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan (fisik, fisik dan seksual, serta emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir mengalami peningkatan.	Keberpihakan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Perempuan
1.3.1.(d)	Masih terdapat sekitar 52.687 Keluarga Miskin yang masih mendapatkan bantuan Program PKH	Pemerataan Pendapatan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan
10.1.1*	Masih terdapat kekurangan 0,02 untuk mencapai target Indeks Koefisien Gini sebesar 0,36	
15.6.1*	Belum tersedianya kerangka legislasi, administrasi, dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata terkait pemanfaatan sumber daya genetika	Konservasi Ekosistem dan Daratan Penganekaragaman Sumber Daya Hayati
15.9.1.(a)	Belum tersedianya Dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	
15.3.1.(a)	Peningkatan luas lahan kritis yang direhabilitasi masih kurang sebanyak 15,20%	
11.5.1.(a)	Pencapaian Indeks Risiko Bencana Indonesia masih kurang sebesar 15,44% dari target nasional	Perlunya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Pemberian Pelayanan Khusus terhadap Korban Bencana
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial masih sebanyak 113 (kurang sebanyak 46 dari target)	
1.5.3* & 11.b.2*	Belum tersedianya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	
16.6.1.(d)	Masih terdapat kekurangan sebesar 26,23% terkait persentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Baik dari target sebesar 45%	Tata Laksana Birokrasi
17.17.1.(a)	Belum adanya proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU	Tantangan Peningkatan PAD, Pengelolaan Belanja Daerah, dan
17.17.1.(b)	Belum adanya alokasi penyiapan proyek yang ditawarkan dengan skema KPBU	

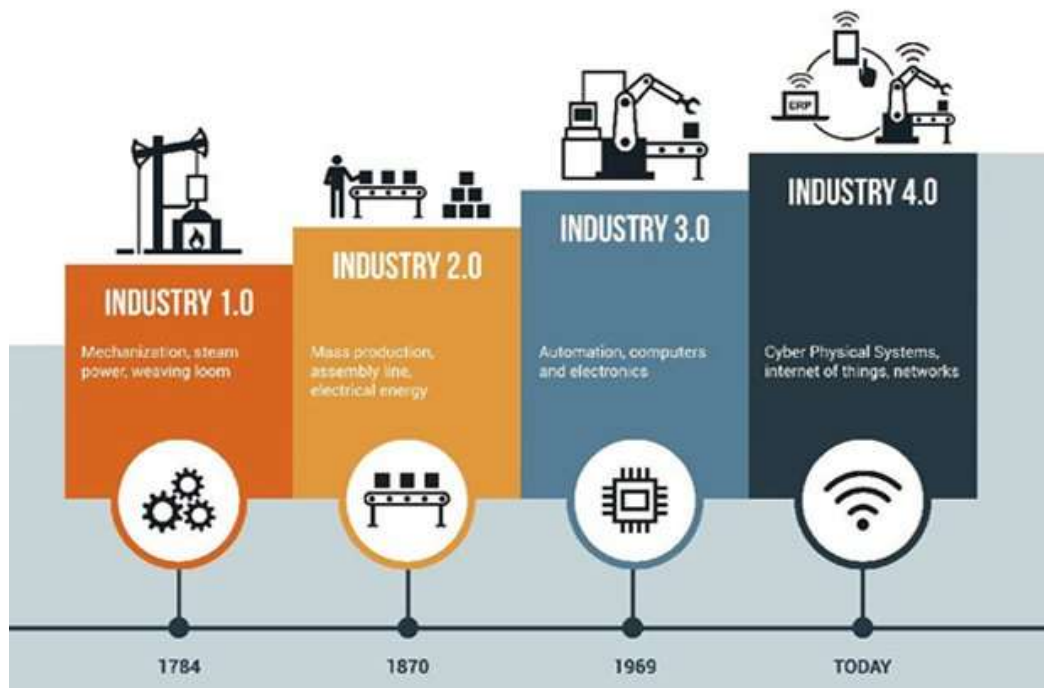
Kode Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
11.3.2.(b)	Belum adanya lembaga pembiayaan infrastruktur di Kab. Banyuwangi	Penyediaan Alternatif Pembiayaan Daerah
16.6.1.(c)	Masih terdapat kekurangan sebesar 37,98% dari target sebesar 80% penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	
17.1.1.(a)	Rasio pajak terhadap PDRB masih mencapai 0,3%	

Berdasarkan daftar permasalahan atau isu utama yang dihimpun dari berbagai indikator TPB dan berdasarkan hasil analisis DDDT sebagaimana telah disajikan pada tabel di atas, maka selanjutnya dilakukan penyusunan isu strategis, dimana jumlah isu strategis yang dihasilkan sebanyak 15 isu. Adapun daftar dari 15 isu strategis terkait dengan KLHS RPJMD di Kabupaten Banyuwangi meliputi:

1. Menjamin Aksesibilitas Pendidikan yang Adil dan Merata;
2. Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Dasar Pendidikan;
3. Menjamin Kesehatan Masyarakat Melalui kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
4. Pentingnya pemenuhan Gizi Bayi, Imunisasi dasar dan Peningkatan Kesadaran;
5. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemerataan Ekonomi;
6. Pentingnya Penanganan Sampah Yang Komprehensif;
7. Pentingnya Pengelolaan Sumber daya Air;
8. Perlunya Pemerataan terhadap Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak;
9. Perlunya Pemerataan terhadap infrastruktur Sanitasi Layak;
10. Keberpihakan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Perempuan;
11. Pemerataan Pendapatan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan;
12. Konservasi Ekosistem dan Daratan Penganekaragaman Sumber Daya Hayati;
13. Perlunya Peningkatan Mitigasi Bencana dan Pemberian Pelayanan Khusus terhadap Korban Bencana;
14. Tata Laksana Birokrasi;
15. Tantangan Peningkatan PAD, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Penyediaan Alternatif Pembiayaan Daerah.

## 2. Peluang dan Tantangan Revolusi Industri

Era Revolusi Industri keempat ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Perubahan tersebut terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global.



**Gambar 4. 2: Peluang Tantangan Revolusi Industri**

Industri 4.0 adalah sebuah istilah yang diciptakan pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, mulai dari 3D printing hingga robotik yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas. Sebelum ini telah terjadi tiga revolusi industri yang ditandai dengan:

- a. Ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930;
- b. Penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870-1900;
- c. Penemuan computer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-sekarang.
- d. Lompatan besar terjadi dalam sektor industri di era revolusi industri keempat, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Pada era ini model bisnis mengalami perubahan besar, tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri.

Karakteristik industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi-teknologi terbaru, yaitu:

- a. Sistem siber-fisik (*Cyber-Physical Systems*)  
Sistem siber-fisik meningkatkan kemampuan untuk mengontrol dan memonitor proses fisik, dengan bantuan sensor, robot cerdas, drone, printer 3D dan lain sebagainya.
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology*).

Digitalisasi dan menyebarkan aplikasinya ICT memungkinkan untuk mengintegrasikan semua sistem diseluruh pasokan dan rantai nilai sehingga dapat mengagregasikan data di semua level. Seluruh informasi terdigitalisasi dan kesesuaian sistem di dalam dan antar perusahaan terintegrasi dalam setiap tahapan antar pembuatan dan penggunaan siklus hidup produk.

- c. Jaringan komunikasi (*Network Communications*).  
Jaringan komunikasi dengan kualitas tinggi yang terpercaya menjadi kebutuhan paling penting bagi industri 4.0 dan karenanya sangat penting untuk mengembangkan infrastruktur jaringan internet di mana dibutuhkan. Jaringan dengan kemampuan internet yang tinggi mampu menghubungkan antar komponen ini sehingga dapat melakukan desentralisasi dan pengaturan mandiri dari pengoperasian sistem siber-fisik (*Cyber-Physical Systems*).
- d. Big Data dan *Cloud Computing*.  
Dengan penggunaan big data dan komputasi awan (*Cloud Computing*), informasi yang diambil melalui jaringan ini dapat digunakan untuk memodelkan, memvirtualisasi dan mensimulasi produk dan proses manufakturnya. Model ini disebut sebagai kembar digital (*Digital Twins*), atau peralatan bayangan (*Device Shadows*). *Digital twins* adalah pendamping komputerisasi (*Computerized Companion*) dari aset fisik yang mampu melakukan monitoring, diagnosis, dan prognosis aset secara langsung (*Real Time*).
- e. Peningkatan kemampuan peralatan untuk interaksi dan kooperasi manusia-komputer (*Human-Computer*) dan pemodelan (*Modeling*), virtualisasi dan simulasi.

Industri 4.0 memiliki potensi peluang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara individual, fleksibilitas produksi, optimalisasi pengambilan keputusan, efisiensi dan produktivitas sumber daya, perubahan tempat kerja secara demografik, tenaga kerja dan dunia kerja yang seimbang, dan ekonomi kompetitif dengan upah yang tinggi. Pada saat pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan sistem industri 4.0, maka pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungannya. Jangan sampai penerapan sistem industry digital ini hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Banyak hal yang harus dipersiapkan seperti: peran para pengambilan keputusan, tata kelola, manajemen risiko implementasi sistem, akses publik pada teknologi, dan faktor keamanan sistem yang diimplementasikan. Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pendataan yang berintegritas, menetapkan total harga/biaya kepemilikan sistem, mempersiapkan paying hukum dan mekanisme perlindungan terhadap data pribadi, menetapkan standar tingkat pelayanan, menyusun peta jalan strategis yang bersifat aplikatif dan antisipatif, serta memiliki *design thinking* untuk menjamin keberlangsungan industri.

Selain mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, industry 4.0 juga memiliki dampak negative. Industri 4.0 ini akan mengacaukan bisnis konvensional dan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Untuk itu pemerintah harus mempersiapkan strategi antisipatif terhadap perekonomian nasional. Transformasi industri 4.0 memberikan dampak positif, dimana peran dunia usaha dan organisasi sosial dinilai sangat strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa, sehingga pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan lebih kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5%. Meningkatnya kemandirian ekonomi mendorong dapat memperkuat orientasi kewirausahaan guna pertumbuhan lebih baik sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa transformasi sektor industry ke industry 4.0 dapat menjadi peluang atau ancaman terhadap Kabupaten Banyuwangi. Ancaman terbesar dengan revolusi industry ini ialah Kabupaten Banyuwangi yang saat ini masih bertumpu terhadap industri padat karya akan terancam, mengingat kecerdasan buatan yang mungkin diterapkan pada sektor-sektor tertentu akan memberikan dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja semakin berkurang dan digantikan dengan komputer maupun mesin. Dalam perspektif sektor bisnis dan pengusaha Revolusi Industri 4.0 justru menguntungkan jangka panjang, hal tersebut dikarenakan dengan jumlah tenaga kerja yang dapat digantikan fungsi dan perannya oleh komputer.

Oleh karena itu berikut merupakan beberapa poin-poin penting sebagai bentuk persiapan Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0:

- a. Sektor Pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Banyuwangi harus lebih inovatif dalam menangkap peluang revolusi industry 4.0. Industri pariwisata harus diintegrasikan dengan sistem dan teknologi mulai dari hulu hingga hilir, sehingga akan dapat memperluas pasar, mengembangkan diversifikasi produk dan jasa wisata, dan meningkatkan pelayanan wisatawan melalui sistem dan teknologi.
- b. Sektor UMKM dan Industri yang akan berdampak secara signifikan adalah mulai merubah *mind set* konvensional ke modern berbasis dengan teknologi. Hal tersebut tentunya untuk dapat bertahan dimana dengan terbukanya pasar seluas mungkin, maka pesaing tidak hanya dari Kabupaten Banyuwangi, namun juga dari seluruh Indonesia bahkan manca negara. Sehingga disaat tidak dapat memanfaatkan ancaman menjadi peluang yang terjadi akan tergerus. Khususnya untuk sektor industri padat karya, sebelum berencana menggantikan SDM menjadi mesin atau teknologi setidaknya melakukan kajian terlebih dahulu sehingga menemukan titik equilibrium antara SDM dengan teknologi. Sehingga meminimalisir mengorbankan SDM khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
- c. Sektor Pertanian dan Kelautan yang saat ini menjadi sektor dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Banyuwangi, dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam pemasaran produk pertanian atau kelautan. Permasalahan yang selama ini menghambat majunya petani salah satunya ialah pada sektor pemasaran, panjangnya rantai pemasaran pertanian mengakibatkan minimnya laba yang diterima oleh petani, dikarenakan banyak tereduksi pada rantai pemasaran. Sehingga dengan mendekatkan petani kepada pasar, harapannya dapat mensejahterakan petani. Sedangkan pada sektor produksi pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi tanaman dan kelautan. Bahkan dapat dimanfaatkan juga kedalam produk olahan setengah jadi maupun produk jadi, sehingga difersifikasi produk semakin meningkat.
- d. Sedangkan untuk jangka panjang meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan poin penting yang merupakan isu strategis pembangunan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut guna menyiapkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas guna menghadapi Industri 4.0. Tidak hanya sebatas baca tulis, namun SDM Kabupaten Banyuwangi harus di tingkatkan melek teknologi, mengingat ancaman

mengenai pesaing masyarakatn Kabupaten Banyuwangi tidak hanya masyarakat dari luar melainkan mesin dan komputer merupakan pesaing baru dalam berbagai sektor.

#### 4.2.2 Telaah Dinamika Pembangunan Nasional

##### 1. Telaah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024

Merujuk terhadap UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah ditafsirkan melalui otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun terlepas dari penjelasan diatas, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah akan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Nasional (pusat). Hal tersebut mengingat externalitas akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Prinsip otonomi daerah memang telah memberikan pintu yang lebar untuk daerah dapat menjalankan urusannya, namun dengan catatan tetap memiliki sinkronisasi dan integrase pembangunan terhadap pemerintah diatasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni adalah menjamin terciptanya integrase, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengacu terhadap prinsip tersebut, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, seperti yang kita tahu RPJM Nasional saat ini adalah pada tahap ke 3 yakni tahun 2014-2019. Sedangkan RPJM Nasional tahap ke 4 atau tahun 2019-2024 dijadikan acuan pembangunan, Oleh karena itu, untuk dapat menerka prioritas nasional pada tahun 2019-2024 maka harus memperhatikan tahapan dan skala prioritas RPJP Nasional pada tahap ke IV dan arahan RPJMN 2020-2024.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Sebagai upaya mencapai Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong berikut dikrucutkan terhadap 9 Misi untuk mewujudkan pembangunan nasional yakni sebagai berikut:



**Gambar 4. 3: 9 Misi untuk mewujudkan pembangunan nasional**

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi sebagaimana berikut:

**1. Pembangunan SDM**

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

**2. Pembangunan Infrastruktur**

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,

mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

**3. Penyederhanaan Regulasi**

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

**4. Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

**5. Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saingmanufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuranbangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Berikut merupakan linieritas 7 agenda pembangunan nasional dengan 9 agenda prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026.

**Tabel 4.2: Linieritas 7 agenda pembangunan Nasional dengan 9 agenda prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026**

7 Agenda Pembangunan Nasional	9 Program Prioritas Kabupaten Banyuwangi
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Bekeadilan	Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal Percepatan Pengurangan Kemiskinan Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi

Sesuai arah kebijakan dan strategi yang tercantum pada RPJMN 2020-2024, Banyuwangi termasuk dalam arah kebijakan **peningkatan nilai tambah ekonomi yang mencakup Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi**. Arah tersebut pada pengembangan destinasi pariwisata difokuskan pada **peningkatan kesiapannya untuk menampung peningkatan kunjungan wisatawan**. Sasaran destinasi pariwisata meliputi **ekowisata TN Alas Purwo, TN Baluran, dan TWA Kawah Ijen, dan geopark**. Selain itu dalam Lampiran 3 Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa terdapat beberapa program prioritas nasional yang memiliki lokus di Kabupaten Banyuwangi, berikut merupakan beberapa program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang mana dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026:

**Tabel 4. 3: program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas RPJMN Tahun 2020-2024**

<b>Program Prioritas Nasional</b>	<b>Kegiatan Prioritas Nasional</b>	<b>Proyek Prioritas Nasional</b>	<b>Proyek</b>
Program Prioritas Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)
		Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark	Pusat informasi Geopark
Infrastruktur Pelayanan Dasar	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP)
Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Kereta Api	Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-

Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Proyek Prioritas Nasional	Proyek
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Pengelolaan Krisis Kesehatan	Pengurangan risiko krisis kesehatan	

Berdasarkan uraian diatas, untuk menjamin kesesuaian antara Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, berikut merupakan matriks keselarasan Misi RPJMN, Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang diuraikan dalam matriks bersanding.

**Tabel 4. 4: Misi RPJMN, Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi**

Nawacita Kedua 2020-2024 (Misi RPJMN)	Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024	Misi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2021-2026
Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	<b>Misi I</b> Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.	
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan		
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	<b>Misi II</b> Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia		

<b>Nawacita Kedua 2020-2024 (Misi RPJMN)</b>	<b>Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024</b>	<b>Misi Pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2021- 2026</b>
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	<b>Misi III</b> Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		

## 2. Isu Covid-19

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu.

Dampaknya terjadi pengangguran meningkat. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja.

Krisis ekonomi yang terjadi sebagai akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Sejumlah tenaga kerja telah dirumahkan termasuk pengurangan jam kerja karena krisis telah menimbulkan

gangguan operasional perusahaan. Banyak pula pekerja di sektor informal kehilangan pekerjaan. Mobilitas tenaga kerja juga menjadi terbatas karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM Mikro, sehingga menurunkan produktivitas tenaga kerja. Pada februari 2021 tercatat adanya peningkatan jumlah Angkatan kerja sebesar 1.59 juta orang dibandingkan Agustus 2020 menjadi sebanyak 139.81 juta orang angkata kerja. Berdasarkan survei Angkatan kerja nasional (Sakernas) februari 2021, sektor yang paling besar mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 29.59 persen.

Upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 masih terus dilakukan. Setelah PSBB pemerintah mengeluarkan pembatasan kegiatan masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa menjadi momentum munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan Covid-19 antara pusat, daerah, dan antardaerah itu sendiri. Berikut tahapan kebijakan kebijakan untuk menekan penularan di masyarakat:

#### PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar)

PSBB merupakan istilah pertama yang diberlakukan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona pada bulan April 2020. Kebijakan ini diatur lewat Permenkes nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019.

Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan berwenang untuk menetapkan PSBB di suatu wilayah. Setiap kepala daerah harus mengajukan usulan PSBB terlebih dahulu kepada Menkes.

#### PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali

Kebijakan ini pertama kali diberlakukan hanya di wilayah Jawa-Bali mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Saat itu, angka kasus Covid-19 melonjak pasca libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta sempat memakai istilah PSBB transisi. PSBB transisi merupakan fase pelonggaran dari PSBB awal.

Secara aturan, PPKM Jawa-Bali lebih longgar dibandingkan dengan PSBB. Sejumlah kegiatan bisnis dan perkantoran sudah diizinkan beroperasi dengan syarat pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam penerapannya, PSBB menutup semua kegiatan perkantoran dan industri non esensial. Termasuk pusat perbelanjaan. Pengetatan kapasitas kendaraan dan larangan makan ditempat bagi restoran dan rumah makan juga diterapkan dan diawasi dengan ketat.

#### PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro

Setelah hampir satu bulan menerapkan PPKM Jawa-Bali, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru lagi yang disebut PPKM skala mikro, dimulai 9 Februari 2021. Tujuannya, untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam penanganan Covid-19 dengan pengaturan di tingkat RT/RW.

Dalam penerapan aturan ini, pemerintah mengeluarkan pembeda zona berdasarkan tingkat lingkungan. Aturan yang diberlakukan juga mengikuti label zona masing-masing lingkungan.

### Penebalan PPKM Mikro

Pada pertengahan Juni, Pemerintah memberlakukan kebijakan Penebalan PPKM Mikro saat angka kasus Covid-19 terpantau kembali meningkat. Sejumlah aturan terkait kebijakan ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021.

Tak banyak berbeda, sejumlah aturan dalam masa penerapan kebijakan ini juga mengikuti label zona masing-masing lingkungan.

### PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat

Pasca libur hari raya Idul Fitri dan ditemukannya virus varian baru, varian Delta asal India, Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan aturan baru, yakni PPKM Darurat. PPKM darurat diklaim lebih ketat ketimbang PSBB dan PPKM mikro. Awalnya kebijakan ini hanya diberlakukan di Jawa-Bali. Namun, kemudian kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah wilayah lain.

### PPKM Level 1-4

PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli. Presiden Jokowi kembali mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang hingga 25 Juli. Namun, pemerintah mengubah istilah PPKM Darurat diganti menjadi PPKM level 1-4, karena dinilai istilah sebelumnya terlalu menyeramkan.

Mengantisipasi dampak Covid-19 yang memengaruhi berbagai sektor di Kabupaten Banyuwangi, setidaknya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan berbagai langkah strategis mengantisipasi hal tersebut. Berikut merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

1. Surat Edaran Sekretariat Daerah Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Surat Edaran tentang Penutupan dan Pengaturan Sementara Kegiatan Usaha Hiburan dan Kegiatan/Usaha Yang Menjadikan Berkumpulnya Massa Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
3. Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Banyuwangi;
4. Surat Edaran Tentang Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, Dan Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona / Corona Virus Disease (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
5. Surat Edaran Bupati Banyuwangi Tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. SE Bupati Perpanjangan Kewaspadaan Covid-19;
7. Pedoman Penyelenggaraan Restoran/Kafe/Rumah Makan/Tempat Kuliner Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi;
8. Surat Edaran Bupati perpanjangan ketiga masa WFH;
9. Surat Edaran Bupati perpanjangan keempat masa WFH Revs1;

## **Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.**

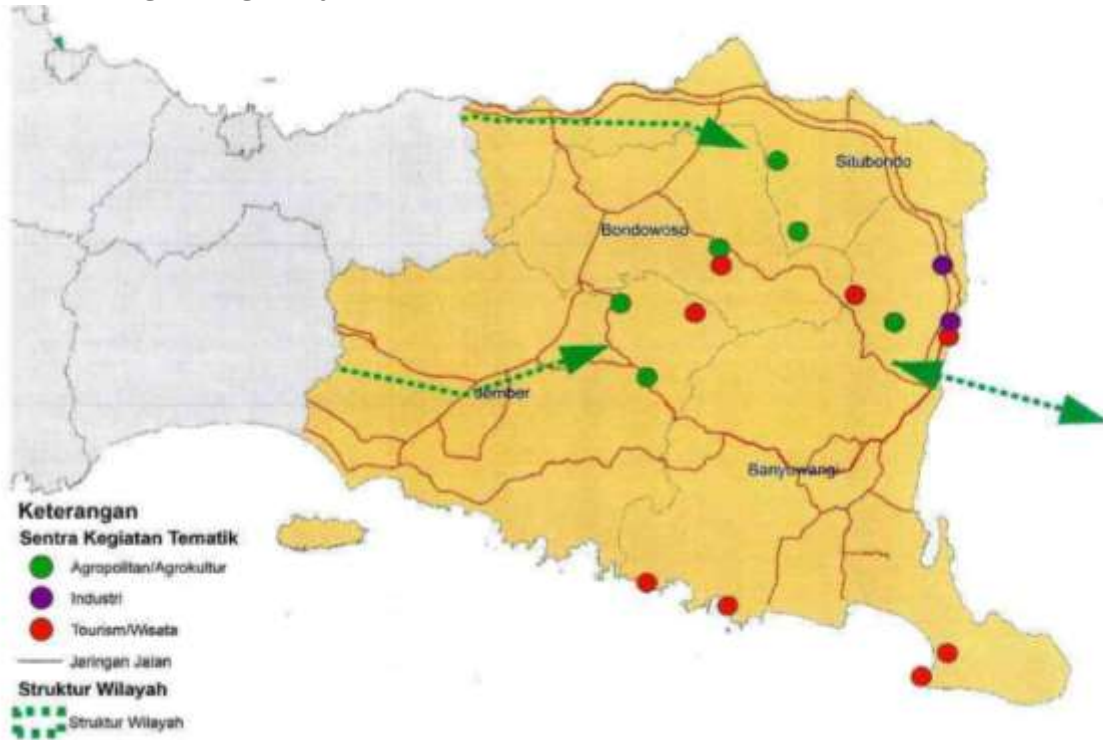
Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dapat dikatakan baik walaupun saat ini mengalami perlambatan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh berlanjutnya penurunan kinerja sektor eksternal ditandai dengan penurunan ekonomi global. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Sementara dari sisi permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, didorong oleh tingkat keyakinan konsumen dan penyaluran bantuan sosial/ pemberian subsidi. Adapun di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonominya meningkat dengan tingkat yang lebih tinggi diatas tren pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam perekonomian tidak terlepas dari kinerja industri pengolahan yang baik, yang menjadi penyumbang terbesar terhadap sektor industri pengolahan secara nasional, serta didukung oleh pengembangan sektor pariwisata unggulan. Dapat dikatakan bahwa provinsi yang berbasis pada sektor industri merupakan salah satu prasyarat peningkatan ekonomi daerah. Namun pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada masa yang akan datang tidaklah mudah untuk dihadapi, karena dinamika ekonomi nasional dan global menuntut untuk selalu siap terhadap perubahan guna mewujudkan provinsi yang maju dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Disatu sisi, percepatan pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, kaidah pembangunan yang berkelanjutan harus tetap menjadi perhatian. Dalam konteks percepatan pembangunan Provinsi Jawa Timur diperlukan penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Kawasan Gresik - Bangkalan- Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo- Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan perekonomian di Provinsi Jawa Timur tidak bisa terlepas dari kontribusi beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, salah satunya ialah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi yang memiliki sektor unggulan pada sektor pariwisata, pertanian, dan industri dalam beberapa tahun terakhir selalu menempatkan diri perekonomiannya tumbuh diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Dalam Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 8 Wilayah Pembangunan (WP) yang meliputi WP Gerbangkertosusila Plus, WP Malang Raya, WP Madiun dan Sekitarnya, WP Kediri dan Sekitarnya, WP Probolinggo-Lumajang, WP Blitar, WP Jember, dan WP Banyuwangi. WP Banyuwangi memiliki fungsi pengembangan wilayah Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

Lebih lanjut dalam Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dijelaskan bahwa prioritas percepatan pembangunan guna memperoleh dampak terhadap perekonomian regional dan nasional adalah 3 wilayah yang meliputi Kawasan Gerbangkertosuilo, Kawasan Bromo Tengger Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Peran Kabupaten Banyuwangi dalam percepatan pembangunan ketiga kawasan

tersebut ialah selaku kawasan pendukung yakni masuk dalam Kawasan Selingkar Ijen yang mana mendukung Kawasan Prioritas Bromo Tengger Semeru. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen berada di wilayah paling timur Provinsi Jawa Timur, dimana kawasan ini meliputi 4 Kabupaten yang mengelilingi Gunung Ijen dan Gunung Raung, yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Secara khusus Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari dataran tinggi Pegunungan atau Gununggapi dan Perbukitan (Gunung Ijen dan Gunung Raung), dataran rendah, dan daerah pantai. Berikut merupakan gambaran Peta Delinasi Kawasan Pendukung Selingkar Ijen.



**Gambar 4. 4: Peta Delinasi Kawasan Pendukung Selingkar Ijen**

Tematik pembangunan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yang memiliki kesamaan sektor unggulan berupa pariwisata, khususnya dibidang agrowisata, yang didukung pula oleh sektor perkebunan dan perikanan ialah Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengembangan Kawasan Ekonomi Tematik Berupa Koridor dan Gugus Wisata, Agropolitan, dan Minapolitan, serta Kawasan Industri. Selanjutnya beriku dijelaskan kaitannya strategi percepatan pengembangan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yang dilakukan melalui pendekatan meliputi aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang meliputi:

- b. **Aspek Sosial**, meliputi Peningkatan pemahaman pola hidup sehat masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

- c. **Aspek Ekonomi**, meliputi Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan KAD dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Pengembangan Pariwisata Ijen dan sekitarnya yang didukung pengembangan Agropolitan dan Minapolitan yang memberikan nilai tambah ekonomi
- d. **Aspek Infrastruktur**, meliputi peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik dan pariwisata; peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.

Berikut merupakan sasaran prioritas kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang dikemas dalam Program Agropolitan / Minapolitan sebagai berikut:

- a. Agropolitan Banyuwangi (Glagah, Giri, Bagorejo, Kalibaru, Kalipuro) di Kabupaten Banyuwangi;
- b. Minapolitan Muncar-Srono di Kabupaten Banyuwangi;

#### **4.2.3 Telaah Keterkaitan dan Dinamika Pembangunan Regional Provinsi Jawa Timur**

##### **1. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional bahwa pembangunan bahwa RPJMD termasuk memperhatikan RPJMD Provinsi yang memuat trategipembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SatuanKerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencanakerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. kebijakan. RPJMD Provinsi perlu Kabupaten Banyuwangi utamanya mengakomodir dari arahan kebijakan kewilayahan dari RPJMD Provinsi sehingga pola perencanaan dapat besinergi dengan arahan gubernur. Menindaklajuti arahan tersebut maka visi, misi, dan program kewilayahan sebagai berikut:

##### **VISI:**

**“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akandilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan misi Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

**Tabel 4. 5: Matriks Misi, Tujuan, Sasaran**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
M1.Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	T.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung.	S.1 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
		S.2 Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
		S.3 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian;
		S.4 Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
		S.5 Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
		S.6 Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;
		S.7 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;
		S.8 Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
		S.9 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air; dan
S.9 Meningkatnya konektivitas jaringan		

Misi	Tujuan	Sasaran
		Transportasi Darat, Laut dan Udara.
M2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.	T2. Menurunnya Angka Kemiskinan	S.10 Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan S.11 Meningkatnya Kemandirian PMKS.
	T3. Meningkatnya Kesetaraan Gender	S.12Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
M3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.	T4.Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	S.13 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
		S.14 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
		S.15 Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah; dan
		S.16 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
	Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.	S.17 Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat; S.18 Meningkatkan Kepedulian Sosial; dan 3) Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal. S.19 Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
M4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang	Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan	S.20 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
		S.21 Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.

Misi	Tujuan	Sasaran
Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.		

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye : Nawa Bhakti Satya. Nawa Bhakti Satya merupakan 9 (Sembilan) Bhakti pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak Jawa Timur Periode 2019-2024 yang merupakan Sembilan pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Jawa Timur menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Nawa Bhakti Satya berasal dari Bahasa Sanssekerta dan Jawa. Nawa berarti Sembilan, kemudian Bhakti merupakan pengabdian yang dilakukan secara aktif yang sifatnya inklusif dan partisipatif (ada keterlibatan Bersama), sedangkan Satya memiliki arti “benar” dan sekaligus menegaskan sebuah kesejahteraan yang bermuara pada tujuan kemuliaan. Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong-Royong”**. Berikut merupakan linieritas Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dengan 9 Agenda Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

**Tabel 4. 6: Linieritas 9 Agenda Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 & Nawa Bakti Satya Provinsi Jawa Timur**

Nawa Bakti Satya	9 Agenda Prioritas Kabupaten Banyuwangi
<b>Jatim Agro</b> : Memberdayakan Masyarakat Pesisir Nelayan, Perdesaan, dan Jatim Terluar	Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata
<b>Jatim Harmoni</b> : Merawat Kebudayaan Lokal, Pariwisata, dan Perlindungan Alam	
<b>Jatim Berdaya</b> : Memajukan Pertanian, Pangan, dan Perkebunan	Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja

<b>Nawa Bakti Satya</b>	<b>9 Agenda Prioritas Kabupaten Banyuwangi</b>
<b>Jatim Amanah</b> : Memperkuat Industri Perdagangan, Koperasi, Menuju Ekonomi Berdikari	
<b>Jatim Sejahtera</b> : Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan Sosial; Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Umat	Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal
	Percepatan Pengurangan Kemiskinan
	Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga
<b>Jatim Cerdas &amp; Sehat</b> : Memperluas Lapangan Pekerjaan; Pengangguran dan Tenaga Kerja	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul
<b>Jatim Akses</b> : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Ponpes, Guru, Madin, Siswa Miskin dan Prestasi	
<b>Jatim Berkah</b> : Mempermudah Akses dan Meningkatkan Mutu Kesehatan; Ibu, Perempuan, Anak, dan Faskes	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif
<b>Jatim Kerja</b> : Membangun Infrastruktur, Mempermudah Akses Pembangunan Wilayah Selatan Jawa dan Kepulauan	Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan
	Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi

## 2. Telaah RTRW Provinsi Jawa Timur

Sebagai Kabupaten yang memiliki letak administrative di Provinsi Jawa Timur, maka RPJMD Kabupaten Banyuwangi harus disusun dengan mempertimbangkan RTRW Provinsi Jawa Timur, sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan dapat sinkron dengan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Beberapa mandat Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RTRW Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi dengan pusat di Perkotaan Banyuwangi memiliki fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata
2. Rencana pengembangan jalan di Kabupaten Banyuwangi meliputi:
  - a. Jalan bebas hambatan Probolinggo–Banyuwangi; (Tol)
  - b. Jalan Nasional Arteri Primer (Surabaya–Sidoarjo–Gempol–Pasuruan–Probolinggo– Situbondo–Banyuwangi)
  - c. Jalan Nasional Kolektor Primer (Glonggong–Pacitan–Panggul–Durenan–Tulungagung– Blitar–Kepanjen–Turen–Lumajang–Wonorejo–Jember–Gentengkulon–Jajag–Benculuk–Rogojampi– Banyuwangi)
  - d. Jalan Strategis Nasional (Paltuding–Banyuwangi)

3. Pembangunan Pembangkit Energi baru terbarukan
  - a. Energi air untuk pembangkit listrik mikro hidro.
  - b. Energi Angin
  - c. Energi Panas Bumi
  - d. Energi Gelombang Laut
4. Pengembangan jaringan transmisi 150kV jalur
  - a. Banyuwangi-Gilimanuk,
  - b. Banyuwangi-Ketapang
  - c. Ijen PLTP-Banyuwangi
  - d. New Banyuwangi-Genteng
  - e. Pengembangan Gardu Induk, (Banyuwangi, Genteng)
5. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi
  - a. Wilayah Sungai Baru Bajulmati meliputi Embung Singolatri, Waduk Kedawang, Waduk Bajulmati, Embung Bomo, dan Embung Sumber Mangaran di Kabupaten Banyuwangi
6. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal meliputi, kawasan permukiman budaya suku Osing;
7. Kawasan Konservasi:
  - a. Kawah Ijen Merapi Unggup-Unggup di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi dengan luas sekurang-kurangnya 2.468 ha;
  - b. Janggangan Rogojampi I/II di Kabupaten Banyuwangi dengan luas sekurang-kurangnya lebih 7,50 ha
8. Taman Wisata Alam
 

Taman Wisata Alam Ijen Merapi Unggup-Unggup di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi dengan luas sekurang-kurangnya 92 ha.
9. Kawasan keunikan batuan dan fosil Teluk Grajagan di Kabupaten Banyuwangi
10. kawasan imbuan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT), CAT Banyuwangi, CAT Blambangan
  - a. pemertahanan kemampuan imbuan air tanah;
  - b. pelarangan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
  - c. pembatasan penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
11. Pengembangan Buah-buahan
  - a. Pisang
  - b. Jeruk
  - c. Manggis
12. Pengembangan Perkebunan
  - a. Kopi
  - b. Karet
  - c. Kakao
  - d. Kelapa
  - e. pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/ koperasi.

13. Diarahkan untuk pengembangan Peternakan dan Perikanan:
  - a. Sentra peternakan ternak besar
  - b. kawasan perikanan budi daya air payau
  - c. kawasan perikanan budi daya air laut
  - d. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
  - e. Arahan Pengelolaan:
    - 1) pemertahanan, perehabilitasian, dan perevitalisasian tanaman bakau/ mangrove dan terumbu karang;
    - 2) pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
    - 3) penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri;
    - 4) pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
    - 5) pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;
    - 6) peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
    - 7) pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi.
    - 8) pemertahanan luasan dan sebaran kawasan tambak garam agar tidak berubah fungsi;
    - 9) pembukaan peluang pengembangan tambak garam baru dalam rangka meningkatkan produksi garam dan membuka peluang investasi;
    - 10) pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam; dan
    - 11) pengembangan kawasan tambak garam dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang keberlanjutan.
14. Mendapatkan Porsi untuk pengembangan kawasan sentra industry
15. Banyuwangi memiliki keunggulan dalam pariwisata:
  - a. Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi.
  - b. Kawah ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso.
  - c. Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi;
  - d. Penetapan pusat pelayanan koridor D wisata salah satunya ada di Banyuwangi.
16. Kabupaten Banyuwangi Masuk dalam Kawasan Andalan dengan sector unggulan unggulan perikanan dan pertanian.
17. Kabupaten Banyuwangi masuk dalam Kawasan Strategis Agropolitan Regional yaitu Sistem Agropolitan Ijen (meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo)
18. Banyuwangi masuk dalam Kawasan pengembangan potensial panas bumi Belawan-Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.

#### **4.2.4 Telaah Keterkaitan Dokumen Pembangunan Kabupaten Banyuwangi**

##### **1. Telaah RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu rangkaian tahapan pembangunan yang termaktub dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Amanat penyusunan RPJP berlaku pada semua level pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten / kota. Pada level pemerintah pusat, RPJP merupakan pengganti dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi acuan jangka panjang pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 merupakan acuan teknis dari penyusunan perencanaan pembangunan yang mana dijelaskan setidaknya terdapat 3 level perencanaan pembangunan jika dilihat dalam dimensi waktu yang meliputi perencanaan jangka panjang yang disusun 20 tahun sekali, perencanaan jangka menengah yang disusun 5 tahun sekali, dan perencanaan tahunan yang biasa disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Salah satu amanat dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 adalah telaah RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025. Urgensi dari telaah RPJPD dalam penyusunan RPJMD adalah mengingat, RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan tahapan terakhir atau tahapan keempat dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025. Sehingga RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 tidak hanya terfokus terhadap rencana pembangunan kepala daerah yang terpilih pada periode tersebut, melainkan juga memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah dapat tercapai dengan baik.

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan cakupan utama telaah RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 yang harus diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025 adalah melihat realisasi kinerja sasaran pokok yang terepresentasikan melalui indikator yang ditetapkan dalam RPJPD dengan melihat target kinerja yang ditetapkan. Pokok persoalan yang ditemukan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 adalah sasaran pokok belum terepresentasikan terhadap indikator yang lebih bersifat measurable (terukur) dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga fokus telaah RPJPD Kabupaten Banyuwangi adalah melihat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 terhadap rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Berikut merupakan Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025

**Tabel 4. 7: Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025**

No	Misi RPJP	Sasaran Pokok
I.1	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang Religius dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudi pekerti luhur, yang dicirikan oleh perilaku yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketinggian akhlak dan toleransi antar individu.
I.2	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	<p>Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan norma, peraturan dan perundang undangan yang berlaku dalam mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang ditunjukkan oleh sikap saling toleransi antar individu serta terjadi Harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>
II.1	Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat Berasas Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	<p>Meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi terhadap pendidikan yang berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat.</p> <p>Meningkatnya aksesibilitas yang merata bagi seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p> <p>Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor strategis</p> <p>Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang diupayakan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.</p> <p>Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan yang berupaya untuk melestarikan dan menjaga fungsi lingkungan dalam mendukung keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan kearifan lokal yang baik.</p>
II.2	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Yang Berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar (listrik, air bersih, pemukiman, transportasi dan lain sebagainya) di seluruh wilayah.

No	Misi RPJP	Sasaran Pokok
		<p>Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang handal dalam mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah.</p> <p>Berkembangnya kegiatan pelestarian norma dan nilai-nilai budaya daerah yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>Menguatnya modal sosial masyarakat yang dicirikan oleh kelembagaan lokal yang kuat yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.</p>
II.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Profesional, dan Tanggung Jawab	<p>Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah.</p> <p>Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan minimum.</p> <p>Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.</p>
III.1	Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang Mandiri Berbasis Agribisnis Terpadu	<p>Berkembangnya sistem agribisnis terpadu.</p> <p>Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif termasuk struktur usahanya.</p> <p>Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan.</p>
III.2	Meningkatnya perekonomian Kabupaten Banyuwangi berbasis ekowisata terpadu.	Meningkatnya perekonomian Kabupaten Banyuwangi berbasis ekowisata terpadu.

Tematik pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025 adalah Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten yang Religius, Sejahtera, dan Mandiri melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai bidang dengan menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kuat Berbasis Agribisnis dan Ekowisata Terpadu yang Didukung oleh Sumberdaya Manusia yang Berkualitas. Berikut merupakan keterkaitan fokus pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025 dengan isu strategis dan misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026:

**Tabel 4. 8: fokus pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2025 dengan isu strategis dan misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026**

Fokus Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2021-2025	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026
Memantapkan struktur perkonomian yang maju, kuat, dan berdaya saing bertumpu terhadap sektor pertanian berbasis agribisnis, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa yang didorong industry besar dan UMKM	Pemulihan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi	<p><b>Misi I</b> Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan</p>
Pemantapan Ekowisata yang berkelanjutan dan kesinambungan dengan sektor lain		
Pengembangan transportasi pada wilayah pertumbuhan yang cukup pesat		
Pemenuhan kebutuhan energi terhadap masyarakat dan dunia usaha melalui energi alternatif dan terbarukan		
Meningkatkan peran TIK untuk mempermudah akses informasi masyarakat dalam kegiatan pertanian, perdagangan, pendidikan, dan lain-lain.		
Pemerataan jaringan perpipaan air minum ke berbagai wilayah dengan pemantapan pengelolaan lembaga pengelolaan air minum perdesaan		
Rintisan pembangunan rumah vertikal pada kawasan padat penduduk		
Mewujudkan konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang		
Menciptakan keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui partisipasi stakeholder dan penegakan aturan		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat fokus terhadap	Kesenjangan Sosial	

Fokus Pembangunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2021-2025	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026
pemerataan tingkat pendapatan, memantapkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan meningkatkan derajat Kesehatan dan status gizi masyarakat	Kapasitas Sumber daya manusia yang Unggul dan berkarakter	<b>Misi II</b> Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif
Pemantapan pendidikan anak usia dini, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun		
Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang berdaya guna		
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan pemenuhan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan di seluruh Kabupaten Banyuwangi yang didukung oleh teknologi		
Menciptakan SDM yang berkarakter cerdas, Tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral		
Mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat yang bebas dari ancaman, hambatan dan gangguan	Penguatan Modal Sosial masyarakat	
Menciptakan sistem pemerintahan dengan baik	Adaptasi Manajemen Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik	<b>Misi III</b> Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis
Optimalisasi pelayanan masyarakat (mudah, murah, cepat, tepat, dan berkualitas, transparan, dan sesuai aturan).		
Meningkatkan SDM aparatur berkualitas yang berilmu, berpengetahuan, berwibawa, taat aturan, dan bersih.		
Penegakan hukum, proses politik, dan budaya politik berjalan sebagai pelaksanaan demokrasi yang procedural dan substantial		
Menciptakan masyarakat paritisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan		

## **2. Telaah RPJMD Daerah Sekitar Kabupaten Banyuwangi**

### **a. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso**

RPJMD Kabupaten Bondowoso memiliki periode dari tahun 2018-2023. Melihat periode tersebut maka terdapat beberapa kebijakan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi meliputi arah kebijakan untuk periode pembangunan tahun 2022 serta arah kebijakan periode 2023. Pada tahun 2022 tema pembangunan Kabupaten Bondowoso adalah **“Peningkatan inovasi sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”**. Tema pembangunan tersebut didukung dengan 3 arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah
- 2) Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan, meningkatnya investasi daerah, meningkatnya usaha skala mikro dan kecil.
- 3) Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya pemberdayaan gender serta perlindungan perempuan dan anak, meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, meningkatnya kerukunan antar suku, agama, ras dan antar golongan, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, serta terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Pada tahun 2023 Kabupaten Bondowoso memiliki tema pembangunan **“Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah serta mengembangkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan berbudaya”**. Tema pembangunan tersebut didukung dengan 2 arah kebijakan pembangunan meliputi:

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah
- 2) Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan, meningkatnya pemberdayaan gender serta perlindungan perempuan dan anak, meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga, meningkatnya kerukunan

antar suku, agama, ras dan antar golongan, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, serta terkendalinya pertumbuhan penduduk.

#### **b. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo**

Kabupaten Situbondo memiliki perodesasi RPJMD yang sama dengan Kabupaten Banyuwangi yaitu 2016-2021. Krena perodesasi yang sama, maka RPJMD Kabupaten Situbondo pada periode selanjutnya juga masih dalam proses penyusunan. Sehingga untuk kebutuhan pertimbangan selama lima tahun kedepan dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Situbondo dibagi menjadi 4 periode pembangunan. Dalam konteks penyusunan RPJMD tahun 2021-2024, maka kebijakan pada RPJPD yang dapat dijadikan pertimbangan adalah pada periode keempat yaitu untuk tahun pembangunan 2021-2025. Beberapa kebijakan pada periode pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan system agribisnis, diarahkan pada penyelarasan keterkaitan subsistem antara hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis yang berdaya saing sesuai dengan permintaan pasar lokal dan nasional. Penataan system informasi agribisnis, diarahkan pada program pembangunan system informasi prasarana, produksi, proses produksi, distribusi dan pengelolaan serta informasi pasar.  
Pemberdayaan koperasi dan UKM, dalam system Agribisnis diarahkan pada pertumbuhan wirausaha baru, peningkatan kompetensi dan perkuat kewirausahaan, peningkatan produktifitas, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan hasil teknologi dalam iklim usaha yang sehat.  
Pengembangan pariwisata, diarahkan untuk melestarikan peninggalan budaya, tradisi kesenian, dan sebagainya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat. Pengembangan juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata serta lama tinggalnya.
- b. Mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya  
Pembangunan Pendidikan, diarahkan pada upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dan outputnya mampu terserap dalam lapangan kerja.  
Pembangunan agama, pembangunan agama dapat meliputi peningkatan kualitas keagamaan, yang dapat mencakup Pendidikan keagamaan, Pendidikan pesantren dan sebagainya.  
Pembangunan pemuda, diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia.  
Pemberdayaan perempuan, diarahkan pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta perlindungan anak pada suatu kondisi yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak serta tumbuh kembang anak secara wajar.
- c. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup  
Pembangunan Kesehatan, diarahkan pada terwujudnya peningkatan derajat Kesehatan sebagai upaya peningkatan derajat Kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM.

Pembangunan kependudukan, diarahkan pada terwujudnya keluarga sejahtera dan keseimbangan daya dukung lingkungan melalui pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk.

Pembangunan ketenagakerjaan, diarahkan pada terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, industrial dan buruh serta penciptaan tenaga kerja yang mandiri, produktif, kompetitif.

Pembangunan kesejahteraan social, diarahkan pada peningkatan kualitas penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) yang tidak berdaya dan tidak memiliki akses untuk melakukan mobilitas ketingkat kualitas kehidupan yang lebih baik.

Penanggulangan kemiskinan, diarahkan pada upaya pemberdayaan untuk akses kualitas hidup, berbasis keluarga.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan.

Pengembangan keanekaragaman hayati, diarahkan pada peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam hayati secara efisien dan tetap memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.

Pengembangan potensi sumber daya kelautan, diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hidup, social budaya dan teknologi

Penanganan Kebencanaan, diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam penanganan pra darurat dan pasca bencana.

e. Mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi

Pembangunan Transportasi, diarahkan untuk mendukung kegiatan social, ekonomi masyarakat yang dilakukan yang dulakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan.

Pengelolaan sumberdaya air, diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konversi sumber daya air, dan pengendalian daya air.

Pengembangan wilayah, diarahkan pada terwujudnya percepatan pembangunan struktur dan pola ruang wilayah didukung infrastruktur ekonomi dalam menopang realisasi pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan Kawasan strategis, pengelolaan Kawasan lindung dan Kawasan budidaya.

f. Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan hukum, diarahkan mewujudkan keterlibatan social yang dilakukan melalui penegakan supremasi hukum yang adil, konsisten konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif.

Penyelenggaraan pemerintahan, diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pementapan tata Kelola yang baik (good Governance).

Pembangunan politik, diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya tata pemerintahan yang demokratis melalui kelembagaan demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, kesatuan social, dan budaya, hak-hak

asasi manusia dan mengutamakan kepentingan kedaulatan bangsa serta tetap utuh teguhnya negara kesatuan republic Indonesia.

Pembangunan komunikasi dan informasi, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sadar informasi serta menjamin hak masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang transparan menuju proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.

Pembangunan keamanan dan ketertiban, diarahkan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan tegaknya tatanan social kemasyarakatan.

Pembangunan keuangan daerah, diarahkan untuk meningkatkan, memperkuat pendapatan keuangan daerah

### **3. Telaah RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032**

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Banyuwangi periode 2012-2032 memiliki 12 kebijakan besar meliputi:

1. pengembangan kawasan pertanian;
2. pengembangan kawasan perikanan;
3. pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
4. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa;
5. penataan sektor informal;
6. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta pelayanan dasar masyarakat;
7. pengembangan kawasan strategis kabupaten;
8. pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya alam;
9. pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis;
10. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
11. pengendalian kawasan rawan bencana alam; dan
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Untuk menjamin terlaksanakannya 12 kebijakan tersebut, maka seluruh kebijakan dituangkan dalam arah pemanfaatan ruang Kabupaten. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 3 meliputi, Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, Perwujudan rencana polar uang wilayah kabupaten, dan Perwujudan Kawasan strategis kabupaten. Dalam pelaksanaannya, RTRW Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi empat tahapan meliputi:

- a. Tahap I (Tahun 2012 - 2016);
- b. Tahap II (Tahun 2017 - 2021);
- c. Tahap III (Tahun 2022 - 2026); dan
- d. Tahap IV (Tahun 2027 - 2032).

Sebagaimana mebagian tahapan tersebut, pemanfaatan ruang memiliki rincian program utama yang terdistribusikan pada 4 tahapan waktu eksekusi tersebut. Melihat perodesasi RPJMD, maka tahapan pada RTRW Kabupaten yang harus diakomodir adalah pada tahapan ketiga yaitu untuk masa perencanaan tahun 2022-2026. Detail program utama KLHS yang harus diakomodir pada pada periode tersebut adalah sebagai berikut:

## **A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**

### **1. Perwujudan Pusat Kegiatan**

#### **a. Perwujudan Sistem Perkotaan**

- 1) Pengembangan WP Banyuwangi Utara
- 2) Pengembangan WP Banyuwangi Tengah Timur
- 3) Pengembangan WP Banyuwangi Tengah Barat
- 4) Pengembangan WP Banyuwangi Selatan
- 5) Pengembangan PKW
- 6) Pengembangan PKL
- 7) Pengembangan PKLp
- 8) Pengembangan PPK

#### **b. Perwujudan Sistem Perdesaan**

- 1) Pengembangan PPL
- 2) Pengembangan agropolitan

### **2. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah**

#### **a. Perwujudan Sistem Prasarana Utama**

- 1) Transportasi Darat
  - a) Pengembangan sistem jaringan jalan nasional, meliputi:
    - pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri;
    - pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer; pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer nasional;
    - pembangunan jaringan jalan bebas hambatan;
    - pengembangan dan peningkatan jaringan jalan strategis nasional rencana tersambung tersambung;
    - pengembangan dan peningkatan jaringan strategis nasional rencana belum tersambung.
  - b) Pengembangan sistem jaringan jalan provinsi berupa pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer.
  - c) Pengembangan sistem jaringan jalan kabupaten, meliputi:
    - pengembangan dan peningkatan jaringan jalan lokal primer;
    - pengembangan dan peningkatan jaringan jalan sekunder didalam kawasan perkotaan;
    - pengembangan dan peningkatan jaringan jalan lingkungan yang menghubungkan antar permukiman perkotaan dan antar permukiman perdesaan diseluruh kabupaten;
    - pembangunan jalan lingkar perkotaan;
    - pengembangan dan peningkatan jalan strategis kabupaten; dan
    - pengembangan dan peningkatan jembatan.

- d) Perwujudan sistem prasarana angkutan penumpang di kabupaten meliputi :
  - relokasi dan peningkatan terminal tipe A di sekitar pelabuhan Ketapang untuk meningkatkan transit antar moda;
  - pengembangan dan peningkatan terminal tipe B;
  - pengembangan dan peningkatan terminal penumpang tipe C;
  - pengembangan trayek angkutan penumpang;
  - pengembangan dan peningkatan prasarana angkutan barang; dan
  - pengembangan dan peningkatan terminal induk sebagai pusat pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- 2) Perkeretaapian, meliputi :
  - a) pembangunan jaringan rel kereta api dua jalur (double track);
  - b) peningkatan stasiun kereta api;
  - c) pembangunan pos jaga dan pemasangan sistem peringatan pada perlintasan kereta api; dan
  - d) peningkatan akses terhadap layanan kereta api.
- 3) Transportasi Laut, meliputi :
  - a) pengembangan fungsi pelabuhan laut; dan
  - b) pengembangan fungsi pelabuhan khusus;
- 4) Transportasi Udara, meliputi :
  - a) penataan kawasan sisi darat dan sisi udara bandar udara;
  - b) pengendalian kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP); dan
  - c) penyusunan rencana induk bandar udara dan penataan rencana rinci tata ruang diluar kawasan bandar udara.

**b. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**

- 1) pengembangan jaringan telekomunikasi;
- 2) peningkatan wilayah pelayanan sistem jaringan kabel, tanpa kabel dan satelit;

**c. Perwujudan sistem jaringan energi**

- 1) peningkatan pelayanan listrik
- 2) pengembangan transmisi tenaga listrik;
- 3) pengembangan areal konservasi sekitar lokasi SUTT dan SUTET; dan
- 4) pengembangan energi alternatif.

**d. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air**

- 1) eksplorasi sumber daya air
- 2) pelestarian sumber daya air permukaan dan air bawah tanah
- 3) pengembangan dan pembangunan sarana prasarana sumber daya air
- 4) perlindungan daerah tangkapan air
- 5) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku
- 6) pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan perkotaan dan perdesaan, diutamakan pada daerah rawan air bersih dan irigasi

- 7) pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan industri kecil, menengah dan besar
  - 8) pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan budidaya perikanan darat
  - 9) pengendalian dan pemanfaatan secara proporsional sumber-sumber mata air dan air tanah
  - 10) pelestarian lingkungan daerah tangkapan air (catchment area), DAS dan disekitar sumber-sumber air
  - 11) pembangunan dan pemeliharaan waduk, embung, bendung, chekdam, groundsill, kolam retensi, bangunan bendung distribusi, dan bangunan pembagi
  - 12) pembangunan tanggul dan talud permanen disepanjang sungai
  - 13) perkuatan tangkis
  - 14) pembangunan dan rehabilitasi plengsengan sungai
  - 15) normalisasi sungai
  - 16) reboisasi kawasan resapan air
  - 17) pengendalian kawasan resapan air
  - 18) pengendalian kawasan lindung sempadan sungai
- e. Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan**
- 1) peningkatan sarana prasarana persampahan
  - 2) pengembangan lokasi TPA sesuai zona pelayanan
  - 3) pengembangan sarana prasarana air minum
  - 4) peningkatan wilayah pelayanan air bersih
  - 5) pembangunan saluran drainase dan sanitasi yang memadai
  - 6) peningkatan akses PS air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan maupun di perdesaan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat
  - 7) penyediaan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan untuk menemui kebutuhan air minum
  - 8) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum
  - 9) penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air minum
  - 10) peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan air minum
  - 11) pengembangan alternatif sumber pembiayaan
  - 12) pembangunan IPAL
  - 13) peningkatan pelayanan dan penanganan drainase;
  - 14) peningkatan pelibatan stakeholders;
  - 15) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
  - 16) penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah;

## **B. PERWUJUDAN POLA RUANG**

### **1. Perwujudan Kawasan Lindung**

- a. Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya**

- 1) pengendalian perubahan fungsi kawasan;
  - 2) pengendalian pendirian bangunan baru;
  - 3) penanaman vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - 4) reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.
- b. Perwujudan kawasan perlindungan setempat**
- 1) perlindungan kawasan sempadan sungai, waduk, danau, embung, rawa dan sektar mata air;
  - 2) pengendalian pencemaran air;
  - 3) pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi dan penutup tanah untuk melindungi pencemaran dan erosi air; dan
  - 4) membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.
- c. Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya**
- 1) pelestarian kawasan suaka alam, cagar alam, suaka alam laut, pantai berhutan bakau, taman nasional dan wisata alam;
  - 2) membatasi penggunaan lahan secara langsung yang dapat merusak pelestarian alam;
  - 3) penanaman vegetasi yang dapat memberikan perlindungan suaka alam; dan
  - 4) tidak mengadakan wisata yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran di kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.
- d. Perwujudan kawasan rawan bencana alam**
- 1) dilakukannya kegiatan-kegiatan reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir;
  - 2) pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai;
  - 3) normalisasi wilayah sungai secara berkala;
  - 4) memperbaiki kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayanannya dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang; dan
  - 5) penghijauan hutan dan kawasan lindung;
  - 6) pemantauan hutan secara berkala;
  - 7) pengaturan bangunan dan daerah hijau; dan
- e. Perwujudan kawasan lindung geologi**
- 1) perlindungan kawasan cagar alam geologi;
  - 2) pengelolaan kawasan rawan bencana alam geologi; dan
  - 3) perlindungan daerah imbuhan air tanah.
- f. Perwujudan kawasan lindung lainnya**
- 1) perlindungan konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan;
  - 2) pengembangan budidaya perikanan dan kelautan; dan

- 3) penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang tidak mengganggu lingkungan.

**g. Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi**

- 1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Hutan Produksi;
- 2) pembentukan dan pembinaan kesatuan pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- 3) fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan Kawasan Hutan;
- 4) fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perluasan akses pelayanan informasi pemasaran hasil hutan;
- 5) pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat; dan
- 6) pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan.

**h. Perwujudan kawasan peruntukan pertanian**

- 1) membatasi alih fungsi lahan pertanian melalui penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi sesuai peraturan perundangan;
- 2) mengatur pola penggunaan sumberdaya air untuk kegiatan pertanian lahan basah pada kawasan pertanian yang potensial;
- 3) memperluas daerah tangkapan hujan pada DAS sehingga dapat menjaga ketersediaan air;
- 4) meningkatkan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir;
- 5) e. meningkatkan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan;
- 6) meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi; dan
- 7) penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air (irigasi), pengadaan produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

**i. Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan**

- 1) mengembangkan komoditas tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomi tinggi; dan
- 2) meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan

**j. Perwujudan kawasan peruntukan peternakan**

- 1) mengembangkan komoditas ternak;

**k. Perwujudan kawasan peruntukan perikanan**

- 1) pemberdayaan ekonomi masyarakat, meliputi pembudidaya ikan;
- 2) peningkatan pengelolaan kawasan budidaya perikanan
- 3) pengembangan sarana & prasarana kawasan perikanan
- 4) pengembangan sarana kawasan minapolitan
- 5) peningkatan usaha perikanan kolam, sungai, rawa, sawah dan laut;
- 6) pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha;

- 7) peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
- 8) penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan. Pemasaran produk perikanan;
- 9) pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan; dan
- 10) peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank.

**l. Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan**

- 1) pengendalian usaha penambangan yang merusak lingkungan.

**m. Perwujudan kawasan peruntukan industri**

- 1) pengelolaan, mencakup kelembagaan dan peran/kewajiban pengelola kawasan industri dalam melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri.

**n. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata**

- 1) penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata.
- 2) melengkapi Kawasan Wisata dengan fasilitas penunjang wisata;
- 3) melakukan promosi Kawasan Wisata melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi; dan
- 4) mempromosikan daerah wisata dengan mengadakan event tahunan maupun bulanan; dan
- 5) melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.

**o. Perwujudan kawasan peruntukan lainnya**

- 1) membatasi pembukaan lahan baru yang mengganggu pengembangan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

**C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

**1. Perwujudan kawasan strategis ekonomi**

- a. pengembangan kegiatan ekonomi skala besar;

**2. Perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan**

- a. pengembangan kawasan hutan produksi dan perkebunan;
- b. melarang alih fungsi pada kawasan hutan lindung; dan
- c. pemanfaatan kawasan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup.

**4.2.5 Perumusan Isu Strategis Kabupaten Banyuwangi**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, Telaah SDGs, isu regional Provinsi Jawa Timur, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait (RPJPD, RTRW, KLHS). Berikut merupakan isu strategis Kabupaten Banyuwangi:

#### **1. Pemulihan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi**

Keberadaan sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi saat ini perlu dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur perekonomian daerah, karena keberadaan sektor tersebut menjadi lokomotif penggerak perkembangan ekonomi daerah, yang meliputi : Pariwisata, UMKM dan Pertanian.

Kondisi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi saat ini memiliki tantangan yang sangat berat, dimana dengan adanya pandemi Covid-19 telah banyak memberikan dampak terhadap sektor pariwisata. Pada tahun 2020 di Kabupaten Banyuwangi telah terjadi penurunan jumlah kunjungan pariwisata, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk saat ini dan dimasa mendatang perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut, disamping masih perlu adanya pengembangan terhadap pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, dimana saat ini masih sedikit pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi, serta belum maksimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini perlu dilakukan karena pariwisata menjadi salah satu sektor yang saat ini telah menopang pertumbuhan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Sehingga selain membangkitkan sektor pariwisata agar mampu beradaptasi pada era New Normal, juga masih diperlukan pengembangan yang didukung dengan keberadaan ekosistem ekonomi kreatif. Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menjadi identitas pembangunan, dengan pembangunan pariwisata berdampak besar pada perekonomian di usaha masyarakat termasuk penyerapan tenaga kerja. Pariwisata juga memberikan keuntungan pada pelaku usaha UMKM dan pertanian. Potensi sektor ini akan memberikan produktivitas dan daya saing dari pertumbuhan ekonomi. Pariwisata yang merosot karena pandemi 19 tentunya juga berdampak pada kondisi pelaku usaha UMKM.

Keberadaan UMKM di Kabupaten Banyuwangi selain turut terkena dampak pandemi Covid-19 yang harus segera ditangani juga memiliki berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun mendatang, karena keberadaan UMKM dengan jumlah yang banyak juga turut memiliki peran yang besar dalam rangka mendukung perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai salah satu pilar penting sektor ekonomi, keberadaan UMKM di daerah perlu terus didorong untuk tumbuh, terutama pada saat terjadinya pelemahan ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Masih minimnya diversifikasi usaha mikro perlu ditingkatkan untuk memperkuat struktur perekonomian dan mendukung keberlangsungannya usaha yang dimiliki oleh UMKM, selain itu masih belum optimalnya kemampuan akses pada sumber-sumber informasi, belum optimalnya kemampuan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar, belum maksimalnya kemampuan

SDM usaha mikro, belum maksimalnya kualitas sarana distribusi perdagangan, lemahnya pembentukan jaringan usaha atau kemitraan usaha mikro, belum maksimalnya pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah, kurangnya keakuratan data UMKM, serta minimnya jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha juga masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dan secara bertahap diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Selain pariwisata dan UMKM, keberadaan sektor pertanian juga perlu mendapatkan perhatian. Perekonomian Kabupaten Banyuwangi masih ditopang kuat oleh adanya sektor pertanian, dimana keberadaan sektor tersebut saat ini masih memiliki kontribusi lebih dari 29%. Bahkan saat pandemi melanda Indonesia pada tahun 2020, kondisi ekonomi Kabupaten Banyuwangi baru terdampak pada tribulan ketiga, karena masih ditopang oleh adanya sektor pertanian. Peran yang diberikan oleh sektor pertanian dalam struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir, dimana kontribusi yang diberikan pada tahun 2016 mencapai 35,38%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 29,69%. Kondisi yang dialami oleh sektor pertanian memerlukan intervensi yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana kondisi tersebut banyak disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan, seperti penurunan produktivitas yang disebabkan oleh adanya penurunan tingkat kesuburan atau produktivitas lahan karena penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan; terjadinya cuaca ekstrim yang memicu serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air yang belum memadai; maupun Penurunan permintaan hasil produksi perikanan budidaya; sedangkan dari sisi kelembagaan petani/ nelayan saat ini masih banyak terdapat kelemahan.

Peluang kedepan Sektor Pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Banyuwangi harus lebih inovatif dalam menangkap peluang revolusi industri 4.0. Industri pariwisata harus diintegrasikan dengan sistem dan teknologi mulai dari hulu hingga hilir, sehingga akan dapat memperluas pasar, mengembangkan diversifikasi produk dan jasa wisata, dan meningkatkan pelayanan wisatawan melalui sistem dan teknologi. Sektor UMKM dan Industri yang akan berdampak secara signifikan adalah mulai merubah mind set konvensional ke modern berbasis dengan teknologi. Sektor Pertanian dan Kelautan yang saat ini menjadi sektor dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Banyuwangi

Selain peluang revolusi industri 4.0, dalam amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dijelaskan bahwa prioritas percepatan pembangunan guna memperoleh dampak terhadap perekonomian regional dan nasional adalah 3 wilayah yang meliputi Kawasan Gerbangkertosuilo, Kawasan Bromo Tengger Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Peran Kabupaten Banyuwangi dalam percepatan pembangunan ketiga kawasan tersebut ialah selaku kawasan pendukung yakni masuk dalam Kawasan Selingkar Ijen yang mana mendukung Kawasan Prioritas Bromo Tengger Semeru. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen berada di wilayah paling timur

Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Banyuwangi. Pada kawasan tersebut, selaras dengan dokumen RTRW Provinsi Jawa timur yang menyebutkan Kabupaten Banyuwangi Masuk dalam Kawasan Andalan dengan sektor unggulan unggulan perikanan dan pertanian, serta mendukung Kabupaten Banyuwangi masuk dalam Kawasan Strategis Agropolitan Regional yaitu Sistem Agropolitan Ijen. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat mampu menangkap peluang dari adanya perhatian khusus pada yang di tetapkan pada prioritas nasional maupun provinsi Jawa Timur.

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek *multiplier*. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah kurang optimal, dapat berarti bahwa perekonomian pada daerah tersebut berjalan dengan cara yang kurang efisien. Biaya distribusi dan produksi yang tinggi akan berujung pada belum maksimalnya daya saing usaha.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi perlu ditingkatkan secara lebih merata, mengingat Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai potensi di sektor ekonomi yang perlu dikembangkan, sepertihalnya sektor pariwisata, pertanian dan UMKM. Disisi lain Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah yang luas dengan pembagian wilayah administratif sebanyak 25 kecamatan dan 217 desa/ kelurahan. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah, maka pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ekonomi sehingga multiplier efek dari pembangunan infrastruktur bisa dirasakan, yaitu untuk mendukung peningkatan daya tarik dan daya saing sektor pariwisata, produktivitas sektor pertanian dan daya saing UMKM, serta memberikan daya dukung terhadap akselerasi pembangunan ekonomi dan peningkatan investasi. Masih minimnya ketersediaan sarana dan parasarana perhubungan di Kabupaten Banyuwangi, masih terdapatnya ruas jalan yang mengalami kerusakan dan beberapa ruas jalan masuk pada usia perbaikan, serta belum optimalnya penyediaan akses air bersih terutama di kawasan pedesaan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik dan memadai dapat mendukung akselerasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi yang pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan pada umumnya harus mengacu pada konsep pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tetap memperhatikan aspek

lingkungan. Karena pembangunan ekonomi sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk itu, antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup diperlukan adanya keseimbangan. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan infrastruktur dan ekonomi perlu dilakukan mitigasi sehingga kerusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Di Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan melalui pengawasan secara intensif. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya pencemaran air dan udara. Berkembangnya kegiatan usaha masyarakat sangat berpotensi terhadap pencemaran lingkungan, baik air yang berasal dari limbah maupun udara sehingga dengan adanya pengawasan yang dilakukan, maka potensi dari permasalahan tersebut dapat dikendalikan. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan perlu memperhatikan penggunaan lahan dan ketersediaan sumber mata air. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, maka perlu dipastikan bahwa keberuntukan lahan yang digunakan telah sesuai, tidak mengubah fungsi lahan tanam/ resapan air, serta tidak merusak ketersediaan sumber mata air, sehingga dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi.

## **2. Kesenjangan Sosial**

Kesenjangan sosial menggambarkan suatu keadaan dimana telah terjadi kesenjangan, ketimpangan, ataupun ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kesenjangan sosial menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan oleh adanya kesenjangan (*gap*) pendapatan antar masyarakat yang cukup kontras, khususnya antara masyarakat yang berada di kota dan masyarakat di desa. Kondisi tersebut dapat dilihat dari angka gini rasio yang mengalami kenaikan. Dimana ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Untuk itu diperlukan adanya pemerataan pendapatan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja maupun peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini sangat penting dikarenakan pengangguran merupakan salah satu sebab yang dapat menimbulkan adanya kesenjangan pendapatan antar masyarakat, sehingga dengan semakin berkurangnya tingkat pengangguran maka kesenjangan tersebut akan semakin berkurang. Peningkatan skill berwirausaha bagi pemuda dan perempuan juga perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat, karena terjadinya kesenjangan berarti menunjukkan masih adanya masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang produktif. Dengan adanya peningkatan produktivitas, maka peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi akan semakin besar.

Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial juga diperlukan adanya peningkatan ketahanan keluarga. Dalam hal meningkatkan ketahanan keluarga, setiap individu utamanya perempuan dapat diberdayakan menjadi penyokong pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Akses perempuan di

bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan pemerintahan perlu diperluas dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, angka kekerasan (fisik, seksual & emosional) pada perempuan yang tinggi di Kabupaten Banyuwangi menjadi dasar kenapa perempuan perlu diberdayakan yakni untuk mendapatkan kemandirian guna meningkatkan akses pendapatan dan mengurangi kemiskinan, disamping perlu adanya perlindungan hukum yang diperlukan.

Kesenjangan sosial juga terjadi disebabkan oleh adanya kemiskinan, dimana tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 masih tercatat sebesar 8,06% dan terpusat pada daerah pedesaan. Untuk itu, pemerataan pembangunan perlu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembangunan yang dimulai dari desa, sehingga dengan demikian kesenjangan sosial antara desa dan kota akan dapat diminimalkan. Selain itu, masyarakat desa khususnya yang termasuk dalam angkatan kerja memiliki peranan yang penting dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dengan demikian perlu dikembangkan, baik dalam konteks penyediaan informasi lapangan kerja, pengembangan kompetensi SDM, perlindungan kerja sampai pada pemberian bantuan usaha. Disisi lain, pemberian bantuan sosial pada masyarakat miskin dipastikan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan secara efektif.

### **3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkarakter**

Representasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi sebagai manifestasi kinerja pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat Kabupaten Banyuwangi. IPM merupakan indeks yang terbentuk dari 3 indeks komposit yang meliputi indeks pendidikan yang dibentuk dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), indeks kesehatan yang dibentuk dari angka harapan hidup (AHH), dan indeks pengeluaran perkapita atau Purchasing Power Parity (PPP). Ketiga indeks komposit tersebut merupakan representasi dari kualitas pembangunan manusia disebuah daerah. Dengan kata lain yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia disaat masyarakat Kabupaten Banyuwangi memiliki ekspektasi yang tinggi dari waktu tempuh pendidikannya yang dilihat dari HLS, masyarakat Kabupaten Banyuwangi secara eksisting rata-rata telah menempuh jenjang pendidikan yang tinggi yang dilihat dari RLS, masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang memiliki usia harapan hidup yang panjang yang dilihat dari AHH, dan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang memiliki pengeluaran perkapita yang tinggi yang merepresentasikan kemudahan akses masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam mengakses ekonomi yang berimplikasi terhadap tingginya kualitas pengeluaran perkapita yang tinggi.

Isu strategis yang merupakan sebuah kondisi yang belum terjadi namun menjadi potensi maupun persoalan yang menjadi peluang dan ancaman yang akan terjadi di masa depan dalam pembangunan manusia perlu untuk diperhatikan guna menangkap peluang tersebut maupun

mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk akan berpotensi terjadi nantinya. Daya saing dan kapasitas SDM yang berkualitas hingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi sejauh ini belum dikatakan tercapai sepenuhnya, namun hal tersebut yang diharapkan nantinya akan terwujud. Menindak lanjut hal tersebut maka perlu kita pahami permasalahan-permasalahan pembangunan sumber daya manusia yang harus menjadi perhatian dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing dan berkualitas.

Pada sektor pendidikan persoalan di Banyuwangi masih berkebutakan pada masih belum optimalnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Banyak hal yang menjadi persoalan sehingga daya akses dan ekspektasi masyarakat dalam menempuh sektor pendidikan berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Di Kabupaten Banyuwangi masih banyaknya angka murid putus sekolah yang mana terjadi dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor ekonomi dan lemahnya mindset masyarakat Kabupaten Banyuwangi terhadap pentingnya pendidikan. Selain itu persoalan lain yang tidak kalah penting ialah berkaitan dengan kualitas pendidikan yang belum merata, khususnya antara di pusat perkotaan dengan wilayah pinggiran dan terpencil. Mengingat luas geografis yang merupakan kabupaten dengan luas paling besar di Provinsi Jawa Timur, pemerataan pendidikan merupakan tantangan penting yang sejauh ini masih menjadi persoalan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang belum tuntas diselesaikan. Tidak hanya kualitas bahkan ketersediaan fasilitas prasarana dasar pendidikan seperti listrik, internet, dan komputer masih belum merata. Terutama sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.

Revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan. aspek pendidikan berperan signifikan dalam menentukan dan membentuk sebuah bangsa yang maju dan modern. Karenanya, pemerintah berupaya melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendidikan. Di sini, pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari

Sektor kesehatan menyisakan persoalan masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan di beberapa wilayah. Salah satu tingginya angka tersebut adalah masih terdapat beberapa masyarakat yang belum secara rutin memeriksakan kandungannya kepada tenaga medis, sehingga terjadi komplikasi tertentu yang mana menyebabkan kasus fatal pada masa kehamilan maupun melahirkan. Masih tingginya masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang melakukan proses melahirkan pada dukun bayi yang belum tersertifikasi medis, sehingga berpotensi tingginya kasus kematian pada ibu dan bayi baru lahir.

#### **4. Penguatan Modal Sosial masyarakat**

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu variabel dalam membangun modal sosial, namun banyak hal-hal lain yang harus dibangun dari modal sosial Kabupaten Banyuwangi. Pentingnya hal tersebut dikarenakan masih belum maksimalnya pemahaman kesadaran masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan peraturan di Kabupaten Banyuwangi tentunya merupakan modal sosial penting dalam pembangunan. Masyarakat yang paham dan memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, akan menciptakan kondusifitas di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga semakin tingginya tingkat kondusifitas lingkungan sosial masyarakat, maka sektor bisnis atau sektor perekonomian akan tumbuh.

Permasalahan modal sosial tidak hanya terletak pada masyarakat secara umum. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam membina masyarakat sebagai bentuk tindakan preventif pencegahan konflik sosial masyarakat belum dikatakan berjalan efektif. Sejauh ini permasalahan utama ialah masih terdapat penegak perda baik Sapol PP maupun anggota Linmas yang belum terampil dalam menindaklanjuti permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Lemahnya kapasitas penegak perda akan berimplikasi terhadap penegakan perda yang kurang maksimal, sehingga masyarakat akan cenderung tidak jera dalam melakukan pelanggaran.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pembangunan perlu mengelola modal sosial, yaitu ikatan-ikatan sosial yang terbentuk dalam kurun waktu panjang, yang membentuk interaksi sosial, karakter masyarakat, dan didukung dengan adanya nilai bersama, rasa percaya (trust) dan kerjasama. Lebih jauh, modal sosial juga merupakan jalinan ikatan sosial-budaya, pemerintahan (governance), dan perilaku sosial yang sedemikian rupa sehingga membentuk fungsi dan tatanan masyarakat

Dapat disimpulkan berkaitan dengan modal sosial, aspek kunci dalam pembangunan modal sosial adalah pembangunan toleransi, solidaritas, dan stabilitas sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan konteks masyarakat secara umum maupun manusia dalam konteks aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, khususnya selaku penegak perda. Peran serta masyarakat dapat menjadi stimulan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kondusifitas. Modal sosial yang tidak kondusif justru akan menjadi kendala dalam pembangunan.

Permasalahan sosial di Kabupaten Banyuwangi yang masih perlu mendapatkan perhatian serius adalah kemiskinan karena masih tingginya keluarga miskin dan masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin serta masyarakat yang rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran. Tercatat masih ada sekitar 52.687 keluarga miskin yang masih mendapatkan bantuan Program PKH dan adanya peningkatan pada Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2018-2019.

Untuk mewujudkan modal sosial yang memberikan dukungan kepada pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Membangun modal sosial tidak

hanya sebatas permasalahan kemiskinan, namun jauh lebih kompleks. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu variabel dalam membangun modal sosial, namun banyak hal-hal lain yang harus dibangun dari modal sosial Kabupaten Banyuwangi. Pentingnya hal tersebut dikarenakan masih belum maksimalnya pemahaman kesadaran masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan peraturan di Kabupaten Banyuwangi tentunya merupakan modal sosial penting dalam pembangunan. Masyarakat yang paham dan memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, akan menciptakan kondusifitas di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga semakin tingginya tingkat kondusifitas lingkungan sosial masyarakat, maka sektor bisnis atau sektor perekonomian akan tumbuh.

Permasalahan modal sosial tidak hanya terletak pada masyarakat secara umum. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam membina masyarakat sebagai bentuk tindakan preventif pencegahan konflik sosial masyarakat belum dikatakan berjalan efektif. Sejauh ini permasalahan utama ialah masih terdapat penegak perda baik Sapol PP maupun anggota Linmas yang belum terampil dalam menindaklanjuti permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Lemahnya kapasitas penegak perda akan berimplikasi terhadap penegakan perda yang kurang maksimal, sehingga masyarakat akan cenderung tidak jera dalam melakukan pelanggaran.

Dapat disimpulkan berkaitan dengan modal sosial, aspek kunci dalam pembangunan modal sosial adalah pembangunan manusia Kabupaten Banyuwangi. Baik manusia dalam konteks masyarakat secara umum maupun manusia dalam konteks aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, khususnya selaku penegak perda. Peran serta masyarakat dapat menjadi stimulan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kondusifitas. Modal sosial yang tidak kondusif justru akan menjadi kendala dalam pembangunan.

#### **5. Kualitas Layanan Publik dan Adaptasi Manajemen Pemerintahan.**

Pelayanan publik berkualitas menjadi fokus utama masalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, banyak tuntutan masyarakat dalam menyelenggarakan layanan publik harus cepat, prima dan responsif. Masih banyak tugas untuk diselesaikan masalah layanan pemerintah. contoh masih adanya proses pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan SOP Pelayanan, contohnya juga seperti pelayanan dasar pembuatan pengantar administrasi penduduk, pertanahan, koordinasi dan sebagainya. Penanganan persoalan polemik di masyarakat desa pun adalah bagian pelayanan publik pemerintahan desa. Maka secara umum bahwa segala pembuatan dokumen berharga bagi masyarakat desa tentu harus melalui pemerintahan desa terlebih dahulu sebagai dasar syarat legalitas. Mendekatkan pelayanan publik desa menjadi isu yang harus di tangkap oleh pemerintah, karena menjadi perhatian kepala daerah.

Selain itu untuk menghadapi di era society 5.0, Pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada era perkembangan teknologi yang canggih (*artificial intelligence*). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus mengantisipasi era keterbukaan yang semakin luas, yang berujung pada kemampuan untuk bersaing dalam rangka meningkatkan kapasitas daya saingnya. Untuk mendukung era keterbukaan yang semakin meluas harus di dukung melalui pendekatan paradigma mengubah orientasi cara bekerja dengan apa yang disebut sebagai *network government* dan *collaborative governance*. Pemerintah sudah tidak dapat bekerja dan menyelesaikan masalah-masalah publik sendirian. Pemerintah berkomitmen dalam menangkap isu peluang tersebut dengan beradaptasi dengan inovasi layanan publik yang semakin dituntut untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kekurangan sebesar 26,23% terkait persentase instansi pemerintah yang memiliki Indeks Reformasi Baik dari target SDG's sebesar 45%, adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah, belanja modal kecenderungan mengalami penurunan. Manajemen pemerintahan di tuntutan untuk dinamis dan adaptif dalam menyikapi perubahan. Birokrasi harus respon terhadap kebijakan yang terus berubah, selain itu pemerintah dihadapkan dengan pengelolaan APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat.

## **6. Kapasitas Fiskal Daerah.**

Kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dihadapkan pada kondisi menurun, dimana adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020. Terjadinya penurunan ekonomi seiring dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat telah memberikan dampak terhadap penurunan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu Lain-lain PAD yang sah pada tahun tersebut juga turut mengalami penurunan. Disisi lain keberadaan Dana Perimbangan saat ini sulit untuk prediksi, dimana pada tahun 2020 realisasi dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan, khususnya pada Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pandemi Covid-19 yang telah terjadi dan masih munculnya kasus baru hingga saat ini belum bisa diprediksi kapan berakhir, sehingga disamping permasalahan kesehatan dan ekonomi, kapasitas fiskal juga memerlukan perhatian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mengingat kebutuhan belanja daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dalam setiap tahun mengalami peningkatan, disisi lain tuntutan terhadap kemandirian keuangan daerah saat ini sangat diperlukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya penurunan pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada tahun-tahun yang akan datang.

Untuk memastikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 telah memperhatikan isu dan untuk menjawab isu strategis, maka penting kiranya guna melinierkan isu strategis terhadap misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026. Berikut linieritas isu strategis terhadap misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 4. 9: Isu Strategis terhadap Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026**

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026	Misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026
Pemulihan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi	<b>Misi I</b> Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan
Kesenjangan Sosial	
Kapabilitas Sumber daya manusia yang Unggul dan berkarakter	<b>Misi II</b> Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif
Penguatan Modal Sosial masyarakat	
Kualitas Layanan Publik dan Adaptasi Manajemen Pemerintahan.	<b>Misi III</b> Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis
Kapabilitas Fiskal Daerah.	

# BAB V

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### 5.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah”**

Memahami substansi Visi merupakan bagian dari upaya membangun value yang harus melekat dalam merencanakan pembangunan Kab. Banyuwangi kedepan. *Value* Visi inilah yang akan menghantarkan kita dalam menyusun misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih tepat. Beberapa *value* yang terkandung dalam Visi diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 5.1: Value Visi Pembangunan Kab. Banyuwangi**

Makna dari Visi Pembangunan “Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh tahun terakhir ini

pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dinilai sangat positif oleh masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berbagai macam pencapaian positif dan penghargaan diperoleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Makna **“SEMAKIN”** yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Banyuwangi yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan.

Makna **“Semakin Maju”** dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek kemajuan pembangunan ekonomi, kemajuan pembangunan fisik infrastruktur. Kedua aspek inilah yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pembangunan di Banyuwangi. Selain itu makna maju juga dapat diartikan sebagai bentuk posisi Banyuwangi yang mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) **Pertanian** dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) **Pariwisata**, dalam hal ini wisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) **UMKM**, sebagai wadah dari industri pengolahan dan menjadi sarana penambahan nilai dari hasil pertanian dan diharapkan mampu menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Makna “Semakin maju” secara implisit masuk di Misi pertama **“Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan”** dan didukung pembanguan ekonomi yang maju dengan misi ke empat **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan “**

Sedangkan Makna **“Semakin Sejahtera”** ini merupakan manifestasi kondisi Banyuwangi yang harmonis kehidupan sosial masyarakatnya dan kondusif kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas budaya dan kharakter masyarakat Banyuwangi. Sejahtera dapat pula dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara lahir maupun batin, serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Keadilan berkaitan dengan aspek kesempatan yang sama oleh masyarakat baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat/berpolitik, dan mendapat perlindungan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Makna **“Semakin Sejahtera” secara implisit masuk di Misi kedua “ Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya”** dan misi ketiga **“Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai**

## **Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan”**

Tujuan besar pembangunan yang terkandung pada makna semakin maju dan semakin sejahtera ini adalah pembangunan yang diorientasikan sebesar-besarnya untuk masyarakat Banyuwangi. Artinya, dampak pembangunan di Banyuwangi harus bermuara pada peningkatan kemajuan dan kesejahteraan manusianya. Inilah pengejawantahan dari maksud Bung Karno tentang **“Pembangunan Manusia Seutuhnya”** atau dikenal sebagai *People Centre Development*. Cita-cita besar ini tidak akan terwujud dan tidak akan bermakna jika nilai **“KEBERKAHAN”** tidak menyertai proses pembangunan di Banyuwangi. Maka makna berkah ini dapat diartikan pula sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan/manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, pembangunan yang diberkahi pastilah akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Keberkahan pasti tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral kehidupan sosial, maka pembangunan yang diberkahi pasti berdampak pada meningkatnya nilai kesalehan sosial masyarakat.

### **5.2 Misi**

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 5 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, kelima misi tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan;**
- 2. Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya;**
- 3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan;**
- 4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;**
- 5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.**

Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi

Kepala Daerah menjadi penting. Kerangka pikir tersebut dapat terlihat jelas dalam konstruksi Visi-Misi kepala daerah sebagai berikut:



**Gambar 5.2: Konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah**

Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah diatas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan *clustering* dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.

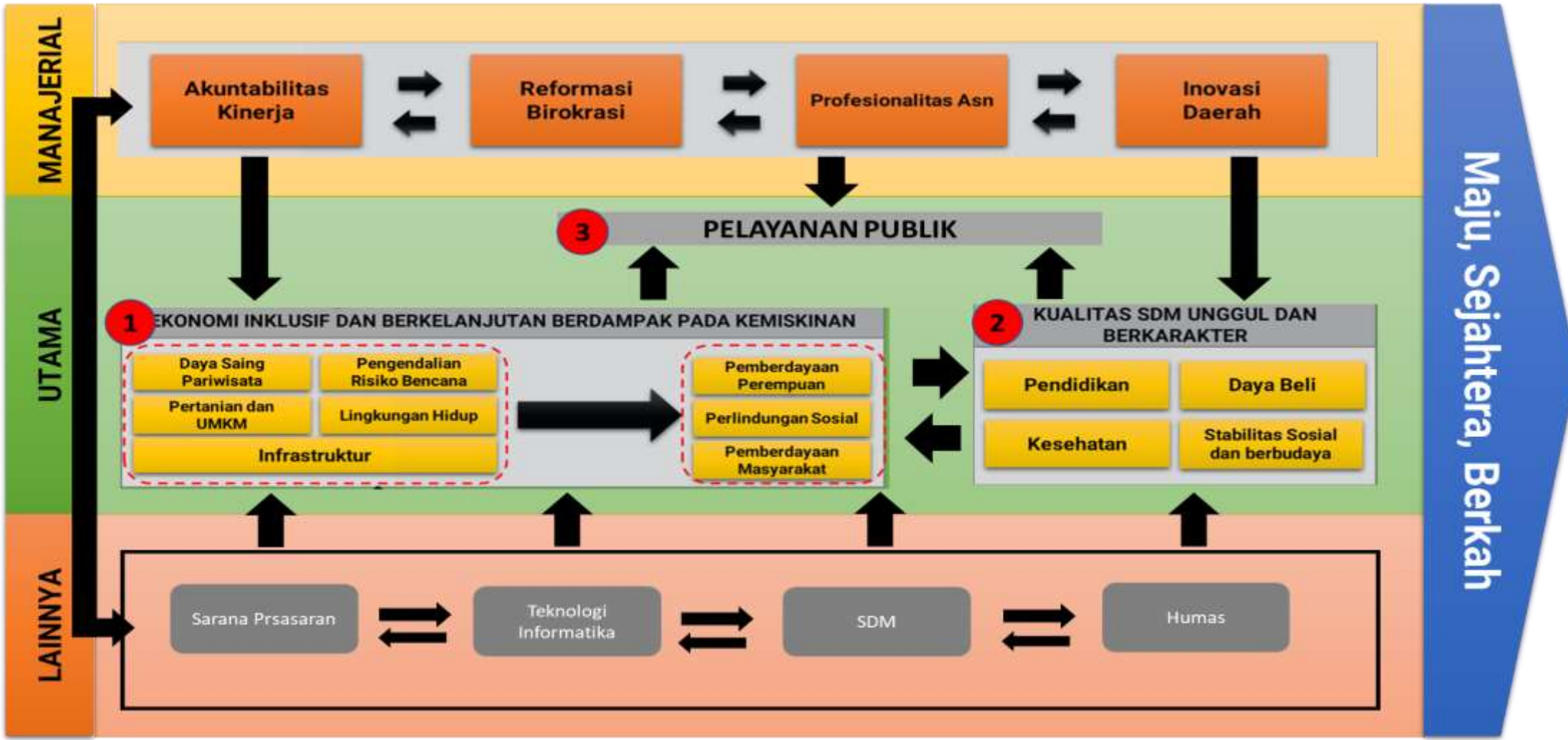


**Gambar 5.3: Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah**

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;**
- 2. Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;**
- 3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.**

Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. *Cascading* pencapaian Misi Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.



Gambar 5.4: Proses Bisnis Pencapaian Visi Pembangunan

## 5.2.1 Misi 1

*“Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;”*

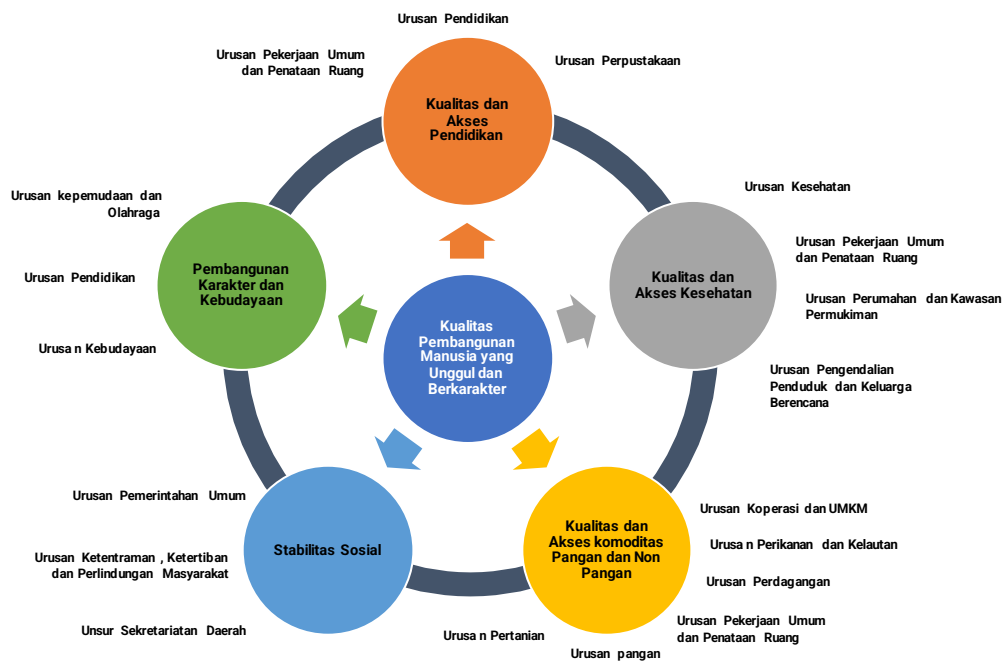


**Gambar 5.5: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1**

Pembangunan inklusif yang dimaksudkan yaitu Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya yang dilaksanakan dalam pembangunan inklusif melalui dukungan pemerataan infrastruktur di segala lini ekonomi yang berpotensi mendorong usaha masyarakat khususnya kelas ekonomi menengah kebawah hal ini diyakini akan mengurangi kesenjangan di masyarakat. penciptaan dorongan pada sektor pariwisata, UMKM dan pertanian melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan perempuan dalam perempuan akan mengurangi kemiskinan. untuk dimensi keberlanjutan perlu keseimbangan lingkungan termasuk pengendalian resiko bencana untuk menghindari keterancaman pada sektor produktif ekonomi masyarakat. Strategi pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai. pelaksanaan ekonom inklusif dan berkelanjutan berdampak pada kemiskinan di laksanakan oleh berbagai urusan yang saling bersinergi dalam mencapai tujuan.

## 5.2.2 Misi 2

*"Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;"*



**Gambar 5.6: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2**

Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Pembangunan sumberdaya manusia tolak ukur ketercapaian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) misi ini berkomitmen dalam penguatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, pertama, adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK. Kedua yaitu tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas tidak dapat bertahan utamanya pendidikan tanpa adanya adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building) serta diperkuat nilai nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat kabupaten Banyuwangi.

### 5.2.3 Misi 3

*Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.*



**Gambar 5.7: Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3**

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis, yang ujungnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Birokrasi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mereformasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat melalui akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, kapasitas ASN, transformasi digital pada layanan publik. Pemerintah Banyuwangi berkomitmen kedepan akan lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintah dengan mempelajari iklim di mana perubahan amat cepat dan ketidakpastian tinggi, pemerintah yang efektif juga mensyaratkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, kemampuan yang membuat institusi pemerintah dapat terus tetap relevan ketika kondisi berubah.

### 5.3 Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah *measurable* yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.



**Gambar 5.8: Linieritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program**

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan *logframe* Kabupaten Banyuwangi. Gambaran *cascading* diatas menunjukkan gambaran pola intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang dan disertai dengan indikator keberhasilan yang melekat didalamnya. Masing masing sasaran terdapat intervensi program prioritas yang merupakan kumpulan dari program program pembangunan daerah terdapat keterlibatan lintas perangkat daerah/ lintas urusan untuk mendorong pencapaian sasaran Pemerintah Daerah. Program prioritas daerah ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang menfokuskan Langkah intervensi tersebut harus lakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Keberadaaan Program Prioritas Daerah (Program Pemda) dalam arsitektur kinerja merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pendekatan *money follow program* yang berorientasi pada pendekatan tematik. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Misi .

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yang di ikuti dengan gambar arsitektur kinerja Banyuwangi dlam bentuk cascading dan proses bisnis pencapaian tujuan pembangunan:

### **5.3.1. Tujuan I: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berdampak Pada Penurunan Kemiskinan**

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1: Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan
- 2) Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga



**Gambar 5.9: Cascading Pencapaian Tujuan 1**

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan sebuah pertumbuhan harus mampu menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan. Pendekatan ekonomi inklusif dalam pembangunan dengan merupakan basis pembangunan ekonomi yang diharapkan akan menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan pendapatan antarkelompok pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta efektif mempercepat penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif dirumuskan sasaran yaitu pertama, meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan. Kedua, meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.

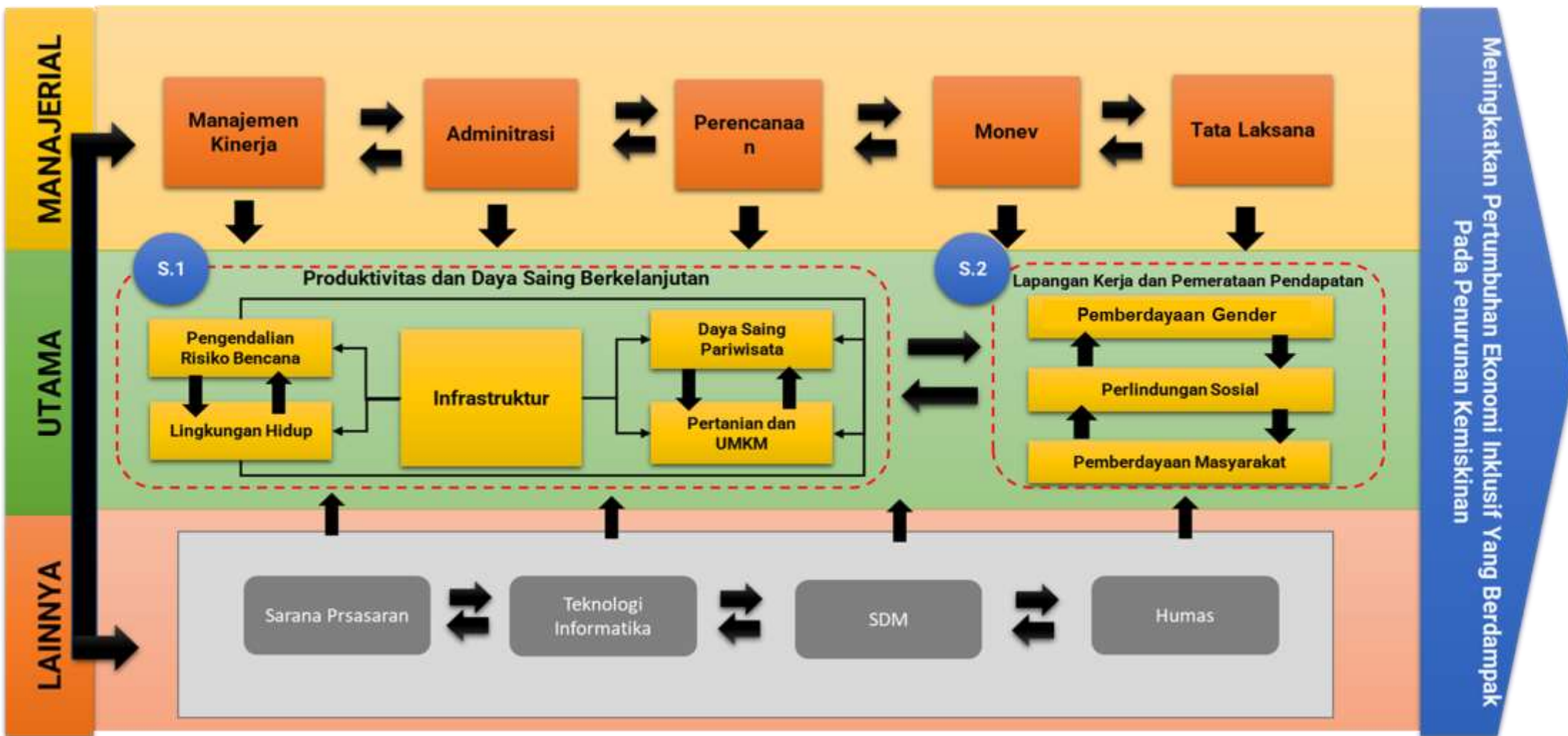
**Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan**, diartikan bahwa produktifitas, daya saing dan berkelanjutan menjadi fokus dari Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas, pariwisata tidak lagi menjadi lokomotif tunggal untuk menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Banyuwangi karena sektor pariwisata sangat rentan terhadap perubahan kondisi eksternal, salah satunya pandemi Covid-19. Dalam 5 tahun ke depan, sektor pertanian dan UMKM tidak hanya sekedar menjadi gerbong yang ditarik oleh lokomotif pariwisata tetapi didorong untuk menjadi

lokomatif utama yang bisa menggerakkan perekonomian Kabupaten Banyuwangi pada saat sektor pariwisata sedang lesu.

Dalam struktur perekonomian Kabupaten Banyuwangi, sektor pertanian terepresentasi pada kategori A lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan sektor UMKM terepresentasi pada kategori C lapangan usaha industri pengolahan dan kategori G lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sehingga indikator PDRB sektor unggulan merupakan kumulatif dari PDRB kategori A, C dan G. Sementara itu untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata difokuskan untuk peningkatan daya saing pariwisata yang diukur dengan indeks daya saing pariwisata.

Dalam membangun potensi unggulan tidak lepas dari pembangunan infrastruktur sebagai konektifitas perputaran perekonomian. Makna berkelanjutan di sasaran artinya bahwa pembangunan ekonomi tetap memperhatikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana agar perekonomian tetap stabil.

**Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.** Masalah kemiskinan menjadi perhatian khusus Kabupaten Banyuwangi untuk di tanggulangi. Kemiskinan di sebabkan karena belum meratanya akses terhadap pendapatan masyarakat. Dalam mengurangi kemiskinan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fokus. Pertama, melalui peningkatan lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, pemberdayaan ekonomi di utamakan di wilayah pedesaan karena sebagian besar kemiskinan berada di wilayah pedesaan. Ketiga, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang miskin absolut artinya secara fisik sudah tidak berdaya. Keempat, peran perempuan dalam aktivitas ekonomi diperlukan untuk keberdayaan dari keluarga serta memberikan perhatian kepada perlindungan perempuan dan anak.



Gambar 5.10: Proses Bisnis Pencapaian Tujuan 1

### 5.3.2. Tujuan II: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2: Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
  1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan
  2. Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya



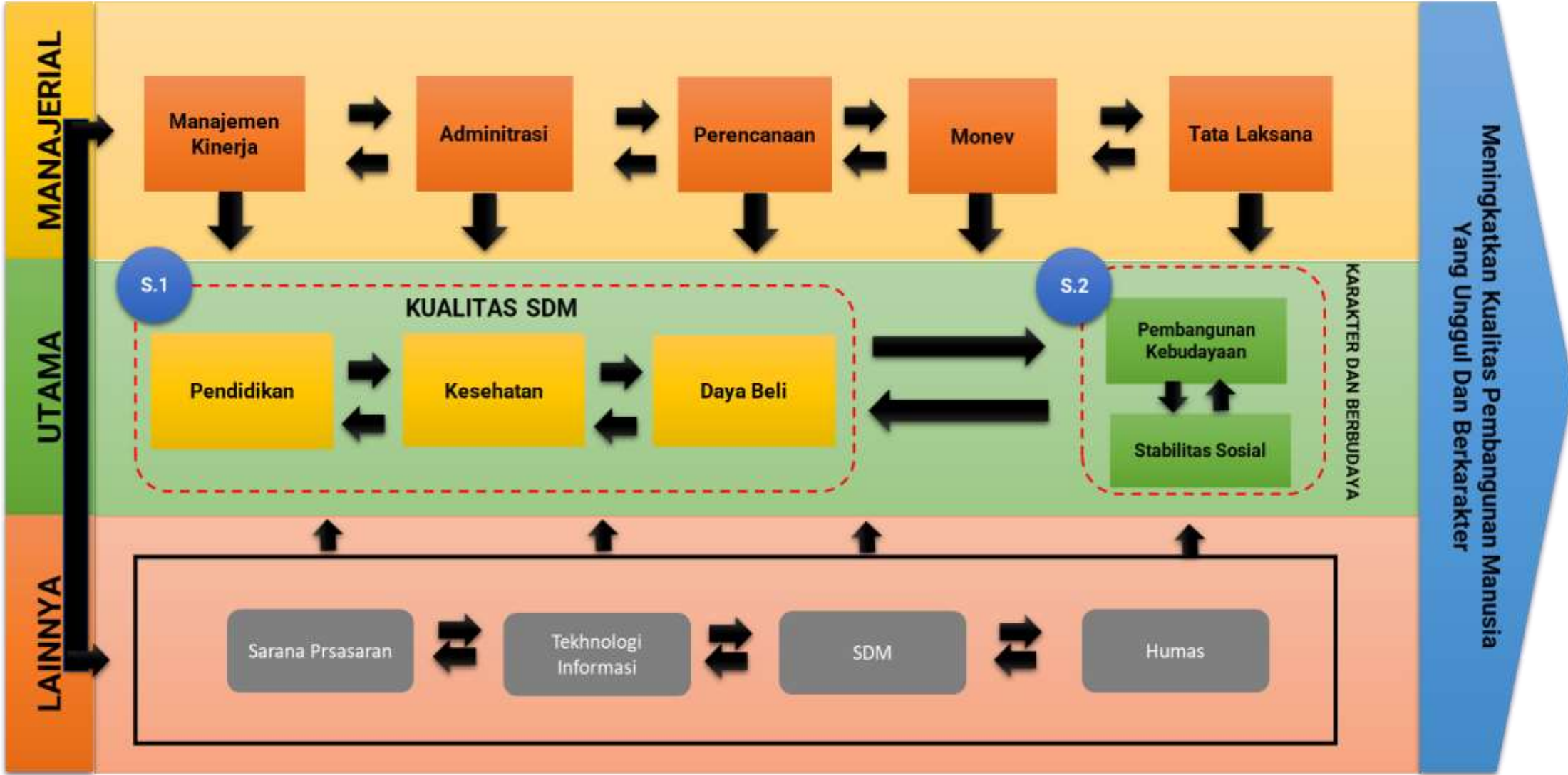
**Gambar 5.11: Cascading Pencapaian Tujuan 2**

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan SDM yang menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, mandiri, kompetitif yang sesuai nilai-nilai moral kehidupan sosial. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan dan kedua, Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.

**Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan**, sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pemerataan kualitas inilah yang masih akan menjadi tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi lima tahun mendatang. Untuk mencapai nilai pembangunan manusia Kabupaten Banyuwangi memberikan upaya pemerataan dan perbaikan kualitas di pendidikan

dan kesehatan, serta memberikan upaya stabilitas harga pangan dan non pangan agar terjangkau masyarakat.

Sasaran kedua, **Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya**. Untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat-istiadat, dan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dalam ketaatan pada berbagai pranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan kedamaian.



Gambar 5.12: Proses Bisnis Pencapaian Tujuan 2

### 5.3.3. Tujuan III : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

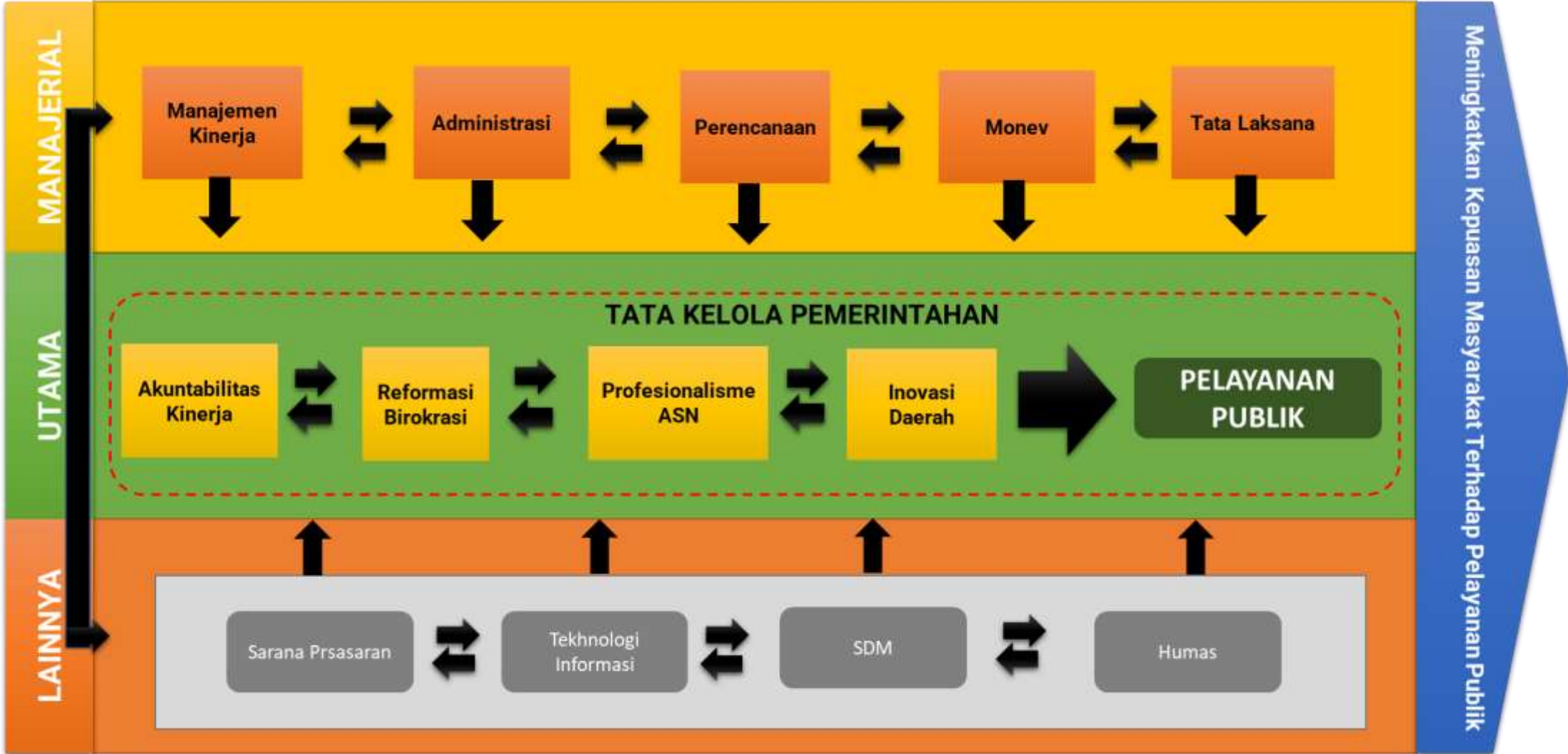
- a. **Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik**, dengan sasaran pembangunan yaitu
  1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.



**Gambar 5.13: Cascading Pencapaian Tujuan 3**

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Sasaran dari misi ketiga yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa** yang artinya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan kedepan focus pada 3 area: pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan kabupaten sampai di tingkat pemerintahan desa, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik.



Gambar 5.14: Proses Bisnis Pencapaian Tujuan 3

Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari level pemerintah daerah hingga level perangkat daerah, maka arsitektur pembangunan seperti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan di breakdown secara menyeluruh pada level perencanaan perangkat daerah. Cascading yang dibangun pada perangkat daerah sekurang-kurangnya merujuk pada cascading yang ada di RPJMD ini. Demikian juga peta proses bisnis pada level berikutnya (level ke-n) yang berada pada perangkat daerah sekurang-kurangnya harus merujuk pada proses bisnis yang telah digambarkan dalam RPJMD ini.

**Tabel 5. 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah  
Kabupaten Banyuwangi**

**VISI : “TERWUJUDNYA BANYUWANGI YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKAH”**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;</b>	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>		<b>-3.58</b>	<b>4,27</b>	<b>4,54</b>	<b>4,81</b>	<b>5,07</b>	<b>5,34</b>	<b>5,34</b>
		Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Pariwisata	n/a	3	3	3	3	3	3
			Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	-3,5	2,99	3,26	3,57	3,88	4,19	4,19
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	n/a	79,58	81,16	82,74	84,32	85,9	85,9
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.66	71,14	71,19	71,23	71,28	71,32	71,32
			Indeks Resiko Bencana	137,16	130,59	127,38	124,22	121,11	118,05	118,05
		<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>		<b>8.06</b>	<b>7,58</b>	<b>7,49</b>	<b>7,32</b>	<b>7,26</b>	<b>7,01</b>	<b>7,01</b>
		Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34	5,00	4,84	4,68	4,53	4,38	4,38
			Gini Ratio	0,32	0,32	0,31	0,31	0,3	0,3	0,3
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,41	75,66	76,80	77,95	79,13	80,32	80,32
<b>Membangun SDM Unggul berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;</b>	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>70.62</b>	<b>71.02</b>	<b>71.27</b>	<b>71.75</b>	<b>72.17</b>	<b>72.59</b>	<b>72.59</b>
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	Indeks Pengeluaran	0,76	0,77	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79
			Indeks Pendidikan	0,59	0,60	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62
		Indeks Kesehatan	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	
Meningkatnya Stabilitas Sosial	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	n/a	63	64,5	66	67,5	69	69		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Masyarakat yang berkarakter dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	n/a	56.60	57.80	60	61.15	61.18	61.18
<b>Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis;</b>	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>87.03</b>	<b>90,1</b>	<b>90,62</b>	<b>91,33</b>	<b>91,7</b>	<b>92,01</b>	<b>92,01</b>
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	Nilai SAKIP	83,1	84,1	84,6	85,1	85,6	86,1	86,1
			Indeks Reformasi Birokrasi	77	79	80	81	82	83	83
			Indeks Profesionalisme Aparatur	75,91	78,71	80,01	81,31	82,61	83,89	83,89
		Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	



# BAB VI

## STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut.

### 6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design perencanaan* pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perumusan strategi hasil analisis SWOT, SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan permasalahan dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Setelah melalui proses penilaian dirumuskan strategi terpilih seperti dijelaskan:

**ST.1 Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan**

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian dari strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menunjang pembangunan di sektor ekonomi. Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah yang mencapai 5.782,50 Km<sup>2</sup> memerlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata sebagai roda penggerak pengembangan sektor unggulan, dimana Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai potensi di sektor Pariwisata, UMKM, dan Pertanian yang harus terus dikembangkan.

Pariwisata saat ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan sektor pariwisata sangat terkait dan bergantung pada perkembangan infrastruktur yang tersedia. Peran infrastruktur menjadi sangat penting, karena dengan pengembangan infrastruktur dan sistem infrastruktur yang tersedia akan dapat mendukung perkembangan sektor tersebut, dimana kemudahan akses maupun ketersediaan sarana dan prasarana akan mendorong masyarakat Kabupaten Banyuwangi maupun dari luar daerah untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi. Apalagi Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu wilayah pengembangan di Provinsi Jawa

Timur yang termasuk dalam Kawasan Selingkar Ijen sebagai Pendukung Kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019, pada sektor pariwisata potensi geopark yang sudah ada di Kabupaten Banyuwangi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru berbasis geologi dengan didukung oleh berbagai sarana dan prasarana. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kawasan pendukung sektor perekonomian di bidang infrastruktur dan industri di Kabupaten Banyuwangi berpotensi untuk dikembangkan sebagai program pemerataan pembangunan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Untuk itu dibidang pariwisata diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis, disamping dilakukan pendampingan kepada pelaku pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata Kabupaten Banyuwangi pasca Pandemi Covid-19.

Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi mampu mendorong pengembangan pariwisata diharapkan juga turut mendukung berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha. Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan produk (barang dan jasa) dapat dipasarkan dari Kabupaten Banyuwangi menuju daerah lain di Indonesia atau luar negeri, sehingga dengan demikian turut meningkatkan akses pasar dari produk-produk yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi. Apalagi Kabupaten Banyuwangi memiliki berbagai komoditas dengan hasil produksi tertinggi di Sektor Agropolitan, seperti: jeruk siam, buah naga, jagung, kedelai, kopi, dan padi ladang yang dapat dikembangkan. Keberadaan infrastruktur juga merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung proses produksi dari sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan dan industri (UMKM). Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, serta mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu diperlukan pengembangan konektivitas perhubungan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, peningkatan infrastuktur irigasi dan embung dalam mendukung ketersediaan air bersih khususnya di kawasan pedesaan, maupun peningkatan kualitas jalan. Selain itu, untuk menunjang berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian perlu adanya penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro, peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang; pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional; penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan; penguatan kelembagaan kelompok petani dan nelayan; serta pemberian bantuan stimulan asuransi gagal panen.

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, serta meningkatnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang ditunjang dengan adanya perkembangan investasi akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Sehingga dengan demikian jumlah tenaga kerja lokal yang terserap

akan semakin banyak dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banyuwangi akan semakin menurun.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperlukan adanya keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan, dimana dari aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat dipastikan tidak memiliki dampak/ merusak kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan di bidang ekonomi perlu dibarengi dengan pembangunan sektor lingkungan, agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, tingkat risiko terhadap bencana juga turut diperhatikan. Jangan sampai dengan meningkatnya pembangunan ekonomi justru menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan hidup dan menimbulkan terjadinya bencana, atau bahkan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan akan sia-sia dengan hadirnya bencana tanpa adanya pertimbangan terhadap tingkat risiko dari bencana tersebut. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan mitigasi dan pengendalian terhadap bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi diperlukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon; diperlukan pengelolaan persampahan bersama dengan masyarakat, serta diperlukan adanya pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi:

- Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
- Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan
- Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan
- penguatan pengenalan konsumsi perikanan tangkap maupun budidaya lokal
- peningkatan infrastruktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan
- penyediaan sistem penyediaan air bersih di kawasan pedesaan
- peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat
- Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis
- Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri
- Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor

- Peningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
- Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf
- Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Lokal Pasca Pandemi Covid-19
- Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang
- Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
- pengelolaan persampahan bersama masyarakat
- Membangun konektivitas perhubungan
- Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana

**ST. 2 Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum.**

Peningkatan kesejahteraan keluarga di desa dapat dilakukan dari berbagai sisi pada konteks ekonomi. Salah satunya dengan penyediaan lapangan kerja melalui proyek padat karya sehingga dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Hal tersebut dapat disokong dengan adanya pelatihan pada angkatan kerja guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM mengenai ekonomi berbasis teknologi dan digital yang akan berdampak pada peningkatan daya saing pada kebutuhan industry saat ini serta pengembangan klaster industry yang lebih luas.

Titik utama peningkatan kesejahteraan juga dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan yang dapat dilakukan dengan pengembangan wirausaha maupun penumbuhan wirausaha baru. Adanya bantuan usaha yang tepat sasaran serta pengembangan peningkatan iklim wirausaha yang simultan dirasa dapat menjadi strategi yang tepat. Sedangkan penumbuhan wirausaha baru dilakukan dengan peningkatan iklim wirausaha yakni melalui program inkubasi bisnis pada pengusaha muda baru di Banyuwangi yang dapat menjajdi skema pemulihan ekonomi daerah. Penumbuhan wirausaha baru didukung dengan adanya bantuan usaha dan logistic melalui program bagi alat usaha gratis untuk warga. dan program Gerakan ekonomi rakyat bantu warung yang memberikan bantuan untuk mendorong warung lebih berdaya.

Pemulihan ekonomi haruslah disokong oleh berbagai pihak, mulai dari setiap individu termasuk perempuan perlu diberdayakan untuk memiliki akses pendapatan

guna menyokong ketahanan ekonomi keluarga. Perempuan diberdayakan dengan diberikan akses pendidikan, bantuan modal usaha serta perlindungan hukum mengingat angka kekerasan perempuan yang tinggi pada Kabupaten Banyuwangi. Perempuan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Selain pada sisi individu, peningkatan kesejahteraan keluarga di desa juga perlu disokong oleh pemerintah desa melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga perekonomian dan penyelenggaraan BUMDes dengan memanfaatkan potensi yang ada meliputi pariwisata, pertanian dan UMKM. Beberapa program difokuskan pada hal tersebut yakni meliputi peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan yang inklusif dan terintegrasi, peningkatan kelas UMKM, serta mendorong masyarakat untuk mensupport produk-produk UMKM.

- Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar.
- Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja.
- Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi.
- Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM.
- Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak
- Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran.

**ST 3 Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.**

Strategi menciptakan SDM unggul dan berdaya saing tentunya memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi dengan tujuan yakni “Menciptakan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter” kemudian tujuan pembangunan SDM tersebut diturunkan kedalam saran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan”.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa strategi pembangunan SDM merupakan *tools* untuk terciptanya SDM yang unggul dan berakarakter, dimana representasi SDM unggul dan berakarakter di Kabupaten Banyuwangi ialah SDM yang mana dapat memiliki akses dan kualitas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan komoditas pangan dan non pangannya. Untuk mencapai hal tersebut Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi menetapkan poin-poin penting strategi pengembangan SDM yakni pendidikan dasar yang terjangkau hingga pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotive kesehatan, dan stabilisasi harga pangan guna menjangkau daya beli masyarakat. Harapannya dengan demikian akan terciptanya tujuan pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, strategi kemudian akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan. Arah kebijakan pembangunan disusun lebih konkrit yang sekaligus memberikan arahan dan panduan agar strategi dapat berjalan lebih optimal. Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi:

- Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting
- peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai agama, etika, dan budaya lokal serta mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja
- Peningkatan dukungan kerjasama perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan
- Keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau masyarakat desa
- Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif,
- Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang menjangkau seluruh desa
- Penguatan Desa dalam menghadapi penyakit menular
- Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Penguatan literasi berbasis digital

#### **ST 4 Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah**

Strategi menciptakan penguatan modal sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi tentunya memperhatikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan modal sosial yang dibangun dilandaskan dalam ruang lingkup masyarakat yang berkarakter dan berbudaya. Modal sosial yang kondusif tentunya menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Modal sosial yang kuat akan meningkatkan semangat gotong-royong, meningkatkan produktivitas, mengurangi kriminalitas, serta dapat mendorong setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu keberagaman sosial budaya Kabupaten Banyuwangi juga merupakan modal berharga, khususnya Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan

pariwisata budaya sebagai prioritas daerah. Masyarakat yang berbudaya akan menciptakan daya tarik pariwisata tersendiri di Kabupaten Banyuwangi.

Modal sosial tidak hanya tentang hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, pembangunan modal sosial di Kabupaten Banyuwangi juga dibangun antara hubungan masyarakat dengan pemerintah. Menjaga harmonisasi hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif, sehingga masyarakat mau dan mampu untuk berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Sejalan dengan uraian diatas, berikut merupakan arah kebijakan pembangunan modal sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi:

- fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas
- Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan siswa atas budaya lokal
- penegakan perda dengan edukasi masyarakat

#### **ST 5 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah**

Pemerintahan yang dinamis dan adaptif artinya memeberikan perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya. pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat.

Masyarakat sebagai customer yang harus dilayani menuntut pelayanan prima, cepat, dan tanggap. Dalam pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus beradaptasi dengan tuntutan agile birokrasi atau birokrasi yang tangkas. Media peningkatan kualitas layanan bisa dilakukan dengan digitalisasi layanan publik dan menempatkannya dekat dengan masyarakat dan lebih efektif dan efisien. Termasuk bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu merespon secara cepat keluhan-keluhan dari masyarakat. Hal tersebut tidak akan terwujud tanpa berbasis aplikasi serta mendukung seluruh aktivitas pelayanan kepada masyarakat sampai desa.

Optimalisasi Pendapatan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur keuangan daerah, karena merupakan salah satu tolok ukur/ indikator kemampuan dan cermin dari kemandirian daerah. Penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dianggap sebagai

hambatan dan harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Untuk itu pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu ditingkatkan dan dilakukan secara efektif dan efisien. Disisi lain, penyediaan alternatif pembiayaan pembangunan daerah perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah sebagai terobosan dalam memperbanyak sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu wujud peningkatan pendapatan asli daerah melalui revitalisasi peran BUMD dan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Berikut merupakan arah kebijakan dalam pembangunan manajemen pemerintahan dan layanan publik Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa
- Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis e-government
- Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif
- Peningkatan Infratastruktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik
- Penguatan data-data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan
- Optimalisasi fungsi BUMD dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah
- Inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

**Tabel 6. 1. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2021-2026**

<b>Visi: Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera, dan Berkah</b>		
<b>Misi I: Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
T1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	S1.1 Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	ST.1 Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertai penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan
	S1.2 Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	ST. 2 Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>Misi II: Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif</b>		
T.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter	S2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	ST 3Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.
	S2.2 Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	ST 4 Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi III: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis;</b>		
T.3 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	S.3.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	ST 5 Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

## 6.2 Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, permasalahan, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Arah kebijakan menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan yang bertujuan secara lebih operasional dalam pencapaian sasaran pembangunan.

**Tabel 6. 2. Pemetaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi**

Strategi	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun infrastruktur tematik untuk pengembangan pariwisata yang diikuti dengan berkembangnya produktivitas sektor UMKM dan Pertanian yang disertain penguatan investasi, akses pasar dan pendampingan pelaku usaha yang mampu menyerap tenaga kerja	Bantuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan						
	Penguatan Kelembagaan kelompok petani dan nelayan dalam meningkatkan manajemen pengelolaan						
	Bantuan stimulan asuransi gagal panen pada petani dan nelayan						
	penguatan pengenalan konsumsi perikanan						

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
lokal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan	tangkap maupun budidaya lokal						
	peningkatan infrastuktur irigasi dan embung untuk menanggulangi debit air dan kekeringan						
	penyediaan sistem penyediaan air bersih di kawasan pedesaan						
	peningkatan kualitas jalan penunjang perekonomian masyarakat						
	Percepatan infrastruktur tematik dan fasilitas publik pendukung kawasan pariwisata strategis						
	Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri						
	Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor						
	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional						
	Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata dan ekraf						
	Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten						

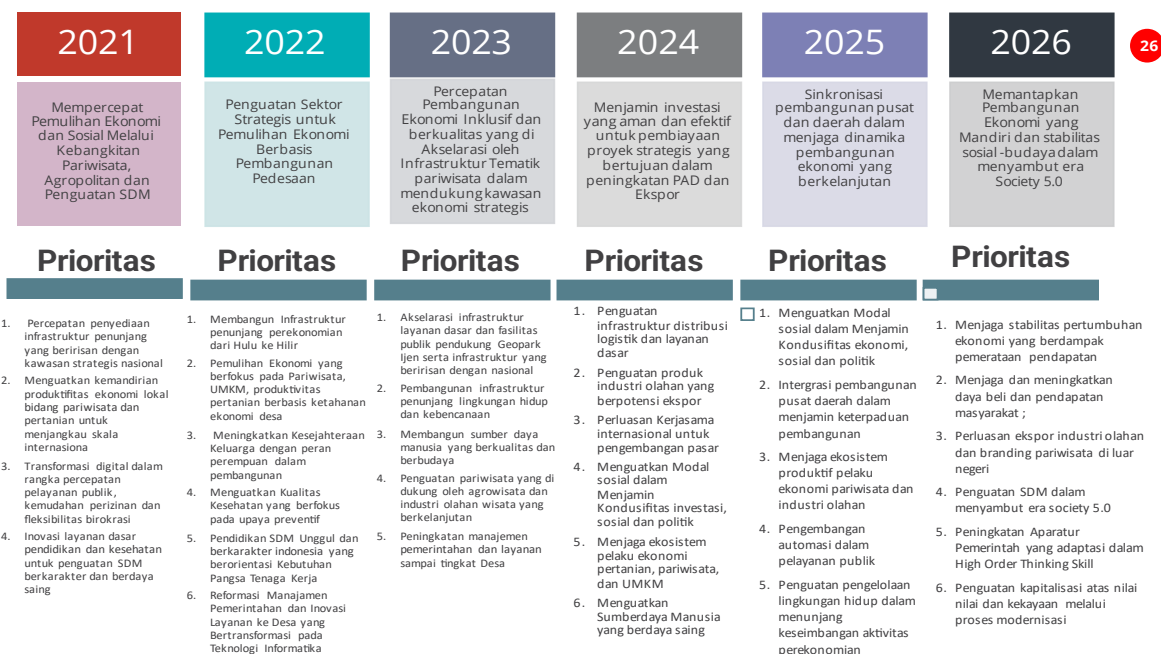
Strategi	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Banyuwangi Lokal Pasca Pandemi Covid-19						
	Pengendalian alih fungsi lahan produktif dan rehabilitasi lahan kritis guna meningkatkan kualitas penataan ruang						
	Mengurangi pencemaran air dan reduksi emisi karbon dengan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup						
	pengelolaan persampahan bersama masyarakat						
	Membangun konektivitas perhubungan						
	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana						
	Meningkatkan Kesejahteraan keluarga di Desa melalui penyediaan lapangan kerja yang padat karya dan bantuan permodalan wirausaha dengan memperhatikan peran perempuan dalam keberpihakan akses pendapatan dan perlindungan hukum	Peningkatan Kapasitas dan kompetensi angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar					
Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk menyerap tenaga kerja							
Pelaksanaan inkubasi bisnis penciptaan pengusaha muda baru sebagai skema pemulihan ekonomi							
Pengembangan ekonomi desa dengan kemitraan dan BUMDes yang berfokus pada pariwisata, pertanian dan UMKM							

Strategi	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan ketahanan keluarga melalui kesempatan pendidikan dan usaha bagi perempuan serta bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak						
	Peningkatan bantuan usaha dan logistik bagi PMKS yang tepat sasaran						
Menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing yang berfokus pada keterjangkauan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, peningkatan preventif dan promotif dalam kesehatan, serta kestabilan harga pangan untuk keterjangkauan daya beli masyarakat.	Peningkatan ketersediaan ,akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting						
	peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan nilai nilai agama, etika, dan budaya lokal serta mendukung kebutuhan pasar tenaga kerja						
	Peningkatan Dukungan Kerjasama perguruan tinggi dan pendidikan kejuruan						
	keberpihakan beasiswa lanjut yang dapat menjangkau masyarakat desa						
	Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif,						
	Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang menjangkau seluruh desa						

Strategi	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Penguatan Desa dalam menghadapi penyakit menular						
	Peningkatan kesejahteraan, Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
	Penguatan literasi berbasis digital						
Penguatan Modal Sosial yang meletakkan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi, serta menjaga kondusifitas daerah	Peningkatan modal sosial dengan fasilitasi forum keagamaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas						
	Peningkatan insentif, pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal, serta penguatan minat budaya untuk pariwisata dan ketertarikan siswa atas budaya lokal						
	penegakan perda dengan edukasi masyarakat						
Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan sampai desa yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.	Permudah dan percepat pelayanan perijinan usaha dan kependudukan sampai ke tingkat desa						
	Optimalisasi fungsi BUMD dalam peningkatan Kapasitas fiskal daerah						
	Inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah						
	Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan						

Strategi	Arah Kebijakan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	akuntabel berbasis e-government						
	Penguatan aparatur pemerintah yang profesional dan adaptif						
	Peningkatan Infrastuktur teknologi informatika yang menunjang pelayanan publik						
	Penguatan data data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah						

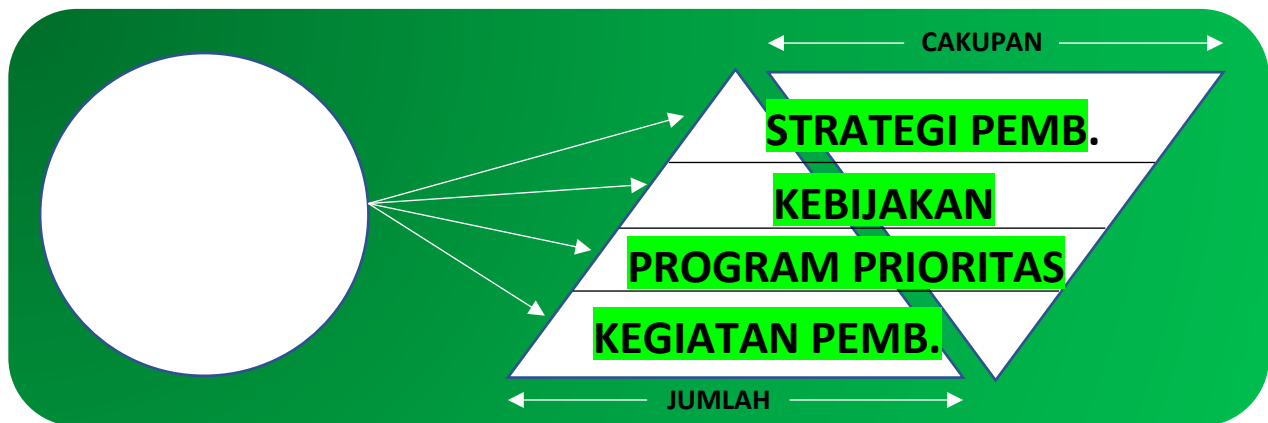
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema dan prioritas Daerah pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan arahan yang mengacu dari tema pembangunan tahap keempat pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi dan tema dan prioritas daerah dijadikan acuan scenario tahunan pada RKPd, maka tema pembangunan Tahun 2021-2026 disajikan pada Gambar 6.1 berikut ini.



**Gambar 6. 1. Tema Pembangunan dan Prioritas Lima Tahunan Kabupaten Banyuwangi**

### 6.3 Program Pembangunan Daerah

Langkah selanjutnya menselaraskan antara janji politik dengan program prioritas, serta dengan mensinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi atau kebijakan ataupun kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Jika bunyi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi. Pernyataan ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



**Gambar 6. 2. Definisi janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih**

Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 menterjemahkan Visi dan Misinya melalui program dan janji politisnya sebagai berikut:

**Tabel 6. 3. Integrasi Janji Politis dengan Program Nomenklatur**

<b>Janji Politis</b>	<b>Program Prioritas Daerah</b>	<b>Sinkronisasi Program PMDN 90</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
Banyuwangi Membangun	Percepatan Pemerataan Infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,
		Program Penyelenggaraan Jalan	Perumahan dan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	
		Program pengelolaan persampahan	
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dinas Damkar
Program Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan		

<b>Janji Politis</b>	<b>Program Prioritas Daerah</b>	<b>Sinkronisasi Program PMDN 90</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
			dan Permukiman
Banyuwangi Bekerja	Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan

<b>Janji Politis</b>	<b>Program Prioritas Daerah</b>	<b>Sinkronisasi Program PMDN 90</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
	Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 dan Pembukaan Lapangan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program perencanaan dan pembangunan industri	
		Program Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Banyuwangi Keluarga Berdaya	Perlindungan Perempuan, Anak, Difabel dan Kelompok Marginal	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

<b>Janji Politis</b>	<b>Program Prioritas Daerah</b>	<b>Sinkronisasi Program PMDN 90</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
Banyuwangi Sehat	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan yang berorientasi pada preventif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
Banyuwangi Cerdas Berkarakt er	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pengembangan Kurikulum	
		Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Banyuwangi Berkah dan Peduli	Menjaga Stabilitas Sosial, Keagamaan dan Kerukunan Warga	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

<b>Janji Politis</b>	<b>Program Prioritas Daerah</b>	<b>Sinkronisasi Program PMDN 90</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Satpol PP
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Banyuwangi Melayani	Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	BKPP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat Daerah
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	

<b>Janji Politis</b>	<b>Program Prioritas Daerah</b>	<b>Sinkronisasi Program PMDN 90</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	dan Persandian
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

**Tabel 6. 4. Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	<b>Misi 1: Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;</b>																
	<b>Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan</b>																
		<b>1. Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	-3,58	4,27	220.989,71	4,54	292.934,06	4,81	293.169,25	5,07	289.005,45	5,34	284.428,05			
	<b>Sasaran 1: Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan</b>																
		<b>Indeks Daya Saing Pariwisata</b>	<b>Indeks</b>	<b>n/a</b>	<b>3</b>	<b>709,00</b>	<b>3</b>	<b>8.490,19</b>	<b>3</b>	<b>8.539,81</b>	<b>3</b>	<b>8.591,73</b>	<b>3</b>	<b>8.646,07</b>			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	2,2	635,00	2,3	4.657,59	2,4	4.684,81	2,5	4.713,30	2,6	4.743,11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-72,94	1,10	64,00	1,15	1.836,48	1,20	1.847,22	1,25	1.858,45	1,30	1.870,20	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-43,9	5,0		5,2		5,4		5,6		5,8		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif	%	11,76	23,52	10,00	29,41	1.996,11	35,29	2.007,78	41,17	2.019,98	47,05	2.032,76	
				<b>Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan</b>	%	<b>-3,5</b>	<b>2,99</b>	<b>38.685,44</b>	<b>3,26</b>	<b>30.552,46</b>	<b>3,57</b>	<b>30.731,02</b>	<b>3,88</b>	<b>30.917,86</b>	<b>4,19</b>	<b>31.113,40</b>	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi	%	0	2,87	197,52	3,91	394,97	4,84	397,28	5,64	399,69	6,31	402,22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		LATIHAN PERKOPERASIAN														dan Perdagangan	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	26,34	40	87,83	50	247,22	60	248,66	70	250,18	80	251,76	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas	%	8,32	15	11.491,79	20	1.788,77	25	1.799,22	30	1.810,16	35	1.821,61	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	%	5	6	25,00	7	38,85	7,5	39,08	8	39,31	8,5	39,56	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	ton	20.447	21.674	574,39	22.324	2.754,73	22.994	2.770,82	23.684	2.787,67	24.394	2.805,30	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	ton	27.677	29.936	1.098,68	31.133	1.691,68	32.378	1.701,57	33.674	1.711,92	35.021	1.722,74	Dinas Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan UMK	%	0	4,5	336,56	4,6	1.236,09	4,7	1.243,32	4,8	1.250,88	4,9	1.258,79	Dinas Perikanan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi Tanaman pangan	%	0,5	0,49	4.174,54	0,50	11.953,03	0,51	12.022,89	0,52	12.095,99	0,53	12.172,49	Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase peningkatan produksi Tanaman perkebunan dan hortikultura	%	3	3,70		3,75		3,80		3,85		3,90		
				Rata-rata Persentase peningkatan produksi Peternakan	%	2	2		2		2,1		2,1		2,1		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	%	100	100	16.943,64	100	5.781,39	100	5.815,18	100	5.850,53	100	5.887,54	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura	%	100	100		100		100						
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	%	100	100		100		100						
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	100	100		100		100						
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	100	100	760,41	100	197,04	100	198,19	100	199,40	100	200,66	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	2.745,09	100	2.588,74	100	2.603,86	100	2.619,70	100	2.636,26	Dinas Pertanian dan Pangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	%	50	59,09	250,00	68,18	1.879,96	77,27	1.890,95	86,36	1.902,44	95,45	1.914,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)</b>	<b>Indeks</b>	<b>n/a</b>	<b>79,58</b>	<b>173.754,01</b>	<b>81,16</b>	<b>232.663,66</b>	<b>82,74</b>	<b>232.546,61</b>	<b>84,32</b>	<b>228.014,24</b>	<b>85,9</b>	<b>223.051,09</b>	
1	3	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	62	65	69	73	77	80				
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	%	56	60	63	66	69	72				
							30.899,72					65.545,43		59.554,73	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1	3	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sehari-hari	%	86	88	89	90	91	92				
							665,63					7.505,27		7.552,73	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1	3	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	82,45	90	92,5	95	97,5	100				
				Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	%	64,68	65	66	67	68	69				
							2.566,98					33.409,16		33.620,46	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	74,45	76,45	78,45	80,45	82,45	84,45				
							135.653,69					107.848,33		108.530,43	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	20	25	45,00	33,33	1.412,68	41,66	1.420,94	49,99	1.429,57	58,32	1.438,62	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	%	87%	100	3.922,98	100	12.131,39	100	12.202,28	100	12.276,47	100	12.354,12	Dinas Perhubungan
				Persentase layanan angkutan darat	%	72%	75		100		100						
				<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>Indeks</b>	<b>68.66</b>	<b>71,14</b>	<b>7.409,62</b>	<b>71,19</b>	<b>13.101,31</b>	<b>71,23</b>	<b>13.177,88</b>	<b>71,28</b>	<b>13.258,00</b>	<b>71,32</b>	<b>13.341,85</b>	
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	59,17	60,05	309,00	60,11	1.411,39	60,16	1.419,64	60,22	1.428,27	60,27	1.437,30	Dinas Lingkungan Hidup
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,23	86,61		86,67		86,72		86,78		86,83		
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	Indeks	61,59	61,59	10,00	61,59	988,88	61,59	994,65	61,59	1.000,70	61,59	1.007,03	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	61	61,06	7.090,62	61,12	10.701,05	61,18	10.763,59	61,24	10.829,03	61,31	10.897,52	Dinas Lingkungan Hidup
				<b>Indeks Resiko Bencana</b>	<b>Indeks</b>	<b>137,16</b>	<b>130,59</b>	<b>431,64</b>	<b>127,38</b>	<b>8.126,44</b>	<b>124,22</b>	<b>8.173,93</b>	<b>121,11</b>	<b>8.223,63</b>	<b>118,05</b>	<b>8.275,64</b>	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	85	100	349,89	100	4.389,90	100	4.415,56	100	4.442,40	100	4.470,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	90	100		100		100		100				
				Persentase penanganan pasca bencana	%	27	30		45		55		70		80		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	81,75	15	3.736,54	15	3.758,37	15	3.781,23	15	3.805,14	Dinas Pemadam Kebakaran
				<b>2. Persentase Penduduk Miskin</b>	%	<b>8,06</b>	<b>7,58</b>	<b>4.334,19</b>	<b>7,49</b>	<b>11.921,59</b>	<b>7,32</b>	<b>14.197,67</b>	<b>7,26</b>	<b>15.164,86</b>	<b>7,01</b>	<b>25.930,90</b>	
			<b>Sasaran 2: Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga</b>														
				<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%	<b>5,34</b>	<b>5</b>	<b>3.150,06</b>	<b>4,84</b>	<b>8.942,26</b>	<b>4,68</b>	<b>8.994,52</b>	<b>4,53</b>	<b>9.049,21</b>	<b>4,38</b>	<b>9.106,44</b>	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,78	0,93	368,76	1,02	370,83	1,11	373,00	1,21	375,26	1,32	377,64	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	65,6	70,75	100,61	73,47	678,09	76,29	682,05	79,23	686,20	82,28	690,54	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	%	N/A	0,57	2.501,50	0,58	3.867,21	0,59	3.889,81	0,6	3.913,46	0,61	3.938,21	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	%	-6,78	1,2		1,26		1,3		1,34		1,38		Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN	%	50	75	179,20	80	4.026,14	85	4.049,67	90	4.074,29	95	4.100,06	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		yang ditetapkan dalam RPIK															
		Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%	70	70		75		80		85		90				
		<b>Gini Ratio</b>	<b>Rasio</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>818,82</b>	<b>0,31</b>	<b>2.417,09</b>	<b>0,31</b>	<b>2.431,22</b>	<b>0,3</b>	<b>2.446,00</b>	<b>0,3</b>	<b>2.461,47</b>			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	%	55,6	36,7	427,46	37	1.168,99	38	1.175,82	39	1.182,97	40	1.190,45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial	%	53,8	11,8	99,77	11,9	474,66	12	477,43	12	480,34	12	483,38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	%	n/a	5	291,58	6	773,44	7	777,96	8	782,69	9	787,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terafiliasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	%	60	65		70		75		80		85		
				<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>	<b>Indeks</b>	<b>74,41</b>	<b>75,66</b>	<b>365,30</b>	<b>76,80</b>	<b>562,23</b>	<b>77,95</b>	<b>2.771,93</b>	<b>79,13</b>	<b>3.669,65</b>	<b>80,32</b>	<b>14.362,98</b>	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%	84	77	45,00	80	240,16	83	241,56	85	243,03	87	244,56	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelompok perempuan berdaya	%	66,6	20	45,68	25	45,91	30	2.252,59	35	3.147,15	40	13.837,18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian kasus terhadap anak	%	n/a	77	274,62	80	276,16	83	277,78	85	279,47	87	281,23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
<b>Misi 2: Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;</b>																	
			<b>Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter</b>	<b>3. Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Indeks</b>	<b>70,62</b>	<b>71,02</b>	<b>269.639,27</b>	<b>71,27</b>	<b>240.906,46</b>	<b>71,75</b>	<b>242.314,36</b>	<b>72,17</b>	<b>243.787,62</b>	<b>72,59</b>	<b>245.329,48</b>	
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan</b>																	
				<b>Indeks Pengeluaran</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,76</b>	<b>0,77</b>	<b>864,62</b>	<b>0,78</b>	<b>971,22</b>	<b>0,78</b>	<b>976,89</b>	<b>0,79</b>	<b>982,83</b>	<b>0,79</b>	<b>989,05</b>	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	angka	95	95,2	649,71	95,4	653,36	95,6	657,18	95,8	661,18	96	665,36	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	86	86	70,24	87	70,63	88	71,05	89	71,48	90	71,93	
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%	5,5	5,3	144,67	5,2	247,22	5,1	248,66	5,0	250,18	4,9	251,76	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	DAN BARANG PENTING																
		<b>Indeks Pendidikan</b>	%	<b>0,59</b>	<b>0,6</b>	<b>170.315,79</b>	<b>0,61</b>	<b>230.690,06</b>	<b>0,62</b>	<b>232.038,26</b>	<b>0,62</b>	<b>233.449,04</b>	<b>0,62</b>	<b>234.925,51</b>			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	66,06	85	169.164,49	95	215.551,08	100	216.810,80	100	218.129,00	100	219.508,58	Dinas Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	0	100		100		100		100				
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	0	73,39		88,39		100		100				
				Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	47,24		50,24		53,24		56,24				
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	25,56		28,56		31,56		34,56				
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Perangkat kurikulum yang di kembangkan	%	100	100	70,00	100	600,39	100	603,90	100	607,57	100	611,41	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	1:39,94	1:44,26	20,00	1:41,46	141,27	1:38,66	142,09	1:35,86	142,96	1:33,06	143,86	Dinas Pendidikan
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	%	0	58,63		59,13		59,63		60,13				
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	10	880,00	10	13.715,71	20	13.795,86	20	13.879,74	30	13.967,52	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	56	58	181,30	59	681,62	60	685,60	61	689,77	62	694,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	56	58		59		60		61		62		
				<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>%</b>	<b>0,77</b>	<b>0,78</b>	<b>97.478,14</b>	<b>0,78</b>	<b>2.971,54</b>	<b>0,78</b>	<b>2.988,91</b>	<b>0,78</b>	<b>3.007,08</b>	<b>0,79</b>	<b>3.026,10</b>	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,1	22,1	97.303,14	21,1	2.847,93	20,1	2.864,57	19,1	2.881,99	18,1	2.900,22	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH	Angka	79,7	96		94		93		92		91		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Angka	5,09	5,07		5,06		5,05		5,04		5,03		
				Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%	67,05	70		71,6		73,2		74,8		76,4		
				Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin	%	69	71,67	175,00	73	123,61	74,33	124,33	75,67	125,09	77	125,88	Dinas Kesehatan
				<b>Sasaran 4: Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya</b>													
				<b>Indeks Kesalehan Sosial (IKS)</b>	<b>Indeks</b>	<b>n/a</b>	<b>63</b>	<b>940,71</b>	<b>64,5</b>	<b>5.567,30</b>	<b>66</b>	<b>5.599,84</b>	<b>67,5</b>	<b>5.633,89</b>	<b>69</b>	<b>5.669,52</b>	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka potensi konflik SARA di masyarakat	kejadian	1	2	400,00	2	988,88	2	994,65	2	1.000,70	2	1.007,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	%	65	70	95,00	80	139,86	80	140,67	90	141,53	90	142,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95,9	100	428,48	100	3.849,55	100	3.872,05	100	3.895,59	100	3.920,23	Satuan Polisi Pamong Praja
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	90	17,24	92	589,02	93	592,46	95	596,06	96	599,83	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
				<b>Indeks Pembangunan Kebudayaan</b>	<b>Indeks</b>	<b>n/a</b>	<b>56,6</b>	<b>40,00</b>	<b>57,8</b>	<b>706,34</b>	<b>60</b>	<b>710,47</b>	<b>61,15</b>	<b>714,79</b>	<b>61,18</b>	<b>719,31</b>	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan menjadi atraksi	%	52,94	64,7	40,00	70,58	706,34	76,47	710,47	82,35	714,79	88,23	719,31	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			<b>Misi 3: Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis;</b>														
			<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik</b>	<b>4. Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Skor</b>	<b>87,03</b>	<b>90,1</b>	<b>527.609,48</b>	<b>90,62</b>	<b>399.259,29</b>	<b>91,33</b>	<b>401.592,64</b>	<b>91,7</b>	<b>404.034,30</b>	<b>92,01</b>	<b>406.589,66</b>	
			<b>Sasaran 5: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa</b>														
				<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>449.904,68</b>	<b>80</b>	<b>315.907,56</b>	<b>81</b>	<b>317.753,78</b>	<b>82</b>	<b>319.685,71</b>	<b>83</b>	<b>321.707,59</b>	
2	12	02		Perekaman KTP-el	%	99	99,2	100,00	99,4	406,15	99,6	408,52	99,8	411,00	100	413,60	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
																Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	18	04														Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	02	02														Sekretariat DPRD
5	02	02														Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	%	93	93		94		95		96		97	
				Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	n/a	90	1.050,00	90,5	4.470,15	91	4.496,27	91,5	4.523,61	92	4.552,22
				Jumlah penambahan wajib pajak baru	WP	0	2.500		3.000		3.500		4.000		4.500	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	3.195,08	100	1.924,78	100	1.936,02	100	1.947,80	100	1.960,11
				<b>Indeksi Inovasi Daerah</b>	<b>Kategori</b>	<b>Sangat inovatif</b>	<b>Sangat inovatif</b>	<b>6.879,47</b>	<b>Sangat inovatif</b>	<b>17.474,42</b>	<b>Sangat inovatif</b>	<b>17.576,55</b>	<b>Sangat inovatif</b>	<b>17.683,41</b>	<b>Sangat inovatif</b>	<b>17.795,25</b>
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	n/a	85	2.279,89	86	7.628,47	86	7.673,05	86	7.719,70	86	7.768,53
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	3.653,27	100	7.550,35	100	7.594,47	100	7.640,65	100	7.688,97
2	20	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	411,45	100	423,80	100	426,28	100	428,87	100	431,58
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	%	100	100		100		100		100		100	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		pembangunan daerah															
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pedes	%	70%	75	534,87	80	1.871,80	85	1.882,74	90	1.894,19	95	1.906,17	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
			jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	%	0,3	40	50		60		70		75				
			<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Nilai</b>	<b>83,1</b>	<b>84,1</b>	<b>67.102,64</b>	<b>84,6</b>	<b>61.321,42</b>	<b>85,1</b>	<b>61.679,80</b>	<b>85,6</b>	<b>62.054,81</b>	<b>86,1</b>	<b>62.447,28</b>		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realiasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasara perkantoran	%	85	85	63.709,19	86	59.393,12	87,0	59.740,22	88	60.103,44	90	60.483,57	Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	%	NA	30		35		40,0		45		50		
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	%	80	81		82		83,0		84		85		
				Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	%	70	70		75		80,0		85		90		
				Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	90	90		90,5		91,0		91,5		92,0		
				Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIPnya bernilai baik (A)	%	81	81		82		83,0		84		85		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.	Kinerja	Juta Rp.			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5	1	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam tahapan pelaksanaan perencanaan (sesuai dengan Permendagri 86)	%	95	100	3.393,45	100	1.928,31	100	1.939,58	100	1.951,37	100	1.963,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	86		87		88		89		90			
			<b>Indeks Profesionalisme Aparatur</b>	<b>Indeks</b>	<b>75,91</b>	<b>78,71</b>	<b>3.722,69</b>	<b>80,01</b>	<b>4.555,89</b>	<b>81,31</b>	<b>4.582,52</b>	<b>82,61</b>	<b>4.610,38</b>	<b>83,89</b>	<b>4.639,54</b>		
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	%	80	85	2.378,00	85	1.942,43	88	1.953,79	88	1.965,67	90	1.978,10	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90		90		95		95		95			
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	%	80	80	1.344,69	80	2.613,46	83	2.628,73	83	2.644,71	85	2.661,44	Badan Kepegawaian Daerah
			<b>TOTAL</b>				<b>1.022.572,65</b>			<b>945.021,40</b>		<b>951.273,92</b>		<b>951.992,24</b>		<b>962.278,08</b>	



# BAB VII

## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab VII RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 memuat program pembangunan yang merupakan program prioritas yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, serta seluruh program yang dirumuskan perangkat daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, yang dilengkapi dengan indikator kinerja, pagu indikatif, target perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebelum pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menentukan belanjanya setiap tahun dalam periode RPJMD 2021-2026 maka perlu diketahui terlebih dahulu Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab III RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Kapasitas Riil Keuangan Daerah merupakan alokasi belanja program untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas Riil Kabupaten Banyuwangi dihitung dengan mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Berdasarkan Kapasitas Riil Keuangan Daerah, selanjutnya disusun Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah lima tahun ke depan sebagai acuan pengalokasian belanja program perangkat daerah, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022-2026**

No	Uraian	Proyeksi/ Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
		Milyar Rp.	Milyar Rp.	Milyar Rp.	Milyar Rp.	Milyar Rp.
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.443,99	2.477,85	2.493,00	2.503,03	2.523,06
2	BELANJA	2.443,99	2.477,85	2.493,00	2.503,03	2.523,06
2.1	Belanja Operasi	1.779,81	1.787,45	1.794,95	1.802,80	1.811,01
2.1.1	Belanja Pegawai	1.008,64	1.011,33	1.014,42	1.017,65	1.021,04
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	733,04	737,58	741,50	745,61	749,90
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-

No	Uraian	Proyeksi/ Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
		Milyar Rp.	Milyar Rp.	Milyar Rp.	Milyar Rp.	Milyar Rp.
2.1.5	Belanja Hibah	9,97	10,08	10,20	10,34	10,48
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28,16	28,47	28,83	29,20	29,60
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>261,16</b>	<b>286,13</b>	<b>292,47</b>	<b>293,28</b>	<b>303,66</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35,90	36,38	36,94	37,53	38,14
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53,44	52,45	52,92	54,30	55,74
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	152,56	183,96	189,19	187,95	196,18
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,26	3,34	3,42	3,51	3,60
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	1,00	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>393,02</b>	<b>394,27</b>	<b>395,57</b>	<b>396,95</b>	<b>398,39</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	28,91	30,16	31,46	32,84	34,28
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	364,11	364,11	364,11	364,11	364,11

Selanjutnya dalam menyajikan daftar program perangkat daerah yang tertuang di Renstra Perangkat Daerah, hal yang perlu diingat bahwa RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 disusun pada tahun 2021, sehingga alokasi belanja dan program pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang tertuang pada RKPDP 2021 telah definitif dan sedang berlangsung. Untuk itu, program Perangkat Daerah beserta kerangka pendanaannya akan disajikan dalam 2 tabel yaitu tabel 7.2 adalah program beserta kebutuhan pendanaan yang sedang berjalan (tahun 2021) dan tabel 7.3-7.5 adalah indikasi rencana program disertai kebutuhan pendanaan untuk tahun 2022-2026. Berikut ini rencana program disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2021-2026:

**Tabel 7. 2. Program yang disertai Kerangka Pendanaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 (tahun berjalan)**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>							
1	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>						
1 01	<b>PENDIDIKAN</b>						
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APM SD/MI/Paket A	%	99,39	99,99	292.000.817.390	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI/Paket A	%	102,04	100,33		
		Jumlah SD terakreditasi A	bilangan	316,00	315		
		Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/Mts	%	102,05	100		
		Perbedaan Gender angka melanjutkan (AM) SD/MI Ke SMP/MTs	%	1,00	1		
		Rasio Ketersediaan Lembaga terhadap penduduk usia SD (10.000)	Rasio	1 : 72,48	02:14		
		Persentase Penduduk miskin usia 7-12 tahun terlayani pendidikan SD	%	59,83	50		
		Persentase Tenaga Pendidik SD berkualifikasi S-1 dan Bersertifikasi	%	62,58	61,49		
		Angka Putus Sekolah SD	%	0,01	0,02		
		APK SMP/MTs/Paket B	%	110,24	100		
		APM SMP/MTs/Paket B	%	93,60	89,24		
		Jumlah SMP Terakreditasi A	bilangan	88,00	104		
		Persentase Tenaga Pendidik SMP berkualifikasi S-1 dan Bersertifikasi	%	62,30	62,91		
		Rasio ketersediaan lembaga terhadap penduduk usia SMP (10.000)	Rasio	01,44	01:43		
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C	%	103,81	99,39		
		Perbedaan Gender angka melanjutkan (AM) SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C	%	01,01	1		
		Persentase penduduk miskin usia 13-15 tahun terlayani pendidikan SMP	%	66,56	50		
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0,08	0,21		
		APK PAUD Formal	%	105,45	100		
		APM PAUD Formal	%	80,59	74,76		
		Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi	%	67,74	66,25		
		Persentase Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S1 dan Bersertifikasi	%	58,11	51,48		
		Persentase ketersediaan ruang kelas PAUD terhadap kelas rombongan belajar	%	97,68	100		
		Persentase Penduduk Miskin usia 5-6 tahun terlayani PAUD Formal	%	22,00	40		
		Jumlah Lembaga Kursus/ Pelatihan dan PKBM berizin	Lembaga	70	50		
		Jumlah Lembaga Kursus/ Pelatihan dan PKBM Terakreditasi	Lembaga	42,86	27,11		
		Angka Melek Aksara penduduk usia 15 Tahun keatas	%	99,01	98,02		
Persentase Warga Belajar miskin 7-59 tahun terlayani Pendidikan PNF	%	100,00	20				
Persentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus sekoah/tidak sekolah tertangani Pendidikan Non Formal	%	83,42	73,39				
1 01 04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Jumlah SD terakreditasi A	bilangan	316	315	49.984.640	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP terakreditasi A	bilangan	88	104		
		Persentase Lembaga PAUD Terakreditasi	%	67,74	66,25		
		Jumlah Lembaga Kursus/ Pelatihan dan PKBM berizin	bilangan	70	27		
		Persentase Tenaga Pendidik SD berkualifikasi S-1 dan Bersertifikasi	%	62,58	61,49		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
1	2	3	4	5	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	8
		<i>Persentase Tenaga Pendidik SMP berkualifikasi S-1 dan Bersertifikasi</i>	%	62,3	62,91		
		<i>Persentase Tenaga Pendidik PAUD berkualifikasi S-1 dan Bersertifikasi</i>	%	58,11	51,48		
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	<i>Jumlah SD terakreditasi A</i>	bilangan	316	315	99.997.120	Dinas Pendidikan
		<i>Jumlah SMP terakreditasi A</i>	bilangan	88	315		
		<i>Persentase Lembaga PAUD terakreditasi</i>	%	67,74	66,25		
		<i>Jumlah Lembaga Kursus/ Pelatihan dan PKBM berizin</i>	bilangan	70	27		
1 02	<b>KESEHATAN</b>						
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Persentase Akses Penduduk Terhadap Jamban Sehat</i>	%	100	100	4.781.257.267	Dinas Kesehatan
		<i>Persentase Desa Siaga Aktif</i>	%	22,5	22,5		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Cakupan Anggaran Kesehatan</i>	%	11,83	12	167.999.393.007	Dinas Kesehatan
		<i>Persentase Akses Penduduk Terhadap Jamban Sehat</i>	%	100	100		
		<i>Prevalensi balita stunting</i>	%	24,1	23,1		
		<i>Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus</i>	%	100	100		
		<i>Tingkat Kesehatan RS</i>	Angka	77,38	80		
		<i>Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 KH</i>	Angka	79,7	95		
		<i>Angka Kematian Bayi per 1.000 KH</i>	Angka	5,09	5,07		
		<i>Persentase Pencapaian SPM Rumah Sakit</i>	%	100	100		
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	<i>Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin</i>	%	58,26	50	150.000.000	Dinas Kesehatan
		<i>Cakupan Anggaran Kesehatan</i>	%	0,1183	0,12		
1 03	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	indikator program : Presentase Ketersediaan Air Baku	%	87	88	183.136.502.761	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	indikator Program : Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sehari-hari	%	86	87	29.324.888.800	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Indikator Program : Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	unit	1	1	275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Indikator Program : Panjang saluran drainase /gorong-gorong yang dibangun dalam kondisi baik	Meter	22.886	15.000	14.290.729.590	
		Indikator Program : Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi dalam kondisi baik	Meter	740	500		
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Indikator Program : Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	70	70	58.411.865.290	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Indikator Program : Presentase gedung negara dalam kondisi baik	%	85	90	13.831.727.267	
1 03 09		Indikator Program : Presentase kecukupan luasan RTH Publik	%	16,49	17,19	25.503.307.180	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Indikator Program : Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	%	30,65	32,55		
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indikator Program : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Rasio (%)	74,45	76,45	130.186.832.089	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indikator Program : Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	70	70	779.999.560	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indikator Program : Persentase wilayah yang telah tersusun perencanaan tata ruang	%	56	60	1.692.498.420	
1 04	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Indikator Program : Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi korban bencana	%	0	100	2.007.283.680	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Indikator Program : Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	90	100	949.997.960	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	4,16	4,34	699.999.960	
1 05	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase penurunan pelanggaran PERDA</i>	%	4,1	4,1	1.409.989.445	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Tingkat waktu tanggap (respon rate time) penanggulangan kebakaran</i>	%	4,1	4,1	2.399.869.900	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indikator Program: Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	%	75	80	2.624.909.031	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 06	<b>SOSIAL</b>						
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Prosentase PSKS yg mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</i>	%	82,25	82,25	744.354.400	
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<i>Prosentase Warga Migran yang mendapat pembinaan</i>	%	90	90	19.910.500	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Prosentase angka PMKS (Penyandang Masalah kesejahteraan sosial) didalam lembaga (Panti)</i>	%	55,6	36,7	896.598.070	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial</i>	%	53,8	11,8	1.333.162.000	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase Respon cepat darurat bencana</i>	%	100	90	833.895.300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase TMP yang dikelola	%	0	100	20.000.000	
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>							
2 07	<b>TENAGA KERJA</b>						
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Indikator Program : Persentase rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan pada RTK Kabupaten yang dilaksanakan	%	75%	80,00%	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang memiliki kompetensi	%	66,10%	60,00%	49.999.240	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan 2. Persentase Permasalahan PMI yang terselesaikan	% %	65,6 % 98,7%	80,43% 70%	188.996.840	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan 2. Persentase kepesertaan pekerja penerima upah pada perusahaan dalam BPJS ketenagakerjaan	% %	100% 56,52%	90% 40%	428.499.000	
2 8	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase desa/Kel yang memahami PPRG : Jumlah Desa/kel	%	100	25	549.999.700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	84	7	720.977.790	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	% PEKKA, Purna TKW dan Keluarga TKI yang mendapat pelatihan	%	66,6	0,1	64.999.900	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase penyajian data gender dan anak di kecamatan /SKPD	%	0	31,1	20.000.000	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Jumlah forum anak yang telah terbentuk	%	84	20	139.999.900	
2 14	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB / KR mandiri	%	0,32	46	757.133.600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Capaian KB Aktif	%	73, 66	70	7.118.642.342	
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase kelompok tribina Persentase Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB / KR mandiri	% %	97,53 47,5	80% 85	586.699.900	
2 12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	%	95%	96%	3.530.070.920	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1. Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil 2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	%	1. 75% 2. 95%	1. 80 % 2. 96 %	728.993.440	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1. Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil 2. Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el	%	1. 75% 2. 95%	1. 80 % 2. 96 %	49.999.840	
2 13	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
2 13 3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Skala (0-1)	0.7613	0.77	169.957.660	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemerintah Desa	Skala (1-100)	84,9	85	1.059.791.300	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Skala (0-1)	0.8665	0.87	809.994.480	
2 09	<b>PANGAN</b>						
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	angka	95	95	320.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	angka	90,5	90,5	953.893.250	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Kerawanan Pangan	%	N/A	2%	279.933.040	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	%	N/A	80%	29.992.570	
2 11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>						
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup	%	20%	20%	7.999.699	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan sarana prasarana dan aktifitas penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100%	100%	1.652.955.460	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	%	61.59%	60.8%	103.996.400	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan/usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	%	20%	20%	1.999.690	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP	Persentase izin lingkungan dan IPPLH	%	100%	100%	778.062.070	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
1	2	3	4	5	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	8
	IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat peduli lingkungan hidup	%	20%	20%	160.989.750	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan terhadap pelaku pelestari lingkungan hidup	%	20%	20%	71.504.290	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rasio sampah daerah yang tertangani	%	99.80%	99.80%	12.677.571.647	
2 15	<b>PERHUBUNGAN</b>						
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indikator Program : Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	70	72%	6.288.395.346	Dinas Perhubungan
2 16	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	<i>Indikator Program : Persentase aplikasi IT yang mendukung city branding dan layanan publik yang berfungsi baik</i>	%	100	100	7.573.706.465	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Indikator Program : Persentase infrastruktur IT yang berfungsi baik</i>	%	95	95	6.699.878.300	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20	<b>STATISTIK</b>						
2 20 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Indikator Program : Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik</i>	%	100	100	544.929.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21	<b>PERSANDIAN</b>						
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Indikator Program : Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik</i>	%	100	100	1.004.971.230	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 17	<b>KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>						
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Indikator Program : Persentase koperasi aktif</i>	%	84,13	84,13	99.971.960	
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Indikator Program : Persentase KSP/USP Sehat</i>	%	35,24	19,03	99.991.760	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Indikator Program : Persentase Pemahaman Perkoperasian</i>	%	53,47	57,87	525.169.930	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Indikator Program : Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	16,08	16,04	99.995.320	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Indikator Program : Persentase Usaha Mikro yang berdaya	%	27,34	30	94.999.790	
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Indikator Program : Persentase Usaha Mikro naik kelas	%	8,32	10	2.559.995.460	
2 18	<b>PENANAMAN MODAL</b>						
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi	%	7,42%	4,50%	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	%	7,42%	5,50%	49.995.330	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian penyelesaian perijinan dan non perijinan sesuai dengan SOP	%	95,00%	95,00%	2.263.113.961	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha/ penanam modal terhadap penyampaian LKPM	%	17,00%	17,00%	372.456.930	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	%	95,00%	95,00%	99.999.990	
2 22	<b>KEBUDAYAAN</b>						
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan	kegiatan	28	28	1.469.140.900	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	55	58	124.998.000	
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	%	7	8	685.000.000	
2 23	<b>PERPUSTAKAAN</b>						
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	5,6	6%	484.778.300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang di lestarikan	%	100%	100%	59.997.440	
2 24	<b>KEARSIPAN</b>						
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola	%	80,00%	80,00%	364.974.230	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran 2021		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 19	<b>PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlit yang berprestasi	Atlit even	1000	1000	6.971.857.945	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah event	%	11	-		
		Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standart	%	80	80		
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah duta anti narkoba meningkat	orang	180	-	4.983.799.174	
		Jumlah pemuda pelopor meningkat	Orang	25	9		
		Persentase organisasi pemuda yang memenuhi ketentuan	%	95	-		
		Persentase pemuda terampil	%	50	25		
		Persentase pemuda terlatih	%	70	100		
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi kegiatannya	%	95	90	349.999.860	
2 10	<b>PERTANAHAN</b>						
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Indikator Program : Persentase Konflik Pertanahan yang terfasilitasi	%	90	100%	40.000.000	Sekretariat Daerah
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Indikator Program : Persentase Peningkatan Aset tanah Pemkab Bersertifikat	%	90	100%	30.000.000	
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Indikator Program : Presentase penyelesaian Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang terfasilitasi	%	90	100%	30.000.000	
3 25	<b>PERIKANAN</b>						
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	ton	8949	15500	2.280.701.390	Dinas Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume produksi perikanan budidaya	ton	27677	32194	2.145.030.700	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Poklaksar yang meningkat kelasnya	%	56	25	243.664.620	
3 26	<b>PARIWISATA</b>						
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Length of stay	hari	2	2	6.079.309.061	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	%	10	10	1.749.943.400	
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi (orang)	%	2	2,5	1.209.125.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 27	<b>PERTANIAN</b>						
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian	%	90	100	19.689.798.415	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	%	95	100	13.169.817.740	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kejadian Penyakit	Angka	3,8	4	2.594.937.725	
		Usaha produk hewan yang bersertifikasi PRA/NKV	Unit	6	7		
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	%	95	100	273.581.610	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	7	8	2.664.499.540	
3 30	<b>PERDAGANGAN</b>						
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indikator Program : Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%	5,5	5,4	148.352.350	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Indikator Program : Jumlah realisasi ekspor	%	103,81	110	29.259.750	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indikator Program : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	12,81	13,64	122.352.390	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Indikator Program : Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	%	50	54,55	324.998.990	
3 31	<b>PERINDUSTRIAN</b>						
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%	99	75	749.999.100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		2. Persentase peningkatan sertifikasi standarisasi dan HKI	%	25	50		
		4.Persentase rekomendasi kebijakan industri kecil menengah pada RPI Kabupaten yang dilaksanakan	%	50	50		
		5.Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	%	2,1222	2,5		
		6.Rasio ketimpangan pendapatan IKM wilayah kecamatan	%	15	17		
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	0,49	50	39.999.800	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2021				
1	2	3	4	5	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	8		
<b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>									
<b>UNSUR STAFF</b>									
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							
4	01	02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	1. Nilai/Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan	skor	3	3,1	22.811.499.350	Sekretariat Daerah
				2. Persentase Kerjasama antar wilayah yang terlaksana dengan baik	%	85	90%		
				3. Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	95	100%		
				4. Persentase produk hukum yang terpublikasi	%	95	100%		
				5. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum	%	80	95%		
				6. Persentase kajian keagamaan dan kemasyarakatan yang dimanfaatkan	%	95	100%		
				7. Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	95	100%		
				8. Persentase kesesuaian dokumen pengajuan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	%	95	100%		
				9. Persentase desa yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal Desa	%	73	75%		
4	01	03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	1. Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan untuk policy brief	%	90	100%	2.144.992.550	Sekretariat Daerah
				2. Persentase pelaksanaan pembangunan daerah yang memenuhi aspek kualitas	%	90	100%		
				3. Persentase pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, efektif dan efisien	%	80	85%		
4	02	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>							
4	02	02	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Indikator Program : Persentase konsultasi, koordinasi dan studybanding oleh alat kelengkapan dewan	%	100	100	25.389.677.100	Sekretariat DPRD
				Indikator Program : Persentase penyebarluasan perda	%	49	100		
				Indikator Program : Persentase terselenggaranya rapat dan risalah persidangan yang berkualitas	%	100	100		
				Indikator Program : Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti	%	100	100		
				Indikator Program : Presentase daftar inventarisasi masalah yg ditindaklanjuti dan disusun berdasarkan hasil kunker	%	100	100		
				Indikator Program : Presentase pemahaman pimpinan & anggota DPRD ttg subtansi, hasil mengikuti bimtek	%	100	100		
				Indikator Program : Presentase publikasi kegiatan DPRD	%	100	100		
				Indikator Program : Prosentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai prolegda	%	47	79		
6	01	<b>FUNGSI PENGAWASAN</b>							
6	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP	%	100%	100%	2.242.560.170	Inspektorat
6	01	03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI/APIP	%	61%	100%	1.375.926.770	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran 2021		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>FUNGSI PENUNJANG</b>							
5 01	<b>PERENCANAAN</b>						
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Program : Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	90%	90%	6.621.452.890	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indikator Program : Persentase data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai policy brief	%	80%	80%	1.734.573.110	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 02	<b>KEUANGAN</b>						
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indikator Program : Persentase peningkatan kinerja Aset Daerah	%	92	95	2.131.600.540	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indikator Program : Persentase Pelayanan Kepada masyarakat dalam pencairan SP2D	%	95	97	442.273.908.512	
		Indikator Program : Persentase pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu	%	95	97		
		Indikator Program : Persentase SKPD dalam menyusun RKA, DPA dan DPPA tepat waktu	%	100	100		
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Indikator Program : Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	80,5	91	4.325.504.970	Badan Pendapatan Daerah
<b>RUTIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>							
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85,17	92,5	782.107.338.617	Dinas Pendidikan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85	92,5	122.381.107.030	Dinas Kesehatan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85	92,5	16.083.726.427	Satpol PP
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	4.608.377.057	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	87,02	92,5	8.839.286.299	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85	92,5	5.418.944.243	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	12.054.504.371	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	100	92,5	13.392.566.899	Badan Pendapatan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	100	92,5	9.733.111.306	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	100	92,5	8.255.796.601	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92	92,5	31.209.206.735	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	93	92,5	45.738.615.292	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	92,5	5.799.120.191	Dinas Perikanan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	97,97	92,5	22.860.045.500	Dinas Pertanian dan Pangan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85	92,5	52.990.950.305	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	20	92,5	70.484.479.461	Sekretariat Daerah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	100	92,5	44.623.305.027	Sekretariat DPRD
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	92,5	9.373.209.189	Inspektorat
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	4.092.718.882	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	92,5	7.818.996.769	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	92,5	4.831.446.137	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85	92,5	14.033.458.932	Dinas Perhubungan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	92,5	7.966.731.808	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	91	92,5	14.676.605.030	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	93	92,5	6.965.614.573	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	87,5	92,5	5.656.579.832	Dinas Pemuda dan Olahraga
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85	92,5	8.677.545.049	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	92,5	4.959.291.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	20.881.043.124	Kecamatan Banyuwangi
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92	92,5	6.352.835.181	Kecamatan Giri
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	5.317.985.800	Kecamatan Glagah
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	6.640.180.527	Kecamatan Kalipuro
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	3.120.796.596	Kecamatan Licin
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.846.850.156	Kecamatan Wongsorejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.550.257.542	Kecamatan Kabat
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.913.669.711	Kecamatan Rogojampi
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.856.497.641	Kecamatan Songgon
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.649.762.761	Kecamatan Singojuruh
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.459.922.607	Kecamatan Srono
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.463.961.800	Kecamatan Muncar
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.865.559.562	Kecamatan Cluring
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.307.278.905	Kecamatan Purwoharjo
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.999.951.612	Kecamatan Tegaldlimo
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.300.997.205	Kecamatan Gambiran
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.271.698.827	Kecamatan Bangorejo
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.159.787.922	Kecamatan Siliragung
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.295.996.031	Kecamatan Pesanggaran
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	3.067.802.017	Kecamatan Genteng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.301.791.828	Kecamatan Tegalsari
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.965.160.456	Kecamatan Sempu
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.110.183.351	Kecamatan Glenmore
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	98	92,5	2.697.419.289	Kecamatan Kalibaru
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92,5	2.373.273.642	Kecamatan Blimbingsari
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85	92,5	62.500.000.000	RSUD Genteng
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	85	92,5	110.000.000.000	RSUD Blambangan
5 03	<b>KEPEGAWAIAN</b>						
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penilaian dan kapasitas kinerja aparatur	%	83	83	2.346.624.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 04	<b>PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN</b>						
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	%	80	80	1.190.528.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
8 01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka potensi konflik SARA di masyarakat	kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1.387.102.960	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase angka masyarakat yang menggunakan hak hak politiknya	%	65%	65%	2.789.162.880	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang dibina	%	65%	65%	497.759.800	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Angka potensi konflik sosial dan budaya di masyarakat	kejadian	12 kejadian	12 kejadian	106.068.960	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan	kejadian	12 kejadian	12 kejadian	2.118.101.365	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7 01	KECAMATAN						
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	423.415.000	Kecamatan Banyuwangi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	3.003.542.249	Kecamatan Banyuwangi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	100.000.000	Kecamatan Banyuwangi
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	263.018.650	Kecamatan Giri
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	738.748.800	Kecamatan Giri
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	19.997.500	Kecamatan Giri
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	9.999.300	Kecamatan Giri
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	451.484.130	Kecamatan Glagah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	701.135.360	Kecamatan Glagah
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	9.991.300	Kecamatan Glagah
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	9.998.310	Kecamatan Glagah
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	549.676.310	Kecamatan Kalipuro
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	1.196.302.235	Kecamatan Kalipuro
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	33.998.800	Kecamatan Kalipuro
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	9.999.550	Kecamatan Kalipuro
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	239.665.360	Kecamatan Licin
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	273.371.604	Kecamatan Licin
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	5.996.200	Kecamatan Licin
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.997.420	Kecamatan Licin
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	265.088.790	Kecamatan Wongsorejo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	19.919.960	Kecamatan Wongsorejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	14.994.380	Kecamatan Wongsorejo
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.999.800	Kecamatan Wongsorejo
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	283.965.930	Kecamatan Kabat
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	12.970.870	Kecamatan Kabat
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	9.999.880	Kecamatan Kabat
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.960.640	Kecamatan Kabat
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	269.939.340	Kecamatan Rogojampi
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	17.923.180	Kecamatan Rogojampi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	9.901.100	Kecamatan Rogojampi
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.995.000	Kecamatan Rogojampi
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	211.074.550	Kecamatan Songgon
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	39.960.065	Kecamatan Songgon
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	9.996.060	Kecamatan Songgon

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.995.820	Kecamatan Songgon
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	362.985.000	Kecamatan Singojuruh
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	27.495.900	Kecamatan Singojuruh
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	7.500.000	Kecamatan Singojuruh
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	6.000.000	Kecamatan Singojuruh
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	305.097.270	Kecamatan Srono
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	14.999.975	Kecamatan Srono
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	9.997.680	Kecamatan Srono
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	9.998.220	Kecamatan Srono
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	244.266.460	Kecamatan Muncar
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	14.997.780	Kecamatan Muncar
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	5.587.500	Kecamatan Muncar
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	9.992.370	Kecamatan Muncar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	317.467.930	Kecamatan Cluring
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	22.796.400	Kecamatan Cluring
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	3.000.000	Kecamatan Cluring
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	31.899.900	Kecamatan Cluring
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	323.234.300	Kecamatan Purwoharjo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	5.199.120	Kecamatan Purwoharjo
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	2.599.740	Kecamatan Purwoharjo
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.998.400	Kecamatan Purwoharjo
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	340.487.140	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	18.795.960	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	19.996.960	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.993.900	Kecamatan Tegaldlimo
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	272.136.290	Kecamatan Gambiran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	17.991.830	Kecamatan Gambiran
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	7.995.000	Kecamatan Gambiran
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.976.000	Kecamatan Gambiran
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	244.497.310	Kecamatan Bangorejo
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	19.960.880	Kecamatan Bangorejo
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	20.000.000	Kecamatan Bangorejo
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10.000.000	Kecamatan Bangorejo
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	527.501.120	Kecamatan Siliragung
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	74.997.060	Kecamatan Siliragung
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	20.618.700	Kecamatan Siliragung
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	24.993.050	Kecamatan Siliragung
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	322.760.660	Kecamatan Pesanggaran
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	33.999.470	Kecamatan Pesanggaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	10.007.470	Kecamatan Pesanggaran
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	9.999.300	Kecamatan Pesanggaran
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	248.765.000	Kecamatan Genteng
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	22.499.900	Kecamatan Genteng
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	10.000.000	Kecamatan Genteng
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10.000.000	Kecamatan Genteng
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	257.976.400	Kecamatan Tegalsari
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	47.499.875	Kecamatan Tegalsari
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.995.000	Kecamatan Tegalsari
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	232.435.830	Kecamatan Sempu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	22.978.615	Kecamatan Sempu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	7.999.640	Kecamatan Sempu
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	22.943.000	Kecamatan Sempu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2021		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	223.822.480	Kecamatan Glenmore
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	15.659.710	Kecamatan Glenmore
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	2.445.190	Kecamatan Glenmore
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.797.220	Kecamatan Glenmore
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	260.398.690	Kecamatan Kalibaru
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	39.223.700	Kecamatan Kalibaru
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	24.999.820	Kecamatan Kalibaru
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5.996.220	Kecamatan Kalibaru
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75,0	77,5	238.294.540	Kecamatan Blimbingsari
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	23	8.483.640	Kecamatan Blimbingsari
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	2.466.750	Kecamatan Blimbingsari
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	9.972.560	Kecamatan Blimbingsari
		<b>TOTAL</b>				<b>3.216.198.798.997</b>	

**Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas I yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2022-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>																		
1	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>																	
1 01	<b>PENDIDIKAN</b>					743.612,37		903.963,38		909.246,30		914.774,48		920.560,06		920.560,06		
1 01 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	66,06	85		95		100		100		100		100			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%		100		100		100		100		100		100		100	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%		73,39	169.164,49	88,39	215.551,08	216.810,80	218.129,00	219.508,58	219.508,58	219.508,58	219.508,58	219.508,58	219.508,58	219.508,58	Dinas Pendidikan
		Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%		47,24		50,24		53,24		56,24		59,24		59,24		59,24	
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi	%		25,56		28,56		31,56		34,56		37,56		37,56		37,56	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		numerasi yang memenuhi kompetensi minimum															
1 01 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase Perangkat kurikulum yang di kembangkan	%	100	100	70,00	100	600,39	100	603,90	100	607,57	100	611,41	100	611,41	Dinas Pendidikan
1 01 04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	1:39,94	1:44,26	20,00	1:41,46	141,27	1:38,66	142,09	1:35,86	142,96	1:33,06	143,86	1:33,06	143,86	Dinas Pendidikan
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	%		58,63		59,13		59,63		60,13		60,63				
1 01 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Satuan Pendidikan yang dibina	%	100	100	20,00	100	70,63	100	71,05	100	71,48	100	71,93	100	71,93	Dinas Pendidikan
		1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Lembaga		807		819		831		843		855		855		
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%		97,43		98,43		99,43		100		100		100		
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%		79,70		80,70		81,70		82,70		83,70		83,70		
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	Lembaga		30		35		40		45		50		50		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	100	60,00	100	671,02	100	674,94	100	679,05	100	683,34	100	683,34	Dinas Pendidikan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	574.277,88	94	686.928,98	94,5	690.943,52	95	695.144,42	95	699.540,93	95	699.540,93	Dinas Pendidikan
1 02	KESEHATAN					385.566,48		244.506,41		245.935,35		247.430,62		248.995,52		248.995,52	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,1	22,1		21,1		20,1		19,1		18,1		18,1		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH	Angka	79,7	96		94		93		92		91		91		
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Angka	5,09	5,07	97.303,14	5,06	2.847,93	5,05	2.864,57	5,04	2.881,99	5,03	2.900,22	5,03	2.900,22	
		Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	%	67,05	70		71,6		73,2		74,8		76,4		76,4		
		Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	%	100	100		100		100		100		100		100		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	13,33	24,44	702,60	28,89	88,29	33,33	88,81	37,78	89,35	42,22	89,91	42,22	89,91	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin	%	69	71,67	175,00	73	123,61	74,33	124,33	75,67	125,09	77	125,88	77	125,88	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga aktif	%	22,5	23	758,42	23,5	138.547,85	24	139.357,55	24,5	140.204,84	25	141.091,58	25	141.091,58	Dinas Kesehatan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	286.627,32	94	102.898,72	94,5	103.500,08	95	104.129,36	95	104.787,93	95	104.787,93	Dinas Kesehatan
1 03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					262.729,69		378.206,40		378.939,93		375.297,62		371.265,97		371.265,97	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	62	65	30.899,72	69	72.114,96	73	71.059,64	77	65.545,43	80	59.554,73	80	59.554,73	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	%	56	60		63		66		69		72		72		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sehari-hari	%	86	88	665,63	89	7.416,57	90	7.459,91	91	7.505,27	92	7.552,73	92	7.552,73	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	N/A	85,16	2,00	85,26	70,63	85,36	71,05	85,46	71,48	85,56	71,93	85,56	71,93	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	N/A	6	6.906,83	7	7.628,47	8	7.673,05	9	7.719,70	10	7.768,53	10	7.768,53	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	N/A	66,8	13.004,42	69,1	68.656,22	71,4	69.057,46	73,7	69.477,33	76	69.916,75	76	69.916,75	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	72	73,6	466,45	75,2	20.589,80	76,8	20.710,13	78,4	20.836,05	80	20.967,83	80	20.967,83	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah	%	82,45	90	2.566,98	92,5	33.014,32	95	33.207,26	97,5	33.409,16	100	33.620,46	100	33.620,46	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	LINGKUNGANNYA	kota/kawasan perkotaan															
		Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	%	64,68	65		66		67		68		69		69		
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	74,45	76,45	135.653,69	78,45	106.573,74	80,45	107.196,58	82,45	107.848,33	84,45	108.530,43	84,45	108.530,43	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	N/A	53,46	100,00	57,59	282,54	61,74	284,19	65,88	285,91	70,02	287,72	70,02	287,72	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	%	56	70,83		75		83,33		91,66		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
		Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya	%	12,51	20,83	50,00	29,17	2.749,43	37,50	2.765,50	45,83	2.782,31	54,17	2.799,91	54,17	2.799,91	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	41.770,85	94	37.986,87	94,5	38.208,88	95	38.441,18	95	38.684,31	95	38.684,31	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang	%	92	93	30.643,12	93,5	21.122,84	94,0	21.246,28	94,5	21.375,46	95	21.510,65	95	21.510,65	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah															
1 04	<b>PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					64,00		3.602,33		3.623,39		3.645,42		3.668,47		3.668,47	
1 04 02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase perumahan yang mendapatkan ijin	%	100	100	14,00	100	1.059,51	100	1.065,70	100	1.072,18	100	1.078,96	100	1.078,96	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 04 03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	20	25	45,00	33,33	1.412,68	41,66	1.420,94	49,99	1.429,57	58,32	1.438,62	58,32	1.438,62	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	4,16	4,34	5,00	4,52	1.130,14	4,70	1.136,75	4,88	1.143,66	5,06	1.150,89	5,06	1.150,89	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman
1 05	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>					19.826,08		34.244,64		34.444,78		34.654,20		34.873,37		34.873,37	
1 05 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95,9	100	428,48	100	3.849,55	100	3.872,05	100	3.895,59	100	3.920,23	100	3.920,23	Satuan Polisi Pamong Praja
X XX 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	13.237,92	94	13.225,54	94,5	13.302,84	95	13.383,72	95	13.468,36	95	13.468,36	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	85	100	349,89	100	4.389,90	100	4.415,56	100	4.442,40	100	4.470,50	100	4.470,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	90	100		100		100		100		100		100		
		Persentase penanganan pasca bencana	%	27	30		45		55		70		80		80		
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	4.091,30	94	3.936,79	94,5	3.959,79	95	3.983,87	95	4.009,07	95	4.009,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	82	15	3.736,54	15	3.758,37	15	3.781,23	15	3.805,14	15	3.805,14	Dinas Pemadam Kebakaran
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	1.636,74	94	5.106,32	94,5	5.136,17	95	5.167,39	95	5.200,08	95	5.200,08	Dinas Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 06	<b>SOSIAL</b>					9.556,13		10.507,15		10.568,50		10.632,69		10.699,88		10.699,88	
1 06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase Peningkatan kapasitas bagi PSKS	%	82,25	82	602,27	83	605,65	84	609,19	85	612,90	87	616,77	87	616,77	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 03	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase Warga pekerja Migran yang mendapat pembinaan	%	55,6	82	10,00	83	10,00	84	10,00	85	10,00	87	10,00	87	10,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang tertangani	%	55,6	36,7	427,46	37	1.168,99	38	1.175,82	39	1.182,97	40	1.190,45	40	1.190,45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial	%	53,8	11,8	99,77	11,9	474,66	12	477,43	12	480,34	12	483,38	12	483,38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	90	17,24	92	589,02	93	592,46	95	596,06	96	599,83	96	599,83	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 06 07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	140,48	100	141,27	100	142,09	100	142,96	100	143,86	100	143,86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Juta Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		Keluarga Berencana
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	8.258,91	94	7.517,56	94,5	7.561,49	95	7.607,46	95	7.655,58	95	7.655,58		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	TOTAL					1.421.354,75		1.575.030,31		1.582.758,24		1.586.435,02		1.590.063,28		1.590.063,28		

**Tabel 7.4. Indikasi Rencana Program Prioritas II yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2022-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	07	TENAGA KERJA				469,37	1.048,91	1.055,04	1.061,46	1.068,17	1.068,17								
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,78	0,93	368,76	1,02	370,83	1,11	373,00	1,21	375,26	1,32	377,64	1,32	377,64	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	65,6	70,75	100,61	73,47	678,09	76,29	682,05	79,23	686,20	82,28	690,54	82,28	690,54	
2	08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				365,30	562,23	2.771,93	3.669,65	14.362,98	14.362,98								
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%	84	77	45,00	80	240,16	83	241,56	85	243,03	87	244,56	87	244,56	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelompok perempuan berdaya	%	66,6	20	45,68	25	45,91	30	2.252,59	35	3.147,15	40	13.837,18	40	13.837,18	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian kasus terhadap anak	%	n/a	77	274,62	80	276,16	83	277,78	85	279,47	87	281,23	87	281,23	
2	09	PANGAN				719,95	724,00	728,23	732,66	737,29	737,29								
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	angka	95	95,2	649,71	95,4	653,36	95,6	657,18	95,8	661,18	96	665,36	96	665,36	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	86	86	70,24	87	70,63	88	71,05	89	71,48	90	71,93	90	71,93	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	11	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				7.409,62		13.101,31		13.177,88		13.258,00		13.341,85		13.341,85			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	59,17	60,05		60,11		60,16		60,22		60,27		60,27		
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,23	86,61	309,00	86,67	1.411,39	86,72	1.419,64	86,78	1.428,27	86,83	1.437,30	86,83	1.437,30	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Lahan	Indeks	61,59	61,59	10,00	61,59	988,88	61,59	994,65	61,59	1.000,70	61,59	1.007,03	61,59	1.007,03	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	61	61,06	7.090,62	61,12	10.701,05	61,18	10.763,59	61,24	10.829,03	61,31	10.897,52	61,31	10.897,52	
2	12	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				200,00		950,03		955,58		961,39		967,47		967,47			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Perekaman KTP-el	%	99	99,2		99,4		99,6		99,8		100		100		
				Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		n/a	100		100		100		100		100		100		100
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	86	92		94		96		98		100		100		
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	%	n/a	100		100	100,00	100	543,88	100	100	550,39	100	100	553,87	100
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	n/a	100		100		100		100		100		100		100
2	13	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				826,45		2.645,24		2.660,70		2.676,88		2.693,81		2.693,81			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	%	70%	75	534,87	80	1.871,80	85	1.882,74	90	1.894,19	95	1.906,17	95	1.906,17	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	%	30%	40		50		60		70		75		75				
2	13	05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	%	n/a	5	291,58	6	773,44	7	777,96	8	782,69	9	787,64	9	787,64	
				Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terafiliasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	%	60	65		70		75		80		85		85		
2	15		<b>PERHUBUNGAN</b>			3.922,98		12.131,39		12.202,28		12.276,47		12.354,12		12.354,12			
2	15	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	%	87%	100	3.922,98	100	12.131,39	100	12.202,28	100	12.276,47	100	12.354,12	100	12.354,12	Dinas Perhubungan
				Persentase layanan angkutan darat	%	72%	75		100		100		100		100		100		
2	16		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			5.933,16		15.178,82		15.267,53		15.360,35		15.457,50		15.457,50			
2	16	02	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	n/a	85	2.279,89	85,6	7.628,47	85,7	7.673,05	85,8	7.719,70	85,9	7.768,53	86	7.768,53	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	16	03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	3.653,27	100	7.550,35	100	7.594,47	100	7.640,65	100	7.688,97	100	7.688,97	
2	17		<b>KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>			11.777,14		2.430,95		2.445,16		2.460,03		2.475,58		2.475,58			
2	17	05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi	%	0	2,87	197,52	3,91	394,97	4,84	397,28	5,64	399,69	6,31	402,22	6,31	402,22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA</b>	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	26,34	40	87,83	50	247,22	60	248,66	70	250,18	80	251,76	80	251,76	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)		
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>																
2	17	08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Usaha Mikro naik kelas	%	8,32	15	11.491,79	20	1.788,77	25	1.799,22	30	1.810,16	35	1.821,61	35	1.821,61
2	18		<b>PENANAMAN MODAL</b>					645,00		1.804,70		1.815,25		1.826,28		1.837,83		1.837,83
2	18	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Prosentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	%	5	6	25,00	7	38,85	7,5	39,08	8	39,31	8,5	39,56	8,5	39,56
2	18	04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	%	95	95	620,00	95,5	1.765,85	96	1.776,17	96,5	1.786,97	97	1.798,27	97	1.798,27
2	19		<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					3.381,50		17.582,92		17.685,67		17.793,20		17.905,74		17.905,74
2	19	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	%	N/A	0,57	2.501,50	0,58	3.867,21	0,59	3.889,81	0,6	3.913,46	0,61	3.938,21	0,61	3.938,21
2	19	03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	%	N/A	10	880,00	10	13.715,71	20	13.795,86	20	13.879,74	30	13.967,52	30	13.967,52
2	20		<b>STATISTIK</b>					411,45		423,80		426,28		428,87		431,58		431,58
2	20	01	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	411,45	100	423,80	100	426,28	100	428,87	100	431,58	100	431,58
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	
2	22		<b>KEBUDAYAAN</b>					40,00		706,34		710,47		714,79		719,31		719,31
2	22	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan menjadi atraksi	%	52,94	64,7	40,00	70,58	706,34	76,47	710,47	82,35	714,79	88,23	719,31	88,23	719,31

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	23		PERPUSTAKAAN				181,30		681,62		685,60		689,77		694,13		694,13		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	5,6	7,6	181,30	8,6	681,62	9,6	685,60	10,6	689,77	11,6	694,13	11,6	694,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	56	58		59		60		61		62		62		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.009,63		5.682,50		5.715,71		5.750,46		5.786,83		5.786,83		
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap nelayan kecil	ton	20.447	21.674	574,39	22.324	2.754,73	22.994	2.770,82	23.684	2.787,67	24.394	2.805,30	24.394	2.805,30	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	ton	27.677	29.936	1.098,68	31.133	1.691,68	32.378	1.701,57	33.674	1.711,92	35.021	1.722,74	35.021	1.722,74	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan UMK	%	0	4,5	336,56	4,6	1.236,09	4,7	1.243,32	4,8	1.250,88	4,9	1.258,79	25,75	1.258,79	
3	26		PARIWISATA				709,00		8.490,19		8.539,81		8.591,73		8.646,07		8.646,07		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	2,2	635,00	2,3	4.657,59	2,4	4.684,81	2,5	4.713,30	2,6	4.743,11	2,6	4.743,11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-72,94	1,10	64,00	1,15	1.836,48	1,20	1.847,22	1,25	1.858,45	1,30	1.870,20	6,14	1.870,20	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-43,9	5,0		5,2		5,4		5,6		5,8		34,02		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif	%	11,76	23,52	10,00	29,41	1.996,11	35,29	2.007,78	41,17	2.019,98	47,05	2.032,76	47,05	2.032,76	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	27	PERTANIAN				24.623,67		20.520,20		20.640,12		20.765,62		20.896,95		20.896,95			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi Tanaman pangan	%	0,5	0,49	4.174,54	0,50	11.953,03	0,51	12.022,89	0,52	12.095,99	0,53	12.172,49	3,04	12.172,49	
				Persentase peningkatan produksi Tanaman perkebunan dan hortikultura	%	3	3,70			3,75		3,80		3,85		3,90		24,11	
				Rata-rata Persentase peningkatan produksi Peternakan	%	2	2			2		2,1		2,1		2,1		13,1	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	%	100	100	16.943,64	100	5.781,39	100	5.815,18	100	5.850,53	100	5.887,54	100	5.887,54	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura	%	100	100			100		100		100		100		100	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	%	100	100			100		100		100		100		100	
				Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	100	100			100		100		100		100		100	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	100	100	760,41	100	197,04	100	198,19	100	199,40	100	200,66	100	200,66	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	2.745,09	100	2.588,74	100	2.603,86	100	2.619,70	100	2.636,26	100	2.636,26	

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	30	<b>PERDAGANGAN</b>				394,67		2.127,18		2.139,61		2.152,62		2.166,23		2.166,23			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	%	50	59,09	250,00	68,18	1.879,96	77,27	1.890,95	86,36	1.902,44	95,45	1.914,47	95,45	1.914,47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%	5,5	5,3	144,67	5,2	247,22	5,1	248,66	5,0	250,18	4,9	251,76	4,9	251,76	
3	31	<b>PERINDUSTRIAN</b>				179,20		4.026,14		4.049,67		4.074,29		4.100,06		4.100,06			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	%	-6,78	1,2		1,26		1,3		1,34		1,38		1,38	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian	
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	50	75	179,20	80	4.026,14	85	4.049,67	90	4.074,29	95	4.100,06	95		4.100,06
				Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%	70	70		75		80		85		90		90		
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
4	2		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			24.396,37		25.875,63		26.026,85		26.185,09		26.350,70		26.350,70			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda	%	40	80	24.396,37	81	25.875,63	82	26.026,85	83	26.185,09	84	26.350,70	84	26.350,70	Sekretariat DPRD
				Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti	%	83,5	87		88		89		90		91		91		
5			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
5	01		<b>PERENCANAAN</b>			3.393,45		1.928,31		1.939,58		1.951,37		1.963,71		1.963,71			
5	1	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketepatan waktu dalam tahapan pelaksanaan perencanaan (sesuai dengan Permendagri 86)	%	95	100	3.393,45	100	1.928,31	100	1.939,58	100	1.951,37	100	1.963,71	100	1.963,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	86		87		88		89		90		90				
5	02	<b>KEUANGAN</b>				421.493,22		285.391,28		287.059,16		288.804,46		290.631,04		290.631,04			
5	02	02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase dokumen APBD tepat waktu	%	100	100	420.443,22	100	280.921,13	100	282.562,89	100	284.280,86	100	286.078,82	100	286.078,82	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	%	100	100	100		100		100		100						
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	%	93	93	94		95		96		97						
5	02	04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	n/a	90	1.050,00	90,5	4.470,15	91	4.496,27	91,5	4.523,61	92	4.552,22	92,5	4.552,22	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah penambahan wajib pajak baru	WP		2.500			3.000				3.500				4.000		
5	03		<b>KEPEGAWAIAN</b>			2.378,00		1.942,43		1.953,79		1.965,67		1.978,10		1.978,10			
5	03	02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	%	80	85	2.378,00	85	1.942,43	88	1.953,79	88	1.965,67	90	1.978,10	90	1.978,10	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	90	90	90		95		95		95						
5	04		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			1.344,69		2.613,46		2.628,73		2.644,71		2.661,44		2.661,44			
5	04	02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	%	80	80	1.344,69	80	2.613,46	83	2.628,73	83	2.644,71	85	2.661,44	85	2.661,44	
6	01		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
6	01		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			3.195,08		1.924,78		1.936,02		1.947,80		1.960,11		1.960,11			
6	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	100	100	3.195,08	100	1.924,78	100	1.936,02	100	1.947,80	100	1.960,11	100	1.960,11	Inspektorat
4	01		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
4	01		<b>RUTIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>			63.709,19		59.393,12		59.740,22		60.103,44		60.483,57		60.483,57			
X	XX	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Persentase realiasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasara perkantoran	%	85	85	63.709,19	86	59.393,12	87,0	59.740,22	88	60.103,44	90	60.483,57	90	60.483,57	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)						
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	%	NA	30		35		40,0		45		50		50							
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	%	80	81		82		83,0		84		85		85							
		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	%	70	70		75		80,0		85		90		90							
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	90	90		90,5		91,0		91,5		92,0		92,0							
		Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIPnya bernilai baik (A)	%	81	81		82		83,0		84		85		85							
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																					
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															495,00	1.128,73	1.135,33	1.142,23	1.149,45	1.149,45
8	01	02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarakat	kejadian	1	2	400,00	2	988,88	2	994,65	2	1.000,70	2	1.007,03	2	1.007,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	01	04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	%	65	70	95,00	80	139,86	80	140,67	90	141,53	90	142,42	90	142,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
TOTAL							584.604,40		491.016,19		496.092,19		499.989,27		513.821,63		513.821,63					

**Tabel 7.5. Indikasi Rencana Program Prioritas III yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Banyuwangi tahun 2022-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>																			
<b>2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>2 07 TENAGA KERJA</b>																			
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	50	75	35,12	75	35,32	75	35,52	80	35,74	80	35,97	80	35,97	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	98	85	325,00	85	456,65	90	459,32	90	462,11	95	465,03	95	465,03	
<b>2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Desa/Kelurahan yang memahami PPRG	%	25	25	17,56	45	17,66	60	17,76	75	17,87	90	17,98	90	17,98	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase jumlah forum anak yang telah dibentuk	%		20	100,00	40	282,54	60	284,19	80	285,91	100	287,72	100	287,72	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
<b>2 09 PANGAN</b>																			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	angka	90,50	90,55	1.044,73	90,60	1.236,09	90,65	1.243,32	90,70	1.250,88	90,75	1.258,79	90,75	1.258,79	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	15	14	250,00	13	303,73	12	305,50	11	307,36	10	309,30	10	309,30	Dinas Pertanian dan Pangan
2	10		PERTANAHAN				150,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	%	100	100	150,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	100	10.000,00	Sekretariat Daerah
2	11		LINGKUNGAN HIDUP				121,00		2.171,78		2.184,47		2.197,75		2.211,65		2.211,65		2.211,65
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lingkup perencanaan bidang lingkungan hidup	%	20	20	9,00	40	529,75	60	532,85	80	536,09	100	539,48	100	539,48	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	%	20	20	2,00	40	109,48	60	110,12	80	110,79	100	111,49	100	111,49	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	104,00	100	197,78	100	198,93	100	200,14	100	201,41	100	201,41	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Persentase pendidikan dan pelatihan masyarakat	%	20	20	3,00	40	946,28	60	951,81	80	957,59	100	963,65	100	963,65	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)				
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		HIDUP UNTUK MASYARAKAT																		
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	%	20	20	3,00	40	388,49	60	390,76	80	393,13	100	395,62	100	395,62	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						127,50		587,67			591,11		594,70		598,46		598,46
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan data kependudukan	%		70		75	587,67	80		85		90		598,46	90	598,46	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%		100		100		591,11	100		100		100		598,46	100	
2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						371,58		831,36			836,22		841,30		846,63		846,63
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	%	n.a	50	280,96	60	282,54	70	284,19	80	285,91	90	287,72	90	287,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Desa	71	50	90,62	22	548,83	17	552,03	15	555,39	14	558,90	189	558,90		
2	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						896,29		6.057,26			6.092,65		6.129,70		6.168,47		6.168,47
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (Survei)	%	0,98	0,89	17,56	0,86	17,66	0,83	17,76	0,80	17,87	0,77	17,98	0,77	17,98	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak terpenuhi (UnmetNeed)f	%	12,18	12,18	40,00	12,18	5.196,16	11,86	5.226,52	11,62	5.258,30	11,45	5.291,56	11,40	5.291,56		
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Tribina	%	84,5	84,5	838,73	84,6	843,44	84,70	848,37	84,80	853,53	84,90	858,93	85,00	858,93		
2	15		PERHUBUNGAN						224,77		226,03			227,35		228,73		230,18		230,18
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan angkutan penyeberangan	%	100	100	126,43	100	127,14	100	127,88	100	128,66	100	129,48	100	129,48	Dinas Perhubungan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase fasilitasi pendirian tempat tinggal landas dan pendaratan helikopter	%	n/a	25	84,29	25	84,76	25	85,26	25	85,77	25	86,32	25	86,32	
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase layanan angkutan Perkretapian	%	100	100	14,05	100	14,13	100	14,21	100	14,30	100	14,39	100	14,39	
2	17		<b>KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>					150,00		257,77		259,28		260,86		262,51		262,51	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	84,13	84,82	50,00	85,94	70,61	87,05	71,03	88,17	71,46	89,29	71,91	89,29	71,91	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Sehat	%	19,03	39,65	50,00	41,85	70,61	44,05	71,03	46,26	71,46	48,46	71,91	48,46	71,91	
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	16,04	16,2	50,00	16,4	116,55	16,6	117,23	16,8	117,94	17	118,69	150,17	118,69	
2	18		<b>PENANAMAN MODAL</b>					333,46		416,74		419,18		421,72		424,39		424,39	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	%	2,13	4	20,00	4,5	56,51	5	56,84	5,5	57,18	6	57,54	32,08	57,54	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM	%	17	60	280,96	65	282,54	70	284,19	75	285,91	80	287,72	80	287,72	
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	%	95	95,5	32,50	96	77,70	96,5	78,15	97	78,63	97,5	79,12	97,5	79,12	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	19	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				50,00		247,22		248,66		250,18		251,76		251,76			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang terfasilitasi	%	95	90	50,00	90	247,22	90	248,66	90	250,18	90	251,76	90	251,76	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	21	<b>PERSANDIAN</b>				270,00		593,33		596,79		600,42		604,22		604,22			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	80	270,00	100	593,33	100	596,79	100	600,42	100	604,22	100	604,22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2	22	<b>KEBUDAYAAN</b>				35,00		2.913,65		2.930,68		2.948,50		2.967,15		2.967,15			
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	0,98	1,02	15,00	1,04	2.119,02	1,06	2.131,40	1,08	2.144,36	1,10	2.157,92	1,10	2.157,92	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	17,24	21,37	10,00	23,44	88,29	25,51	88,81	27,58	89,35	29,65	89,91	29,65	89,91	
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	%	-43,52	10,06	10,00	10,51	706,34	12,52	710,47	12,94	714,79	13,70	719,31	77,32	719,31	
2	23	<b>PERPUSTAKAAN</b>				48,68		52,98		53,29		53,61		53,95		53,95			
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah	N/A	1	48,68	1	52,98	1	53,29	1	53,61	1	53,95	1	53,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	<b>KEARSIPAN</b>				1.202,81		2.592,27		2.607,42		2.623,27		2.639,86		2.639,86			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	%	N/A	92	230,00	93	1.613,99	94	1.623,42	95	1.633,29	96	1.643,62	96	1.643,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat																	
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	N/A	25%	874,48	50%	879,39	70%	884,53	80%	889,91	90%	895,54	90%	895,54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan	%		75%	98,34	78%	98,89	80%	99,47	83%	100,07	85%	100,70	85%	100,70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	%		70		71		72		73		74		74		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	26		PARIWISATA					40,00		1.836,48		1.847,22		1.858,45		1.870,20		1.870,20	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan kraf yang bersertifikat kompetensi	%	1,7	3	40,00	4	1.836,48	5	1.847,22	6	1.858,45	7	1.870,20	7	1.870,20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	27		PERTANIAN					553,63		1.928,31		1.939,58		1.951,37		1.963,71		1.963,71	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	unit	7	8		9		10		11		12		12		Dinas Pertanian dan Pangan
				Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	22,70	22,40		22,20		21,80		21,50		21,20		21,20		
3	30		PERDAGANGAN					149,99		328,44		330,36		332,37		334,47		334,47	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-14,18	4,76	14,60	5,45	70,63	6,03	71,04	6,5	71,48	6,87	71,93	34,86	71,93	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	%	12,81	14,16	89,73	14,69	211,90	15,21	213,14	15,74	214,44	16,26	215,79	16,26	215,79	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		PERLINDUNGAN KONSUMEN	bertanda tera sah yang berlaku																
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran produk dalam negeri	%	0	0	45,66	10	45,91	10,9	46,18	11,5	46,46	11,76	46,76	11,76	46,76	
3	31		PERINDUSTRIAN				36,00		105,95		106,57		107,22		107,90		107,90		
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%	0,49	0,50	36,00	0,50	105,95	0,50	106,57	0,50	107,22	0,50	107,90	0,50	107,90	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
4			URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				25.030,67		24.445,42		24.588,28		24.737,78		24.894,23		24.894,23		
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi	%	85	85	21.900,00	85	21.824,90	90	21.952,45	90	22.085,92	95	22.225,60	95	22.225,60	
				Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai	3,40	3,41		3,46		3,51		3,56		3,61		3,61		Sekretariat Daerah
				Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat	%	80	80		82		84		86		90		90		
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	70	70	3.130,67	75	2.620,52	80	2.635,84	80	2.651,86	85	2.668,63	85	2.668,63	
				% Penayangan SIRUP	%	50	50		55		55		60		65		65		
				Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	%	80	80		80		85		85		90		90		
				Tingkat Inflasi	%	1,74	3		3		3		3		3		3		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01		PERENCANAAN				2.109,01		2.790,04		2.806,35		2.823,41		2.841,27		2.841,27		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN	Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja	Nilai	27,85	28,13	2.109,01	28,5	2.790,04	28,65	2.806,35	28,8	2.823,41	28,95	2.841,27	28,95	2.841,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		<b>SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia																
			Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai	28,95	29	29,1		29,15		29,25		29,4		29,4				
			Rata-rata nilai komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Nilai	27,76	27,85	27,9		28,05		28,2		28,35		28,35				
5	02	<b>KEUANGAN</b>				27.617,73		32.966,01		33.158,67		33.360,27		33.571,26		33.571,26			
5	02	03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase Perangkat daerah yang menyusun laporan barang milik daerah (LBMD) tepat waktu	%	90,91	90,91	27.617,73	92,73	32.966,01	94,55	33.158,67	94,55	33.360,27	96,36	33.571,26	96,36	33.571,26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				777,16		1.765,85		1.776,17		1.786,97		1.798,27		1.798,27			
5	05	02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan	%	80	81	777,16	82	1.765,85	83	1.776,17	84	1.786,97	85	1.798,27	85	1.798,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				%	n/a	81	82		83		84		85						
6		<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
6	01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				417,35		1.430,34		1.438,70		1.447,44		1.456,60		1.456,60			
6	01	03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase terkait pencapaian tata kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	%	25	60	417,35	70	1.430,34	80	1.438,70	90	1.447,44	100	1.456,60	100	1.456,60	Inspektorat
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
7	01	<b>KECAMATAN</b>				9.365,81		13.499,91		13.578,80		13.661,36		13.747,76		13.747,76			
7	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	426,01	82,5	309,73	82,5	311,54	85,0	313,43	85,0	315,42	85,0	315,42	Kecamatan Banyuwangi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	2.184,81	25	4.405,15	27	4.430,89	27	4.457,83	30	4.486,03	30	4.486,03	Kecamatan Banyuwangi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	33,00	2	81,23	2	81,70	2	82,20	2	82,72	2	82,72	Kecamatan Banyuwangi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	255,45	82,5	185,84	82,5	186,92	85,0	188,06	85,0	189,25	85,0	189,25	Kecamatan Giri
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	421,19	25	523,62	27	526,68	27	529,88	30	533,23	30	533,23	Kecamatan Giri
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	20,00	2	14,13	2	14,21	2	14,30	2	14,39	2	14,39	Kecamatan Giri
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10,00	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Giri
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	338,19	82,5	318,56	82,5	320,42	85,0	322,37	85,0	324,41	85,0	324,41	Kecamatan Glagah
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	401,59	25	296,38	27	298,11	27	299,92	30	301,82	30	301,82	Kecamatan Glagah
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	7,02	2	7,06	2	7,10	2	7,14	2	7,19	2	7,19	Kecamatan Glagah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	7,02	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Glagah
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	298,48	82,5	388,26	82,5	390,53	85,0	392,90	85,0	395,39	85,0	395,39	Kecamatan Kalipuro
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	334,16	25	1.147,24	27	1.153,94	27	1.160,96	30	1.168,30	30	1.168,30	Kecamatan Kalipuro
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	17,00	2	12,01	2	12,08	2	12,15	2	12,23	2	12,23	Kecamatan Kalipuro
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10,00	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Kalipuro
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	140,60	82,5	169,73	82,5	170,73	85,0	171,76	85,0	172,85	85,0	172,85	Kecamatan Licin
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	14,13	25	59,69	27	60,03	27	60,40	30	60,78	30	60,78	Kecamatan Licin
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	5,00	2	4,24	2	4,26	2	4,29	2	4,32	2	4,32	Kecamatan Licin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		DAN KETERTIBAN UMUM																	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	4,50	90	4,24	90	4,26	90	4,29	90	4,32	90	4,32	Kecamatan Licin
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	225,69	82,5	268,37	82,5	269,94	85,0	271,58	85,0	273,30	85,0	273,30	Kecamatan Wongsorejo
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	21,07	25	21,19	27	21,31	27	21,44	30	21,58	30	21,58	Kecamatan Wongsorejo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	7,02	2	7,06	2	7,10	2	7,15	2	7,19	2	7,19	Kecamatan Wongsorejo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	4,21	90	4,24	90	4,26	90	4,29	90	4,32	90	4,32	Kecamatan Wongsorejo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	135,29	82,5	204,13	82,5	205,33	85,0	206,57	85,0	207,88	85,0	207,88	Kecamatan Kabat
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	10,54	25	10,60	27	10,66	27	10,72	30	10,79	30	10,79	Kecamatan Kabat
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	21,07	2	21,19	2	21,31	2	21,44	2	21,58	2	21,58	Kecamatan Kabat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10,00	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Kabat
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	166,52	82,5	286,77	82,5	288,45	85,0	290,20	85,0	292,04	85,0	292,04	Kecamatan Rogojampi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	24,58	25	24,72	27	24,87	27	25,02	30	25,18	30	25,18	Kecamatan Rogojampi
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	21,07	2	21,19	2	21,31	2	21,44	2	21,58	2	21,58	Kecamatan Rogojampi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	7,02	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Rogojampi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	140,26	82,5	38,85	82,5	39,08	85,0	39,31	85,0	39,56	85,0	39,56	Kecamatan Songgon
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	28,10	25	28,25	27	28,42	27	28,59	30	28,77	30	28,77	Kecamatan Songgon
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	7,02	2	7,06	2	7,10	2	7,15	2	7,19	2	7,19	Kecamatan Songgon

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	4,21	90	4,24	90	4,26	90	4,29	90	4,32	90	4,32	Kecamatan Songgon
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	148,91	82,5	303,73	82,5	305,50	85,0	307,36	85,0	309,30	85,0	309,30	Kecamatan Singojuruh
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	50,12	25	35,32	27	35,52	27	35,74	30	35,97	30	35,97	Kecamatan Singojuruh
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	10,54	2	10,60	2	10,66	2	10,72	2	10,79	2	10,79	Kecamatan Singojuruh
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	7,02	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Singojuruh
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	140,48	82,5	320,75	82,5	322,62	85,0	324,58	85,0	326,64	85,0	326,64	Kecamatan Srono
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	21,07	25	21,19	27	21,31	27	21,44	30	21,58	30	21,58	Kecamatan Srono
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	10,00	2	7,06	2	7,10	2	7,15	2	7,19	2	7,19	Kecamatan Srono

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10,00	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Srono
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	199,42	82,5	256,05	82,5	257,54	85,0	259,11	85,0	260,75	85,0	260,75	Kecamatan Muncar
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	15,00	25	17,66	27	17,76	27	17,87	30	17,98	30	17,98	Kecamatan Muncar
7	01	04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5,59	90	10,60	90	10,66	90	10,72	90	10,79	90	10,79	Kecamatan Muncar
7	01	06	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	9,99	2	7,06	2	7,10	2	7,15	2	7,19	2	7,19	Kecamatan Muncar
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	210,08	82,5	227,79	82,5	229,13	85,0	230,52	85,0	231,98	85,0	231,98	Kecamatan Cluring
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	15,00	25	16,10	27	16,20	27	16,30	30	16,40	30	16,40	Kecamatan Cluring
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	3,00	2	10,60	2	10,66	2	10,72	2	10,79	2	10,79	Kecamatan Cluring

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10,00	90	22,60	90	22,73	90	22,87	90	23,02	90	23,02	Kecamatan Cluring
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	224,77	82,5	226,03	82,5	227,35	85,0	228,73	85,0	230,18	85,0	230,18	Kecamatan Purwoharjo
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	6,00	25	21,19	27	21,31	27	21,44	30	21,58	30	21,58	Kecamatan Purwoharjo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	8,43	2	8,48	2	8,53	2	8,58	2	8,63	2	8,63	Kecamatan Purwoharjo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	8,43	90	8,48	90	8,53	90	8,58	90	8,63	90	8,63	Kecamatan Purwoharjo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	325,00	82,5	215,43	82,5	216,69	85,0	218,01	85,0	219,39	85,0	219,39	Kecamatan Tegaldlimo
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	20,00	25	14,83	27	14,92	27	15,01	30	15,11	30	15,11	Kecamatan Tegaldlimo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	15,00	2	7,06	2	7,10	2	7,15	2	7,19	2	7,19	Kecamatan Tegaldlimo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	7,50	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Tegaldlimo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	160,53	82,5	226,03	82,5	227,35	85,0	228,73	85,0	230,18	85,0	230,18	Kecamatan Gambiran
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	21,07	25	21,19	27	21,31	27	21,44	30	21,58	30	21,58	Kecamatan Gambiran
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	8,43	2	8,48	2	8,53	2	8,58	2	8,63	2	8,63	Kecamatan Gambiran
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	8,43	90	8,48	90	8,53	90	8,58	90	8,63	90	8,63	Kecamatan Gambiran
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	175,60	82,5	176,58	82,5	177,62	85,0	178,70	85,0	179,83	85,0	179,83	Kecamatan Bangorejo
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	17,56	25	17,66	27	17,76	27	17,87	30	17,98	30	17,98	Kecamatan Bangorejo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	15,00	2	14,13	2	14,21	2	14,30	2	14,39	2	14,39	Kecamatan Bangorejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	8,56	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Bangorejo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	120,35	82,5	363,76	82,5	365,89	85,0	368,12	85,0	370,44	85,0	370,44	Kecamatan Siliragung
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	17,66	25	52,98	27	53,29	27	53,61	30	53,95	30	53,95	Kecamatan Siliragung
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	14,05	2	14,13	2	14,21	2	14,30	2	14,39	2	14,39	Kecamatan Siliragung
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	7,02	90	10,60	90	10,66	90	10,72	90	10,79	90	10,79	Kecamatan Siliragung
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	261,55	82,5	365,88	85,0	368,02	85,0	370,26	85,0	372,60	85,0	372,60	Kecamatan Pesanggaran
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	32,90	25	35,32	27	35,52	27	35,74	30	35,97	30	35,97	Kecamatan Pesanggaran
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	10,00	2	14,13	2	14,21	2	14,30	2	14,39	2	14,39	Kecamatan Pesanggaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran											Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10,00	90	8,48	90	8,53	90	8,58	90	8,63	90	8,63	Kecamatan Pesanggaran
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	194,25	82,5	273,53	82,5	275,13	85,0	276,80	85,0	278,55	85,0	278,55	Kecamatan Genteng
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	9,56	25	31,95	27	32,14	27	32,33	30	32,54	30	32,54	Kecamatan Genteng
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	21,07	2	21,19	2	21,31	2	21,44	2	21,58	2	21,58	Kecamatan Genteng
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	5,00	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Genteng
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	101,63	82,5	190,71	82,5	191,83	85,0	192,99	85,0	194,21	85,0	194,21	Kecamatan Tegalsari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	30,00	25	28,25	27	28,42	27	28,59	30	28,77	30	28,77	Kecamatan Tegalsari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	8,43	2	8,48	2	8,53	2	8,58	2	8,63	2	8,63	Kecamatan Tegalsari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	10,54	90	10,60	90	10,66	90	10,72	90	10,79	90	10,79	Kecamatan Tegalsari
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	173,49	82,5	174,47	82,5	175,49	85,0	176,55	85,0	177,67	85,0	177,67	Kecamatan Sempu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	24,58	25	24,72	27	24,87	27	25,02	30	25,18	30	25,18	Kecamatan Sempu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	7,02	2	7,06	2	7,10	2	7,15	2	7,19	2	7,19	Kecamatan Sempu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	16,16	90	16,25	90	16,34	90	16,44	90	16,54	90	16,54	Kecamatan Sempu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	163,47	82,5	158,56	82,5	159,49	85,0	160,46	85,0	161,47	85,0	161,47	Kecamatan Glenmore
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	11,00	25	11,06	27	11,13	27	11,19	30	11,26	30	11,26	Kecamatan Glenmore
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	5,90	2	1,73	2	1,74	2	1,75	2	1,76	2	1,76	Kecamatan Glenmore

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran											Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	4,07	90	4,09	90	4,12	90	4,14	90	4,17	90	4,17	Kecamatan Glenmore
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	183,32	82,5	184,35	82,5	185,43	85,0	186,56	85,0	187,74	85,0	187,74	Kecamatan Kalibaru
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	28,10	25	28,25	27	28,42	27	28,59	30	28,77	30	28,77	Kecamatan Kalibaru
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	17,56	2	17,66	2	17,76	2	17,87	2	17,98	2	17,98	Kecamatan Kalibaru
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	4,21	90	4,24	90	4,26	90	4,29	90	4,32	90	4,32	Kecamatan Kalibaru
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	75	80	189,00	82,5	218,26	82,5	219,53	85,0	220,87	85,0	222,27	85,0	222,27	Kecamatan Blimbingsari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	23	25	13,35	25	13,42	27	13,50	27	13,58	30	13,67	30	13,67	Kecamatan Blimbingsari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	kasus	2	2	2,47	2	12,01	2	12,08	2	12,15	2	12,23	2	12,23	Kecamatan Blimbingsari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)						
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	90	90	9,75	90	7,06	90	7,10	90	7,15	90	7,19	90	7,19	Kecamatan Blimbingsari			
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																					
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															605,00	3.637,65	3.658,91	3.681,16	3.704,44	3.704,44
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	%	65	65	255,00	65	2.066,04	67	2.078,12	67	2.090,75	67	2.103,98	67	2.103,98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	kejadian	12	12	50,00	12	75,42	12	75,86	12	76,32	12	76,80	12	76,80				
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka potensi gangguan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	kejadian	12	12	300,00	12	1.496,19	12	1.504,93	12	1.514,08	12	1.523,66	12	1.523,66				
X	XX	RUTIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH															365.574,08	297.786,32	299.526,64	301.347,75	303.253,65	303.253,65
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	92	13.571,97	92	11.884,37	92,0	11.953,83	92	12.026,51	92	12.102,57	92	12.102,57	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	82,5	85	5.109,29	85	4.558,03	87	4.584,67	87	4.612,54	87	4.641,71	87	4.641,71	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	7.327,76	94	6.579,06	94,5	6.617,51	95	6.657,75	95	6.699,85	95	6.699,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	4.185,75	94	4.232,23	94,5	4.256,97	95	4.282,85	95	4.309,93	95	4.309,93	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	12.696,95	94	12.737,93	94,5	12.812,37	95	12.890,27	95	12.971,79	95	12.971,79	Dinas Perhubungan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	92,7	7.288,96	93	6.300,36	93,2	6.337,18	93,5	6.375,71	93,7	6.416,03	93,7	6.416,03	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	95	5.189,33	96	5.931,45	97	5.966,12	98	6.002,39	99	6.040,35	99	6.040,35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	
							Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			KABUPATEN/KOTA A																
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	4.844,89	94	4.844,70	94,5	4.873,01	95	4.902,64	95	4.933,64	95	4.933,64	Dinas Pemuda dan Olah raga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	7.501,31	94	3.575,01	94,5	3.595,90	95	3.617,76	95	3.640,64	95	3.640,64	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	4.114,49	94	4.212,36	94,5	4.236,98	95	4.262,74	95	4.289,70	95	4.289,70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	100	100	4.880,71	100	4.771,50	100	4.799,38	100	4.828,56	100	4.859,10	100	4.859,10	Dinas Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	90	21.681,09	90	19.142,45	90,0	19.254,32	90	19.371,38	90	19.493,90	90	19.493,90	Dinas Pertanian dan Pangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	100	11.942,78	100	10.488,15	100,0	10.549,44	100	10.613,58	100	10.680,71	100	10.680,71	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
					Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	7.280,63	94	7.064,54	94,5	7.105,83	95	7.149,03	95	7.194,25	95	7.194,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	8.886,04	94	7.718,88	94,16	7.763,99	94,56	7.811,19	94,96	7.860,60	94,96	7.860,60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,36	12.488,76	93,76	13.206,69	94,5	13.283,88	95	13.364,64	95	13.449,17	95	13.449,17	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	85.109,26	94	45.492,23	94,5	45.758,09	95	46.036,30	95	46.327,46	95	46.327,46	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	45.370,18	94	38.643,90	94,5	38.869,74	95	39.106,07	95	39.353,40	95	39.353,40	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	8.767,57	94	7.991,00	94,5	8.037,71	95	8.086,57	95	8.137,72	95	8.137,72	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	
							Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	3.710,91	94	3.500,10	94,5	3.520,56	95	3.541,96	95	3.564,36	95	3.564,36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	20.408,22	94	14.645,59	94,5	14.731,18	95	14.820,75	95	14.914,48	95	14.914,48	Kecamatan Banyuwangi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	5.863,76	94	4.094,77	94,5	4.118,70	95	4.143,74	95	4.169,95	95	4.169,95	Kecamatan Giri
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	3.961,70	94	3.983,96	94,5	4.007,24	95	4.031,60	95	4.057,10	95	4.057,10	Kecamatan Glagah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	5.987,30	94	4.793,39	94,5	4.821,40	95	4.850,72	95	4.881,40	95	4.881,40	Kecamatan Kalipuro
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.477,08	94	2.633,47	94,5	2.648,86	95	2.664,97	95	2.681,82	95	2.681,82	Kecamatan Licin

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	
							Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.386,48	94	2.436,85	94,5	2.451,10	95	2.466,00	95	2.481,60	95	2.481,60	Kecamatan Wongsorejo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.531,24	94	2.169,12	94,5	2.181,80	95	2.195,06	95	2.208,95	95	2.208,95	Kecamatan Kabat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.836,91	94	2.513,56	94,5	2.528,25	95	2.543,62	95	2.559,70	95	2.559,70	Kecamatan Rogojampi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.528,29	94	2.455,60	94,5	2.469,96	95	2.484,97	95	2.500,69	95	2.500,69	Kecamatan Songgon
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.199,68	94	2.082,73	94,5	2.094,91	95	2.107,64	95	2.120,97	95	2.120,97	Kecamatan Singojuruh
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.449,23	94	2.176,00	94,5	2.188,72	95	2.202,02	95	2.215,95	95	2.215,95	Kecamatan Srono

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	
							Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.451,12	94	2.484,53	94,5	2.499,05	95	2.514,24	95	2.530,14	95	2.530,14	Kecamatan Muncar
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.659,66	94	2.698,95	94,5	2.714,73	95	2.731,23	95	2.748,51	95	2.748,51	Kecamatan Cluring
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.045,34	94	2.302,25	94,5	2.315,70	95	2.329,78	95	2.344,52	95	2.344,52	Kecamatan Purwoharjo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.196,21	94	2.222,14	94,5	2.235,12	95	2.248,71	95	2.262,93	95	2.262,93	Kecamatan Tegaldlimo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.003,61	94	2.120,40	94,5	2.132,79	95	2.145,76	95	2.159,33	95	2.159,33	Kecamatan Gambiran
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	1.897,30	94	1.878,79	94,5	1.889,77	95	1.901,26	95	1.913,29	95	1.913,29	Kecamatan Bangorejo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	
							Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	1.857,30	94	1.727,50	94,5	1.737,60	95	1.748,16	95	1.759,22	95	1.759,22	Kecamatan Siliragung
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.194,06	94	2.227,54	94,5	2.240,56	95	2.254,18	95	2.268,44	95	2.268,44	Kecamatan Pesanggaran
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.365,48	94	2.467,37	94,5	2.481,79	95	2.496,88	95	2.512,67	95	2.512,67	Kecamatan Genteng
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	1.990,70	94	2.030,99	94,5	2.042,86	95	2.055,28	95	2.068,28	95	2.068,28	Kecamatan Tegalsari
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.070,94	94	2.597,75	94,5	2.612,93	95	2.628,82	95	2.645,44	95	2.645,44	Kecamatan Sempu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	1.755,30	94	1.666,60	94,5	1.676,34	95	1.686,53	95	1.697,20	95	1.697,20	Kecamatan Glenmore

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	
							Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)	Kinerja	Anggaran (Juta Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.141,28	94	2.028,36	94,5	2.040,22	95	2.052,62	95	2.065,60	95	2.065,60	Kecamatan Kalibaru
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	92,5	93,5	2.367,25	94	2.473,17	94,5	2.487,62	95	2.502,75	95	2.518,58	95	2.518,58	Kecamatan Blimbingsari
TOTAL								438.029,92		411.800,76		414.148,95		416.606,16		419.177,78		419.177,78	



# BAB VIII

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Banyuwangi diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Ukuran keberhasilan RPJMD dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Pembangunan SDM unggul berkharakter dan harmonisasi sosial yang kondusif diupayakan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis terus diupayakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dalam proses pembangunan di Banyuwangi periode 2021-2026.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian periode 2021-2026 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8. 1: Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Kabupaten Banyuwangi**

No	Indikator Makro	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi*(%)	-3.58	4,27	4,54	4,81	5,07	5,34	5,34
2	Persentase Penduduk Miskin*(%)	8.06	7,58	7,49	7,32	7,26	7,01	7,01
3	Indeks Pembangunan Manusia*	70.62	71.02	71.27	71.75	72.17	72.59	72.59
4	Indeks Kepuasan** Masyarakat	87.03	90,1	90,62	91,33	91,7	92,01	92,01
5	Gini Ratio***	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30
6	Tingkat Pengangguran Terbuka***(%)	5.34	5,00	4,84	4,68	4,53	4,38	4,38

Keterangan:

\* = IKU dan Indikator Makro

\*\* = IKU

\*\*\* = Indikator Makro

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKD dan target capaian periode 2022-2026 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8.2: Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi**

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1.1	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	-3,5	2,99	3,26	3,57	3,88	4,19	4,19
1.2	Tingkat inflasi (%)	1,74	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.3	Pendapatan Perkapita (Rp. Juta)	50,13	54,73	57,56	60,66	64,69	67,92	67,92
<b>1.4</b>	<b>Pendidikan</b>							
1.4.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,16	7,19	7,22	7,25	7,28	7,31	7,31
1.4.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,8	12,9	13	13,1	13,2	13,3	13,3
<b>1.5</b>	<b>Kesehatan</b>							
1.5.1	Umur Harapan Hidup (tahun)	70,65	70,74	70,84	70,93	71,02	71,12	71,12
1.5.2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	5,10	5,07	5,06	5,05	5,04	5,03	5,03
1.5.3	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	79,7	96	94	93	92	91	91
<b>2.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
	<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>							
<b>2.1.1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
2.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	86,33%	84,76%	94,76%	100%	100%	100%	100%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
2.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan	95,64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	73.39%	73.39%	88.39%	100%	100%	100%	100%
<b>2.1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>							
2.1.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	24,26%*	22.1%	21.1%	20.1%	19.1%	18.1%	18.1%
<b>2.1.3.</b>	<b>Pekerjaan umum dan penataan ruang;</b>							
2.1.3.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	n/a	79.58	81.16	82.74	84.32	85.9	85.9
2.1.3.2	Persentase ketersediaan air irigasi	88	89	90	91	92	93	93
2.1.3.3	Persentase ketersediaan air bersih	86	88	89	90	91	92	92
<b>2.1.4.</b>	<b>Perumahan rakyat dan kawasan permukiman</b>							
2.1.4.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	n/a	79,58	81,16	82,74	84,32	85,9	85,9
<b>2.1.5</b>	<b>Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</b>							
2.1.5.1	Indeks Kepatuhan pada Peraturan Negara	n/a	82	83	84	85	86	86
2.1.5.2	Indeks Resiko Bencana	137,16	130,59	127,38	124,22	121,11	118,05	118,05
2.1.5.3	Indeks ketahanan & keselamatan kebakaran	n/a	92	92	94	96	97	97
2.1.5.4	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran (wilayah manajemen kebakaran (WMK) / jumlah luas kabupaten x 100%)	n/a	61	62	63	64	65	65
<b>2.1.6.</b>	<b>Sosial</b>							
2.1.6.1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	n/a	63	64.5	66	67.5	69	69
2.1.6.2	Indeks Kepedulian Sosial	33,2	33,3	33,4	33,5	33,6	33,7	33,7
2.1.6.3	Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	36,7	36,7	37	38	39	40	40
<b>2.2.</b>	<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>							
<b>2.2.1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
2.2.1.1	Tingkat Kesempatan Kerja	94,66	95	95,16	95,32	95,47	95,62	95,62
2.2.1.2	Persentase perlindungan tenaga kerja penerima upah pada perusahaan	49,76	52,14	53,33	54,52	55,71	56,9	56,9
<b>2.2.2</b>	<b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>							
2.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,41	75,66	76,80	77,95	79,13	80,32	80,32
2.2.2.2	Persentase Penyelesaian kasus terhadap anak	n/a	77	80	83	85	87	87
<b>2.2.3</b>	<b>Pangan</b>							
2.2.3.1	Angka konsumsi beras kabupaten Banyuwangi	n/a	93,53	92,59	91,66	90,75	89,84	89,84
2.2.3.2	Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Unggulan	100	100	100	100	100	100	100
<b>2.2.4</b>	<b>Pertanahan</b>							
2.2.4.1	Persentase fasilitasi sengketa dan konflik pertanahan	100	100	100	100	100	100	100
<b>2.2.5</b>	<b>Lingkungan hidup;</b>							
2.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68.66	71,14	71,19	71,23	71,28	71,32	71,32
2.2.5.2	Rasio sampah daerah yang tertangani	61	61,06	61,12	61,18	61,24	61,31	61,31
<b>2.2.6</b>	<b>Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</b>							

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
2.2.6.1	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	86,09	87	89	91	92	94	94
2.2.6.2	Persentase pengolahan data kependudukan yang sesuai dengan data konsolidasi kemendagri	91,54	93	94	95	96	97	97
<b>2.2.7</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat dan Desa</b>							
2.2.7.1	Indeks Desa Membangun	0,8176	0,8195	0,8205	0,8238	0,8325	0,8342	0,8342
2.2.7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Desa	84,9	84,9	85	85,5	86	86,5	86,5
<b>2.2.8</b>	<b>Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>							
2.2.8.1.	Angka kelahiran total	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
<b>2.2.9</b>	<b>Perhubungan</b>							
2.2.9.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	79,32	80,25	81,49	81,92	82,91	83,06	83,06
2.2.9.2	Rasio konektivitas kabupaten	76	76,54	77,23	77,92	78,83	79,46	79,46
<b>2.2.10</b>	<b>Komunikasi dan informatika</b>							
2.2.10.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,22	3,3	3,34	3,36	3,39	3,41	3,41
<b>2.2.11</b>	<b>Koperasi, usaha kecil, dan menengah;</b>							
2.2.11.1	Persentase koperasi berkualitas	53,47	53,75	53,8	53,86	53,91	53,96	53,96
2.2.11.2	Persentase UKM terhadap UMKM	7,68	8,37	8,73	9,09	9,45	9,8	9,8
<b>2.2.12</b>	<b>Penanaman modal</b>							
2.2.12.1	Laju Pertumbuhan Investasi	7,42	7,52	7,54	7,56	7,58	7,6	7,6
2.2.12.2	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	4,23	4,89	5,26	5,66	6,08	6,55	6,55
<b>2.2.13</b>	<b>Keperempuanan dan olah raga</b>							
2.2.13.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	n/a	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,017
2.2.13.2	Persentase atlet berprestasi	0	10	10	20	20	30	30
<b>2.2.14</b>	<b>Statistik</b>							
2.2.14.1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>2.2.15</b>	<b>Persandian</b>							
2.2.15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>2.2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>							
2.2.16.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	n/a	56.6	57.8	60	61.15	61.18	61.18
<b>2.2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>							
2.2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	5,6	7,6	8,6	9,6	10,6	11	11
2.2.17.2	Persentase minat baca	56	58	59	60	61	62	62
<b>2.2.18</b>	<b>Kearsipan</b>							
2.2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip (%)	59,52	60	61	62	63	64	64
<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>								
<b>2.3.1</b>	<b>Pertanian</b>							
2.3.1.1	Pertumbuhan PDRB Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)	-2,96	0,13	0,14	0,17	0,18	0,22	0,22
2.3.1.2	Rata-rata persentase peningkatan produksi pertanian unggulan	2,52	3	3	3	3	3	19,4
<b>2.3.2</b>	<b>Kelautan dan perikanan</b>							
2.3.2.1	Persentase peningkatan produksi perikanan	-39	3,58	3,58	3,58	3,59	3,59	23,46
2.3.2.2	Konsumsi ikan (kg/ kap/ th)	33,1	33,2	33,25	33,3	33,35	33,4	33,4
<b>2.3.3</b>	<b>Pariwisata</b>							
2.3.3.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	n/a	3	3	3	3	3	3

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
<b>2.3.4</b>	<b>Perdagangan</b>							
2.3.4.1	Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	-6,63	6,17	6,4	6,75	7,00	7,24	7,24
2.3.4.2	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	101,63	106,32	109,29	112,26	115,23	118,2	118,2
2.3.4.3	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	11,22	59.09	68.18	77.27	86.36	95.45	95.45
<b>2.3.5</b>	<b>Perindustrian</b>							
2.3.5.1	Pertumbuhan PDRB Kategori C (Industri Pengolahan)	-0,38	5,1	5,64	6,1	6,67	7,1	7,1
2.3.5.2	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	-11,53	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
<b>3</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
<b>3.1</b>	Indeks Pengeluaran	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79
<b>3.2</b>	Nilai SAKIP	83,1	84,1	84,6	85,1	85,6	86,1	86,1
<b>3.3</b>	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP (Review SAKIP Inspektorat)	28,5	28,5	28,62	28,74	28,8	28,86	28,86
<b>3.4</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	77	79	80	81	82	83	83
<b>3.5</b>	Persentase pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100	83	85	90	95	100	100
<b>3.6</b>	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>3.7</b>	Penetapan APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
<b>3.8</b>	Indeks Profesionalitas ASN	75.91	78.71	80.01	81.31	82.61	83.89	83.89
<b>3.9</b>	Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif
<b>3.10</b>	Persentase keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	83,5	87	88	89	90	91	91
<b>3.11</b>	Indeks relasi antar manuasia	n/a	63	64.5	66	67.5	69	69
<b>3.12</b>	Indeks etika dan budi pekerti	n/a	63	64.5	66	67.5	69	69
<b>3.13</b>	Tingkat konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	0	0	0	0	0	0	0



# BAB IX

## PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Banyuwangi lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah Terpilih yang dielaborasi dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

### 9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2019 hingga tahun 2024. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, perlu disusun RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026-2031 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026-2046, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Selain itu, transisi RPJMD pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2026-2031. Pada RPJMD tahun 2026, khususnya target capaian pada tahun 2026 masih menggunakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

### 9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati Banyuwangi berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026;
- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 paska penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 ini;
- f. Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap PERANGKAT DAERAH di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026;
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

- i. Beberapa hal mengenai perubahan dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yang bersifat tidak fundamental cukup ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati, hal tersebut meliputi perubahan target kinerja, perubahan nomenklatur perangkat daerah, dan hal-hal lain yang bersifat tidak merubah substansi terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

### **9.3 Penutup**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022-2026, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2021-2026 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini dan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

  
BUPATI BANYUWANGI  
*Ipuk Fiestiandani*  
Ipuk Fiestiandani Azwar Anas





**RPJMD**  
Tahun 2021-2026



*Kabupaten  
Banyuwangi*